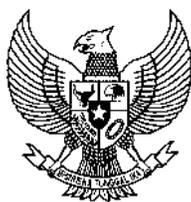


# RKPD TABANAN 2020

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan  
2019





BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016 –2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

## BAB II

### RKPD

#### Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :
  - Bab I. Pendahuluan
  - Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan keuangan Daerah
  - Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - Bab VII. Penutup
  - Lampiran
- (3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :

- a. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020; dan
- b. Pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 36 TAHUN 2019  
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Halaman

PERATURAN BUPATI.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-4
	1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-5
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-5
BAB II	GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.....	II-1
	2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-7
	2.1.3. Aspek Daya Saing.....	II-18
	2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-22
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-50
	2.2.1. Realisasi RPJMD.....	II-50
	2.2.2. Realisasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	II-57
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Rekomendasi	II-111
BAB III	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.....	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015.....	III-1
	3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014.....	III-2
	3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah.....	III-5

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-12
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2020.....	III-15
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-19
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-15
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020.....	IV-19
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH..	V-1
BAB VI RENCANA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
BAB VII PENUTUP.....	VII-1
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2013-2017.....	II-9
Tabel 2.2 Jumlah dan Sebaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	II-17
Tabel 2.3 Q Kabupaten Tabanan.....	II-18
Tabel 2.4 Usaha Mikro Di Kabupaten Tabanan.....	II-20
Tabel 2.5 Partisipasi Sekolah Penduduk Tabanan berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	II-22
Tabel 2.6 Ketersediaan Guru pada Janjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	II-23
Tabel 2.7 Kondisi Ruang Belajar SD di sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	II-24
Tabel 2.8 Kondisi Ruang Belajar SMP di sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	II-25
Tabel 2.9 Keberadaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	II-26
Tabel 2.10 Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2017.....	II-29
Tabel 2.11 Jenis dan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 – 2017.....	II-42
Tabel 2.12 Jumlah Armada Trans SERASI dan Siswa yang terangkut Tahun 2015 – 2017.....	II-43
Tabel 2.13 Realisasi Target RPJMD Tahun 2016, 2017, 2018.....	II-50
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2017.....	III - 6
Tabel 3.2 Keselarasan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tabanan dengan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali.....	III - 9
Tabel 3.3 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Non Bintang di Bali Menurut Kab/Kota, November dan Desember 2018.....	III-11
Tabel 3.4 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non Bintang Menurut Bulan di Kabupaten Tabanan(%),2017.....	III-11
Tabel 3.5 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tabanan (hari), 2017.....	III-12
Tabel 3.6 Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2018.....	III-14
Tabel 3.7 Dana Perimbangan Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2019.....	III-14
Tabel 3.8 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2018.....	III-14
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2016 s/d Tahun 2020.....	III-18
Tabel 3.10 Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020.....	III-21
Tabel 4.1 Arah Pembangunan Lima Tahunan dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Tabanan.....	IV - 5
Tabel 4.2 Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Bali, dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan.....	IV-22
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	V - 2

Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tabanan Tahun 2020.....	VI - 2
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah.....	VI-11

## DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	2.1	Peta Wilayah Kabupaten Tabanan.....	II-1
Gambar	2.2	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	II-3
Gambar	2.3	Peta Rawan Bencana Kabupaten Tabanan.....	II-4
Gambar	2.4	Peta Rawan Bencana Kabupaten Tabanan.....	II-5
Gambar	2.5	Banyaknya penduduk menurut kelompok umur dan Jenis kelamin di kabupaten Tabanan Tahun 2017.....	II-6
Gambar	2.6	Potensi Wilayah Kabupaten Tabanan.....	II-7
Gambar	2.7	Laju Pertumbuhan PDRB.....	II-8
Gambar	2.8	Perkembangan IPM Tabanan, Bali dan Nasional Periode 2013-2017.....	II-10
Gambar	2.9	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabanan Dan Provinsi Bali 2013-2017.....	II-10
Gambar	2.10	Foto Mobil Sehat.....	II-11
Gambar	2.11	Perkembangan Angka Harapan Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017.....	II-12
Gambar	2.12	Foto Kemah Budaya.....	II-12
Gambar	2.13	Perkembangan pengeluaran perkapita per tahun Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2013-2017.....	II-13
Gambar	2.14	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tabanan Dan Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018.....	II-14
Gambar	2.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2013 – 2017.....	II-15
Gambar	2.16	Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tabanan Tahun 2013-2017.....	II-16
Gambar	2.17	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan Tahun 2013 – 2018.....	II-16
Gambar	2.18	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018.....	II-17
Gambar	2.19	Foto Puskesmas Semesta Selemdeg Timur.....	II-26
Gambar	2.20	Kondisi Jalan Kabupaten Tabanan 2014-2018.....	II-28
Gambar	2.21	Persentase kondisi ruas jalan Kabupaten Tabanan Berdasarkan wilayah Tahun 2018.....	II-29
Gambar	2.22	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah.....	II-34
Gambar	2.23	IPAL Komunal di Kabupaten Tabanan.....	II-35
Gambar	2.24	Armada Trans Serasi.....	II-43
Gambar	2.25	Tabanan Command Center (TCC).....	II-44
Gambar	2.26	Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).....	II-44
Gambar	2.27	Penyelenggara 4th Asian Vovinam Championship 2018 dan Peraih Medali Emas Asian Games.....	II-45
Gambar	2.28	Gedung Kesenian I Ketut Maria dan Garuda Wisnu Serasi.....	II-46

Gambar 2.29	e-Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling.....	II-46
Gambar 2.30	Penghargaan Penghargaan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2017 dan 2019.....	II-49
Gambar 2.31	Penghargaan Opini WTP 5 Kali Berturut Turut dari Kementerian Keuangan RI.....	II-50
Gambar 3.1	Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017..	III - 6
Gambar 3.2	Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017...	III - 7
Gambar 3.3	Pendapatan Daerah 2019.....	III-11
Gambar 4.1	Tahapan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah....	IV - 1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terdapat beberapa penyesuaian dalam penyusunan RKPD pada sistematika, substansi dokumen RKPD maupun menekankan pada penggunaan sistem *e-planning*.

Proses penyusunan RKPD dibagi dalam 3 tahapan yaitu: Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD. Tahapan dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi

pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan, dalam penyusunan RKPD tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Tabanan sesuai amanat Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021. Disisi lain, tahun 2019 ini sekaligus melakukan evaluasi terhadap RPJMD karena sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017. Kedua dokumen perencanaan daerah tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keselarasan prioritas dan program pembangunan daerah.

Tahun 2020 merupakan tonggak terakhir menuju pencapaian Tabanan Serasi. Untuk itu, banyak hal yang harus lebih dapat diakselerasi untuk mencapai keberhasilan pembangunan kepala daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Mengacu pada hasil evaluasi, pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya membenahi tata cara penyusunan, evaluasi maupun pengajuan usulan program dan kegiatan agar selaras dengan dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, Renstra maupun Renja Perangkat daerah. Untuk RKPD tahun 2020, penginputan usulan menggunakan sistem *Tabanan Fair Plan* yang akan lebih di fokuskan untuk memastikan bahwa pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dapat berjalan secara adil (*fair*).

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 54);

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran satu tahun dari rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Tabanan sebagaimana amanat Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021. RKPD ini telah diselaraskan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2020, serta dokumen perencanaan lainnya ditingkat kabupaten. Oleh karena itu maka RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD 2020 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD adalah :

1. Sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

#### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi , aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

### BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP, kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

### BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2020.

### BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

### BAB VII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

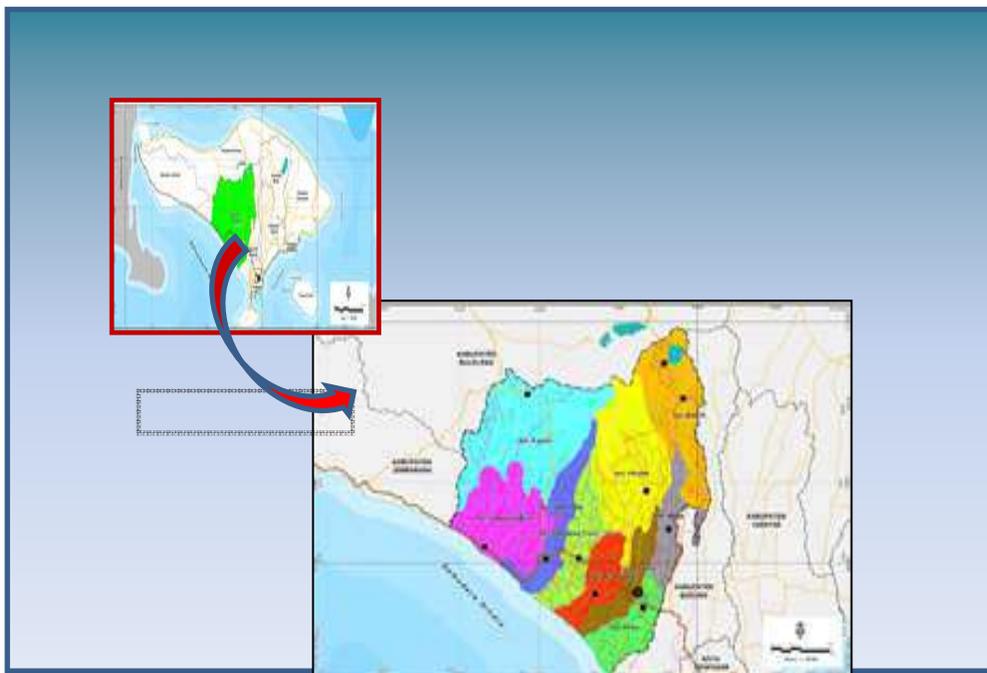
#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

###### a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali yang secara geografis berada pada posisi  $8^{\circ}14' 30''$  -  $8^{\circ} 30' 07''$  Lintang Selatan,  $114^{\circ} 54' 52''$  -  $115^{\circ} 12' 57''$  Bujur Timur. Wilayah ini cukup strategis karena berdekatan dengan Ibukota Propinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 25 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  45 menit dan dilalui oleh jalur arteri yaitu jalur antar provinsi. Wilayah Kabupaten Tabanan berbatasan dengan beberapa Kabupaten meliputi :

- sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Badung
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, dan
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan merupakan Kabupaten terbesar kedua di Provinsi Bali setelah Buleleng dengan luas wilayah sebesar 839.33 Km<sup>2</sup> atau 14,90 persen luas Propinsi Bali dengan garis pantai sepanjang 30.177 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Tabanan

terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 133 desa dinas, 344 desa pekraman dan 816 banjar adat.

Topologi Kabupaten Tabanan bervariasi berada pada ketinggian 0 - 2.276 meter di atas permukaan laut (dpl), di mana wilayah tertinggi di puncak Gunung Batukaru. Karakteristik wilayah dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia merupakan dataran rendah dengan topografi yang relatif datar, di bagian tengah bergelombang, dan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan di mana terdapat beberapa gunung yaitu Gunung Batukaru (2.276 m), Gunung Sangiyang (2.097 m), Gunung Pohen (2.055 m) dan Gunung Adeng (1.811 m).

Kabupaten Tabanan mempunyai karakteristik hidrologi yang beragam sehingga secara relatif memiliki sumber daya air yang kaya dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Karakteristik hidrologi tersebut meliputi sungai, danau, mata air dan air tanah. Terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu daerah aliran sungai (DAS), antara lain Tukad Yeh Empas luasnya 100,82 km<sup>2</sup>. Daerah aliran sungai ini sepenuhnya berada di Kabupaten Tabanan dan bermuara di perbatasan Desa Sudimara dan Pangkung Tibah, Tukad Yeh Ho luasnya 135,76 km<sup>2</sup>. Semua daerah aliran sungai ini terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di perbatasan Kecamatan Selemadeg Timur dan Kerambitan dan Tukad Balian luasnya 152,9 km<sup>2</sup>. Semua daerah aliran sungai terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat. Sungai-sungai besar lainnya yang bermuara di wilayah Kabupaten Tabanan yaitu Tukad Yeh Sungi (panjang 40,5 km) bermuara di Desa Beraban (Kecamatan Kediri), Tukad Yeh Abe (panjang 9,3 km) bermuara di perbatasan Kabupaten Tabanan dan Tabanan. Tukad Yeh Matan (panjang 13,5 km) bermuara di perbatasan Desa Berembeng dan Tegalmengkeb, dan Tukad Yeh Otan (panjang 24,0 km) bermuara di Desa Antap.

Selain Daerah Aliran Sungai, Kabupaten Tabanan memiliki sebuah danau dari empat buah danau yang ada di Provinsi Bali, yaitu Danau Beratan. Danau Beratan terletak di kawasan Bedugul

pada ketinggian sekitar 200 m dpl, memiliki luas permukaan air 3,85 km<sup>2</sup> dan luas daerah tangkapan air 13,4 km<sup>2</sup>. Danau ini memiliki kedalaman rata-rata 12,8 m dan kedalaman maksimum 20 m, dengan volume airnya 49,22 juta m<sup>3</sup>. Untuk kebutuhan air Kabupaten Tabanan memiliki sebuah waduk yang baru saja dibangun pada tahun 2008 yaitu Waduk Telaga Tunjung. Waduk Telaga Tunjung terletak di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dengan luas daerah tangkapan waduk 81,50 km<sup>2</sup>, volume tampungan efektif 1.159.640 m<sup>3</sup>, dan luas genangan waduk 16,50 km<sup>2</sup>. Waduk ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Kerambitan dan sekitarnya serta sebagai sumber air bersih.

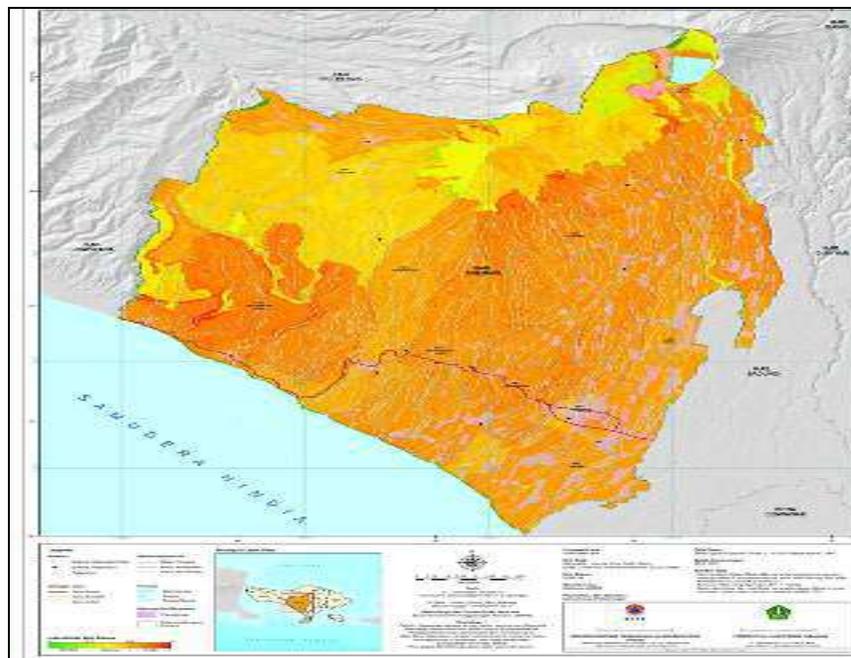
Tipe iklim Kabupaten Tabanan secara umum termasuk tipe AW, yang merupakan iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai Mei), dan adanya musim kemarau pada bulan April sampai September. Suhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74 – 77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 – 3.292 mm. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmith dan Fergusson, Kabupaten Tabanan secara dominan termasuk ke dalam tipe iklim C dan D, hanya sebagian kecil daerahnya termasuk ke dalam tipe iklim A, yaitu wilayah pegunungan Batukaru dan kawasan Bedugul. Dari kondisi wilayah (Gambar 2.2), sebagian besar (74%) lahan di Kabupaten Tabanan merupakan lahan bukan sawah berupa tegal, kebun dan hutan negara sementara luas lahan sawah pada kisaran 23 persen selebihnya merupakan kolam, tambak dan rawa-rawa.



Gambar 2.2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

## b. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, berdasarkan data badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016 sebesar 174,9 artinya wilayah Kabupaten Tabanan memiliki potensi bencana tinggi. Sumber potensi bencana alam yang perlu diwaspadai adalah bencana tanah longsor, tsunami, gempa bumi, puting beliung. Berikut wilayah Tabanan Rawan Bencana :



Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Kabupaten Tabanan

## c. Demografi

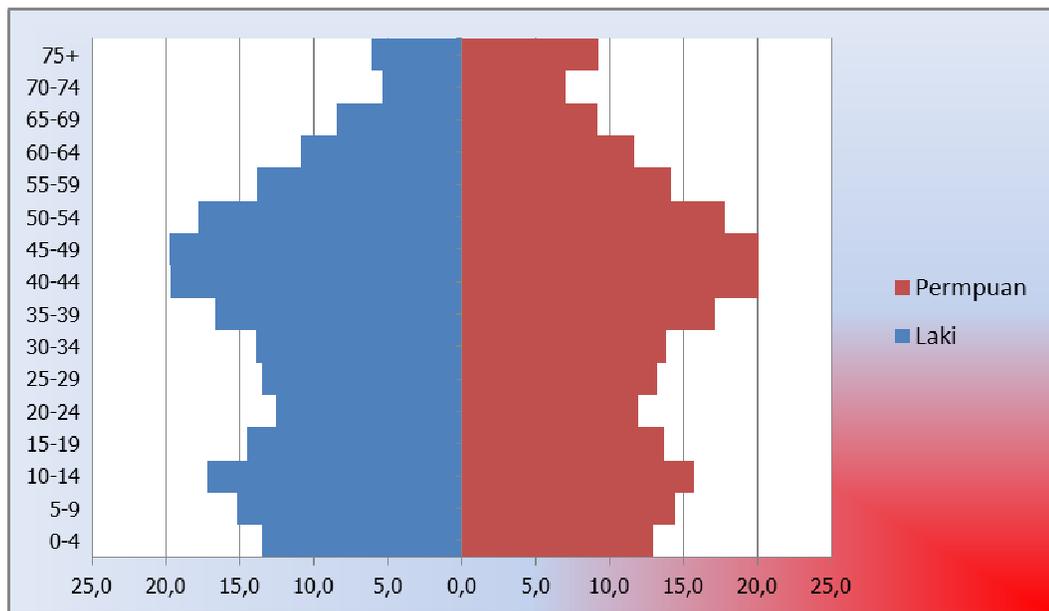
Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Disamping itu, penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan apabila kualitas penduduk atau sumber daya manusianya rendah. Hasil proyeksi penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Tabanan tercatat berjumlah 441,0 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan alaminya sebesar 0,621% dari tahun 2010. Dari 441,0 ribu jiwa, 219,0 ribu jiwa (49,66%) diantaranya merupakan penduduk laki laki dan 222,0 ribu jiwa (50,34%) merupakan penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduknya, rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2017 adalah sebesar 98,65. Nilai ini berarti, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tabanan terdapat 98 penduduk laki laki.

Kepadatan penduduknya mencapai 525 jiwa per km<sup>2</sup> . Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya jauh diatas rata-rata, diantaranya Kecamatan Kediri (1.736 jiwa per km<sup>2</sup> ), Tabanan (1.446 jiwa per km<sup>2</sup> ), Marga (934 jiwa per km<sup>2</sup> ), dan Kerambitan (919 jiwa per km<sup>2</sup> ), sedangkan tingkat kepadatan penduduk lainnya 500 jiwa per km<sup>2</sup> kebawah.



Gambar 2.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Per-Kecamatan Tahun 2017 di Kabupaten Tabanan

Jika dilihat penduduk dari kelompok umur (Gambar 2.5.), komposisi penduduk Kabupaten Tabanan mengerucut di kelompok umur usia 65 tahun keatas. Jumlah kelompok umur tertinggi berada di rentang umur 45-49 tahun yang berjumlah 39,8 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi juga terdapat di kelompok umur anak-anak usia sekolah di kelompok umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun yang jumlahnya melebihi 30.000 jiwa. Untuk kelompok penduduk usia produktif, jumlah penduduk terendah berada di kelompok umur 20-24 tahun yang hanya mencapai 24,4 ribu jiwa. Gambar 2.5 Banyaknya penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Tabanan Tahun 2017.



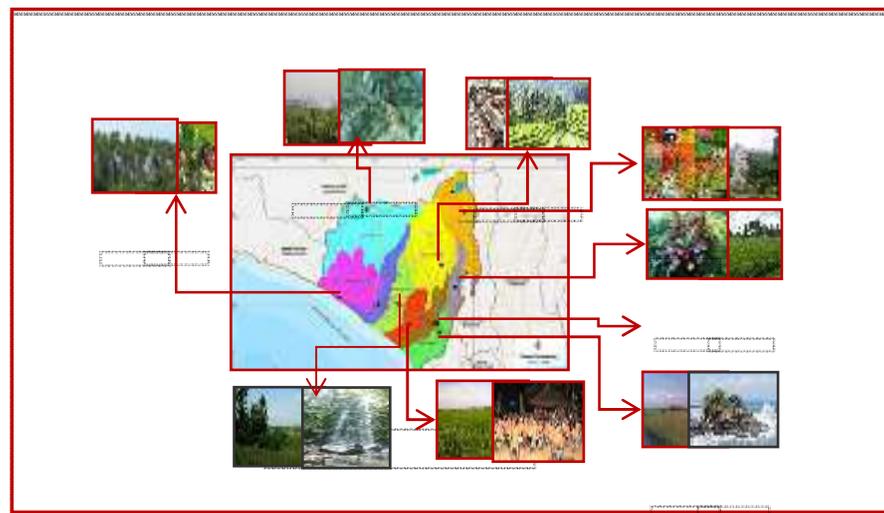
Gambar 2.5 Banyaknya penduduk menurut kelompok umur dan Jenis kelamin di kabupaten Tabanan Tahun 2017.

#### d. Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Tabanan memiliki potensi pengembangan sumber daya ekonomi utamanya sektor pertanian yang tersebar diseluruh kecamatan. Pengembangan sumber daya ekonomi Tabanan dibagi menjadi 3 *cluster* meliputi :

1. Wilayah utara Kabupaten Tabanan yang meliputi wilayah Kecamatan Marga, Penebel dan Baturiti merupakan kawasan konservasi, perkebunan, hortikultura, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan pariwisata, dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Baturiti didukung Kawasan Perkotaan Penebel, Kawasan Perkotaan Marga dan Kawasan Perkotaan Candikuning.
2. Wilayah selatan wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri, dengan fungsi utama pusat pelayanan wilayah dan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita, bagian dari PKN, ibukota kabupaten, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan dan industri kecil, dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Tabanan didukung Kawasan Perkotaan Sembunggede, Kawasan Perkotaan Kerambitan, dan Kawasan Tanah Lot

3. Sementara bagian barat wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, dan Kecamatan Selemadeg Timur selain mendukung kawasan lindung juga memiliki sebagai kawasan perkebunan dengan komoditi utama kelapa, kopi, kakao, nira, manggis, durian. peternakan, hortikultura buah-buahan, tanaman pangan, pariwisata dan perikanan yang mendukung fungsi kawasan lindung wilayah dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Bajera didukung Kawasan Perkotaan Pupuan, Kawasan Perkotaan Lalanglinggah dan Kawasan Perkotaan Megati. Berikut potensi wilayah berdasarkan Kecamatan di kabupaten Tabanan (Gambar 2.6)



Gambar 2.6 Potensi Wilayah Kabupaten Tabanan

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

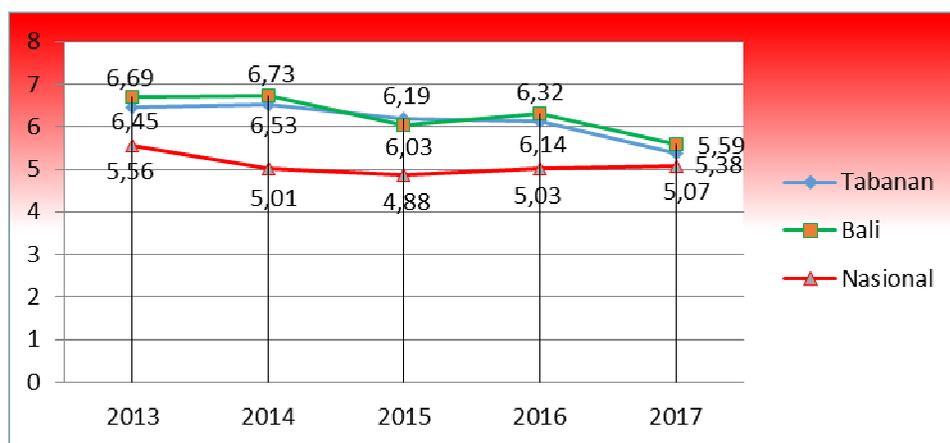
#### a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### *Pertumbuhan PDRB*

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari

beberapa indikator antara lain laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Indek pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin dan indek gini (Gini Rasio).

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2013-2017 menunjukkan tren perlambatan (Gambar 2.7) dan masih dibawah laju pertumbuhan regional ekonomi Bali meskipun masih diatas pertumbuhan nasional. Tren perlambatan ini disebabkan adanya penurunan pertumbuhan pada sektor basis antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -1,39%, sektor Pertambangan dan Penggalian -9,24%, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -2,25%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -1,93% dan Jasa Lainnya -1,69%. Sementara sektor basis yang berkontribusi positif pada sektor Konstruksi 98,10%, sektor Informasi dan Komunikasi 99,99% dan Real Estate 0,78%.



Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB

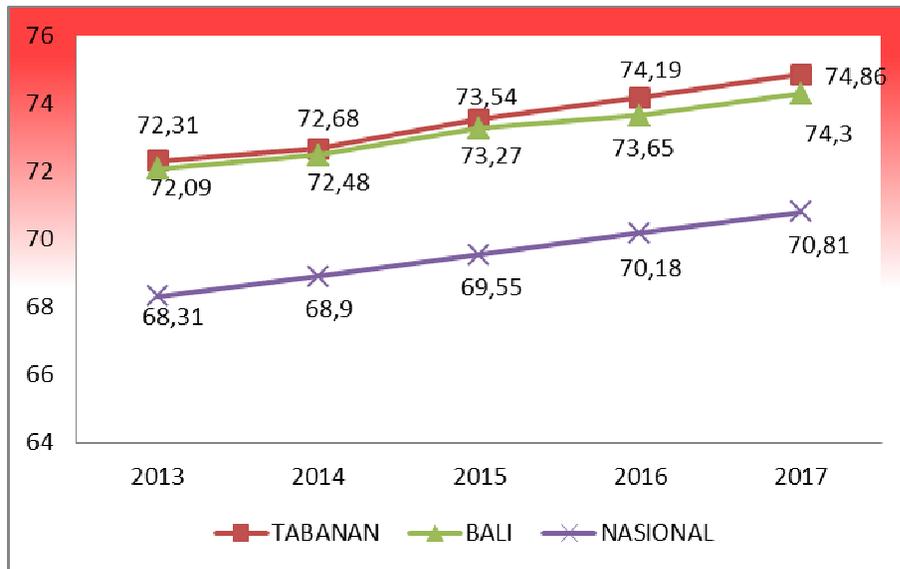
Pertanian merupakan sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi pembentukan PDRB Tabanan namun peranannya terus berkurang, kondisi ini dapat menjadi indikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Tabanan. Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 22,55% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi terjadi hampir seluruh sektor pertanian yaitu subsektor tanaman bahan makanan, peternakan, kehutanan dan perikanan peranannya mengecil dibandingkan tahun 2016. Meski demikian, secara umum sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)					Distribusi Persentase PDRB (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.43	3.58	1.97	5.23	3.87	23.45	22.53	22.41	22.67	22.55
Pertambangan dan Penggalian	8.17	-0.02	-3.55	3.39	3.35	1.42	1.37	1.24	1.20	1.16
Industri Pengolahan	9.17	8.87	10.75	4.79	2.04	5.65	5.67	5.98	5.95	5.73
Pengadaan Listrik dan Gas	8.81	4.02	2.61	2.62	4.55	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	6.31	7.49	1.97	4.97	1.98	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16
Konstruksi	6.74	1.96	6.74	7.61	7.81	10.48	9.77	9.73	9.87	9.92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.92	7.57	8.66	6.99	7.14	8.17	8.23	8.37	8.45	8.75
Transportasi dan Pergudangan	6.92	8.72	5.73	7.49	6.57	1.65	1.68	1.62	1.61	1.60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.38	6.76	5.98	6.08	8.29	20.29	22.07	21.87	21.57	21.91
Informasi dan Komunikasi	6.54	7.33	9.68	9.98	6.62	5.61	5.40	5.45	5.55	5.45
Jasa Keuangan dan Asuransi	14.18	9.88	3.58	7.17	1.40	3.77	3.79	3.77	3.78	3.62
Real Estate	7.74	9.16	6.57	2.81	3.76	5.49	5.47	5.33	5.06	4.88
Jasa Perusahaan	10.01	7.85	7.76	6.15	8.40	0.92	0.92	0.96	0.99	1.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.64	11.12	9.11	4.87	-0.76	7.22	7.19	7.17	7.06	6.91
Jasa Pendidikan	14.59	10.99	11.75	8.21	7.73	1.67	1.69	1.76	1.81	1.88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.62	12.79	9.72	7.29	9.67	2.13	2.15	2.24	2.28	2.38
Jasa Lainnya	4.90	8.06	6.50	7.54	10.98	1.84	1.84	1.84	1.87	1.96
PDRB	6.45	6.53	6.19	6.14	5.38	100	100	100	100	100

### *Indek Pembangunan Manusia (IPM)*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tabanan sejak tahun 2013 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 72,31 menjadi 74,86 pada tahun 2017, capaian ini diatas capaian Bali dan Nasional. Melihat perkembangan capaian dari tahun ke tahun peluang Tabanan mengejar Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar sangat dimungkinkan (Gambar 2.8)



Gambar 2.8 Perkembangan IPM Tabanan, Bali dan Nasional Periode 2013-2017

#### Angka Harapan Hidup (AHH)

Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPM seluruh dimensi mengalami peningkatan. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabanan periode 2013 - 2017 menunjukkan peningkatan ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat.



Gambar 2.9 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabanan Dan Provinsi Bali 2013-2017

Perbaikan derajat kesehatan masyarakat selain disebabkan kemajuan teknologi, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang tak kalah penting dukungan program inovatif MOBIL SEHAT

SERASI yaitu program pendekatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama wilayah yang masih memiliki kendala akses pada layanan kesehatan.



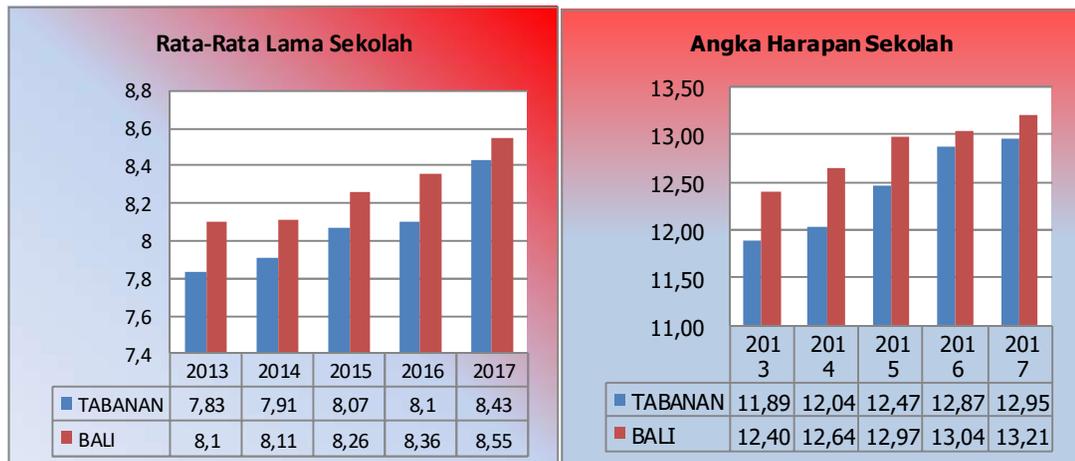
Gambar 2.10 Foto Mobil Sehat

Program mobil sehat serasi diluncurkan pada tahun 2012, layanan mobil sehat meliputi layanan umum, mata dan pelayanan deteksi kanker serviks. Cakupan layanan mobil sehat meliputi 10 kecamatan.

#### *Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Sekolah AHS)*

Dimensi pengetahuan yang wakili agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Perkembangan Angka

Harapan Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (Gambar 2.11)



Gambar 2.11 Perkembangan Angka Harapan Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017

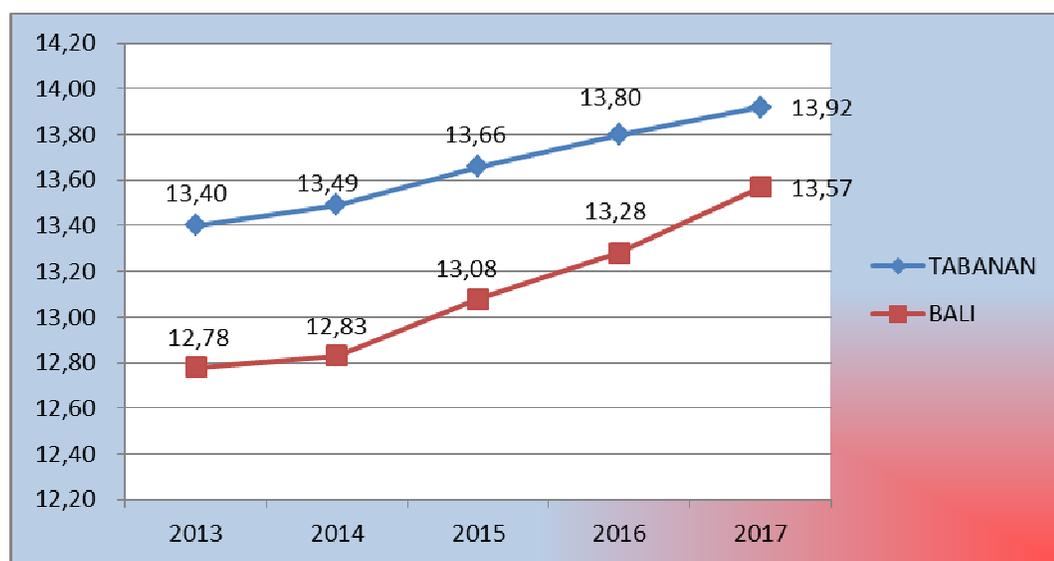
Beberapa program dibidang pendidikan sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tabanan seperti Klinik Pendidikan, Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang difokuskan pada peningkatan sarana pendidikan, program pendidikan berkarakter budaya bali dan kemah budaya yaitu program yang memebrikan ruang bagi siswa untuk berekpresi dan mengeksplorasi di bidang budaya.



Gambar 2.12 Foto Kemah Budaya

### *Pengeluaran Per Kapita (PPP)*

Standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, pengeluaran per kapita per tahun Kabupaten Tabanan meningkat sebesar 0,95 persen lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan pengeluaran perkapita Provinsi Bali sebesar 1,51 persen. Jika pada tahun 2013 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 13,40 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2017 sudah mencapai 13,95 juta rupiah per tahun (Gambar 2.13).

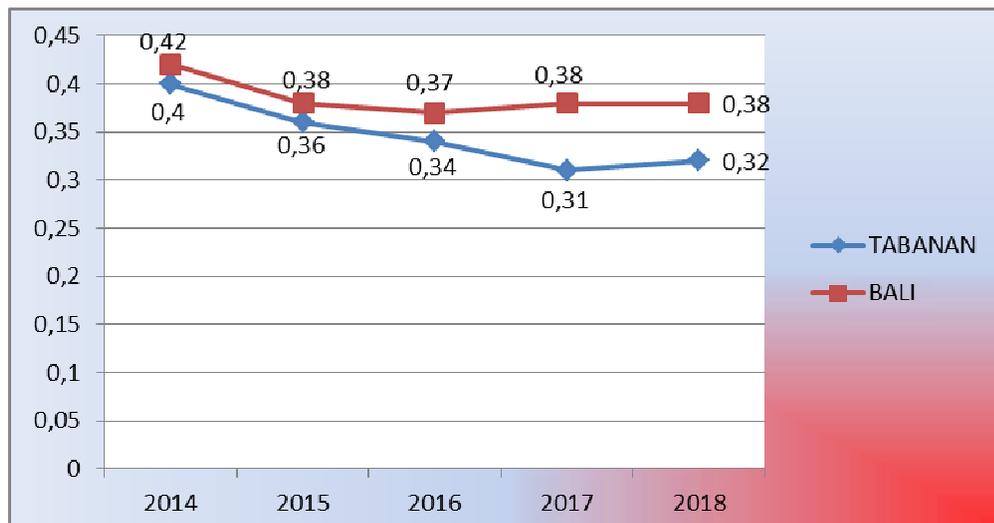


Gambar 2.13 Perkembangan pengeluaran perkapita per-tahun Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2013-2017

PDRB per Kapita berdasarkan data BPS Tabanan, PDRB Tabanan setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan di atas satu juta rupiah per tahun. Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan inflasi, maka pengaruh pertumbuhan PDRB per kapita terhadap peningkatan daya beli masyarakat menjadi tidak begitu besar. Pengeluaran per Kapita diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Selama periode 2013-2017, angka pengeluaran per kapita selalu menunjukkan peningkatan meskipun masih kurang dari 1% dan di bawah rata-rata nasional.

Dari sisi pemerataan pendapatan, dalam kurun waktu 2014-2017 menunjukkan tren penurunan namun tahun 2018 menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang semakin melebar. Berikut

perkembangan gini rasio Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 (Gambar 2.14).



Gambar 2.14 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tabanan Dan Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018.

Ditilik dari sumbernya, ketimpangan pendapatan disebabkan tiga hal yaitu kesenjangan antar individu, kesenjangan antar sektor dan kesenjangan antar wilayah (kecamatan). Dari identifikasi sumber utama ketimpangan terletak pada adanya ketimpangan antar wilayah, dimana wilayah barat Kabupaten Tabanan selain merupakan kantong kemiskinan juga dipengaruhi kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

#### b. Fokus Kesejahteraan Sosial

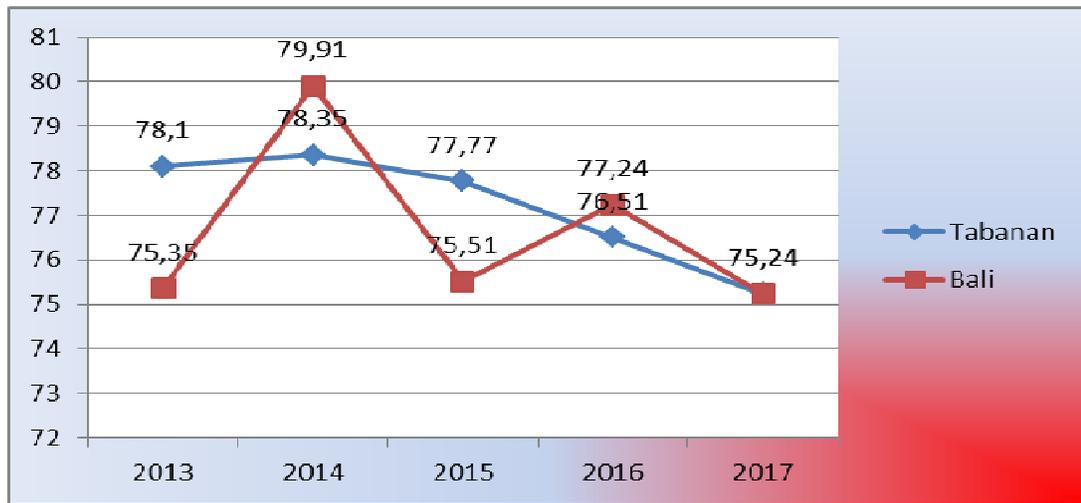
Aspek kesejahteraan sosial dapat digambarkan dari tingkat pengangguran, TPAK dan angka kemiskinan.

##### *Ketenagakerjaan*

Kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Tabanan akan ditinjau dari aspek ketenagakerjaan dan kemiskinan. Untuk menggambarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat dua indikator penting, yaitu: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran.

Kontribusi penduduk usia kerja dalam perekonomian dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dihitung sebagai nilai TPAK. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk

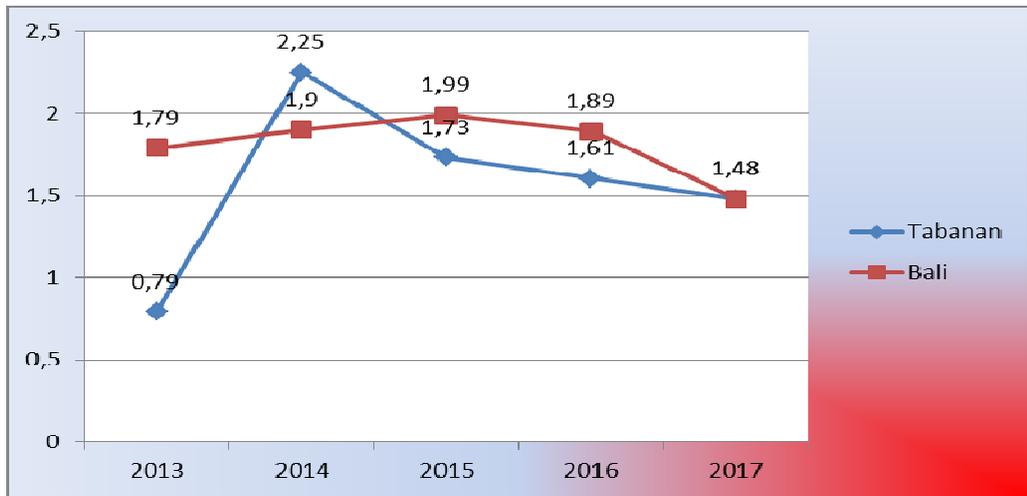
memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK penduduk Kabupaten Tabanan tahun 2017 tercatat sebesar 75,24 persen mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 77,77 persen. Perkembangan kondisi TPAK penduduk Tabanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2013 – 2017

TPAK Bali dan Tabanan tergolong tinggi, artinya ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa relatif tinggi. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut di atas mengindikasikan kita sudah masuk dalam bonus demografi. Jika bonus demografi ini bisa digarap dan dimanfaatkan secara baik, maka peluang meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah akan terbuka lebar. Sebaliknya, jika kualitas tenaga kerja yang tersedia rendah dan iklim usaha tidak tumbuh dengan baik maka bonus demografi ini akan berdampak buruk pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Gambaran lain dari kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dihitung dari persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tabanan dalam beberapa kurun waktu, terhitung relatif rendah. Tahun 2017, tingkat pengangguran tercatat sebesar 1,48 persen dari jumlah angkatan kerja yang berjumlah 2.434.450 orang. Pencapaian tingkat pengangguran di bawah 1,5 persen ini merupakan angka minimal yang sulit untuk diturunkan lagi.

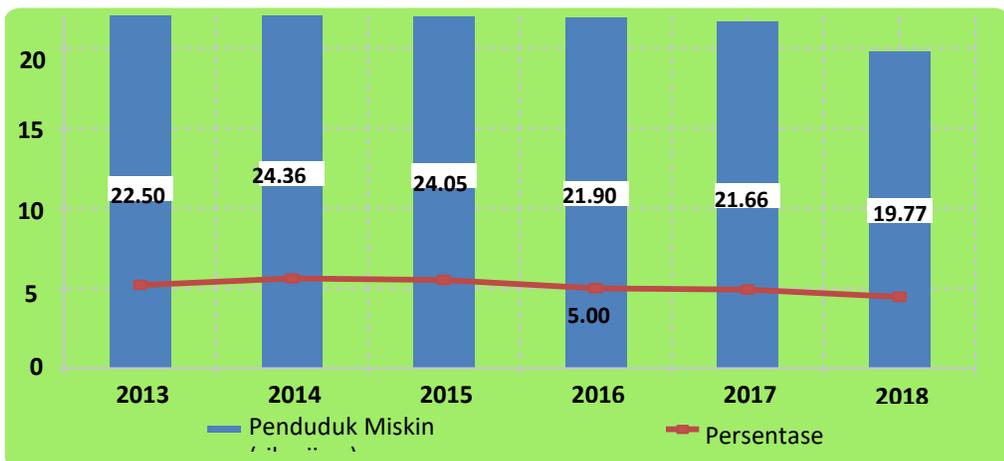


Gambar 2.16 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tabanan Tahun 2013-2017

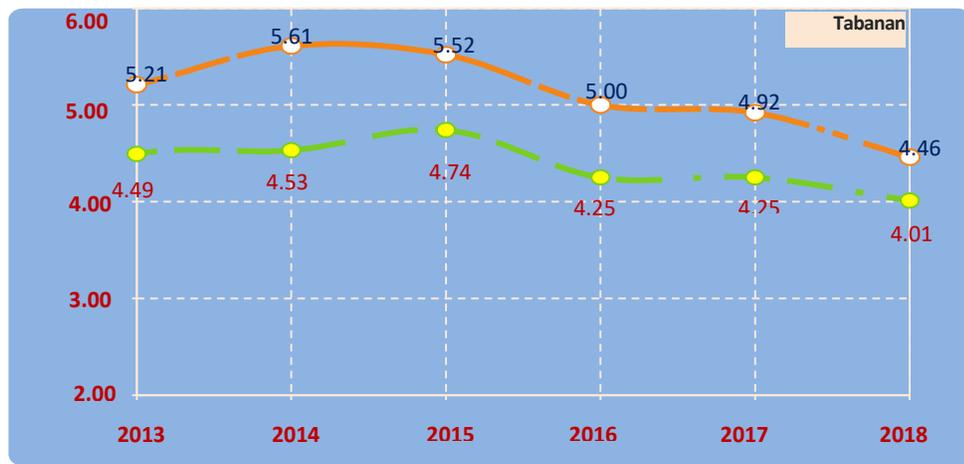
Kondisi di atas sekilas nampak cukup membanggakan, namun perlu dicermati lebih jauh tingkat produktivitas dari angkatan kerja yang bekerja. Jika produktivitas tenaga kerja rendah, maka kecilnya angka pengangguran belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### *Kemiskinan*

Pada aspek penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 22.500 jiwa lebih pada tahun 2013 menjadi 19.770 jiwa pada tahun 2018. Dalam periode tahun yang sama persentase penduduk miskin menurun dari 5,21 persen menjadi 4,46 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Bali yang mencapai 4,01 persen pada tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.14 dan Gambar 2.15



Gambar 2.17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan Tahun 2013 - 2018



Gambar 2.18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018

Walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Tabanan khususnya dan Bali umumnya telah mampu mencapai angka yang sangat rendah, namun jumlah penduduk yang tergolong rentan miskin masih cukup tinggi. Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang dikategorikan dalam 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah. Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah harus terus digalakkan agar penduduk yang masuk kategori rentan miskin agar tidak kembali jatuh miskin. Berdasarkan hasil pendataan terakhir, jumlah rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 119 ribu lebih rumah tangga atau mendekati 27 persen dari jumlah rumah tangga. Jumlah dan sebarannya di sepuluh kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah dan Sebaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tabanan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tagga (dalam ribuan)	Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan (dalam ribuan)	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan (%)
1	Kediri	93,03	19,27	20,72
2	Tabanan	74,35	10,91	14,68
3	Baturiti	48,31	16,90	34,98
4	Penebel	44,78	7,72	17,25
5	Marga	41,82	9,45	22,59
6	Pupuan	39,14	18,64	47,61
7	Kerambitan	38,97	9,26	23,76
8	Selemadeg Timur	21,52	9,45	43,89
9	Selemadeg	19,66	10,66	54,20
10	Selemadeg Barat	19,42	7,51	38,67
	Jumlah	441,00	119,76	27,16

Dari tabel di atas dapat disimak bahwa keberadaan rumah tangga miskin dan rentan miskin di sepuluh kecamatan ketimpangannya cukup besar. Kecamatan Selemadeg, Pupuan, dan Selemadeg Timur menunjukkan jumlah tertinggi dari jumlah rumah tangga yang ada di kecamatan tersebut. Prioritas penanganan penduduk miskin seharusnya memperhatikan sebaran dari kantong-kantong kemiskinan tersebut. Dalam upaya menjamin hak-hak dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabanan masih membutuhkan kerja keras berkenaan dengan peningkatan efektivitas program dan pemerataan dalam menanggulangi kantong-kantong kemiskinan di seluruh wilayah. Selain itu, strategi peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin juga didasarkan atas potensi lokal yang diyakini dapat berperan sebagai titik ungkit ekonomi masyarakat.

### 2.1.3. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis LQ terdapat 7 sektor basis perekonomian Kabupaten Tabanan (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Analisis LQ Kabupaten Tabanan

SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017	KET.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,52	1,51	1,49	1,52	1,54	Basis
Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,07	1,11	1,1	1,16	Basis
Industri Pengolahan	0,86	0,86	0,89	0,91	0,92	
Pengadaan Listrik dan Gas	0,53	0,5	0,5	0,47	0,47	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	
Konstruksi	1,05	1,05	1,07	1,07	1,07	Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,96	0,97	0,97	0,98	0,97	
Transportasi dan Pergudangan	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	
Informasi dan Komunikasi	1,02	1,02	1,02	1,03	1,02	Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,88	0,85	0,84	0,84	
Real Estate	1,22	1,22	1,24	1,21	1,21	Basis
Jasa Perusahaan	0,91	0,92	0,92	0,91	0,93	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,39	1,4	1,41	1,4	1,42	Basis
Jasa Pendidikan	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	1,06	1,07	1,05	1,07	Basis

Sumber BPS. : Data diolah

#### a. Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Dominasi sektor pertanian menjadikan Tabanan sebagai lumbung pangan Bali. Berdasarkan analisis LQ sektor pertanian, peternakan, dan perikanan masih menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan melihat kontribusinya yang cukup konsisten terhadap perekonomian Kabupaten Tabanan dalam lima tahun terakhir (2013-2017). Walaupun kontribusi terhadap PDRB menurun namun sektor ini masih menjadi sektor utama di Kabupaten Tabanan. Pentingnya sektor ini bagi Tabanan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian pertanian cukup tinggi yaitu mencapai 36,58% pada tahun 2016. Terdapat beberapa sub sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Tabanan dari sektor pertanian dalam arti luas, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan serta sektor perikanan yang tersebar di masing-masing kecamatan.

Saat ini daya saing sektor pertanian Kabupaten Tabanan utamanya didukung oleh kuantitas produk pertanian yang cukup besar sehingga mampu menjaga kontinuitas pasokan bagi kebutuhan perdagangan maupun industri pariwisata Bali. Disisi lain, daya saing sumber daya manusia dibidang pertanian dan produk olahan hasil pertanian masih harus terus dibenahi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pertanian tidak hanya dalam hal cara mengelola produk pertanian, tetapi secara kualitas hidup juga perlu ditingkatkan sehingga nantinya mampu melakukan inovasi-inovasi lain yang terkait dengan sektor pertanian. Demikian pula untuk produk olahan pertanian mulai jenis, kualitas, dan pemasarannya yang masih perlu dilakukan pembenahan sehingga mampu meningkatkan nilai tukar produk bagi petani di Kabupaten Tabanan.

#### b. Pariwisata

Meskipun sektor pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum) bukan sektor basis namun sektor ini mampu memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tabanan yakni sebesar 21,5 persen pada Tahun 2017, hal ini disebabkan Tabanan memiliki Obyek wisata alam yang spesifik

seperti Tanah Lot, Ulun Danau Beratan dan Warisan Budaya Dunia Jatiluwih.

Namun demikian, tingginya jumlah kunjungan ke obyek-obyek wisata alam tersebut belum didukung oleh keinginan wisatawan untuk tinggal dan menginap di Tabanan. Kedepannya perlu ditingkatkan daya saing di sektor pariwisata yang dapat memikat wisatawan untuk lebih lama menghabiskan waktunya di Tabanan sehingga dampak kontribusi ekonominya akan lebih besar dirasakan masyarakat.

c. Ekonomi Kreatif

Daya saing ekonomi kreatif masyarakat Tabanan masih perlu ditingkatkan terutama melalui produk-produk olahan hasil pertaniannya. Meskipun saat ini jumlah usaha mikro di Kabupaten Tabanan telah mencapai puluhan ribu, namun jumlah produk yang menunjukkan “*brand*” Tabanan masih dapat dihitung dengan jari. Produk-produk khas Tabanan yang sudah mulai bermunculan, masih perlu pembenahan manajemen produksi dan pemasarannya, baik dari sarana dan prasarananya maupun sumber daya manusianya. Pasar di sektor pariwisata yang masih terbuka lebar perlu dimanfaatkan secara maksimal dengan mengintegrasikan potensi usaha mikro yang saat ini jumlahnya cukup besar

Tabel 2.4 Jumlah Usaha Mikro Di Kabupaten Tabanan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH USAHA MIKRO	
		FORMAL	INFORMAL
1	Tabanan	1.393	4.245
2	Kediri	1.579	4.845
3	Kerambitan	908	2.340
4	Baturiti	1.162	3.380
5	Marga	1.087	2.075
6	Selemadeg Barat	926	1.825
7	Selemadeg Timur	728	1.755
8	Selemadeg	1.090	2.725
9	Penebel	1.243	2.630
10	Pupuan	1.009	2.035

d. Sumber Daya Manusia

Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan, pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator dari kualitas sumber

daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat beban ketergantungan penduduk.

- Kualitas Tenaga Kerja (Rasio S1/S2/S3)

Pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia (SDM) erhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas sumber daya Manusia di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3. Periode 2015-2017 menunjukkan tren penurunan dimana pencari kerja pada tahun 2015 didominasi atau 68,32 persen merupakan pencari kerja berpendidikan sarjana namun dua tahun terakhir pencari kerja didominasi lulusan SMP. Pada tahun 2016 persentase lulusan SMP pencari kerja mencapai 45,64 persen sarjana hanya 25,26 persen. Sementara pada tahun 2017 lulusan sarjana pencari kerja semakin rendah, hanya 15,08 persen sementara lulusan SMP meningkat menjadi 65,69 persen.

- Rasio Ketergantungan (Dependency Rasio)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

*Dependency ratio* Kabupaten Tabanan Tahun 2015 – 2017 rata-rata sebesar 44,40 persen, artinya dari 100 usia produktif menanggung 44 usia non produktif dimana 66 persennya

merupakan usia 0-14 tahun dan 34 persen usia 65 tahun keatas. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan masih tinggi. Oleh karena itu pengendalian penduduk menjadi sangat penting melalui kelahiran yang terencana.

#### 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik menggambarkan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan publik terdiri dari layanan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pelayanan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan, sedangkan pelayanan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan. Berikut gambaran dan analisis kondisi beberapa urusan pelayanan umum tersebut di atas.

##### a. Fokus Layanan urusan Wajib Dasar

###### 1) Urusan Pendidikan

Kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Tabanan dapat dikaji dari beberapa indikator, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf, ketersediaan tenaga pendidik, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana sekolah. APS di Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 pada jenjang pendidikan SD dan SMP telah mendekati 100 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SLTA baru mencapai 84,45 persen dan terjadi bias gender pada partisipasi sekolah anak laki-laki dengan perempuan (Tabel 2.2). Minat orang tua atau anak perempuan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah lanjutan atas ternyata lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini tentu perlu intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Tabel 2.5 Partisipasi Sekolah Penduduk Tabanan berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
7 - 12	98,20	99,76	98,98
13 - 15	100,00	96,94	98,47
16 - 18	95,50	76,70	86,10

Sumber: BPS Kab. Tabanan

Berkenaan dengan angka melek huruf, pada tahun 2018, 97,28 persen penduduk Tabanan yang berusia 15 tahun ke atas tidak lagi menyandang predikat “buta huruf”. Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, Kabupaten Tabanan masih menghadapi kondisi yang cukup serius dengan kurangnya ketersediaan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Pada jenjang pendidikan SD, semestinya tersedia 6 guru kelas, 1 kepala sekolah, 1 guru agama, dan 1 guru pendidikan jasmani dan kesehatan (panjaskes). Dari 324 jumlah SD dan 1.934 rombongan belajar (Rombel) yang ada di Kabupaten Tabanan mestinya tersedia guru sebanyak 2.896 guru. Namun, saat ini ketersediaan guru SD hanya sebanyak 2.438 guru (minus 458 orang). Dari jumlah guru yang ada ini pun 20,4 persen berstatus sebagai guru kontrak (non PNS) (Tabel 2.3). Kondisi ini baru ditinjau dari sisi kuantitas, belum menyangkut ketersediaan guru mata pelajaran wajib (guru Agama dan Panjaskes). Apabila permasalahan guru ini tidak ditangani secara serius, mustahil dapat terwujud peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan SD.

Tabel 2.6 Ketersediaan Guru pada Janjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Rombongan Belajar	Guru Berstatus		Jumlah Guru	Kebutuhan
				PNS	Kontrak		
1	Baturiti	35	215	148	39	187	322
2	Kerambitan	31	184	201	49	250	277
3	Kediri	45	288	258	59	317	426
4	Marga	34	203	220	48	268	305
5	Penebel	44	261	274	51	325	393
6	Pupuan	31	186	243	56	299	279
7	Selemadeg Barat	20	116	101	26	127	176
8	Selemadeg	17	102	87	37	124	153
9	Selemadeg Timur	20	120	124	38	162	180
10	Tabanan	47	259	284	95	379	385
	Jumlah	324	1.934	1.940	498	2.438	2.896

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tabanan, 2018

Dari tabel di atas dapat disimak, bahwa sebaran guru antar kecamatan juga mengalami ketimpangan. Kecamatan yang paling besar kekurangan guru adalah berturut-turut adalah Kecamatan Baturiti, Kediri, dan Penebel. Jadi, kekurangan guru SD tidak hanya terjadi di sekolah yang jauh dari kota namun juga terjadi di perkotaan (Kecamatan Kediri).

Di samping akses pendidikan dan ketersediaan guru, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Dari seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, ruang kelas merupakan prasarana yang paling utama sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ruang kelas di seluruh SD yang tersebar di sepuluh kecamatan terangkum dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Kondisi Ruang Belajar SD di sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Ruang Belajar	Kondisi Ruang Kelas			Persentase Ruang Belajar Rusak Berat
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Baturiti	35	210	71	134	5	2,38
2	Kerambitan	31	192	77	111	4	2,08
3	Kediri	45	282	124	149	9	3,19
4	Marga	34	201	72	109	20	9,95
5	Penebel	44	269	91	165	13	4,83
6	Pupuan	31	190	62	118	10	5,26
7	Selemadeg Barat	20	130	36	89	5	3,85
8	Selemadeg	17	108	25	76	7	6,48
9	Selemadeg Timur	20	122	68	46	8	6,56
10	Tabanan	47	368	118	245	5	1,36
Jumlah		324	2.072	744	1.242	86	4,15

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa 23,37 persen kondisi ruang belajar SD yang ada masih dalam kondisi rusak berat. Ruang belajar SD di Kecamatan Marga, Selemadeg Timur, Selemadeg, dan Pupuan wajib mendapat penanganan lebih prioritas dibandingkan dengan SD di kecamatan lainnya.

Kondisi ruang belajar pada jenjang pendidikan SMP kondisinya relative lebih baik dibandingkan dengan jenjang SD. Ruang belajar yang rusak berat masih ada sebanyak 18 unit atau 3,12 persen dari ruang yang ada (Tabel 2.5) Ruang belajar SMP di Kecamatan Selemadeg Barat, Baturiti, dan Selemadeg butuh penanganan segera agar pemerataan kondisi prasarana pendidikan antar kecamatan lebih optimal.

Tabel 2.8 Kondisi Ruang Belajar SMP di sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah SMP	Jumlah Ruang Belajar	Kondisi Ruang Kelas			Persentase Ruang Belajar Rusak Berat
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Baturiti	5	66	36	23	7	10,61
2	Kerambitan	2	46	21	25	0	0,00
3	Kediri	4	72	38	34	0	0,00
4	Marga	4	64	19	45	0	0,00
5	Penebel	3	46	22	22	2	4,35
6	Pupuan	6	60	29	29	2	3,33
7	Selemadeg Barat	2	17	2	10	5	29,41
8	Selemadeg	2	32	4	26	2	6,25
9	Selemadeg Timur	3	48	36	12	0	0,00
10	Tabanan	5	125	43	82	0	0,00
Jumlah		36	576	250	308	18	3,13

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

## 2) Urusan Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari keberadaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan telah tersedia cukup banyak, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau keseluruhan kecamatan, bahkan jika digabungkan dengan jaringan pelayanan di bawahnya, seperti: Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), pelayanan kesehatan telah menjangkau seluruh desa dan banjar.

Tahun 2018 di Kabupaten Tabanan terdapat Puskesmas sebanyak 20 unit, dengan rincian: Puskesmas Perawatan (Puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergency dasar) sebanyak 5 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 15 unit. Lima Puskesmas Perawatan dimaksud adalah: Puskesmas Pupuan I, Puskesmas Selemadeg, Puskesmas Tabanan III, Puskesmas Baturiti I, dan Puskesmas

Penebel I. Keterjangkauan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tabanan telah mencapai 1,38 per 30.000 penduduk. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana

elayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling). Jumlah Pustu pada tahun 2018 adalah sebanyak 76 unit, dan jumlah Pusling sebanyak 20 unit ditambah dengan 2 unit Mobil Sehat untuk memberikan pelayanan sampai pada tingkat banjar khususnya pelayanan kesehatan kanker servik (IVA).



Gambar 2.19 Foto Puskesmas Semesta Selemdeg Timur

Keberadaan Pustu yang tersebar di 10 kecamatan dan 76 desa keberadaannya masih belum optimal karena lebih dari 50 persen kondisi fisik bangunannya belum dapat dikategorikan “baik” (Tabel 2.6). Oleh karena itu, upaya perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih intensif, baik dari sisi kualitas sarana yang telah ada maupun pembangunan baru bagi desa-desa yang aksesnya masih sulit terhadap sarana kesehatan.

Tabel 2.9 Keberadaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUSTU	KONDISI PUSTU		
				Baik	RR dan RS	RB
1.	KEDIRI	3	8	2	4	2
2.	TABANAN	3	4	-	3	1
3.	KERAMBITAN	2	9	3	4	2
4.	SELEMADEG TIMUR	2	7	3	4	-
5.	SELEMADEG	1	4	3	1	-
6.	SELEMADEG BARAT	1	7	3	3	1
7.	PUPUAN	2	11	4	7	-
8.	PENEBEL	2	13	7	6	-
9.	BATURITI	2	9	4	4	1
10.	MARGA	2	6	2	2	2
JUMLAH		20	78	31	38	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabanan, 2019

Keterangan: B : Baik; RR: Rusak Ringan; RS: Rusak Sedang; RB: Rusak Berat

Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dilakukan oleh Rumah Sakit. Di Kabupaten Tabanan sampai saat ini terdapat 7 (tujuh) rumah sakit, salah satu diantaranya merupakan rumah sakit pemerintah, yaitu Badan Rumah Umum (BRSU) Tabanan. Pemanfaatan tempat tidur (*Bed Occupancy Rate/BOR*) dari BRSU tercatat cukup tinggi, melebihi 80 persen sebagai kondisi ideal. Tahun 2016 dan 2017 rata-rata BOR rumah sakit tersebut tercatat 96,64 dan 84,95. Adanya kebijakan baru pemerintah berkenaan dengan rujukan berjenjang mulai dari Puskesmas ke rumah sakit menurut tipenya (C-B-A), secara perlahan BOR BRSU Tabanan menjadi lebih rendah. Sebagaimana diketahui, BRSU Tabanan termasuk rumah sakit rujukan regional tipe B. Tahun 2018, BOR BRSU Tabanan telah mendekati angka ideal, yaitu 77,95.

Ketersediaan tenaga kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang lebih menekankan pada usaha kesehatan yang bersifat promotif dan preventif setidaknya perlu didukung oleh beberapa jenis tenaga kesehatan, yaitu: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Tahun 2017 terdapat 593 tenaga kesehatan yang bekerja di Dinas Kesehatan dan 20 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tabanan. Dari 593 tenaga kesehatan yang ada, jumlah dokter umum sebanyak 67 orang, dokter gigi sebanyak 41 orang, tenaga perawat sebanyak 168 orang, tenaga perawat gigi sebanyak 54 orang, bidan sebanyak 211, tenaga farmasi sebanyak 2 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 26 orang, tenaga sanitarian sebanyak 48 orang, tenaga gizi sebanyak 20 orang, dan tenaga keteknisan medis sebanyak 15 orang.

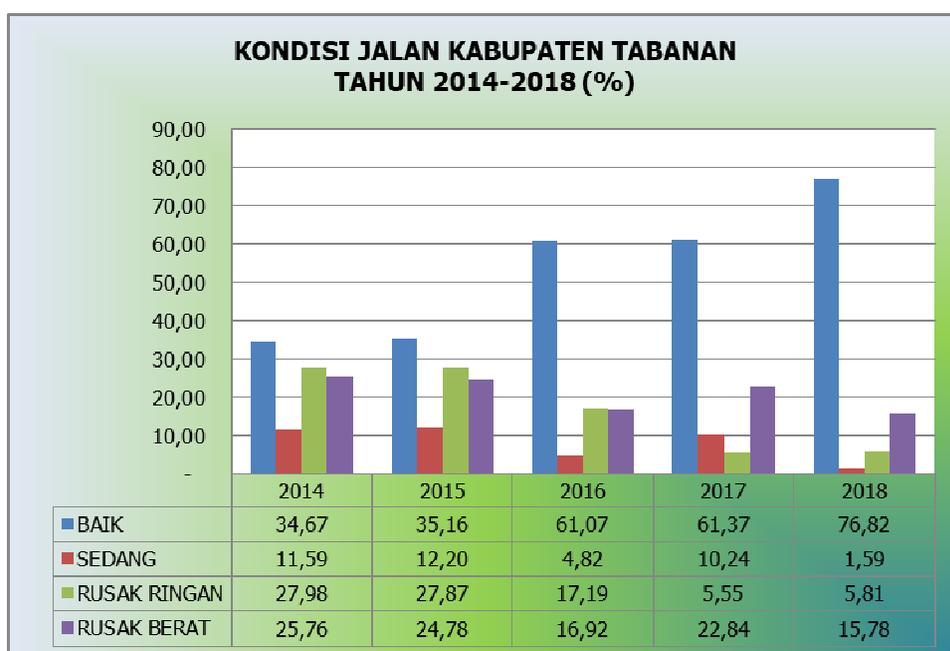
Ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 1.094 orang. Dari 1094 tenaga tersebut terdiri dari 101 orang dokter spesialis, 59 orang dokter umum, 15 orang dokter gigi, 562 orang tenaga perawat, 13 orang perawat gigi 117 orang bidan, 81 orang tenaga farmasi, 12 orang tenaga kesehatan masyarakat, 13 orang tenaga

sanitarian, 31 orang tenaga gizi, 79 orang tenaga keteknisan medis, dan 11 orang tenaga fisioterapis. Jenis tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar adalah dokter umum, bidan, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, tenaga gizi, dan keterampilan fisik.

### 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### *Pekerjaan Umum*

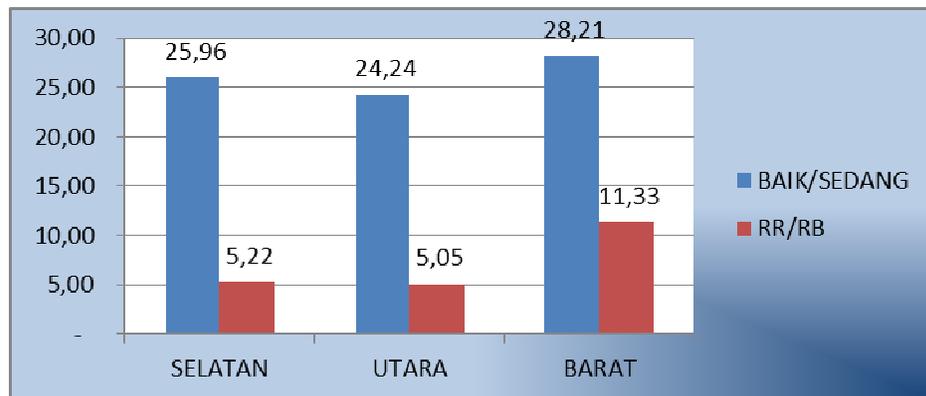
Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi Kondisi Jalan, sanitasi, jaringan irigasi, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik dan jaringan irigasi. Kondisi jalan Kabupaten Tabanan terus mengalami peningkatan, capaian ini tidak terlepas dari program Hotmik sehingga target kondisi jalan mantap 2020 dapat tercapai dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Berikut Kondisi Jalan Kabupaten Tabanan Tahun 2014 - 2018.



Gambar 2.20 Kondisi Jalan Kabupaten Tabanan 2014-2018

Meskipun secara umum kondisi jalan di Kabupaten Tabanan dalam baik namun masih menyisakan pekerjaan rumah sebesar 21,59 persen jalan rusak yang sebagian besar terdapat di Tabanan bagian barat. Wilayah barat memiliki ruas terpanjang sebesar 341,288 km atau 39,54% dari total panjang jalan di Kabupaten Tabanan 863,218 km, hingga tahun 2018 wilayah barat ruas jalan yang membutuhkan penanganan sepanjang 97,76 km atau 11,33

persen. Sementara wilayah selatan dan utara ruas jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat pada kisaran 5 persen, sehingga pada tahun 2019 mampu dituntaskan dan tahun 2020 penanganan jalan difokuskan pada wilayah barat. Persentase kondisi ruas jalan Kabupaten Tabanan berdasarkan wilayah Tahun 2018 (Gambar 2.16)



Gambar 2.21 Persentase kondisi ruas jalan Kabupaten Tabanan Berdasarkan wilayah Tahun 2018

Sebagai daerah pertanian, Tabanan memiliki potensi sumber daya air cukup melimpah. Kebutuhan untuk irigasi sawah di Tabanan mencapai 342,83 juta m<sup>3</sup>/tahun, namun belum didukung dengan jaringan irigasi cukup baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tahun 2017 Jaringan irigasi di Kabupaten Tabanan 60 persen dalam kondisi rusak merata di seluruh wilayah. Jaringan irigasi terpanjang berada di wilayah utara Tabanan sepanjang 769,8m atau 34,6 persen kemudian di wilayah selatan sepanjang 730 m atau 31,81 persen dan wilayah barat sepanjang 725,10 matau 32,59 persendari seluruh panjang irigasi di Kabupaten Tabanan. KOndisi haringan Irigasi Kabupaten Tabanan 2017 Tabel 2.7

Tabel 2.10 Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jaringan Irigasi (m)				
		Total Panjang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	SELBAR	110,5	44,2	16,575	27,625	22,1
2	SELEMADEG	183,6	73,44	27,54	45,9	36,72
3	SELTIM	237,9	95,16	35,685	59,475	47,58
4	KERAMBITAN	237,6	95,04	35,64	59,4	47,52
5	TABANAN	201,1	80,44	30,165	50,275	40,22
6	KEDIRI	291,3	116,52	43,695	72,825	58,26
7	MARGA	230	92	34,5	57,5	46
8	BATURITI	197,8	79,12	29,67	49,45	39,56

9	PENEBEL	431,4	172,56	64,71	107,85	86,28
10	PUPUAN	103,7	41,48	15,555	25,925	20,74

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, 2017

### *Penataan Ruang*

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten Tabanan merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten Tabanan yang tersusun berdasarkan arahan RTRWN dan RTRWP Bali, serta atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah, sehingga rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tabanan meliputi.

#### a. Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan Tabanan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari sistem KSN Perkotaan Sarbagita meliputi :

- (1) Kawasan Perkotaan Inti terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung;
- (2) Kawasan Perkotaan di sekitarnya terdiri atas Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud dan Kawasan Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan; dan
- (3) Kawasan penyeimbang antar Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya.

Kawasan Perkotaan Tabanan sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tabanan dan sebagian wilayah Kecamatan Kediri, terdiri atas :

- (1) Wilayah Desa/kelurahan Dauh Peken, Delod Peken, Dajan Peken, dan Denbantas di Kecamatan Tabanan; dan
- (2) Wilayah Desa/kelurahan Kediri, Abiantuwung dan Banjar Anyar di Kecamatan Kediri.

Kawasan penyeimbang antar Kawasan Perkotaan Inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya di wilayah Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri yang berada di luar Kawasan Perkotaan Tabanan didukung pusat-pusat lingkungan sebagai

pusat kawasan permukiman yang melayani kawasan permukiman perdesaan di sekitarnya terdiri atas:

- (1) Pusat Lingkungan Tunjuk melayani Desa Tunjuk dan Buahman;
- (2) Pusat Lingkungan Wanasari melayani Desa Wanasari, Subamia dan Sesandan;
- (3) Pusat Lingkungan Bongan melayani Desa Bongan dan Desa Gubug;
- (4) Pusat Lingkungan Sudimara melayani Desa Sudimara;
- (5) Pusat Lingkungan Beraban melayani Desa Beraban, Belalang, Pangkung Tibah, dan Pandak Gede;
- (6) Pusat Lingkungan Pejaten melayani Desa Pejaten, Desa Nyitdah, dan Bengkel;
- (7) Pusat Lingkungan Pandak Gede melayani Desa Pandak Gede dan Pandak Bandung; dan
- (8) Pusat Lingkungan Kaba-Kaba melayani Desa Kaba-Kaba, Buwit, Nyambu dan Cepaka.

(a) PPK sebagaimana meliputi:

- (1) Kawasan Perkotaan Lalanglinggah terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Lalanglinggah;
- (2) Kawasan Perkotaan Bajera terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Bajera;
- (3) Kawasan Perkotaan Megati terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Sembung Gede;
- (4) Kawasan Perkotaan Sembunggede terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Sembunggede dan Desa Meliling;
- (5) Kawasan Perkotaan Marga terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Marga, Desa Marga Dajan Puri dan Marga Dauh Puri;
- (6) Kawasan Perkotaan Baturiti terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Baturiti;
- (7) Kawasan Perkotaan Penebel terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Penebel;
- (8) Kawasan Perkotaan Pupuan terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Pupuan dan Bantiran;
- (9) Kawasan Perkotaan Candikuning terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Candikuning; dan
- (10) Kawasan Perkotaan Kerambitan terdiri atas Kawasan Perkotaan Desa Kerambitan.

b. Kawasan Perdesaan

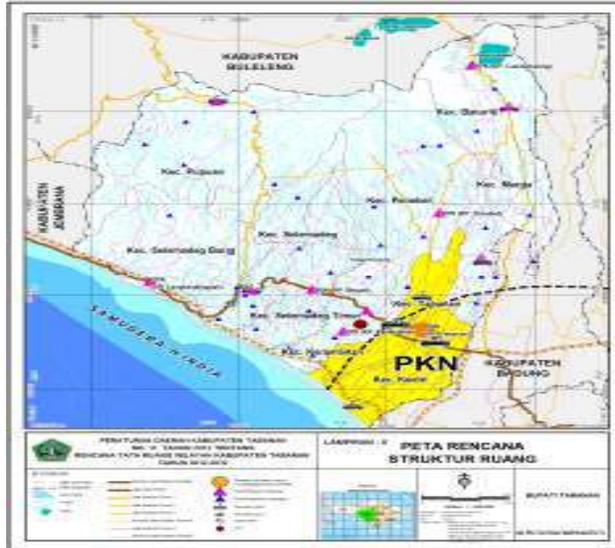
Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. sistem perdesaan di Kabupaten Tabanan meliputi:

- 1) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pusat permukiman perdesaan dan kegiatan sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa, sebaran PPL meliputi:
  - a. Sebaran PPL di Kecamatan Marga terdiri atas:
    - 1) PPL Cau Belayu melayani Desa Cau Belayu;
    - 2) PPL Tua melayani Desa Tua dan Petiga;
    - 3) PPL Kukuh melayani Desa Kukuh, Tegal Jadi dan Beringkit;
    - 4) PPL Peken melayani Desa Peken, Batannyuh dan Kuwum; dan
    - 5) PPL Selanbawak melayani Desa Selanbawak.
  - b. Sebaran PPL di Kecamatan Baturiti terdiri atas:
    - 1) PPL Batunya melayani Desa Batunya dan Antapan;
    - 2) PPL Luwus melayani Desa Luwus dan Desa Mekarsari;
    - 3) PPL Perean melayani Desa Perean, Perean Tengah dan Perean Kangin; dan
    - 4) PPL Angseri melayani Desa Angseri, Bangli dan Apuan.
  - c. Sebaran PPL di Kecamatan Penebel terdiri atas:
    - 1) PPL Rejasa melayani Desa Rejasa, Pesagi, dan Tegallinggah;
    - 2) PPL Sangketan melayani Desa Sangkatén;
    - 3) PPL Jegu melayani Desa Jegu, Buruan, dan Pitra;
    - 4) PPL Riangede melayani Desa Riangede;
    - 5) PPL Penatahan melayani Desa Penatahan, Teng kudak, dan Wongaya Gede;
    - 6) PPL Biaung melayani Desa Biaung dan Tajen;
    - 7) PPL Senganan melayani Desa Senganan dan Babahan; dan
    - 8) PPL Jatiluwih melayani Desa Jatiluwih dan Mengesta.
  - d. Sebaran PPL di Kecamatan Kerambitan terdiri atas:
    - 1) PPL Timpag melayani Desa Timpag dan Kesitu;
    - 2) PPL Samsam melayani Desa Samsam, Batuaji dan Pangkungkarung;
    - 3) PPL Kerambitan melayani Desa Kerambitan, Baturiti, Kukuh, Tista;
    - 4) PPL Tibubiu melayani Desa Tibubiu dan Belumbang; dan

- 5) PPL Kelating melayani Desa Kelaiting dan Penarukan.
- e. Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg Timur terdiri atas:
    - 1) PPL Gunungsalak melayani Desa Gunungsalak dan Dalang;
    - 2) PPL Gadungan melayani Desa Gadungan dan Bantas;
    - 3) PPL Tegalmengkeb melayani Desa Tegalmengkeb, Beraban, Tanguntiti; dan
    - 4) PPL Mambang melayani Desa Mambang.
  - f. Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg terdiri atas:
    - 1) PPL Selemadeg melayani Desa Selemadeg, Pupuansawah, Manikyang dan Serampingan;
    - 2) PPL Wanagiri melayani Desa Wanagiri dan Wanagiri Kauh;
    - 3) PPL Antap melayani Desa Antap; dan
    - 4) PPL Berembeng melayani Desa Berembeng.
  - g. Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg Barat terdiri atas:
    - 1) PPL Antosari melayani Desa Antosari, Tiyinggading, Angkah dan Mundeh Kangin;
    - 2) PPL Mundeh melayani Desa Mundeh, Mundeh Kauh dan Lumbung Kauh; dan
    - 3) PPL Lumbung.
  - h. Sebaran PPL di Kecamatan Pupuan terdiri atas:
    - 1) PPL Pujungan melayani Desa Pujungan dan Batungsel;
    - 2) PPL Munduk Temu melayani Desa Munduk Temu dan Desa Belatungan;
    - 3) PPL Belimbing melayani Desa Belimbing dan Sanda;
    - 4) PPL Padangan melayani Desa Padangan, Kebon Padangan dan Jelijih Punggang; dan
    - 5) PPL Pajahan melayanai Desa Pajahan.
- 2) Kawasan Agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sebaran kawasan agropolitan terdiri atas:
- a. Kawasan Agropolitan Baturiti;
  - b. Kawasan Agropolitan Penebel;
  - c. Kawasan Agropolitan Marga; dan
  - d. Kawasan Agropolitan Pupuan.

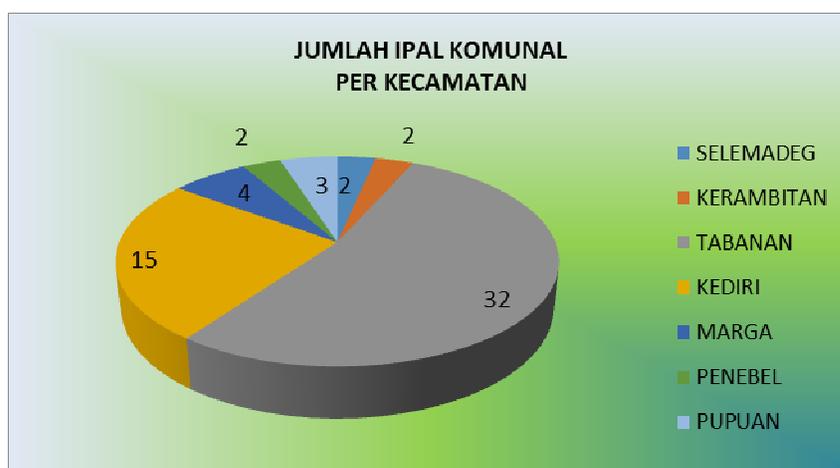
Pusat-pusat pelayanan kawasan agropolitan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agribisnis dan agroindustri pasar khusus agro (hasil pertanian) dan terminal agribisnis, sedangkan kawasan perdesaan lainnya yang mempunyai potensi sistem agribisnis terpadu dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan promosi. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tabanan seperti disajikan pada Gambar 2.22



Gambar 2.22 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

#### 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk sektor sanitasi khususnya air limbah selain pembangunan jamban sehat di tiap individu masyarakat, pemenuhannya dilakukan juga melalui pembangunan IPAL Komunal. Pembangunan IPAL Komunal di Kabupaten Tabanan telah dimulai sejak tahun 2007 yang didanai melalui dana reguler Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Bali. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 sudah terbangun 60 (enam puluh) unit IPAL Komunal yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Adapun sebaran IPAL Komunal di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 2.23 IPAL Komunal di Kabupaten Tabanan

Pembangunan IPAL Komunal di Kabupaten Tabanan dipenuhi melalui dana reguler Satker PLP, DAK maupun Hibah JICA. Dari sebaran IPAL Komunal di atas dapat dilihat bahwa jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Tabanan yang mencapai 32 unit yaitu sejumlah 53,33 % diikuti oleh Kecamatan Kediri (15 unit) dan Marga (4 unit). Sebaran IPAL Komunal ini masih terfokus di wilayah perkotaan yaitu Perkotaan Tabanan yang terdiri dari Kecamatan Tabanan dan Kediri yang memang merupakan wilayah padat penduduk dan area berresiko sanitasi. Di samping itu, beberapa IPAL Komunal yang dibangun berada di kawasan kumuh yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dimana hal ini tidak terlepas dari upaya pelayanan bidang sanitasi khususnya sektor air limbah di Kabupaten Tabanan. Selain pembangunan IPAL Komunal, pelayanan sektor air limbah di Kabupaten Tabanan juga dipenuhi melalui pembangunan jamban sehat yang tersebar di seluruh kecamatan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun berkolaborasi oleh masyarakat.

Di samping pembangunan IPAL Komunal dan pembangunan jamban sehat, sudah terbangun 1 (satu) unit IPAL Kawasan di tahun 2017 yang berlokasi Dauh Pala untuk pelayanan di wilayah perkotaan Tabanan. Dari pelayanan sektor air limbah ini, beberapa desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat memenuhi kriteria *ODF (Open Defecation Free)*-Bebas Buang Air Besar Sembarangan dimana sampai dengan tahun 2018, sudah tercatat 18 (delapan belas) desa sudah berstatus *ODF* dan diharapkan dapat diikuti oleh desa-desa lainnya di seluruh Kabupaten Tabanan.

Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tabanan dilaksanakan melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan hasil pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tabanan, sampai dengan tahun 2018 terdapat 2.836 unit RTLH yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Hasil pendataan sangat tergantung dengan pada ketepatan waktu pengumpulan data, keabsahan data, validasi dan verifikasi. Kondisi ini pun dipengaruhi oleh kondisi masing-masing rumah di masyarakat yang dapat berubah kondisinya dalam kurun waktu tertentu.

Penyediaan rumah layak huni dapat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah maupun pembangunan baru. Dalam penuntasan penyediaan rumah layak huni bagi MBR di Kabupaten Tabanan dalam tiga tahun terakhir dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui pendanaan pusat yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) sudah dapat ditangani 1.207 unit rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menysasar 3 (tiga) kecamatan di 17 desa. Mengingat masih banyaknya rumah layak tidak layak huni di Kabupaten Tabanan, perlu diupayakan pendanaan melalui program pusat maupun *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Selain itu, penuntasan Kawasan Kumuh Kabupaten menjadi tanggung jawab sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan amanat RPJMN 2014-2019. Kawasan kumuh di

Kabupaten Tabanan telah ditetapkan sejak tahun 2014 dan diperbaharui di tahun 2015 melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 180/460/02/HK & HAM/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 180/367/02/Hk & HAM/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tabanan. Adapun kawasan kumuh tersebut terdapat di 11 kawasan dengan 18 sub kawasan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dengan luasan total 116,35 Ha.

Adapun penuntasan kawasan kumuh telah dimulai sejak tahun 2014 melalui pendanaan APBN, Provinsi maupun Kabupaten sebagaimana kewenangan. Sampai dengan tahun 2018, pendanaan penanganan kumuh memang lebih banyak ditangani oleh dana APBN (luasan >15Ha). Namun demikian terdapat pula pendanaan melalui Dana Provinsi (luasan 10-15Ha) dan Kabupaten (luasan <10 Ha), bahkan dana desa. Sampai dengan tahun 2018, masih terdapat kawasan kumuh yang belum ditangani secara tuntas terutama pada kawasan yang menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten. Kawasan kumuh yang menjadi kawasan kabupaten secara berangsur-angsur telah ditangani terutama untuk masalah jalan dan air limbah. Sedangkan komponen yang lain yang meliputi bangunan, air minum, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran akan dituntaskan secara bertahap.

#### 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berkaitan erat dengan keberadaan Polisi Pamong Praja dan Linmas. Data yang dihimpun pada tahun 2018 jumlah Polisi Pamong praja sebanyak 286 orang, dengan estimasi rata-rata per 10.000 orang penduduk dilayani 6 orang polisi pamong praja maka indeks rasio sebesar 5.85. Sedangkan data tahun 2018 jumlah

linmas sebanyak 3.996 yang tersebar di 133 desa menghasilkan Indeks rasio 81.86 dengan estimasi rata-rata per 10.000 penduduk dilayani oleh 82 orang linmas.

#### 6) Urusan Sosial

Urusan Bidang Sosial digambarkan melalui kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara umum, keragaan kemiskinan dan pencapaian SPM bidang social. Persentase PMKS yang mendapat perlindungan social dengan target kinerja 85%, sarana sosial seperti panti asuhan dengan target kinerja 3 unit. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 70% dan persentase penanganan PMKS dengan target kinerja sebesar 70% telah mencapai target yang ditetapkan ditahun 2018 dengan mengacu pada target SPM bidang social sampai tahun 2021.

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan PMKS di kabupaten Tabanan masih terkait dengan tingginya jumlah masyarakat miskin dan PMKS. Penanganan fakir miskin mendapatkan prioritas yang dominan dengan persentase sebanyak 75,15%, sedangkan penanganan terendah adalah gelandangan dan anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 0,004%. Kondisi kemiskinan masyarakat Kabupaten tabanan sesuai dengan data statistik pada tahun 2018 sebesar 4,46% termasuk telah melampaui dari target kerak-kerak batas kemiskinan 5,0% dan juga telah melampaui dari target RPJMD untuk tahun 2018 sebesar 5,25%.

#### b. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

##### 1) Urusan Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memfasilitasi pencari kerja melalui bursa kerja *online* dan pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Dari data yang di himpun pada tahun 2018, sebanyak 602 pencari kerja, 512 atau 85,02 persen diantaranya telah berhasil ditempatkan pada sektor formal (hotel dan restoran). Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat umum juga terus dilakukan di Lembaga Latihan Kerja (LLK) Meliling melalui bantuan progam dari pemerintah pusat.

## 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja ini dibuktikan dengan ditetapkannya Tabanan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama pada Tahun 2018 dan pada tahun yang sama berhasil meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya.

## 3) Urusan Pangan

Kondisi urusan pangan sampai tahun 2018 belum pernah mengalami kekurangan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan, dilakukan dengan menjaga ketersediaan dan kestabilan stok pangan untuk 2 tahun kedepan. Untuk menjaga ketersediaan pangan tambahan seperti sayur mayur, buah tomat, cabe dan pangan yang lainnya diupayakan dengan mengoptimalkan pemberdayaan pekarangan pangan yang dikerjakan langsung masyarakat. Untuk itu pengelolaan lahan pekarangan, akan terus dioptimalkan agar bisa bermanfaat dan berdaya guna selaras dengan mengembangkan usaha pertanian secara intensif dan efisien.

## 4) Urusan Pertanahan

Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sering diistilahkan sertifikasi tanah, dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah yang memicu sengketa atas lahan. Program ini adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan serentak serta meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam satu wilayah (desa/kelurahan) sehingga nantinya akan memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan secara bertahap di Kabupaten Tabanan dimana Kabupaten Tabanan mendapat target 67.000 bidang yang disertifikasi. Sampai dengan awal 2019 telah 32.000 bidang telah menjadi sertifikat hak milik baik perseorangan maupun desa pakraman. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama dari Badan Pertanahan Nasional, masyarakat, Perbekel dan Camat.

#### 5) Urusan Lingkungan Hidup

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian. Tercatat sebesar 52,96 persen kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tabanan masih perlu mendapat perhatian terutama untuk RTH Publik seperti taman kota yang representatif masih sangat kurang.

Fenomena yang menjadi permasalahan hampir di seluruh kabupaten/kota yaitu pengelolaan limbah padat atau sampah. Pengelolaan persampahan pada TPA hanya akan menjadi bom waktu jika tidak ditangani dengan tepat dan menyeluruh. Hal inilah yang mendasari dibutuhkannya penanganan dari hulu sampai hilir yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Di samping dukungan infrastruktur dibutuhkan juga dukungan *soft component* yang mencakup peraturan pendukung, sistem layanan dan pemberdayaan masyarakat. Pada komponen lainnya, Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tabanan tahun 2018 menunjukkan penurunan pada kualitas air pada sungai dan danau.

#### 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana perencanaan pembangunan itu sendiri akan di capai, akan menjadi pekerjaan besar yang akan diwujudkan.

Penataan dan penertiban agregat dokumen/data kependudukan melalui salah satu pelayanan e-KTP telah dilaksanakan serentak di 10 kecamatan. Pada tahun 2018 di kabupaten Tabanan, sebanyak 245.476 penduduk telah memiliki KTP dari 366.031 penduduk yang wajib memiliki KTP, atau dengan persentase kepemilikan KTP sebesar 67.06%. Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk kabupaten Tabanan sebesar 29,87% dan kepemilikan Akta Perkawinan sebesar 18.23%.

#### 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengoptimalkan Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa maka langkah-langkah yang telah dilakukan adalah mendorong jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUMDes, mendorong desa untuk

berprestasi, dan mendorong desa untuk memiliki kinerja keuangan yang baik. Kabupaten Tabanan terdiri dari 133 desa, dalam pengembangan upaya kemandirian ekonomi, pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pemanfaatan potensi desa sebagai *core business*. BUMDes telah dibantu pemerintah Kabupaten Tabanan melalui penganggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sejumlah 50 BUMDes di 10 kecamatan dengan *core business* pengolahan hasil pertanian antara lain pengolahan kopi, kelapa, ikan, krupuk dan lain-lain.

#### 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tabanan dilaksanakan untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan intervensi yang berdampak pada perubahan kualitas dan kuantitas penduduk seperti perbaikan kompetensi, perubahan jumlah, struktur, komposisi persebaran yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dinamika kependudukan di Tabanan saat ini telah memasuki *fase* yang sangat krusial, yaitu *fase window of opportunity* (jendela peluang) yang memberi peluang untuk mendapatkan bonus demografi. Tahap *windows of opportunity* ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendah dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Kondisi ini disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif dibanding tidak produktif, yang artinya penduduk usia produktif menanggung sedikit penduduk tidak produktif.

Kebijakan untuk merespon kondisi ini dilakukan dengan pengendalian kuantitas penduduk agar bonus demografi dapat bertahan lebih lama dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar dan upaya penyediaan lapangan kerja.

#### 9) Urusan Perhubungan

Sektor perhubungan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan selain dapat memperlancar arus barang dan jasa serta angkutan penumpang, juga meningkatkan produktifitas kerja

dan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terisolir serta menunjang pertumbuhan dan percepatan pengembangan sektor lainnya. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan juga bertujuan untuk menciptakan transportasi yang berkeselamatan.

Prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Tabanan secara garis besar terdiri dari prasarana transportasi darat seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2.8  
Jenis dan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan  
Tahun 2015 – 2017

No.	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Mobil Penumpang			
	Sedan	170	170	155
	Suburban	1	0	0
	Microlet	111	123	114
	Latihan mengemudi	2	2	2
	Angkutan pariwisata	517	488	290
	Jumlah	801	783	561
2	Mobil Bus			
	Micro Bis Umum	99	95	117
	Micro Bis tidak Umum	2	5	17
	Bis Umum	136	141	108
	Bis Tidak Umum	6	5	5
	Jumlah	243	246	247
	Total angkutan penumpang umum	1.044	1.029	808
3	Mobil Barang			
	Pick-up umum			0
	Pick-up tidak umum	7.082	6.956	6.602
	Truk ringan umum	297	304	275
	Truk ringan tidak umum	594	583	549
	Truk sedang umum	1.665	1.464	1.409
	Truk sedang tidak umum	276	288	307
	Truk berat umum	314	315	282
	Truk berat tidak umum	11	10	11
	Tangki umum	25	21	25
	Tangki tidak umum	0	2	2
	Kereta tempelan	1	1	1
	Total angkutan barang	10.265	9.944	9.463

Sumber : BPS Tabanan Dalam Angka Tahun 2018

Jenis kendaraan yang wajib uji oleh Dinas Perhubungan adalah mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang. Dari ketiga jenis kendaraan tersebut, hanya jenis mobil bis yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan wajib uji dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Sedangkan untuk jumlah jenis mobil barang yang diuji mengalami penurunan sebesar 4,84% dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Secara umum, jumlah jenis mobil penumpang yang diuji mengalami penurunan, tapi jika dilihat secara rinci jenis mobil penumpang microlet mengalami kenaikan jumlah. Itu berarti transportasi untuk penumpang mulai diminati

Sedangkan untuk pemerataan transportasi khususnya untuk angkutan siswa, Kabupaten Tabanan telah mengembangkan angkutan siswa Trans SERASI, yang mulai dioperasikan pada tahun 2014. Cakupan layanan Trans Serasi meliputi 7 Kecamatan dengan jumlah armada 80 kendaraan kecil (MPU), 63 Bus Kecil dan 3 Bus Sedang.



Gambar 2.24 Armada Trans Serasi

Adapun armada yang telah dioperasikan tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.  
Jumlah Armada Trans SERASI dan Siswa yang terangkut  
Tahun 2015 – 2017

Tahun	Jumlah Kecamatan yang dilayani	Jumlah Armada	Siswa yang terangkut
2014	1	57 armada angkutan kota	
2015	1	70 armada angkutan kota	
2016	4	80 armada angkutan kota, 3 bus sedang, 4 bus kecil;	
2017	7	80 armada angkutan kota , 60 bus kecil, 3 bus sedang;	
2018	7	80 armada angkutan kota (MPU), 63 bus kecil dan 3 bus sedang.	

#### 10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mewujudkan Tabanan Smart City pemerintah Kabupaten Tabanan telah membangun pusat pelayanan pemerintah secara virtual yaitu Tabanan Command Center (TCC).

TCC saat ini telah mengelola 51 website, mengelola 15 server 10 perangkat aktif, 3 Km FO mandiri, 1 wifi corner dan 16 aplikasi seperti smart-goverment, *e-planning*, e-buggeting, LPSE, SIMDA, SIM BPHTB, SIMPEG Kepegawaian, Bank Data, Sistem Pendataan Perusahaan, Sirep, e-Sakip, e-SPTPD, Sistem Uji Kir, Sistem Informasi Investasi, e-JDIH dan Info Harga Pasar. Selain itu terdapat pula aplikasi pelayanan seperti pelayanan Kependudukan dan catatan Sipil “De PAON”



Gambar 2.25 Tabanan Command Center (TCC)

#### 11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan wadah ekonomi kerakyatan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk mendorong koperasi menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Saat ini koperasi di Tabanan berjumlah 568 koperasi, dari jumlah tersebut 77,28 persen dalam kondisi aktif dari jumlah tersebut 6,8 persen merupakan koperasi yang bergerak dari sektor riil sisanya 22,72 tidak aktif.



Gambar 2.26 Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

#### 12) Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Penanaman modal atau investasi baik PMDN dan PMA, akan berdampak positif

yang berkontribusi pada terciptanya lapangan kerja baru dan berkaitan langsung terhadap daya serap tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2018 Kabupaten Tabanan menjadi alokasi investasi untuk proyek PMDN/PMA sebanyak 179 buah. Dari jumlah tersebut PMDN sebanyak 153 dengan nilai investasi sebesar Rp. 12,060 triliun, Sedangkan PMA sebanyak 26 buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,616 triliun. Untuk lebih merangsang investor dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Tabanan, perlu diupayakan kemudah-kemudahan iklim berinvestasi seperti kemudahan dan kenyamanan dalam perijinan, pemanfaatan tata ruang dan mengurangi pungutan-pungutan liar yang dibebankan kepada pemodal.

### 13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terdapat 10 organisasi kepemudaan di Kabupaten Tabanan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan Tabanan melalui kegiatan sosial. Sementara dibidang olahraga, Kabupaten Tabanan berhasil membina atlet sehingga mampu menorehkan prestasi diberbagai cabang olahraga baik ditingkat provinsi, nasional dan internasional antara lain cabang olahraga *woodball*, judo, silat, bulutangkis dan vovinam. Selain itu, Tahun 2018 Tabanan dipercaya sebagai penyelenggara Asian *Vovinam Championship* yang diikuti 16 negara.



Gambar 2.27 Penyelenggara 4th Asian Vovinam Championship 2018 dan Peraih Medali Emas Asian Games

### 14) Kebudayaan

Budaya sangat erat kaitanya pariwisata di Tabanan. Selain melestarikan budaya melalui pariwisata alam, pelestarian budaya dilakukan melalui pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yaitu parade dan pementasan dari sekaa kesenian yang ada di masing-masing

sekaa. Sarana parasma pendukung yang dimiliki seperti Gedung Kesenian I Ketut Maria dan pembangunan Stage Garuda Wisnu Kencana (GWS).



Gambar 2.28 Gedung Kesenian I Ketut Maria dan Garuda Wisnu Serasi

#### 15) Perpustakaan

Perpustakaan Umum mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Program kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan untuk menunjang Perpustakaan adalah melalui program e-perpustakaan dan perpustakaan keliling.



Gambar 2.29 e-Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling

#### c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

##### 1) Pariwisata

Sebagai salah satu destinasi wisata Bali, Tabanan memiliki beberapa beberapa DTW andalan seperti Tanah Lot, Danau

Beratan, Warisan Budaya Dunia Jatiluwih, Alas Kedaton dan beberapa lainnya. Target kunjungan wisata di Tabanan sebesar 3 juta wisatawan baik domestik maupun manca negara. Pada tahun 2018 tingkat kunjungan wisatawan di Tabanan sebesar 3,5 juta wisatawan meningkat dari tahun sebelumnya dan tahun 2019 ditarget meningkat 5 persen. Dari capaian tersebut sektor ini memberikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar 24,71%, menurun 1,8% dari tahun sebelumnya. Kontribusi ini tentunya dapat ditingkatkan lagi jika rata-rata lama tinggal mampu ditingkatkan dengan menyediakan sarana dan prasarana akomodasi yang sesuai dengan aktivitas pariwisata di Tabanan.

## 2) Pertanian

Sektor pertanian/perkebunan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tabanan yakni sebesar 22,54 persen. Dalam sektor ini ada 2 komunitas yang dihandalkan yaitu dari lahan basah dan perkebunan. Dari kedua sektor tersebut lebih banyak dari sektor perkebunan. Petani masih menjual produk pertanian dalam bentuk bahan baku, dan sedikit yang mengusahakan dalam bentuk pengolahan bahan baku, sehingga *edit valuenya* masih rendah. Untuk melestarikan Tabanan sebagai Lumbung Pangan Bali diperlukan usaha-usaha inovatif untuk menggarap mulai dari sektor hulu, tengah dan sektor hilir sehingga pertanian tetap menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tabanan.

## 3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Hingga tahun 2016 rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 111.380 Rumah Tangga atau 100 persen terdiri dari 34.711 Rumah tangga dengan daya 450 watt, 39.963 Rumah Tangga dengan daya 900 watt, 28.618 Rumah Tangga dengan daya 1.300 watt dan 5.890 Rumah Tangga dengan daya 2.200 watt sedangkan Rumah Tangga dengan daya diatas 2.200 watt sebanyak 2.198. Rasio ketersediaan listrik di Tabanan sebesar 100 persen yaitu seluruh wilayah di Kabupaten Tabanan sudah terjangkau aliran listrik.

#### 4) Perdagangan

Menghadapi pasar global (MEA) diperlukan kesiapan pemerintah baik tatanan mikro yang berkaitan dengan kelembagaan pelaksanaan ekspor maupun tatanan makro yang berkaitan dengan kebijakan daerah dalam mendorong ekspor produk daerah. Produk ekspor yang diminati di manca negara antara lain furniture, kerajinan dari logam/besi, keramik, gerabah, garment, rajutan, rumah jadi dari kayu, ikan lobster/salmon, kopi, manggis, kakao eine dan kerajinan UMKM lainnya. Pada tahun 2018 nilai ekspor kabupaten Tabanan sebesar Rp. 75.683.942.789. sementara import yang masuk ke Tabanan hanya berupa mesin dan barang untuk produksi.

#### 5) Perindustrian

Kontribusi sektor sekunder berupa industri pengolahan di Kabupaten Tabanan tergolong rendah. Sektor ini menyumbang kontribusi dari lapangan usaha ini sebesar 5,73%. Cakupan kelompok pengerajin dalam bidang ini, terdiri dari pengerajin Kayu, industri pengolahan besi/ tempat lilin, serta industri keramik/ gerabah. Masih banyak peluang dapat dikembangkan industri di Bidang Pertanian dan Pariwisata. Untuk itu perlu digali jenis – jenis usaha dan industri yang mendukung pengembangan pertanian dan pariwisata, seperti industri pabrik pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung pariwisata.

#### 6) Kelautan dan Perikanan

Dengan garis pantai 30.177 Km<sup>2</sup> Kabupaten Tabanan memiliki potensi disektor kelautan dan perikanan. Tahun 2018 produksi perikanan Tabanan sebesar 4.194,30 ton meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Tabanan sebesar 105.

### d. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1) Perencanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Dalam kurun tiga tahun terakhir (2016-2017) Kabupaten Tabanan telah meraih penghargaan peerencanaan terbaik se-Bali sedangkan pada tingkat nasional Kabupaten Tabanan meraih Anugerah Pangripta Nusantara tahun 2017 dan masuk 10 besar Penghargaan Pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2019.



Penghargaan Penghargaan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2017 dan 2019

## 2) Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Tabanan meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Silpa, laoran Operasional, Laporan Arus Kas dan Laoran perubahan ekuitas serta CaLK. Atas dasar hal tersebut BPK memberikan opini atas pengelolaan Keuangan kabupaten Tabanan Wajar tanpa Pengecualian secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2018.



Penghargaan Opini WTP 5 Kali Berturut Turut dari Kementerian  
Keuangan RI

Persentase Silpa Tahun 2018 sebesar 6,4 persen, tingginya silpa disebabkan terdapat efisiensi terhadap beberapa kegiatan. Sementara proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 54 : 46 ini menunjukkan belanja daerah fokus pada pendanaan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.

2.2.1. Realisasi RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMDSE	2016		2017		2018	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Pertumbuhan PDRB	6,15	6,25	6,14	6,45	5,38	6,55	na
2	Laju Inflasi	2,75	2,75		2,75		2,75	na
3	PDRB Perkapita Harga Berlaku (Jt/Th)	38,76	40,12	42,55	45	46,6	50	na
4	Indek Gini	0,34	0,33	0,34	0,3	0,31	0,28	0,32
5	IPM	73,54	73,77	74,19	74,84	74,86		na
	Fokus Kesejahteraan Sosial							
	Sosial							
1	Persentase Penduduk Miskin	5,61	5,61	5	5,5	4,92	5,25	4,46
2	Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus/10.000 Penduduk)	3	3	5	2	4	2	na
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Aspek Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,4	8,4	8,1	8,45	8,43	8,5	8,43

2	Angka Melek Huruf	96	96,10	93,88	96,15	94	96,15	93,32
	<i>Angka Partispasi Kasar (APK)</i>							
1	SD/MI/Paket A	105,08	105,3	103,54	105,7	106,25	106	105,8
2	SMP/MTs/Paket B	104,76	105	99,51	105,1	98,88	105,4	106,66
	<i>Angka Kelulusan</i>							
1	SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs/Paket B	99,98	100	100	100	100	100	100
	<i>Angka Partispasi Murni (APM)</i>							
1	SD/MI/Paket A	91,09	91,1	97,61	91,1	96,26	91,3	94,54
2	SMP/MTs/Paket B	77,05	77,1	91,99	77,1	92,38	77,3	81,05
	<i>Pendidikan Dasar</i>							
1	Angka Partispasi Sekolah	94,41	94,41	103,96	97,5	106,42	98,5	108,08
2	Rasio Ketersediaan (Sek/10.000 pddk)	2,5	2,5	3,7	3	3,7	3	3,7
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:13	1:13
4	Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata (Guru/Kls/10.000 pddk)	1:35	1:35	1:36	1:35	1:36	1:35	1:36
	<i>Pendidikan Menengah</i>							
1	Angka Partispasi Sekolah	65,50	65,50	62,4	69	62,16	74,5	
2	Rasio Ketersediaan (Sek/10.000 pddk)	0,50	0,50		0,50		1	
3	Rasio Guru Terhadap Murid (Guru/Murid)	1:10	1:10		1:10		1:10	
4	Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata (Guru/Kls/10.000 pddk)	1:35	1:35		1:35		1:35	
5	Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun Melek Huruf	98,00	98,00		98,15		98,70	
	<i>Fasilitas Pendidikan</i>							
1	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal	55	60	80	70	80	75	80
2	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	76	76	77,55	85	78,4	93	79,6
3	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik	85	85		90		95	
	<i>Pendidikan Usia Dini</i>							
1	Pendidikan Usia Dini	50,55	50,55	77,31	53,42	77,34	56,44	77,8
	<i>Angka Putus Sekolah</i>							
1	Angka Putus Sekolah (APS SD/MI) (%)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Angka Putus Sekolah (APS SMP/MTs) (%)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,14
	<i>Angka Kelulusan</i>							
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99	99	100	99,4	100	99,6	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99	99	100	99,4	100	99,6	100
3	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	99,06	99,06	99,06	99,25	100,03	99,4	100,04
4	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	78,6	78,6	82,99	79,6		79,8	
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	75	75	91,6	76	92,54	77	93,29

II	Kesehatan							
1	Pencapaian BOR BRSUD Tabanan sesuai Standar	89,08	100	68,9	80	58,4	80	54,36
2	Tingkat Akreditasi Pelayanan BRSUD Tabanan	Paripurna						
3	Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terakreditasi	10	10	20	10	60	25	20
4	Rasio Posyandu per Satuan Balita ( Bh/ 10.000)	12.00	12.00	18,8	13.00	18,8	13.00	18,7
5	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	2.00	2.00	0,088	3.00	0,093	3.00	0,085
6	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,0016	0,01	0,0018	0,01	0,002
7	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Bh/10.000)	2	2	2,9	3	3	3	3,1
8	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	4.00	4.00	3	4.00	3,6	5.00	3,9
9	Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	90.00	90.00	94	92.00	93,1	92.00	92,4
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebinaan (%)	40	40	94,4	50	92,1	60	93,6
11	Cakupan Desa Kelurahan UCI (%)	92	92	100	94	100	96	100
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100	100	100
14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit BDB (%)	100	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	90,8	90,8	94	91	90,7	91,5	103,2
17	Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan Puskesmas (%)	90	90	75	92	75	92	70
18	Meningkatnya Cakupan Rawat Inap Puskesmas (%)	20	20	25	20	25	30	30
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Rasio Tempat Ibadah (Bh/ 1.000 Penduduk)	4	4		4		4	
2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) (Ton/1.000 Orang	0,2	0,2		0,2		0,2	
3	Penyusunan Norma, Standar Pedoman dan Manual (NSPM) Buah	2	2		4		6	
4	Rasio Pemukiman Layak Huni ( M2 / KM2)	10	10		10		10	
5	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	30	30	30	35	30	40	30
6	Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan (%)	5	5		10		12	
7	Jumlah Kawasan Strategis yang mampu	9	9	0	21	0	25	0

	berkembang							
8	Ketahanan terhadap RTRW (%)	72	72	70	74	73	76	75
9	Luas Wilayah Produktif (%)	80	80		80		80	
10	Luas Wilayah Industri (%)	30	30		30		30	
11	Luas Wilayah Kebanjiran (%)	5	5		5		5	
12	Luas Wilayah Kekeringan (%)	5	5		5		5	
13	Luas Wilayah Perkotaan (%)	10	10	10	10	10	10	10
14	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kondisi sarana prasarana Infrastruktur jalan yang menghubungkan Pusat Pertumbuhan	N/A	N/A		Sedang		Sedang	
15	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	24	24	61,07	39	61,37	53	76,82
16	Panjang Jalan dilalui Roda Empat (KM per orang)	200	200	200	210	210	220	220
17	Jalan Penghubung Kabupaten dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman (KM) Penduduk (Minimal dilalui roda Empat	100,36	100,36	100,36	100,3	100,3	100,36	100,36
18	Jumlah Aset Irigasi (DI)	15	15	24	37	40	37	23
19	Jumlah Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	80	80	65,48	85	66,82	85	68,16
	Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Tingkat Pencapaian Komponen komponen SPM Bidang Keciptakaryaan	9 SPM belum tercapai sesuai target	9 SPM belum tercapai sesuai target		9 SPM belum tercapai sesuai target		9 SPM sudah mencapai target	
2	Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	40	40	69,54	50	71,90	60	85,25
3	Rumah Tangga pengguna Listrik (%)	40	40		45		56	
4	Rumah Tangga bersanitasi (Bh/1000 Pddk)	6	6	5	6	5	6	5
5	Lingkungan Permukiman Kumuh	20	20	33,27	20	12,52	18	8,05
6	Rumah Layak Huni (Orang/ 1000 Penduduk	600	600	200	650	365	675	642
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten (%)	80	80		85		90	
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (%)	60	60		70		75	
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) (%)	30	30	30	35	35	40	40
	Sosial							
1	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan	70	75		80		85	
2	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi (Buah)	3	3		3		3	

3	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (%)	70	70		70		70	
4	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	70	70		70		70	
Ketenagakerjaan								
1	Persentase Pengangguran	2,25	2,15	1,73	2,05	1,79	2	1,43
2	Rasio Penduduk yang bekerja							
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	10	10		10	4,42	10	0,54
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	90	90		90		90	
3	Rasio KDRT (%)	10	10	0,05	9	0,06	8	0,02
4	Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur (%)	30	30		29		18	
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60	60		60	99,5	60	98,94
6	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindakan Kekerasan (%)	10	10	52	9	64	8	25
Pangan								
1	Regulasi Ketahanan Pangan (Buah)	2	2	0	2	2	2	0
2	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100	100		100		100	
3	Indeks Pertanaman Padi (IP Padi) (%)	152,16	152,16		152,16		152,16	
Lingkungan Hidup								
1	Persentase penanganan sampah (%)	90	90	60	90	60	90	60
2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	90	90	0	90	0	90	0
3	Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)	80	80	0	80	0	80	0
4	Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	70	70	0	70	0	70	0
5	Pencemaran status mutu air (%)	70	70	0	70	70	70	48
6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	60	60	0	80	0	70	0
7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	70	70	43	70	57	70	75
8	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (buah/1000)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	Penegakan hukum lingkungan (%)	60	60	0	60	0	70	0
10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)	1,39	1,39	0	1,5	0	1,62	0
11	Kerusakan kawasan hutan ( kawasan)	0,42	0,42	0	0,4	0	0,38	0
Kependudukan dan Catatan Sipil								
1	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	31,8	31,8	12,46	33,5	14,41	34,5	18,24

2	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian(%)	1,1	1,1	36,22	1	45,29	0,5	52,59
3	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Pengakuan,Pengangkatn dan Pengesahan Anak (%)	0,1	0,1	100	0,2	100	0,5	100
Pemberdayaan Masyarakat Desa								
1	Persentase Bumdes yang produknnya mampu diserap BUMD (%)	n.a	n.a		18		30	
2	Persentase desa dengan pelayanan baik	n.a	n.a		30		50	
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (kelompok)	14	14		14		14	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga (org)	4	4	3	4	3	4	3
2	Rasio akseptor KB(%)	60	60	70	60	70	60	80
3	Cakupan peserta KB aktif(%)	70	70	70	70	70	70	80
4	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I (%)	60	60	50	60	50	60	50
Perhubungan								
1	Perolehan penghargaan WTN	1	1	1	1	1	1	
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum (buah)	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42
3	rasio Ijin trayek (buah/org)	427	427	427	427	436	427	507
4	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	11,118	11,118	11234	11,118	10027	11,118	9.912
5	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis (buah)	3	3	3	3	3	3	3
6	Angkutan Darat (buah)	351,178	351,178	359.205	351,18	359.201	351,18	359.201
7	Kepemilikan Kir Angkutan umum	1036	1036	1036	1036	1032	1036	1032
8	Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum (ribu Rp.)	77	77	77	77	77	77	86
Komunikasi dan Informatika								
1	Jumlah wartel/warnet (buah/10.000 penduduk)	1	1		1	5	1	5
2	Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)	5	5		5	26	5	26
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (kali)	5	5		5	6	5	6
4	Pameran/Expo (kali)	2	2	1	2	1	2	1
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
1	Jumlah koperasi Sehat yang jenis usaha utamanya bukan simpan pinjam	3 (koperasi)	4 (koperasi)		5 (koperasi)		6 (koperasi)	
Penanaman Modal								
1	Jumlah Investor PMDN	563	687		700		712	
2	Jumlah Investor PMA	17	11		12		13	
Kepemudaan dan Olah Raga								
1	Jumlah organisasi pemuda (buah)	114	114		114		114	
2	Jumlah organisasi olah raga (buah)	30	30		30		30	

3	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	28	28		28		28	
4	Jumlah kegiatan olah raga (kali)	50	50		50		50	
5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (buah/penduduk)	0,001	0,001		0,001		0,001	
6	Lapangan olahraga (buah/penduduk)	0,004	0,004		0,004		0,004	
	Statistik							
1	Buku "Kabupaten dalam angka" (buah)	1	1	1	1	1	1	1
2	Buku "PDRB Kabupaten" (buah)	1	1	0	1	0	1	0
	Kebudayaan							
1	Jumlah Grup Kesenian yang representatif	1,175	1,175	1.045	1.175	1.045	1.175	1.045
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0	1	1
3	Jumlah Klub Olahraga	10	10		10		10	
4	Jumlah Gedung Olahraga yang representatif	1	1		3		5	
	Perpustakaan							
1	Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan	6	6	17	8	25	10	27
2	Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan (orang)	5	5	10	7	11	9	8
3	Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas (orang)	1,335	1,335	26.600	1,816	32.160	2,332	0
	Kearsipan							
1	Pengelolaan arsip secara buku (buah)	10	10	0	10	0	10	1
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Buah)	28	28	0	28	0	28	203
	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan (%) ton	1.648,80	4.766,60	3.618,70	#####		#####	4.194,30
2	Konsumsi Ikan (%) kg/kapita/tahun	19,3	30	29,6	31	29,9	31	30,6
3	Cakupan Bina Kelompok budidaya Ikan (%)	131	146	152	163	169	183	175
	Pariwisata							
1	Jumlah destinasi wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun		3 Obyek Wisata (Tanah Lot, Ulun Danau, Kebun Raya Eka	4	5		5	
2	Kunjungan wisata (%)	5	5		10		10	
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	19	16		18		18	
4	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah)	31	31		31		31	
5	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah)	63	63		63		63	
	Pertanian							
1	Nilai Tukar Petani	<100	<100		>100		>100	
2	Luas lahan pertanian yang menerapkan sistem	1450 ha	1757 ha		2257 ha		2257 ha	
3	Produktifitas Padi (Ton)/hektar	55	55		55		56	
4	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	33	33		33	22,67	33	22,55

5	Cakupan bina kelompok petani (%)	10	10		10		10	
	Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase jumlah Desa Berlistrik (%)	87	87		92		97	
2	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	50	50		55		60	
3	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	50	50		55		60	
	Perdagangan							
1	Jumlah IKM	752	825	805	864	878	903	938
2	Tenaga Kerja	6382	4846	6838	4412	7606	3978	8074
3	Nilai Investasi (Rp 000.000)	345	460	493	520	542	580	590
4	Nilai Produksi (Rp.000.000)	511	540	536	570	567	600	569
	Perindustrian							
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	14,63	23,14 - 2394		23,68 - 24,63		23,87 - 25,08	
2	Pertumbuhan Industri (UKM)	77,808	77,9		77,9		78	
3	Pertumbuhan Industri IKM	11,905	12,084		12,084		12,259	
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	37,7	25		6,14		50	
	Perencanaan							
1	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP (%)	91,7	91,7		91,85		91,9	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA (Buah)	1	1		1		1	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA ( Buah)	1	1		2		3	
	Sekretariat Daerah							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)	13,13	13,97		13,97		14,85	
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	8,01	8,01		8,01		8,7	
3	Produktivitas total daerah	40,86	44,72		44,72		48,87	
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	4	5		5		5	
5	Jumlah Nasabah Jamkrida	5759	6000		6000		7000	
6	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	43	43		43		43	

### 2.2.2. Realisasi Program dan Kegiatan RKPDP Tahun 2018 dan Tahun 2019

Evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPDP Tahun 2018 dilakukan berdasarkan ketercapaian target aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah pada Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagai berikut :

#### A. Pendidikan

Kriteria pengukuran kinerja yang digunakan adalah target indikator kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan setiap tahunnya.

Setiap akhir tahun, target kinerja (*performance plan*) ini akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*) sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak berhasilan, jika ada, dan selanjutnya terdapat kekurangan yang akan terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvenen*). Tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan sesuai Renstra, Renja terdapat 15 (lima belas) program dengan total dana Rp. 101.835.257.147,16 realisasi sebesar Rp. 94.803.304.456,56 (93,09%) :

1. Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM. Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kabupaten Tabanan dengan indicator Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM dengan target 21,41%

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Persentase SD/MI yang memenuhi SPM tahun 2018 sebesar 0,62%, sehingga Tingkat capaian indikator kinerja Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM tahun 2018 sebesar 2,83% (*Realisasi* Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM 0,62% *dibagi Target* Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM 21,41% = 2,83%) ini berarti capaian indikator kinerja belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100,00% hasilnya yaitu 2,83%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari : Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/MI, Olimpiade SD, Dana Pendidikan SD, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan SD, O2SN SD dan FLS2N SD, regroping SD. Sekolah dinyatakan sudah memenuhi SPM apabila 27 indikator SPM telah dipenuhi. Dari 27 indikator SPM beberapa sekolah ada yang sebageian sudah terpenuhi ada yang belum hal ini disebabkan oleh:

- SPM yang harus dipenuhi oleh SD/MI sebanyak 27 indikator, dimana salah satu dari 27 indikator tidak dipenuhi berarti sekolah tersebut belum memenuhi SPM secara utuh.
- kurangnya komitmen terhadap upaya pemenuhan SPM.
- Banyaknya jumlah sekolah dan Keterbatasan dana dalam mendukung pencapaian SPM.
- perlunya ada kebijakan untuk mempercepat pencapaian SPM.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a.** Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/MI, jumlah anggaran Rp. 670.000.000,00 realisasi Rp. 564.676.000,00 (84,28%) kegiatan ini sudah berjalan sampai penyelenggaraan ujian akhir sekolah dengan prosentase kelulusan siswa 100%.
- b.** Kegiatan Olimpiade SD, jumlah anggaran Rp. 100.000.000,00 realisasi Rp. 92.946.100,00 (92,95%) kegiatan ini sudah berjalan sampai mulai dari seleksi, pembinaan di tingkat Kabupaten dan mengikuti lomba olimpiade SD di tingkat Provinsi Bali. Hambatan yang ditemui belum optimalnya hasil lomba olimpiade, solusi yang ditempuh meningkatkan peran guru di sekolah dan guru pembina olimpiade dalam membimbing siswa, dan meningkatkan besaran hadiah yang diberikan ke siswa yang berprestasi sehingga memotivasi siswa untuk berprestasi.
- c.** Kegiatan Dana Pendidikan SD, jumlah anggaran Rp 0 realisasi Rp. 0 kegiatan ini merupakan dana estimasi atau dana bantuan pemerintah pusat yang langsung kesekolah. Hambatan yang ditemui tidak adanya kepastian jumlah bantuan pemerintah pusat yang langsung ke sekolah sehingga sulit dalam perencanaan anggaran, solusi yang ditempuh menghimbau kepada sekolah agar selalu menginformasikan ke dinas pendidikan kabupaten setiap ada bantuan yang diterima.
- d.** Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan SD, jumlah anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi Rp. 31.500.000,00 (90,00%) kegiatan ini sudah berjalan sampai pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan di SD baik menyangkut siswa, guru, kurikulum dan proses belajar mengajar, sarana dan prasarana pembelajaran. Hambatan yang ditemui masih terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, solusi yang ditempuh mengusulkan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran.

- e. Kegiatan O2SN SD dan FLS2N SD, jumlah anggaran Rp. 100.000.000,00 realisasi Rp. 74.878.000,00 (74,88%) kegiatan ini sudah berjalan sampai mulai dari seleksi, pembinaan di tingkat Kabupaten dan mengikuti lomba O2SN SD dan FLS2N SD di tingkat Provinsi Bali. Peserta yang diseleksi dalam OSN-SD sebanyak 120 siswa (60 siswa bidang studi matematika dan 60 siswa bidang studi IPA) seleksi tingkat Kabupaten menentukan masing-masing 3 (tiga) orang peserta didik pada tiap mata pelajaran ( matematika dan IPA). Yang lolos sebagai peserta tingkat nasional yaitu Calebio Immanuel Stanpo dari SD Saraswati Tabanan matapelajaran matematika. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD terdiri dari empat jenis bidang lomba : Lomba Menyanyi Tunggal, Seni Tari, Pantomim, Gambar Bercerita. Peserta yang mewakili kabupaten ketingkat provinsi menyanyi tunggal peringkat II, Seni Tari peringkat VII, Pantomim peringkat VII, dan Gambar Bercerita peringkat IV. Hambatan yang ditemui belum optimalnya hasil lomba O2SN SD dan FLS2N SD, solusi yang ditempuh meningkatkan peran guru di sekolah dan guru pembina O2SN SD dan FLS2N SD dalam membimbing siswa, dan meningkatkan besaran hadiah yang diberikan ke siswa yang berprestasi sehingga memotivasi siswa untuk berprestasi.
- f. Kegiatan Regrouping SD, jumlah anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi Rp. 35.000.000,00 (100%) kegiatan ini sudah berjalan sampai penetapan sekolah yang diregrouping sebanyak 4 sekolah dasar yaitu SD N 3 Dajan Peken, SD N 5 Dajan Peken gabung ke SD N 2 Dajan Peken. SD N 5 Abiantuwung gabung ke SD N 1 Abiantuwung. SD N 5 Penatahan gabung ke SD N 1 Penatahan. dengan tujuan

efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan sekolah SD yang diregrouping dimanfaatkan untuk penambahan SMP baru yaitu SMP N 6 Tabanan dan SMP N 5 Kediri guna memenuhi daya tampung siswa.

2. Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah Menengah Pertama, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM. Jumlah SMP/MTs yang memenuhi semua indikator SPM sebanyak 0 sekolah. Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kabupaten Tabanan dengan indikator Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM dengan target 20,93% Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Persentase SMP/MTs yang memenuhi SPM tahun 2018 sebesar 0,00%, sehingga Tingkat capaian indikator kinerja Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM tahun 2018 sebesar 0,00% (*Realisasi Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM 0,00% dibagi Target Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan pendidikan Sesuai SPM 20,93% = 0,00%*) ini berarti capaian indikator kinerja belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100,00% hasilnya yaitu 0,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari : Kegiatan Penyelenggaraan UAS SMP/MTs, Olimpiade SMP, Ujian Nasional Tingkat SMP, Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP, Dana Pendidikan SMP, Diklat Kurikulum 2013 SMP, O2SN SMP dan FL2SN SMP, Penyelenggaraan Pendidikan SMP N 6 Tabanan, Penyelenggaraan Pendidikan SMP N 5 Kediri. Sekolah dinyatakan sudah memenuhi SPM apabila 27 indikator SPM telah dipenuhi. Dari 27 indikator SPM beberapa sekolah SMP/MTs ada yang sebagaimana sudah terpenuhi ada yang belum hal ini disebabkan oleh:

- SPM yang harus dipenuhi oleh SMP/MTs sebanyak 27 indikator, dimana salah satu dari 27 indikator tidak dipenuhi berarti sekolah tersebut belum memenuhi SPM secara utuh.
  - kurangnya komitmen terhadap upaya pemenuhan SPM.
  - Banyaknya jumlah sekolah dan Keterbatasan dana dalam mendukung pencapaian SPM.
  - perlunya ada kebijakan untuk mempercepat pencapaian SPM.
- Kegiatan yang dilaksanakan:
- a. Kegiatan Penyelenggaraan UAS SMP/MTs, jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 43.227.000,00 (86,45%) kegiatan ini sudah berjalan sampai penyelenggaraan ujian akhir sekolah dengan prosentase kelulusan siswa 100%.
  - b. Kegiatan Olimpiade SMP, jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 49.900.100,00 (99,80%) kegiatan ini tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang matematika, IPA, IPS yang berasaskan pendidikan karakter. Tujuan khususnya memotivasi sekolah agar berperan aktif memfasilitasi siswa guna meningkatkan prestasi belajar Matematika, IPA, dan IPS, memetakan kemampuan siswa dalam bidang Matematika, IPA, dan IPS sesuai standar mutu pendidikan secara nasional, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam bidang Matematika, IPA, dan IPS. Kegiatan olimpiade SMP sudah terlaksana mulai seleksi Kabupaten sebanyak 112 siswa ( Matematika 37 Peserta, IPA 38 peserta, IPS 37 peserta) dan 9 siswa mengikuti lomba olimpiade SMP di tingkat Provinsi Bali. Dan 1 (satu) lolos ke tingkat nasional mendapatkan emas mata pelajaran IPS atas nama Tarrania Nur Fasyah siswa SMP N 1 Tabanan. Hambatan yang ditemui belum optimalnya hasil lomba olimpiade, solusi yang ditempuh meningkatkan peran guru di sekolah dan guru pembina olimpiade dalam membimbing siswa, dan meningkatkan besaran hadiah yang diberikan ke siswa yang berprestasi sehingga memotivasi siswa untuk berprestasi.

- c.** Kegiatan Ujian Nasional Tingkat SMP, jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 49.222.500,00 (98,45%) kegiatan ini sudah berjalan sampai penyelenggaraan ujian Nasional Tingkat SMP/MTs negeri dan swasta dengan jumlah peserta sebanyak 6.452 siswa dengan prosentase kelulusan siswa 100%. Hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar pemetaan satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- d.** Kegiatan Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP, jumlah anggaran Rp. 30.000.000,00 realisasi Rp. 30.000.000,00 (100,00%), karya ilmiah remaja adalah suatu ajang kompetisi karya ilmiah yang berbasis kegiatan penelitian siswa SMP/MTs Negeri dan Swasta atau yang sederajat yang dilaksanakan secara nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap inovasi, invensi, dan daya cipta dalam IPTEK, memperkuat ajang komunikasi ilmiah bagi kelompok ilmiah remaja (KIR) sekolah dan KIR antar sekolah. Ruang lingkup KIR mencakup 3 (tiga) bidang ilmu yaitu: Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan dan Seni, Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkungan, Ilmu Pengetahuan Teknik dan Rekayasa. kegiatan ini sudah berjalan sampai mulai dari seleksi, pembinaan di tingkat Kabupaten dan mengikuti lomba karya ilmiah remaja SMP di tingkat Provinsi Bali. Dari tiga bidang yang dikirim ke tingkat nasional, Bidang Ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Seni diwakili oleh SMP N 1 Selemadeg Barat berhasil masuk Final mewakili Bali ke Tingkat Nasional dengan judul “Beban Psikologi Perempuan Bali Dalam Mencari “Sentana”. Hambatan yang ditemui belum optimalnya hasil lomba, solusi yang ditempuh meningkatkan peran guru di sekolah dan guru pembina lomba dalam membimbing siswa, dan meningkatkan besaran hadiah yang diberikan ke siswa yang berprestasi sehingga memotivasi siswa untuk berprestasi.
- e.** Kegiatan Dana Pendidikan SMP, jumlah anggaran Rp 251.088.080,22 realisasi Rp. 250.842.579,86 (99,90%) kegiatan ini merupakan dana estimasi atau dana bantuan

yang dikelola oleh SMP . Hambatan yang ditemui tidak adanya kepastian jumlah bantuan pemerintah pusat yang langsung ke sekolah sehingga sulit dalam perencanaan anggaran, solusi yang ditempuh menghimbau kepada sekolah agar selalu menginformasikan ke dinas pendidikan kabupaten setiap ada bantuan yang diterima.

- f.** Kegiatan Diklat Kurikulum 2013 SMP, jumlah anggaran Rp 80.000.000,00 realisasi Rp. 78.130.000,00 (97,66%) kegiatan ini merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait kurikulum 2013 untuk meningkatkan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum 2013 mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada penilaian. Diklat ini diikuti oleh guru mata pelajaran sebanyak 60 Orang guru se kabupaten Tabanan, pelaksanaan di SMP N 2 Tabanan selama 5 hari dengan narasumber dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten dan LPMP Provinsi Bali.
- g.** Kegiatan O2SN SMP dan FL2SN SMP, jumlah anggaran Rp 150.000.000,00 realisasi Rp. 145.461.400,00 (96,97%) kegiatan ini merupakan kegiatan kegiatan ini sudah berjalan sampai mulai dari seleksi, pembinaan di tingkat Kabupaten dan mengikuti lomba O2SN SMP dan FLS2N SMP di tingkat Provinsi Bali. Hambatan yang ditemui belum optimalnya hasil lomba O2SN SMP dan FLS2N SMP, solusi yang ditempuh meningkatkan peran guru di sekolah dan guru pembina O2SN SMP dan FLS2N SMP dalam membimbing siswa, dan meningkatkan besaran hadiah yang diberikan ke siswa yang berprestasi sehingga memotivasi siswa untuk berprestasi..
- h.** Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMP N 6 Tabanan, jumlah anggaran Rp 105.085.000,00 realisasi Rp. 62.574.920,00 (59,55%) kegiatan ini merupakan kegiatan dana operasional sekolah karena sekolah ini baru berdiri tahun 2018 dalam rangka pemenuhan daya tampung siswa. Hambatan yang ditemui terbatasnya fasilitas sarana prasarana. Solusi yang ditempuh pengadaan dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap.



Tidak tercapainya target kinerja indikator kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan disebabkan oleh :

- Dari jumlah guru yang ada banyak guru non PNS yang belum ber hak menerima sertifikasi.
- Untu guru PNS di sekolah negeri masih banyak yang belum memenuhi syarat sertifikasi terkait dengan masa kerja.  
Kegiatan yang dilaksanakan:

**a.** Kegiatan Diklat dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Pelajar, jumlah anggaran Rp 75.000.000,00 realisasi Rp. 75.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian pelatihan kepada tim penilai Angka Kredit Jabatan Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Pelajar. Sasaran diklat dan penilaian angka kredit jabatan guru, pengawas, penilik dan pamong pelajar sebanyak 40 orang yang berasal dari guru PNS dan kepala sekolah dari jenjang TK, SD, SMP kabupaten Tabanan. Tim melakukan penilaian terhadap guru, pengawas, penilik dan pamong pelajar yang memenuhi syarat untuk naik pangkat melalui angka kredit.

**b.** Kegiatan Olimpiade Guru Nasional (OGN), jumlah anggaran Rp 75.000.000,00 realisasi Rp. 75.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini merupakan kegiatan salah satu sarana peningkatan mutu pendidikan khususnya kompetensi profesional dan pedagogic guru kelas SD dan SMP mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Peserta OGN sebanyak 60 orang ( 30 SD dan 30 SMP) masing-masing mata pelajaran 10 orang. sudah berjalan sampai mulai dari seleksi, pembinaan di tingkat Kabupaten dan mengikuti lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) di tingkat Provinsi Bali. Hambatan yang ditemui belum optimalnya hasil lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN), solusi yang ditempuh meningkatkan kompetensi guru di sekolah serta Kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam membimbing guru, dan meningkatkan besaran hadiah yang diberikan ke guru yang berprestasi sehingga memotivasi guru untuk berprestasi.

- c.** Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah, jumlah anggaran Rp 100.000.000,00 realisasi Rp. 100.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini merupakan kegiatan diklat bagi calon kepala sekolah yang diikuti oleh guru (40 orang) untuk memperoleh sertifikat calon kepala sekolah sebagai syarat seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Diklat calon kepala sekolah ini amanat dari Permendiknas nomor 28 tahun 2010 dan diharapkan terpenuhinya kepala sekolah sesuai dengan kemampuan manajerial kepemimpinan yang mampu memimpin sekolah Hambatan yang ditemui masih rendahnya minat guru untuk menjadi kepala sekolah. solusi yang ditempuh meningkatkan motivasi dan kompetensi guru.
- d.** Kegiatan Pemilihan siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi, jumlah anggaran Rp 125.000.000,00 realisasi Rp. 124.500.000,00 (99,60%) kegiatan ini merupakan kegiatan sudah berjalan sampai mulai dari seleksi, pembinaan di tingkat Kabupaten dan mengikuti Pemilihan siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi di tingkat Provinsi Bali. Hambatan yang ditemui belum optimalnya hasil Pemilihan siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi, solusi yang ditempuh meningkatkan kompetensi guru, Kepala sekolah dan pengawas sekolah dan meningkatkan besaran hadiah yang diberikan ke guru, Kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berprestasi sehingga memotivasi untuk berprestasi.
- e.** Kegiatan Pengelolaan Sertifikasi guru, jumlah anggaran Rp 75.000.000,00 realisasi Rp. 74.917.300,00 (99,89%) kegiatan ini merupakan kegiatan sudah berjalan mulai dari mempersiapkan, merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran administrasi kegiatan pengelolaan sertifikasi guru , menyelenggarakan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengelolaan administrasi bagi guru yang memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikasi sesuai SK yang terbit dari pusat. Hambatan masih ada beberapa guru yang belum mengupdate data/dapodik, dan data kepegawaian pada dapodik belum identik dengan data BKN sehingga info GTK belum valid dan belum memenuhi syarat untuk bisa diterbitkan SKTP nya oleh pusat, masih ada SK TPG yang

belum turun. Solusinya agar memperbaharui untuk entry datanya pada dapodik sesuai dengan data yang ada saat ini, mengkonsultasikan dan berkoordinasi ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- f.** Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah, jumlah anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp. 50.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini sudah berjalan terkait dengan pembentukan Tim kabupaten, penyusunan pemetaan mutu pendidikan dasar ( SD dan SMP) untuk 8 Standar Nasional Pendidikan , penyusunan program kerja penjaminan mutu pendidikan kabupaten Tabanan. Permasalahan masih rendahnya mutu pendidikan khususnya pada standar sarana prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Solusi yang dilakukan mendorong peningkatan pemenuhan standar tersebut baik melalui kegiatan kabupaten maupun dilakukan oleh satuan pendidikan.
- g.** Kegiatan Diklat Operator Data Pokok Pendidikan Sekolah, jumlah anggaran Rp 25.000.000,00 realisasi Rp. 25.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini sudah berjalan terkait dengan pendidikan dan pelatihan operator data pokok pendidikan (dapodik) SD dan SMP se Kabupaten Tabanan (361 orang) , dalam upaya peningkatan kemampuan operator sekolah dalam pengelolaan data pokok satuan pendidikan yang terdiri dari data individu sekolah, data siswa, data Pendidik dan tenaga kependidikan, data sarana dan prasarana, secara online diharapkan untuk terus diupdate.
- h.** Kegiatan Penyusunan Statistik Persekolahan dan Profil pendidikan, jumlah anggaran Rp 125.000.000,00 realisasi Rp. 125.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini sudah berjalan terkait dengan Penyusunan statistik persekolahan TK, SD dan SMP. Sebelum penjarangan data dilakukan bintek terhadap petugas pendataan sekolah dalam pengisian format quisioner data sekolah. Setelah format diisi oleh sekolah disampaikan ke kabupaten untuk diperivikasi dan direkap untuk dibukukan menjadi statistik persekolahan jenjang TK, SD dan SMP tahun

pelajaran 2018/2019. Statistik didistribusikan ke bidang dan instansi terkait untuk dapat dijadikan bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya penyusunan profil pendidikan dalam bentuk buku rangkuman data pendidikan per kecamatan. Profil pendidikan berisi data sekolah, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, APK, APM, angka melanjutkan, data siswa putus sekolah, data sarana dan prasarana sekolah, data prestasi dan lain-lain. Buku profil pendidikan didistribusikan ke bidang, UPTD dan instansi terkait untuk dapat dijadikan bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

- i. Kegiatan Diklat Penguatan Pengawas Sekolah, jumlah anggaran Rp 190.000.000,00 realisasi Rp. 23.729.010,00 (12,49%) setelah dilakukan konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan diklat penguatan pengawas sekolah dimana kegiatan Penguatan pengawas tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan dilaksanakan oleh pusat dengan menggunakan anggaran APBN.
  - j. Kegiatan Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah anggaran Rp 20.000.000,00 realisasi Rp. 20.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini sudah berjalan terkait pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berupa data distribusi dan data lebih kurang pendidik dan tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang semestinya ada di satuan pendidikan. Data tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyebaran dan pendistribusian serta pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kabupaten Tabanan dengan indicator Persentase jumlah SD/MI

yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM dengan target 21,41%

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM tahun 2018 sebesar 42,24%, sehingga Tingkat capaian indikator kinerja Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM tahun 2018 sebesar 197,29% (*Realisasi* Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM 42,24% *dibagi Target* Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM 21,41% = 40,12%) ini berarti capaian indikator kinerja melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100,00% hasilnya yaitu 197,29%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari : Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/SDLB (DAK), dan Pembangunan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Sekolah dinyatakan sudah memenuhi SPM apabila indikator SPM telah dipenuhi. Dari indikator SPM beberapa sekolah ada yang sebagaimana sudah terpenuhi ada yang belum hal ini disebabkan oleh:

- SPM yang harus dipenuhi oleh SD/MI seluruh indikator SPM, dimana salah satu dari indikator tidak dipenuhi berarti sekolah tersebut belum memenuhi SPM secara utuh.
- kurangnya komitmen terhadap upaya pemenuhan SPM.
- Banyaknya jumlah sekolah dan Keterbatasan dana dalam mendukung pencapaian SPM.
- perlunya ada kebijakan untuk mempercepat pencapaian SPM.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a.** Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/SDLB (DAK), jumlah anggaran Rp 2.923.677.000,00 realisasi Rp. 2.423.666.990,00 (82,90%) kegiatan ini terdiri dari 1). Rehabilitasi ruang belajar sebanyak 26 ruang di 8 (delapan) SD, 2). Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan koleksi perpustakaan untuk 10 SD. Yang mendapatkan rehab ruang kelas yaitu : SD N 1 Kesiut 3 ruang, SD N 1 Baturiti 3 ruang,

SD N 1 Perean Kangin 3 ruang, SD N 4 Penebel 3 ruang, SD N 5 Pujungan 3 ruang, SD N 2 Bengkel sari 4 ruang, SD N 1 Gadungan 4 ruang, SD N 3 petiga 3 ruang. kegiatan sudah terlaksana terkait rehabilitasi. permasalahan DAK SD yang berupa Koleksi Perpustakaan Sekolah yang diperuntukkan pada Sekolah Dasar yang sudah ada gedung perpustakaanya tetapi pengadaan tersebut tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan adanya kendala teknis pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga kelompok kerja (pokja) 2 tidak dapat membuat paket pemilihan penyedia melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2 sampai tanggal 12 Juli 2018 dengan metode lelang cepat. solusinya dana yang tidak terealisasi menjadi silva tahun 2019.

**b.** Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, jumlah anggaran Rp 8.394.762.800,00 realisasi Rp. 8.229.252.409,00 (98,03%) kegiatan ini sudah terlaksana terkait dengan rehabilitasi, pengadaan sarana prasarana pembelajaran, pembangunan penyengker sekolah dan berjalan sesuai rencana.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kabupaten Tabanan dengan indicator Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM dengan target 34,88%

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM tahun 2018 sebesar 38,64 %, sehingga Tingkat capaian indikator kinerja Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM tahun 2018 sebesar 110,78% (*Realisasi* Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM 38,64% *dibagi Target* Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan

prasarana sesuai SPM  $34,88\% = 110,78\%$  ) ini berarti capaian indikator kinerja melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100,00% hasilnya yaitu 110,78%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari : Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK), dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP. Sekolah dinyatakan sudah memenuhi SPM apabila 6 indikator SPM telah dipenuhi. Dari indikator SPM beberapa sekolah ada yang sebagaimana sudah terpenuhi ada yang belum hal ini disebabkan oleh:

- SPM yang harus dipenuhi oleh SMP/MTs seluruh indikatorSPM, dimana salah satu dari indikator tidak dipenuhi berarti sekolah tersebut belum memenuhi SPM secara utuh.
  - kurangnya komitmen terhadap upaya pemenuhan SPM.
  - Banyaknya jumlah sekolah dan Keterbatasan dana dalam mendukung pencapaian SPM.
  - perlunya ada kebijakan untuk mempercepat pencapaian SPM.
- Kegiatan yang dilaksanakan:

**a.** Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK), jumlah anggaran Rp 1.497.545.000,00 realisasi Rp. 1.494.420.140,00 (99,79%) ruang lingkup jenis dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SMP (DAK) meliputi Rehabilitasikegiatan ini sudah Ruang Belajar dan Pengadaan Meubeler untuk ruang kelas. Tujuan kegiatan ini sebagai berikut : Mendukung tercapainya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, meningkatkan kondisi gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik layak untuk melaksanakan proses pembelajaran, Meningkatkan Sarana Penunjang Pembelajaran, Memberikan kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar, Mendukung tercapainya Standar Pendidikan Nasional. Lokasi pengadaan sarana dan prasarana SMP (DAK) tahun 2018 sebagai berikut: SMP N 1 Baturiti berupa rehabilitasi 2 ruang kelas , SMP N 2 Kerambitan rehabilitasi 3 ruang kelas, SMP N 2 Pupuan

berupa rehabilitasi 3 ruang kelas, SMP N 3 Pupuan berupa rehabilitasi 2 ruang kelas, SMP N 2 Selemadeg berupa pengadaan perabot ruang kelas ( 2 Tong sampah, 44 kursi siswa, 3 meja guru, 43 bangku, 3 kursi guru ).

**b.** Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP, jumlah anggaran Rp 2.050.500.000,00 realisasi Rp. 1.247.696.290,00 (60,85%) Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP yang berupa pengadaan alat lab dan bangku dan rehabilitasi tidak terealisasi sebesar Rp. 802.803.710,- (anggaran perubahan) terdiri dari : 1). Pengadaan alat lab IPA, Alat Peraga matematika, Alat Peraga IPS, Alat Penjaskes, Alat Kesenian, sebesar Rp. 288.000.000,- tidak terealisasi karena Waktu untuk memproses tidak cukup (lelang)., 2). Belanja pengadaan buku teks sebesar RP. 98.560.000,- karena Tidak ada penerbit yang memiliki stok buku kosong, baru akan dicetak ketika ada pesanan dan ini biasanya dilakukan pada bulan Juni menjelang Tahun Pelajaran Baru., 3). Rehabilitasi Ruang kelas Rp. 355.780.000,00 di SMP N 5 Kediri tidak terealisasi karena Waktu untuk memproses tidak mencukupi (lelang).

6. Program Pendidikan Anak Usia Dini, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kabupaten Tabanan dengan indicator Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan target 86%

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik tahun 2018 sebesar 62,98%, sehingga Tingkat capaian indikator kinerja Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik tahun 2018 sebesar 73,23% ( *Realisasi* Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik 62,98% *dibagi Target* Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik 86,00% = 73,23% ) ini berarti capaian indicator kinerja belum mencapai target kinerja yang

telah ditetapkan yaitu 100,00% hasilnya yaitu 73,23%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari : DOP TK Negeri Kabupaten Tabanan, Apresiasi PTK-PAUD NI, Bunda PAUD, Pengelolaan Tenaga Pendidik Paud, BOP PAUD (DAK), Lomba Kreativitas anak dan peringatan hari anak nasional, Manajemen pengelolaan Pendidikan Usia Dini, Diklat Operator Data Pokok Pendidikan PAUD dan DIKMAS, Pembangunan Bidang Pendidikan PAUD.

Belum tercapainya target kinerja program pendidikan anak usia dini , hal ini disebabkan oleh:

- Perlu ada komitmen terhadap upaya pemenuhan Sarana dan prasarana bagi pendidikan anak usia dini secara bertahap.
- Banyaknya jumlah TK dan Keterbatasan dana dalam mendukung pemenuhan Sarana dan prasarana bagi pendidikan anak usia dini.
- perlunya ada kebijakan untuk mempercepat pemenuhan Sarana dan prasarana bagi pendidikan anak usia dini.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a.** Kegiatan DOP TK Negeri Kabupaten Tabanan, jumlah anggaran Rp 20.000.000,00 realisasi Rp. 18.117.427,00 (90,59%), kegiatan ini berupa pemberian dana operasional pendidikan dengan sasaran 2 TK Negeri (TK Negeri Kerambitan, dan TK Negeri Tabanan) bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikut sertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di TK Negeri Kabupaten Tabanan.
- b.** Kegiatan Apresiasi PTK PAUD-NI, jumlah anggaran Rp 60.000.000,00 realisasi Rp. 59.884.800,00 (99,81%) kegiatan ini berupa kegiatan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan serta pendidikan masyarakat. Apresiasi PTK Paudni dilaksanakan melalui lomba karya nyata yang melibatkan 10 (sepuluh) TK dengan mengembangkan konsep kegiatan edukasi kompetensi, dan rekreasi. Sasaran kegiatan ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan di bidang pendidikan non formal

yaitu pengelola PAUD, Pendidik PAUD, Pamong Belajar, Penilik, Pengelola PKBM, Tutor Paket B, Tutor Paket C, Pengelola TBM, Pengelola LKP, Instruktur Tata Rias Pengantin yang mengikuti lomba karya nyata dan karya kegiatan apresiasi PTK PAUDNI tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk tingkat nasional dilaksanakan di Pontianak dengan mengirim 2 (dua) orang duta Tabanan yaitu Pengelola Pendidik PAUD, dan Pamong Belajar.

- c.** Kegiatan Bunda PAUD, jumlah anggaran Rp 100.000.000,00 realisasi Rp. 87.239.200,00 (87,24%), dkegiatan ini dimaksudkan berupa kegiatan gebyar PAUD, Penyerahan bantuan APE kepada 10 Lembaga PAUD se Kabupaten Tabanan, menumbuh kembangkan bakat dan minat serta kreativitas dari anak Paud. Adapun lembaga PAUD penerima APE : 1). TK Widya Karya Meliling, 2). TPA Anak Terang Br. Pekarangan, Baturiti, 3). TK Widya Manggala desa Peken Belayu, 4). TK Santi Pertiwi Br. Piling, 5). TK Widya Sastra desa Pandak Bandung, 6). KB Prasanti Puspa Tabanan, 7). TK Kumara Mekar desa Angkah, 8). TK Kumara Mandala I Desa Bantas Tengah Seltim, 9). TK Lila Kumara Berembeng, 10). Paud Tunas Remaja Sembung Gede.kegiatan Bunda Paud juga melaksanakan berbagai lomba (Lomba memakai baju, lomba memasukkan kelereng dengan sepit, lomba lari kelereng, lomba memindahkan bendera, lomba melempar bola).
- d.** Kegiatan Pengelolaan Tenaga Pendidik PAUD, jumlah anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp. 50.000.000,00 (100,00%) kegiata ini dimaksudkan agar program Paud di Kabupaten Tabanan tetap berjalan sesuai dengan tujuan, memberikan kesejahteraan terhadap pendidik PAUD, mendata lembaga Paud. Berdasarkan Dapodik jumlah lembaga Paud adalah sebagai berikut : Lembaga TK 235 Lembaga, KB 135 Lembaga, TPA 13 Lembaga, SPS 6 Lembaga. Jumlah Pendidik PAUD sebagai berikut : TK 361 orang PNS dan 248 orang non PNS, KB 288 orang, TPA 22 orang, SPS 12 orang. Pemberian kesejahteraan kepada tenaga kerja non pegawai pada pendidik anak usia dini sebanyak 75 orang masing-masing Rp. 100.000,00.

- e.** Kegiatan BOP PAUD (DAK), jumlah anggaran Rp 124.800.000,00 realisasi Rp. 124.800.000,00 (100,00%) kegiatan ini berupa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) non fisik untuk 2 TK Negeri (TK Negeri Kerambitan dan TK Negeri Tabanan), meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan Paud berkualitas. adapun kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran di TK.
- f.** Kegiatan Lomba Kreativitas anak dan peringatan hari anak nasional, jumlah anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp. 50.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini berupa lomba mewarnai untuk anak kelompok bermain TK putra dan putri, dan melaksanakan peringatan hari anak nasional. Pada perayaan hari anak nasional diisi dengan hiburan dari abak Paud. adapun tujuannya untuk meningkatkan bakat dan minat kreativitas dan aktivitas anak dibidang seni.
- g.** Kegiatan Manajemen pengelolaan Pendidikan Usia Dini, jumlah anggaran Rp 25.000.000,00 realisasi Rp. 25.000.000,00 (100,00%) maksud dan tujuan kegiatan ini : mensosialisasikan BOP PAUD kepada Lembaga PAUD penerima BOP tahun 2018, Lembaga memahami pembuatan Proposal BOP DAK yang sesuai dengan juknis BOP PAUD, melaksanakan monitoring kepada lembaga penerima BOP PAUD. Jumlah penerima BOP PAUD sebanyak 278 lembaga. Besaran BOP paud Rp.600.000,00/Siswa/Tahun.
- h.** Kegiatan Diklat Operator Data Pokok Pendidikan PAUD dan DIKMAS, jumlah anggaran Rp 25.000.000,00 realisasi Rp. 25.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini merupakan pendidikan dan pelatihan bagi operator Paud agar operator Paud-Dikmas menginput Dapodik secara online. Adapun tujuan diklat ini agar operator memahami kebijakan data pokok Paud dan Dikmas, memahami sistem pengelolaan data pendidikan Paud, memahami aneka tunjangan, menginput data ke aplikasi Dapodik Paud dan Dikmas. Peserta pelatihan sebanyak 238 orang.

- i. Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan PAUD, jumlah anggaran Rp 1.691.548.000,00 realisasi Rp. 1.493.086.400,00 (88,27%) kegiatan ini berupa rehab gedung, pembagunan gedung, pembangunan tembok penyengker. Adapun penerima bantuan gedung tahun 2018 sebagai berikut : 1) TK Tunas Kumara Guri Kec. Selemadeg berupa pembangunan Tembok Penyengker dan vaving halaman, 2). PAUD Desa Batunya berupa rehab gedung, 3). TK/PAUD desa Kelating berupa pembangunan tembok penyengker, 4). PAUD Desa Buwit berupa pembangunan gedung, 5). Play Group Desa Beringkit berupa pembangunan WC, Canovi, Tempat Bermain, Pavingisasi, 6). PAUD di desa Perean Tengah Rehab Gedung, 7). TK di desa Apuan Baturiti Rehab gedung, 8). PAUD di Desa Rejasa berupa Pembangunan gedung.

Permasalahan yang dihadapi yaitu PAUD Desa Batunya berupa rehab gedung tidak dapat direalisasikan karena masalah lahan dan terbatasnya waktu penyelesaian. Solusinya sudah dikoordinasikan dengan pihak desa akhirnya tidak mengeksekusi kegiatan tersebut dan menghusulkan agar bisa diadakan tahun depannya.

7. Program Pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya) peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya). Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keberlanjutan Lainnya yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kabupaten Tabanan dengan indicator peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya) dengan target 1017 orang.

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya) tahun 2018 sebesar 737 orang, sehingga Tingkat capaian indikator kinerja peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan

dan pendidikan keberlanjutan lainnya) tahun 2018 sebesar 72,47% ( *Realisasi* peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya) 737 orang *dibagi Target* peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya) 1017 orang *kali 100% = 72,47%* ) ini berarti capaian indikator kinerja belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100,00% hasilnya yaitu 72,47%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan Lainnya terdiri dari : Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.

Belum tercapainya target kinerja Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan Lainnya, hal ini disebabkan oleh:

- terbatasnya mendapatkan warga belajar untuk mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan karena masyarakat kebanyakan bekerja.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menuntaskan pendidikan melalui kejar paket karena factor usia (usia lanjut). Kegiatan yang dilaksanakan:
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, jumlah anggaran Rp 125.000.000,00 realisasi Rp. 124.971.200,00 (99,98%) kegiatan ini merupakan upaya menangani masyarakat yang putus sekolah SD, SMP, dan SMA dalam rangka mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Jenis layanan pendidikan non formal yaitu pendidikan kesetaraan seperti kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, kejar paket C setara SMA. Program pembelajaran kesetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan yaitu : 1). Pembelajaran Warga Belajar Kejar Paket B Setara SMP untuk Kelas VII berlokasi di PKBM Mandiri di Kecamatan Pupuan dengan jumlah peserta 20 orang dengan tutor 7 orang, dan kelas IX berlokasi di PKBM Widya sastra kecamatan

selema deg dengan jumlah peserta didik 20 orang jumlah tutor 7 orang, 2). Pembelajaran warga belajar kejar paket C setara SMA untuk kelas X berlokasi di PKBM Mandiri Kecamatan Pupuan jumlah peserta didik 20 orang dengan jumlah tutor 10 orang dan kelas XII berlokasi di PKBM Sari Mekar di Kecamatan Kediri jumlah peserta didik 20 orang dengan tutor 20 orang.

- b.** Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, jumlah anggaran Rp 30.000.000,00 realisasi Rp. 30.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini telah terlaksana berupa ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan berbasis komputer (UNBK). Penyelenggaraan UNBK kejar Paket B dan Paket C di ikuti oleh 4 (empat) Kecamatan yang masing-masing dikelola oleh pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) masing-masing kecamatan. Bentuk kegiatan ini berupa : mengadakan UAS dan monitoring kejar paket B dan C, Mendata peserta UN paket B dan C, Mendistribusikan Naskah UN, mengawasi dan memonitoring pelaksanaan UN, Mendistribusikan ijazah/STTB ke masing-masing lembaga.
- c.** Program pendidikan karakter berbasis budaya, tujuan dari program ini adalah untuk Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kabupaten Tabanan dengan indicator Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya dengan target 42,94%.

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya tahun 2018 sebesar 57,38%, sehingga Tingkat capaian indikator kinerja Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya tahun 2018 sebesar 133,63% (*Realisasi* Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya 57,38% *dibagi Target* Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya 42,94% = 133,63%) ini berarti capaian indikator kinerja

sudah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100,00% hasilnya yaitu 133,63%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya terdiri dari : Pembinaan dan Lomba UKS, Kemah Budaya Siswa, Kemah Pelestarian Kebudayaan, Peringatan Hardiknas dan PGRI, Pembinaan Paskibraka, Pembinaan kepramukaan, Napak Tilas, Lomba gerak jalan siswa pada peringatan HUT puputan margarana, Malam Pentas kreativitas "Saund of freedom". Kegiatan yang dilaksanakan:

- d.** Kegiatan Pembinaan dan Lomba UKS, jumlah anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp. 50.000.000,00 (100,00%), UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah. sasaran kegiatan UKS Kabupaten adalah Peserta didik SD dan SMP, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga (masyarakat) sekolah, TP. UKS Kecamatan. Ruang lingkup TP. UKS Kabupaten adalah pelaksanaan pembinaan UKS meliputi penyediaan tenaga, sarana, prasarana dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan baik ekstra maupun intra kurikuler, pelayanan kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat baik fisik, mental maupun sosial. Kegiatan ini diharapkan semua sekolah memiliki minimal 1 (satu) guru UKS dan kader kesehatan aktif, melaksanakan penjangkaran kesehatan dan administrasi UKS, kebersihan sekolah (kantin, kamar mandi, dan lingkungan sekolah), sekolah memiliki sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan tempat sampah yang berfungsi di semua kelas.
- e.** Kegiatan Kemah Budaya Siswa, jumlah anggaran Rp 350.000.000,00 realisasi Rp. 349.096.400,00 (99,74%) kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka membangun karakter generasi muda terutama dibidang seni dan budaya dengan mendidik generasi muda untuk mengolah daya kreatif menjadi garda terdepan didalam memelihara kebudayaan daerah dalam era globalisasi. Kegiatan terdiri dari audisi (100 orang) siswa/siswi,

pentas budaya, workshop kemah budaya. Lokasi kemah budaya di areal perkemahan Pura Srijong, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg. Pentas budaya dilaksanakan di Lapangan Alit Saputra Tabanan sebagai wahana para peserta kemah budaya didalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama 5 (lima) hari workshop. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggali lebih dalam potensi diri yang ada maka akan bisa menghasilkan karya yang hebat.

- f.** Kegiatan Kemah Pelestarian Kebudayaan, jumlah anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp. 49.992.700,00 (99,99%) kegiatan kemah pelestarian kebudayaan merupakan kegiatan upaya pendidikan budaya yang berkelanjutan kepada pelajar kabupaten Tabanan untuk mengagali potensi atau situs budaya dari Pura Luhur Mekori dan pemenang lomba ini akan dilombakan di tingkat Provinsi Bali.
- g.** Kegiatan Peringatan Hardiknas dan PGRI, jumlah anggaran Rp 100.000.000,00 realisasi Rp. 99.163.361,00 (99,16%) kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan karakteristik guru / potensi guru agar nantinya memenuhi kualifikasi atau standar yang memadai untuk mendidik anak yang dapat mewujudkan generasi bangsa yang berprestasi. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 200 orang masing-masing 100 orang guru SD dan 100 orang guru SMP. Kegiatan berupa bintek pengembangan profesi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter.
- h.** Kegiatan Pembinaan Paskibraka, jumlah anggaran Rp 600.000.000,00 realisasi Rp. 599.126.800,00 (99,85%) kegiatan ini berupa pembinaan bagi pasukan pengibar dan penurunan bendera pusaka terkait dengan Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dimulai dari seleksi tingkat sekolah, seleksi peserta Kabupaten, pembinaan peserta kabupaten, pembinaan peserta provinsi, pengukuhan Paskibraka, acara pentas, study Tour, Pembubaran Paskibraka. Peserta Paskibraka adalah siswa SMA dan SMK hasil seleksi sebanyak 70 orang. Untuk propinsi mewakili Kabupaten Tabanan sebanyak 5 orang siswa. Pelatih dari

Kodim 1619 Tabanan, Polres Tabanan, PPI Tabanan, Dinas Kesehatan Tabanan.

- i.** Kegiatan Pembinaan kepramukaan, jumlah anggaran Rp 75.000.000,00 realisasi Rp. 73.480.200,00 (97,97%) kegiatan ini adalah kegiatan untuk meningkatkan sertifikasi guru dalam membina kegiatan pramuka di sekolah. Para guru yang akan mengikuti kegiatan pembinaan kepramukaan ini merupakan guru-guru yang telah mengikuti kursus mahir dasar. Peserta sebanyak 40 orang guru yaitu guru SD 20 orang, dan guru SMP 20 orang.
- j.** Kegiatan Napak Tilas, jumlah anggaran Rp 80.000.000,00 realisasi Rp. 80.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini adalah untuk mengenang perjuangan pahlawan Bali sekaligus untuk menanamkan jiwa nasionalisme, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dengan menerima Panji Sakti (Petaka) dari Kabupaten Badung di Lapangan Kediri, Tabanan dan meneruskan perjalanan ke Desa Lumbang, Monumen Munduk Malang dan berakhir di Banjar Ole, desa Marga.
- k.** Kegiatan Lomba gerak jalan siswa pada peringatan HUT puputan margarana, jumlah anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp. 46.000.000,00 (92,00%) kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sportivitas dan rasa kepahlawanan di kalangan siswa melalui kegiatan lomba gerak jalan pada peringatan HUT Puputan Margarana. Peserta lomba sebanyak 99 group terdiri dari siswa SMP, SMA dan SMK se Kabupaten Tabanan. Kegiatan ini start di Taman Pujaan Bangsa Margarana dan Finish di Lapangan Alit Saputra. Kreteria lomba kecepatan, keutuhan, dan keseragaman kostum.
- l.** Kegiatan Malam Pentas kreativitas "Saund of freedom", jumlah anggaran Rp 150.000.000,00 realisasi Rp. 149.848.750,00 (99,90%) kegiatan ini untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka menggali kreatifitas seni musik generasi muda di Tabanan. Kegiatan berupa pemantasan parade Band. Dengan meningkatnya kreatifitas

seni musik generasi muda yang selalu optimis dalam menjalani semua tantangan hidup yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan umum Bajera selama 3 hari tanggal 22 s/d. 24 Agustus 2018. Intinya untuk menyalurkan bakat generasi muda khususnya dibidang seni musik, perlu diapresiasi sehingga generasi muda bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif.

8. Program Pelayanan Manajemen Pendidikan, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik' persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik'. Program Pelayanan Manajemen Pendidikan dengan indikator persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik' dengan target capaian 44,20% , Berdasarkan prosentase serapan dana BOS (serapan dana 90% keatas ) maka realisasi capaian 71,02% , maka capaian kinerja Program Pelayanan Manajemen Pendidikan 160,68% ( Realisasi persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik' 71,02% dibagi Target persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik' 44,20% = 160,68%). Ini berarti capaian kinerja sangat baik yaitu melampaui target. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja terdiri dari : Biaya Penunjang Penyelenggaraan UPT, Pembinaan/ lomba-lomba. Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Kegiatan Biaya Penunjang Penyelenggaraan UPT, jumlah anggaran Rp 210.000.000,00 realisasi Rp. 208.196.000,00 (99,14%) kegiatan ini merupakan pemberian bantuan biaya penunjang untuk UPT kecamatan untuk membiayai kegiatan operasional UPT (11 UPT) dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan lebih optimal. Kegiatan ini untuk membantu kelancaran pelayanan administrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan di setiap kecamatan, yang tersebar di sepuluh kecamatan dan di UPT SKB Kediri.

- b. Kegiatan Pembinaan/ lomba-lomba, jumlah anggaran Rp 275.000.000,00 realisasi Rp. 274.321.190,00 (99,75%) kegiatan

ini berupa pemberian apresiasi sebagai bentuk riweds bagi insan berprestasi kabupaten Tabanan sehingga memotivasi untuk berprestasi. Pemberian Apresiasi bagi para juara I yang diraih oleh siswa, Guru, Kepala Sekolah, Tata Usaha, Tenaga Perpustakaan, Pengawas Sekolah sebanyak 100 (seratus) orang dengan rincian 70 (tujuh puluh) orang untuk Siswa masing-masing Rp. 1.750.000,00 dan 30 (tiga puluh) orang untuk Guru, Kepala Sekolah, Tata Usaha, Tenaga Perpustakaan, Pengawas masing-masing Rp.2.000.000,00.

9. Program BOS, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik. Program BOS dengan indikator Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SPM Pendidikan Dasar dengan target 49,58% dimana realisasi Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SPM Pendidikan Dasar adalah 0,55%, sehingga capaian kinerja Program BOS 1,11% (realisasi Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SPM Pendidikan Dasar 0,55% dibagi Target Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SPM Pendidikan Dasar 49,58% = 1,11%). Ini berarti belum mencapai target Prosentase Sekolah yang Memenuhi SPM Pendidikan Dasar. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja terdiri dari : Dana Bos SD, Dana BOS SMP, Manajemen Pengelolaan BOS, Diklat Pengelolaan Keuangan BOS Diklat Pengelolaan Keuangan BOS, Pendampingan BOS SMP Negeri, Pendampingan BOS SD Negeri. belum mencapai target Prosentase Sekolah yang Memenuhi SPM Pendidikan Dasar hal ini disebabkan :

- SPM yang harus dipenuhi oleh SMP/MTs seluruh indikator SPM, dimana salah satu dari indikator tidak dipenuhi berarti sekolah tersebut belum memenuhi SPM secara utuh.
- kurangnya komitmen terhadap upaya pemenuhan SPM.
- Banyaknya jumlah sekolah dan Keterbatasan dana dalam mendukung pencapaian SPM.
- perlunya ada kebijakan untuk mempercepat pencapaian SPM.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a.** Kegiatan Dana BOS SD, jumlah anggaran Rp 26.902.166.995,17 realisasi Rp. 24.947.908.671,31 (92,74%) sisa dana BOS yang

tidak direalisasikan menjadi silva dan tetap mejadi milik sekolah sebesar Rp. 1.954.258.323,86 untuk diprogramkan di tahun berikutnya. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program untuk membantu sekolah dalam membiayai operasionalnya dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. besaran dana Bos yang diterima sekolah didasarkan pada jumlah siswa. Untuk jenjang SD Rp. 800.000,00/siswa/tahun.

- b.** Kegiatan Dana BOS SMP, jumlah anggaran Rp 19.576.937.671,77 realisasi Rp. 18.241.807.117,39 (93,18%) sisa dana BOS yang tidak direalisasikan menjadi silva dan tetap mejadi milik sekolah sebesar Rp. 1.335.130.554,38 untuk diprogramkan di tahun berikutnya. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program untuk membantu sekolah dalam membiayai operasionalnya dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. besaran dana Bos yang diterima sekolah didasarkan pada jumlah siswa. Untuk jenjang SMP Rp. 1.000.000,00/siswa/tahun.
- c.** Kegiatan Manajemen Pengelolaan BOS, jumlah anggaran Rp 75.000.000,00 realisasi Rp. 74.675.000,00 (99,57%) adalah merupakan kegiatan untuk memfasilitasi sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Manajemen pengelolaan BOS kabupaten mensosialisasikan Petunjuk Teknis BOS kepada sekolah SD dan SMP penerima BOS, melaporkan tiap triwulan penyerapan dana BOS, melakukan Verifikasi SPJ dana BOS, melakukan pembinaan dan layanan konsultasi, memonitoring pelaksanaan BOS, membuat laporan akhir BOS sesuai juknis BOS.
- d.** Kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan BOS, jumlah anggaran Rp 75.000.000,00 realisasi Rp. 75.000.000,00 (100,00%) kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bendahara BOS dalam tata kelola dana BOS berupa RKAS, pertanggungjawaban dana BOS, Pembukuan, Asset, laporan triwulanan dan tahunan. Peserta yang di latih sebanyak 361 orang bendahara BOS SD dan SMP.

- e. Kegiatan Pendampingan BOS SMP Negeri, jumlah anggaran Rp 475.300.000,00 realisasi Rp. 392.979.700,00 (82,68%) kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada SMP Negeri (36 SMP) untuk membiayai kebutuhan rutin sekolah seperti biaya ngodalin, banten sehari-hari, karena pengadaan tersebut tidak dibolehkan menggunakan dana BOS Reguler, sehingga melalui APBD memberikan bantuan pendampingan dana BOS.
  - f. Kegiatan Pendampingan BOS SD Negeri, jumlah anggaran Rp 1.811.550.000,00 realisasi Rp. 1.736.050.000,00 (95,83%) kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada SD Negeri (317 SD) untuk membiayai kebutuhan rutin sekolah seperti biaya ngodalin, banten sehari-hari, karena pengadaan tersebut tidak dibolehkan menggunakan dana BOS Reguler, sehingga melalui APBD memberikan bantuan pendampingan dana BOS.
10. Program Pendidikan Masyarakat, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya Prosentase peserta kursus lulus uji kompetensi. Program Pendidikan Masyarakat dengan indikator prosentase peserta kursus lulus uji kompetensi dengan target 10,00% dimana realisasi Prosentase peserta kursus lulus uji kompetensi adalah 100,00%, sehingga capaian kinerja Program Pendidikan Masyarakat 1000,00% (realisasi Prosentase peserta kursus lulus uji kompetensi 100,00% dibagi Target Prosentase peserta kursus lulus uji kompetensi 10,00% = 1000,00%). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja yaitu Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
- Berarti melampaui target Prosentase peserta kursus lulus uji kompetensi hal ini disebabkan:
- Minat masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya melalui kursus cukup besar.
  - Meningkatnya Ketersediaan lembaga layanan kursus.
  - Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH). Kegiatan yang dilaksanakan:
- a. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), jumlah anggaran Rp 70.000.000,00 realisasi Rp. 69.665.000,00 (99,52%), Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) merupakan

salah satu kegiatan pendidikan non formal yang memiliki peran penting dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Pada dasarnya Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dapat membantu warga belajar dalam mengembangkan kemampuan belajar, menyadari dan menggali potensi diri untuk dikembangkan dan diamankan serta berani menghadapi permasalahan kehidupan serta memecahkan permasalahan tersebut dengan kreatif. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Tatarias Pengantin Bali dengan tujuan: memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan memasuki dunia kerja, memiliki motivasi dan etos kerja, memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 30 orang dengan instruktur 2 orang selama 20 hari dengan pembelajaran secara teori 30% dan pembelajaran praktek 70%.

11. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatnya Persentase peraih Medali Terhadap Cabang Olah Raga/Seni Yang Diikuti dalam Lomba Tingkat Provinsi. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan indikator peraih Medali Terhadap Cabang Olah Raga Yang Diikuti dalam Lomba Tingkat Provinsi. Perolehan medali tahun 2018 terdiri dari : Medali emas = 10 buah, Medali Perak = 29 Buah, Medali Perunggu = 71 Buah. Banyak cabang yang dipertandingkan sebanyak 21 cabang olahraga sedangkan yang diikuti Kabupaten Tabanan sebanyak 17 cabang Olahraga.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan indikator peraih Medali Terhadap Cabang Olah Raga/Seni Yang Diikuti dalam Lomba Tingkat Provinsi dengan target 100 medali dimana realisasi capaiannya 110 medali, maka capaian kinerja Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 110,00% (realisasi peraih Medali Terhadap Cabang Olah Raga/Seni Yang Diikuti dalam Lomba Tingkat Provinsi 110 medali dibagi Target peraih Medali Terhadap Cabang Olah Raga/Seni Yang Diikuti dalam Lomba Tingkat Provinsi 100

medali dikali 100% = 110,00%) ini berarti capaian kinerja melampaui target. Kegiatan yang dilaksanakan:

- a.** Kegiatan PORSENI, jumlah anggaran Rp 2.000.000.000,00 realisasi Rp. 1.989.905.300,00 (99,50%) Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Tabanan adalah kegiatan pertandingan/perlombaan tingkat kabupaten yang dilaksanakan tiap 1 (satu) tahun sekali. PORSENI kabupaten Tabanan adalah titik kulminasi pembinaan prestasi olahraga pelajar yang ada di Kecamatan dan sekaligus di sekolah, Dinas Pendidikan, club olahraga, ekstrakurikuler dan semua komponen yang ada di Kabupaten. Jumlah dan nomor pertandingan cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan dalam pekan olahraga pelajar kabupaten Tabanan tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) cabang, dan 3 (tiga) cabang eksebisi yaitu: Atletik, Bola Voli, Sepak Takraw, Bola Basket, Pencak Silat, Bulu Tangkis, Renang, Catur, Panjat Tebing, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Judo, Sepak Bola, Taekwondo, Karate, Petanque, Tayung Derajat, Wood Ball, Balap sepeda (eksebisi), Dansa Sport (eksebisi), Rugby (eksebisi). Peserta pekan olahraga pelajar sebanyak 2.364 orang pelajar SD, SMP, SMA/SMK se kabupaten Tabanan.
- b.** Kegiatan Pengarakan Obor Torch Realy Asian Games XVIII Tahun 2018, jumlah anggaran Rp 100.000.000,00 realisasi Rp. 99.986.000,00 (99,99%) kegiatan ini merupakan Kirab Api Obor (Torch Relay) yang bertempat di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot. Event olahraga Asian Games XVIII tahun 2018 keliling indonesia, dan Kabupaten Tabanan merupakan salah satu daerah yang menjadi titik singgah Kirab Api Obor (Torch Relay). tujuan kegiatan ini untuk sosialisasi Asian Games XVIII kepada masyarakat Indonesia sekaligus mempromosikan destinasi pariwisata, seni budaya, potensi-potensi daerah lain ke manca negara. Peserta yang hadir adalah seluruh OPD dilingkungan Pemkab Tabanan, Siswa siswi SMP Negeri 1, 2 dan 3 Kediri, Tokoh masyarakat dan masyarakat se kecamatan Kediri, dan jaya prana production.

Sementara Target 2018 dibidang pendidikan yang belum tercapai sebagai berikut:

#### 1. Angka Putus Sekolah SMP/MTS

Target 2018 sebesar 0,13%, realisasi (putus sekolah sebanyak 26 orang dari 18.483 siswa SMP/MTs) 0,14% sehingga capaian 92,90% tidak tercapainya target disebabkan oleh : Adanya siswa yang sakit sifatnya permanen; Adanya penduduk yang datangnya musiman dari luar Bali, Factor minat siswa untuk tidak sekolah (membantu orang tua). Upaya penurunan angka putus sekolah SMP/MTs ini dilakukan melalui : pembinaan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, kegiatan BOS, KIP, kunjungan kerumah (home visit) oleh pihak sekolah bersama komite sekolah, Pendidikan Kejar Paket B..

#### 2. Angka melek hurup (AMH)

Tahun 2018 target Angka melek hurup (AMH) 96,15% realisasi Angka melek hurup (AMH) 93,32%, (sesuai dengan perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan) maka prosentase capaian 97,06% tidak tercapainya target disebabkan oleh: Khususnya penduduk usia lanjut yang tidak produktif lagi kurang berminat lagi untuk mengikuti pendidikan. Upaya yang dilakukan: Pembinaan dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, kejar paket A, B, C., Meningkatkan upaya menurunkan angka putus sekolah.melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin bagi anak dari keluarga miskin yang rawan putus sekolah, Kartu Indonesia Pintar, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lembaga masyarakat lainnya.

#### 3. Angka rata-rata lama sekolah

Target Angka rata-rata lama sekolah 8,45 tahun, realisasi Angka rata-rata lama sekolah 8,43 Tahun(sesuai dengan perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan), maka prosentase capaian 99,76% disebabkan penduduk usia lanjut 50 tahun keatas masih banyak hanya tamatan SD bahkan ada tidak tamat SD. Upaya dilakukan : Pembinaan dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, Program pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B, C., Meningkatkan upaya menurunkan angka putus sekolah melalui pemberian Bantuan

Siswa Miskin bagi anak dari keluarga miskin yang rawan putus sekolah, Kartu Indonesia Pintar, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lembaga masyarakat lainnya. Angka rata-rata lama sekolah sesuai dengan

#### 4. Rata-rata Nilai UN

Target Rata-rata UN SMP 217, realisasi 202,40 ( Jumlah nilai UN semua siswa sebanyak 1.296.979,2 dibagi Jumlah siswa yang ikut UN 6.408 siswa), Capaian sebesar 93,27% hal ini disebabkan oleh: Kesiapan anak dalam mengikuti UN kurang optimal, Hasil UN tidak menentukan lulus tidaknya siswa. Upaya dilakukan : Tryout UN, Pemantapan UN, Bimbingan belajar mengingat UN dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional.

#### 5. Persentase SD/MI yang memenuhi SPM

*Target* memenuhi SPM 6,14%, *realisasi* 0,62 % Jumlah SD/MI yang memenuhi semua indikator sebanyak 2 sekolah dari 322 sekolah (SD N 1 Pupuan Sawah, SD N 1 Baturiti), capaian kinerja 10,10% hal ini disebabkan oleh: SPM yang harus dipenuhi oleh SD/MI sebanyak 27 indikator, dimana salah satu dari 27 indikator tidak dipenuhi berarti sekolah tersebut belum memenuhi SPM secara utuh, Kurangnya komitmen terhadap upaya pemenuhan SPM, Banyaknya jumlah sekolah dan Keterbatasan dana dalam mendukung pencapaian SPM. Upaya dilakukan : Adanya kebijakan untuk mempercepat pencapaian SPM, adanya komitmen secara berkelanjutan dalam pemenuhan SPM.

#### 6. Persentase SMP/MTs yang memenuhi SPM

*Target* memenuhi SPM 47,62%, *realisasi* 0,00 % Jumlah SMP/MTsI yang memenuhi semua indikator sebanyak 0 sekolah dari 44 sekolah, capaian kinerja 0,00% hal ini disebabkan oleh: SPM yang harus dipenuhi oleh SMP/MTs sebanyak 27 indikator, dimana salah satu dari 27 indikator tidak dipenuhi berarti sekolah tersebut belum memenuhi SPM secara utuh, Kurangnya komitmen terhadap upaya pemenuhan SPM, Banyaknya jumlah sekolah dan Keterbatasan dana dalam mendukung pencapaian SPM. Upaya dilakukan : Adanya kebijakan untuk mempercepat pencapaian

SPM, adanya komitmen secara berkelanjutan dalam pemenuhan SPM.

7. Persentase kelulusan UKG dengan kategori “baik”

Jumlah guru yang mendapatkan hasil UKG baik sebanyak 2.026 orang, Jumlah seluruh guru yang ikut UKG sebanyak 3.607 orang, target 62,62%, realisasi 56,17% , capaian kinerja 89,70% ini berarti capaian indicator kinerja belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100,00% hasilnya yaitu 89,70%. Hal ini disebabkan oleh tidak ada UKG tahun 2018, upaya dilakukan: hasil UKG yang rendah dilakukan peningkatan kompetensi melalui Sistem Guru Pembelajar online (sim GPO), diklat, penguatan-penguatan guru.

8. Presentase Lembaga Pendidikan Masyarakat Terakreditasi "A"

Target Persentase lembaga pendidikan masyarakat terakreditasi A 2,17%, realisasi 0,00%, capaian kinerja 0,00% dari 76 lembaga 13 terakreditasi dan 63 lembaga belum terakreditasi. Adapun rincian dari 13 lembaga yang sudah terakreditasi yaitu akreditasi A = 0, akreditasi B sebanyak 13 lembaga, terakreditasi C = 0, hal ini disebabkan oleh: Lembaga pendidikan masyarakat belum optimal dalam menyiapkan diri untuk di akreditasi, Kurang optimalnya pembinaan lembaga pendidikan masyarakat khususnya dalam akreditasi, Perlu ada kebijakan untuk mempercepat pencapaian nilai akreditasi A pada lembaga pendidikan masyarakat.

9. Ranking Tabanan dalam prestasi PORSENI dan non akademik lainnya dalam ajang kompetisi tingkat provinsi

prosentase capaian kinerja tahun 2018 sebesar 77,78% ( Target Ranking Tabanan dalam prestasi PORSENI sebesar 7 dibagi Realisasi Ranking Tabanan dalam prestasi PORSENI sebesar 9 = 77,78%) belum tercapai target kinerja Ranking Tabanan dalam prestasi PORSENI sebesar yaitu 100,00% hasilnya 77,78%. hal ini disebabkan oleh: Kabupaten Tabanan hanya mengikuti 22 cabor dari 25 cabor yang dipertandingkan, Belum optimalnya pembinaan olahraga sejak usia dini secara berkesinambungan, Perlu adanya riwed bagi atlet berprestasi untuk memberikan motivasi bagi atlet

untuk meningkatkan prestasinya, Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang perlu terus dibangun dan diadakan.

## B. Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan melaksanakan sembilan belas program dan 87 kegiatan dengan jumlah anggaran tahun 2018 sebesar Rp 107.199.647.765 dengan realisasi sebesar Rp 96.938.748.551,45 (90,43%). Dari sembilan belas program yang dilaksanakan tahun 2018 terdapat delapan program yang capaiannya mencapai target, delapan program capaiannya melampaui target dan tiga program capaiannya masih di bawah target. Adapun capaian program masih dibawah target anatara lain :

- a. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK) dengan indikator jumlah SDM yang memenuhi standar jumlah dan kompetensi, belum mencapai target karena belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi dan perekrutan tidak sepenuhnya berdasarkan ABK. Disamping itu pada tahun 2018 program ini tidak mendapatkan pembiayaan.
- b. Program pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit dengan indikator jumlah terbangunnya gedung rumah sakit sebanyak 7 unit tahun 2018 baru tercapai 2 unit. Capaian di bawah target ini dikarenakan proses peminjaman anggaran untuk membiayai pembangunan rumah sakit di Nyitdah mengalami kendala dengan PT. SMI.
- c. Program peningkatan kesehatan Ibu, dengan indikator angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup target 2018 sebesar 55 namun capaiannya 77. Semakin besar angka kematian ibu menunjukkan kondisi yang lebih buruk, oleh karena itu capaian 77 ini menunjukkan kondisi lebih buruk dari target yang ditetapkan sebesar 55. Kondisi ini diakibatkan karena pencatatan kematian ibu didasarkan pada KTP, sehingga kematian ibu yang berdomisili di luar Tabanan dicatatkan di Tabanan.

Sementara itu delapan program capaiannya sudah sesuai target dan delapan program lainnya mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena tingginya komitmen

dan tanggung jawab *stakeholders* terhadap akuntabilitas kinerja program dan kegiatan yang diemban.

Pada BRSUD Kabupaten Tabanan terdapat satu program yang didukung oleh tiga kegiatan dengan jumlah total anggaran 2018 sebesar Rp. 104.822.930.231,82 dan realisasi terjadi pelampauan yaitu Rp106.508.832.382,58 (101,61%). Program yang dilaksanakan BRSUD yaitu program pelayanan kesehatan rujukan dengan indikator persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima dan target kinerja 2018 sebesar 100% telah tercapai 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target program yaitu ketersediaan anggaran yang cukup dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu.

Capaian SPM BRSUD mengalami penurunan dari 81,52% tahun 2017 menjadi 80% tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Faktor yang mempengaruhi penurunan capaian SPM antara lain 1). Terdapat perubahan cara perhitungan SPM di tahun 2017 dengan 2018. Pada perhitungan SPM tahun 2017 dari 21 jenis standar, dijabarkan menjadi 92 indikator. Sedangkan pada SPM tahun 2018 dari 21 jenis standar, dijabarkan lebih spesifik lagi menjadi 100 indikator. Hal ini menyebabkan jumlah pembagi di tahun 2018 lebih banyak sehingga mempengaruhi persentase; 2). Ada indikator SPM yang tercapai tahun 2017 namun tidak tercapai tahun 2018, seperti persentase kejadian kematian ibu karena persalinan, dari tidak ada kejadian pada tahun 2017 meningkat menjadi 8.33% tahun 2018 karena pada tahun 2018 ada satu kejadian ibu dengan kehamilan 12 minggu datang dalam kondisi sudah perdarahan dan shock.

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan program sejumlah 21 program sebagaimana amanat RPJMD. Untuk tahun 2018, sejumlah 16 program dapat dilaksanakan dan 5 program belum dapat didanai salah satunya dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan skala prioritas. Dengan tidak terlaksananya program tersebut, secara tidak langsung

mempengaruhi capaian target program. Adapun 5 program yang tidak dapat dilaksanakan yaitu:

1. Program Perencanaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional;
2. Program Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. Program Pembangunan Jalan Baru Kabupaten;
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Infrastruktur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Untuk tahun 2018, dari 16 program yang dilaksanakan, 1 program capaiannya dapat melebihi target yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah dengan indikator Jumlah Pusat Pengolahan Limbah Komunal Terbangun yang ditargetkan sejumlah 54 unit di tahun 2018, dapat direalisasikan mencapai 60 unit. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi di tahun 2018 sehingga dapat dibangun 8 unit IpPAL Komunal dengan total capaian menjadi 60 unit.

Dari program yang dilaksanakan di tahun 2018, terdapat 9 program yang dapat dilaksanakan sesuai target yang didukung dengan kegiatan-kegiatan dengan pendanaan yang cukup untuk pencapaian target kegiatan maupun program. Program-program tersebut yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LPJU;
6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum;
8. Program Pengembangan Sumber Daya Air;
9. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;

Selain itu terdapat sejumlah 6 program yang belum bisa mencapai target yaitu:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dengan indikator yaitu Persentase Serapan Anggaran Sesuai Target dimana ditargetkan tercapai 100%, namun hanya dapat direalisasikan 45,06% atau dari pendanaan sejumlah Rp 453.910.691.553,- terrealisasi sejumlah Rp 204.544.573.829,05. Hal ini paling besar dipengaruhi oleh belum terrealisasinya seluruh kegiatan Pembangunan RSUD di Tabanan yang dianggarkan sejumlah Rp 205.795.537.670,- yang baru terrealisasi sejumlah Rp 755.342.869,-. Selain itu, adanya efisiensi dan juga sisa lelang dari beberapa kegiatan lainnya.

2. Program Pembangunan Jembatan Baru

Dengan indikator Jumlah Jembatan Baru yang Dibangun sejumlah 4 unit sampai dengan 2018, baru dapat direalisasikan melalui 1 kegiatan di tahun 2018 untuk membangun 1 unit jembatan baru. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan dana untuk pembangunan jembatan cukup tinggi walaupun sesungguhnya, jembatan yang akan dibangun berfungsi sangat signifikan untuk pengembangan wilayah dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang. Mengingat tingginya kebutuhan pendanaan tersebut, akan diupayakan melalui pendanaan BKK Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya, dan untuk pendukungnya sudah dipersiapkan DED untuk beberapa jembatan lainnya yang akan dibangun.

3. Program Peningkatan Jalan di Kabupaten Tabanan

Adapun indikatornya yaitu Persentase Jalan dalam Kondisi Baik sejumlah 90% di tahun 2018, belum dapat diwujudkan dimana kondisi jalan baik baru dapat diwujudkan sebesar 80% sampai dengan tahun 2018. Hal ini sangat dipengaruhi dengan tingginya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan jalan. Di sisi lainnya, Kabupaten Tabanan belum mampu membangun jalan dengan kebutuhan pelengkap seperti drainase sehingga sangat mempengaruhi umur jalan. Kondisi geografis yang bergelombang dengan kondisi tanah labil dan juga curah hujan yang tinggi menjadikannya rawan bencana dan sangat mempengaruhi umur jalan sehingga jalan yang sudah dalam

kondisi baik dan diperkirakan dapat berumur antara 5-8 tahun sudah rusak kembali sebelum umur konstruksi yang direncanakan. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah salah satunya melalui penggunaan teknologi baru seperti media Matos atau aspal karet ataupun alternative teknologi lainnya. Selain itu, untuk pembiayaan yang tinggi diupayakan melalui pendanaan pusat, DAK maupun BKK Provinsi atau kabupaten/kota lainnya.

#### 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Indikator program ini yaitu Persentase Genangan Yang Dapat Ditangani sejumlah 91% di tahun 2018, baru mencapai 50% dimana hal ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan biaya untuk penanganan genangan di satu wilayah. Namun demikian, sudah dilakukan upaya-upaya untuk penuntasan masalah genangan dengan perbaikan-perbaikan skala kecil untuk genangan yang sifatnya sesaat dan persiapan DED pada lokasi genangan yang perlu penanganan lebih kompleks. Untuk selanjutnya diupayakan penanganan genangan melalui pendanaan APBN melalui Balai Wilayah Bali-Penida atau Balai Jalan, APBD Provinsi maupun BKK Kabupaten/Kota lainnya yang disesuaikan dengan status jalan dimana genangan tersebut berada.

#### 5. Program Peningkatan Prasarana Aparatur dan Prasarana Publik

Dengan indikator Persentase Prasarana Aparatur dan Prasarana Publik dalam Kondisi Baik sejumlah 80% di tahun 2018 belum dapat diwujudkan sepenuhnya, dimana masih banyak kantor-kantor dan juga prasarana publik dalam kondisi kurang layak. Sudah dilakukan upaya-upaya melalui perbaikan-perbaikan untuk beberapa kantor, namun memang untuk beberapa kantor perangkat daerah dibutuhkan perbaikan total sehingga dibutuhkan pendanaan yang tinggi. Demikian juga untuk prasarana publik sudah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ataupun pembangunan baru melalui kegiatan seperti Rehabilitasi GOR Debes, Pembangunan Penyengker dan Penataan Halaman Gedung Maria, namun masih dibutuhkan untuk pembangunan-pembangunan prasarana publik lainnya untuk memberikan ruang kepada publik untuk beraktifitas.

Demikian pula untuk Pembangunan RSUD di Tabanan belum dapat diwujudkan di tahun 2018 dikarenakan terjadi beberapa kali gagal tender dalam proses pengadaannya. Mengingat tingginya kebutuhan pendanaan untuk peningkatan prasarana aparatur dan prasarana publik, diupayakan melalui pendanaan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota lainnya ataupun pinjaman yang sudah diupayakan dari beberapa tahun terakhir ini.

#### 6. Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang dengan indikator Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Dilegalisasi yaitu sejumlah 8 dokumen di tahun 2018 belum dapat diwujudkan. Hal ini tidak terlepas dari panjangnya tahapan yang harus dilaksanakan dan juga tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah (PD) namun diperlukan dukungan dari PD lainnya seperti dalam hal Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan oleh DLH ataupun Rekomendasi Peta oleh Badan Informasi Geospasial yang membutuhkan proses yang cukup lama. Namun demikian, untuk persyaratan dokumen sudah dapat dilaksanakan dan diperlukan tahapan selanjutnya untuk proses legalisasi bagi dokumen yang telah diproses.

#### D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan 3 program sebagaimana arahan RPJMD dan di tahun 2018 dapat dilaksanakan 2 program yaitu Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan dengan 3 kegiatan dan Program Pengembangan Perumahan (RPJMD sebelum perubahan-Program Stimulan Perumahan Swadaya) dengan indikator Persentase Lingkungan Perumahan yang Tertangani dengan 1 kegiatan.

Adapun jumlah total pendanaan untuk Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun 2018 mencapai Rp 439.500.000,- dengan realisasi mencapai Rp 392.116.950,- atau 89,22%. Untuk keempat kegiatan yang dilaksanakan 3 kegiatan sudah memenuhi target hanya satu

kegiatan yaitu Kegiatan Monev Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang ditargetkan 10 kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi, belum dapat dilaksanakan sesuai target 10 kecamatan, mengingat kegiatan ini tergantung kepada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilaksanakan oleh pusat dimana untuk tahun 2018 hanya 2 kecamatan yang mendapatkan alokasi program BSPS yaitu Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat.

Untuk program yang dilaksanakan di tahun 2018, terdapat satu program dapat memenuhi target yaitu Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan sejumlah 92% atau sejumlah 107,04 Ha. Walaupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak menyentuh langsung penanganan infrastruktur, namun dari pendanaan lainnya seperti dana APBN, pengurangan luasan kumuh di Kabupaten Tabanan dapat dicapai.

Untuk program lainnya yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Lingkungan Perumahan yang Tertangani ditargetkan 91% di tahun 2018, belum dapat dilaksanakan secara maksimal dimana diperlukan anggaran yang cukup tinggi untuk mengurangi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tabanan yang berjumlah kurang lebih 2.836 unit rumah berdasarkan hasil pendataan sampai dengan tahun 2018. Diharapkan kondisi pendataan di tahun 2018 dapat dijadikan patokan sehingga penuntasan RTLH segera dapat dituntaskan dengan memaksimalkan pendanaan dari pusat, provinsi, bantuan kabupaten/kota lainnya maupun CSR.

#### E. Perhubungan

Program dan kegiatan untuk urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, dimana untuk tahun 2018 sejumlah 7 (tujuh) program dan 17 kegiatan dapat dilaksanakan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tabanan, adapun program yang dilaksanakan dalam urusan Perhubungan meliputi 10 (sepuluh) program sehingga terdapat 3 program dengan kegiatannya yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2018 yaitu:

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Dengan tidak terlaksanakannya kegiatan-kegiatan pada program ini mempengaruhi capaian target program tersebut di tahun 2018.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 17 kegiatan yang dilaksanakan secara fisik kegiatan semua dapat terlaksana dengan persentase fisik mencapai 100%. Adapun secara keuangan secara keseluruhan mencapai 94,68% atau Rp 21,405,113,180.00 dari total anggaran sejumlah Rp 22,608,950,740.00. Adapun kegiatan dengan capaian keuangan terendah yaitu kegiatan Forum Lalu Lintas sejumlah 79.18%, dan persentase tertinggi yaitu kegiatan Pendataan Aset mencapai 99.75%. Dari 17 kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perhubungan, secara umum seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase keuangan di atas 75% dan target kegiatan sesuai dengan direncanakan. Namun demikian terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Lomba WTN yang keluarannya tidak sesuai dengan target dikarenakan pada tahun 2018 sudah dilakukan penilaian dari Pusat, sedangkan proses Lomba WTN di tingkat pusat dilaksanakan sampai dengan 2019 untuk satu tahap penilaian sampai dengan penetapan penerima WTN.

Berdasarkan program melalui kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018, sejumlah 1 program dapat melebihi target capaian yaitu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan target Rasio Jumlah Seat Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penduduk sebesar 1,4% dimana di tahun 2018 dapat mencapai 4,2%. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan penunjang program yaitu cukup berhasil dilaksanakan yaitu Trans Serasi yang sampai dengan tahun 2018 memenuhi target untuk capaian cakupan wilayah layanan yang mencapai 7 kecamatan dimana kegiatan ini memberikan layanan angkutan bagi siswa yang mampu meningkatkan Rasio Jumlah Seat Angkutan Umum Terhadap Jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan.

Selain itu, terdapat 3 Program yang dapat memenuhi target capaian yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas.

Namun demikian terdapat juga 3 program yang tidak dapat memenuhi target yaitu:

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dengan target Persentase Serapan Anggaran Sesuai Target 100%, di tahun 2018 tercapai 94,68% dimana terdapat efisiensi yang dilakukan untuk seluruh kegiatan di tahun 2018.

- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program ini dengan target kendaraan yang laik uji sejumlah 22.700 kendaraan di tahun 2018 dapat dicapai untuk 19.624 kendaraan yang laik uji. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan penunjang program yang tidak terlaksana di tahun 2018. Selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: beberapa angkutan wajib uji yang melakukan numpang uji di luar wilayah Kabupaten Tabanan, adanya kendaraan yang seharusnya melakukan uji kendaraan namun tidak melaksanakan kewajibannya dan juga adanya kemungkinan penurunan kepemilikan kendaraan wajib uji karena situasi perekonomian secara umum. Hal ini perlu diperhatikan mengingat program ini juga sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, diperlukan realisasi kegiatan pendukung program seperti Pengadaan Alat Uji untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Target program yaitu Persentase Jumlah Kajian Bidang Perhubungan Terhadap Kebutuhan dimana di tahun 2018 ditargetkan 76%, baru dapat dicapai 11%. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang tidak secara langsung mendukung target capaian program walaupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat mencapai target kegiatan

sebagaimana yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan realisasi kegiatan yang mendukung langsung capaian program. Karena adanya keterbatasan anggaran, kegiatan-kegiatan yang berupa kajian, dapat dilaksanakan secara swakelola atau melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Perhubungan atau sejenisnya sesuai dengan kajian yang akan dilakukan.

#### F. Penanggulangan Bencana

Untuk Urusan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 6 program yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 7 program yang menjadi amanat RPJMD di tahun 2018. Adapun program yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2018 yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sehingga secara tidak langsung hal ini mempengaruhi capaian target program tersebut di tahun 2018.

Untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 terdapat 10 kegiatan di 6 program dari 28 kegiatan yang tercantum dalam Renstra BPBD Tahun 2017-2021 dan 7 program dalam RPJMD 2017-2021. Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2018, tentunya terdapat beberapa kegiatan yang tidak terdani sesuai dengan perencanaan dikarenakan keterbatasan anggaran. Dari 10 kegiatan yang dilaksanakan adapun serapan anggaran mencapai 97,92 % atau Rp 1,736,719,542.00 dari total anggaran sejumlah 1,773,674,250.00. Demikian pula untuk realisasi fisik mencapai 98,59% dimana secara keseluruhan kegiatan dalam bidang urusan Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian target program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Dari 6 program yang dilaksanakan, tidak terdapat program yang melebihi target namun sejumlah 4 program dapat mencapai target, dan 1 program tidak mencapai target serta 1 program mengalami kesulitan dalam perhitungan target yaitu Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan target Menurunnya Indek Resiko Bencana, dimana hal ini dikarenakan banyaknya variable dan diperlukan survey secara menyeluruh untuk menentukan Indek Resiko Bencana di suatu daerah.

Untuk program yang tidak mencapai target yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dimana program ini dengan target 100%, di tahun 2018 tercapai 97, 92% dikarenakan terdapat efisiensi yang dilakukan untuk seluruh kegiatan di tahun 2018. Berdasarkan target-target yang ditetapkan dalam RPJMD, kiranya masih diperlukan pendanaan yang cukup untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam urusan Penanggulangan Bencana sehingga dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan juga Renstra PD.

#### G. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan program dan kegiatan pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, untuk tahun 2018 dilaksanakan 8 program sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2017-2021 dengan 14 kegiatan dari 20 kegiatan yang direncanakan dalam Renstra PD. Berdasarkan penganggaran, dari Rp 7.371.000.000,- yang diindikasikan di tahun 2018 dalam RPJMD, baru dapat terdani Rp 5.297.540.400,-. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, penyerapan anggaran mencapai 97,11% atau sebesar Rp 5.144.531.04,- dan fisik secara keseluruhan sudah mencapai 100% atau seluruh kegiatan dapat dilaksanakan di tahun 2018. Berdasarkan indikasi penganggaran, tentunya terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat didanai ataupun kegiatan yang dilaksanakan belum terdani secara penuh. Namun demikian terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah dapat memenuhi target dari yang telah direncanakan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018, belum ada program dan kegiatan yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat 5 program yang capaiannya dapat memenuhi target yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Pengembangan e-government;
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;
5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, didukung dengan kegiatan-kegiatan yang juga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan Program lainnya capaiannya belum dapat memenuhi target sejumlah 3 program yaitu:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program ini dengan target Persentase Serapan Anggaran Sesuai Target yaitu 100%, di tahun 2018 tercapai 97,11% dimana terdapat efisiensi yang dilakukan untuk seluruh kegiatan di tahun 2018. Namun demikian, seluruh kegiatan pendukung pada program ini dapat dilaksanakan sesuai targetnya.

2. Program Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi

Program ini didukung dengan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Kegiatan Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tabanan dimana kegiatan-kegiatan ini pun belum dapat memenuhi target kegiatan. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dengan target kegiatan Jumlah OPD yang Terintegrasi Jaringan sejumlah 27 OPD, baru dapat dicapai 25 OPD di tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari tingginya biaya untuk pengadaan infrastruktur dan juga jarak OPD yang cukup jauh dari jaringan induk. Untuk kedepannya, hal ini akan diupayakan dengan mengadakan kerjasama dengan provider yang dapat menyediakan infrastruktur sehingga dapat menekan biaya pada pemasangan infrastruktur, sehingga hanya memerlukan biaya untuk penyediaan layanan (*bandwidth*).

Sedangkan untuk Kegiatan Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi belum dapat berjalan dengan baik dimana belum semua menara telekomunikasi dapat dimonitor dikarenakan kurangnya pendanaan pendukung kegiatan. Dari 193 menara telekomunikasi yang ada, di tahun 2018 baru 114 menara yang dimonitor dengan hasil 103 menara laik uji (berijin dan layak

operasi) sedangkan 11 menara belum berijin namun layak operasi. Dari hasil monitoring ini, masih terdapat 79 menara yang belum dimonitor sehingga belum dapat diketahui secara pasti persentase menara yang laik operasi. Untuk selanjutnya diharapkan dapat mengefektifkan pendanaan untuk pelaksanaan monitoring sehingga target 85% menara laik operasi dapat dipenuhi.

### 3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Masyarakat

Program ini dengan target di tahun 2018 yaitu Persentase Desa di Wilayah Kabupaten Tabanan yang Berbasis IT sebesar 70% belum dapat direalisasikan dimana di tahun 2018 baru didukung dengan 1 kegiatan yaitu Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi (PIK). Untuk kegiatan ini baru dapat dilakukan di satu kecamatan dan perlu dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lainnya guna memenuhi target program. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dengan kegiatan bidang teknologi informasi yang mudah diaplikasikan di tingkat desa yang dapat mendukung informasi, pelayanan maupun inovasi di tingkat desa dalam rangka mendukung peningkatan jumlah desa yang berbasis IT.

## H. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Terdapat enam program dan lima belas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dengan total anggaran sebesar Rp 4.586.118.778 dan realisasi sebesar Rp 4.533.900.215 (98,86%). Jika dicermati, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagian besar anggarannya bersumber dari DAK berupa Biaya operasional KB, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD Murni sangat terbatas. Meskipun dengan keterbatasan anggaran namun seluruh program yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018. Tercapainya seluruh target program tidak lepas dari tingginya tanggung jawab pemegang program dan pemimpin kegiatan serta kerjasama petugas dengan masyarakat terkoordinasi dengan baik.

## I. Urusan Kebudayaan

Program dan kegiatan untuk urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, dimana untuk tahun 2018 sejumlah 6 (enam) program dan 21 kegiatan dapat dilaksanakan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tabanan, adapun program yang dilaksanakan dalam urusan Kebudayaan meliputi 7 (tujuh) program yang dimandatkan dalam RPJMD sehingga terdapat 1 (satu) program yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2018 yaitu Program revitalisasi sarana prasarana Kesenian/Budaya

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 21 kegiatan yang dilaksanakan secara fisik kegiatan semua dapat terlaksana dengan persentase fisik mencapai 91,676%. Adapun secara keuangan secara keseluruhan mencapai 98,05% atau Rp 5,305,863,872.00 dari total anggaran sejumlah Rp 5,411,492,600.00. Adapun capaian berdasarkan kegiatan Tahun 2018

- Penunjang Administrasi Perkantoran 90,05%
- Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dana Hibah 93,78
- Pengadaan Sarana Prasaean Kantor 100%,
- Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja 100%,
- Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip 100%,
- Penataan Aset 100%,
- Monitoring Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih 100%,
- Pelaksaaan PKB Tingkat Kabupaten dan Provinsi 100%,
- Parade Seni 100%, Kegiatan Utsawa Darma Gita 100%,
- Pembinaan dan Lomba Subak Abian 100%,
- Aci di Penyiwi Pura Subak Kabupaten Tabanan 100%,
- Pemeriksaan dan Pembahasan Awig-awig Subak 100%.

Dari 21 kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kebudayaan, secara umum seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase keuangan di atas 98,05% dan target kegiatan sesuai dengan direncanakan. Terdapat 6 Program yang telah memenuhi target capaian yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - Program Lembaga Adat/ Tradisional Yang terjaga Kelestariannya
- Selain itu masih terdapat program yang tidak dapat di danai sehingga target tidak tercapai yaitu:
- Program revitalisasi sarana prasarana Kesenian/Budaya, Program ini tidak bisa di danai sehingga target 2 di RPJM karena membutuhkan pembiayaan sangat besar ini di sebabkan anggaran APBD masih defisit.

#### J. Perpustakaan dan Arsip

Untuk Urusan Perpustakaan dan Arsip yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, terdapat 5 program yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 7 program yang menjadi amanat RPJMD di tahun 2018. Adapun program yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2018 yaitu :

1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan tidak terlaksanakannya kegiatan-kegiatan pada program ini mempengaruhi capaian target program tersebut di tahun 2018. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 12 kegiatan yang dilaksanakan secara fisik kegiatan semua dapat terlaksana dengan persentase fisik mencapai 100%. Adapun secara keuangan secara keseluruhan mencapai 98,86% atau Rp 1.046.348.933,00 dari total anggaran sejumlah Rp 1.058.440.200,00 Adapun kegiatan dengan capaian keuangan terendah yaitu kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sejumlah 89,30%, dan Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kerja sejumlah 89,40 % dan persentase tertinggi yaitu kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 100%, Kegiatan Penyusunan Renstra Renja dan Lakip mencapai 100%, dan Pendataan Aset 100%. Dari 12 kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perpustakaan dan Arsip, secara umum seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase keuangan di atas 98,86% dan target kegiatan sesuai dengan direncanakan. 8 Program yang telah dilaksanakan semua telah memenuhi target capaian yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
5. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

#### K. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program dan kegiatan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan, dimana untuk tahun 2018 berjumlah 5 (Lima) program dan 20 ( Dua Puluh ) kegiatan dapat dilaksanakan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 20 kegiatan yang dilaksanakan secara fisik kegiatan semua dapat terlaksana dengan persentase fisik mencapai 84,51%. Dan persentase keuangan secara keseluruhan mencapai 84,66% atau dengan jumlah Rp. 3,384,832,042.00 dari total pagu anggaran sejumlah Rp 3,998,218,812.00 . dalam hal ini adapun kegiatan dengan capaian keuangan terendah yaitu pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desadengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bumdes baru mencapai 0,53% di karenakan adanya Kegiatan tidak dilaksanakan karena Desa tidak dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor BUMDes.dan Persentase tertinggi yaitu Kegiatan Penyusunan Renstra Renja dan Lakip 100 % Dari 20 kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, secara umum seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase keuangan di atas 84,66% dan target kegiatan sesuai dengan direncanakan. terdapat 5 Program yang telah memenuhi target capaian yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- Program Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Desa.

#### L. Urusan Sosial ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 12 program yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 12 program terdapat 31 Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak, yang menjadi amanat RPJMD kabupaten Tabanan di tahun 2018. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 31 kegiatan yang dilaksanakan secara fisik kegiatan semua dapat terlaksana dengan persentase fisik mencapai 100%.

Adapun secara keuangan secara keseluruhan mencapai 98,58% atau Rp. 4,922,778,781.00 dari total anggaran sejumlah Rp.4,993,593,000.00 Adapun kegiatan dengan capaian keuangan terendah yaitu kegiatan Penangan Korban Pasca Bencana sejumlah 95,18%, dan persentase tertinggi yaitu kegiatan Penyusunan Renstra Renja dan Lakip mencapai 100%. Secara umum seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase keuangan di atas 96,81% dan target kegiatan sesuai dengan direncanakan.

Terdapat 12 Program yang telah dilaksanakan semua telah memenuhi target capaian yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT )
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pembinaan Anak Terlantar
- Program Pemberian Santunan dan Tunjangan kepada penderita Disabilitas permanen dan lanjut Usia
- Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo
- Program Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak
- Program Peningkatan Mutu Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan

#### M. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat 5 program yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 5 program yang menjadi amanat RPJMD di tahun 2018. Adapun program yang ada semua dapat dilaksanakan di tahun 2018. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 dari 12 kegiatan yang dilaksanakan secara fisik kegiatan semua dapat terlaksana dengan persentase fisik mencapai 990%. Adapun secara keuangan secara keseluruhan mencapai 96,69% atau Rp 41.597.832.864,00 dari total anggaran sejumlah Rp 43.022.131.720,00. Adapun kegiatan dengan capaian keuangan terendah yaitu kegiatan Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja sejumlah 61,65%, Kegiatan Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD 51,42%, dan Kegiatan Pengawasan Perda-perda 42,33 persentase tertinggi yaitu kegiatan Penyusunan Restra, Renja dan Lakip mencapai 100%, Dari 12 kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara umum seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase keuangan di atas 96,69% dan target kegiatan sesuai dengan direncanakan. 8 Program yang telah dilaksanakan semua telah memenuhi target capaian yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
5. Program kerjasama informasi dan media massa

#### N. Urusan Kecamatan

Pelaksanaan Bidang Urusan Kecamatan dilaksanakan oleh 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Untuk program di Bidang Urusan Kecamatan terdiri dari 5 program sebagaimana arahan RPJMD dengan kegiatan terdiri dari 13-15 kegiatan di masing-masing kecamatan sebagaimana kebutuhan pada masing-

masing kecamatan yang juga tercantum dalam Renstra masing-masing kecamatan. Adapun pendanaan untuk program dan kegiatan Bidang Urusan Kecamatan di tahun 2018 sebesar Rp 8,656,136,700 dengan realisasi keuangan mencapai 98,03% atau sebesar Rp 8,485,609,656,-. Jumlah pendanaan ini lebih kecil dari indikasi pembiayaan yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebesar Rp 11.607.000.000,-.

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan, tidak terdapat program yang capaiannya melebihi target dan sebanyak 3 program dapat dilaksanakan sesuai target yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan;

Sedangkan 3 program lainnya belum dapat memenuhi target yaitu:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dengan target Persentase Serapan Anggaran Sesuai Target yaitu 100%, di tahun 2018 tercapai 98,03% dimana terdapat efisiensi yang dilakukan untuk seluruh kegiatan di seluruh kecamatan di tahun 2018. Namun demikian, seluruh kegiatan pendukung pada program ini dapat dilaksanakan sesuai targetnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor belum dapat diakomodir untuk seluruh kecamatan di tahun 2018, walaupun sesungguhnya hampir seluruh kecamatan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Di tahun 2018, hanya 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kediri dan Penebel yang dapat melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Dengan target di tahun 2018 yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik sebesar 80 % baru 3 kecamatan (Tabanan, Kediri dan Kerambitan) yang terpenuhi, sedangkan untuk 7 kecamatan lainnya hanya baru mencapai 50% sarana dan prasarana kantor

dalam kondisi baik. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana, dibutuhkan tambahan pendanaan untuk dapat memenuhi kebutuhan di masing-masing kecamatan. Dalam hal efisiensi, kiranya dapat mengusahakan sarana dan prasarana yang masih layak atau melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk dapat dipergunakan kembali sesuai dengan kebutuhan yang ada.

### 3. Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

Program ini belum dapat mencapai target dimana di tahun 2018 ditargetkan ada 6 jenis inovasi pelayanan publik, namun sampai dengan tahun 2018 baru 3 inovasi yang dapat dikembangkan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pupuan, Kerambitan dan Tabanan. Program ini cukup penting untuk dikembangkan dan diduplikasi untuk meningkatkan pelayanan public yang merupakan salah satu arah kebijakan dalam rangka memenuhi Misi 5 RPJMD. Untuk pengembangan inovasi ini, perlu dilakukan kompetisi kembali sehingga menumbuhkan ide-ide baru dalam hal pelayanan publik khususnya di tingkat kecamatan. Selain itu, dapat mengkondisikan atau membiayai inovasi-inovasi dari diklat-diklat kepemimpinan yang masuk ke dalam katagori program dan kegiatan pelayanan publik sebagai inovasi untuk menunjang Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan.

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Rekomendasi

Pertumbuhan ekonomi Tabanan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Ketimpangan struktur ekonomi antara sektor primer, sekunder, dan tersier juga masih lebar. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan masih menghadapi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan serta pencapaian Kinerja Daerah dalam RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 maka yang perlu diperhatikan

dalam rangka pencapaian target-target RPJMD dan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan tidak efisien berdampak pada tidak meratanya mutu pendidikan antar sekolah dan antar wilayah.
2. Sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan sampai pada tingkat Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes tidak merata, masih terkonsentrasi di daerah perkotaan.
3. Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian
4. UMKM yang berkembang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sektor primer atau sumber bahan baku yang digunakan hanya sebagian kecil dari bahan baku lokal;
5. Ketimpangan konsep pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya dan lingkungan serta bersifat kerakyatan belum tergarap secara sistematis dan terintegrasi.
6. Pembangunan infrastruktur belum mampu memberikan dampak terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terutama wilayah barat Tabanan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengingat RKPD 2020 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMDSB Tahun 2016-2021 maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerataan sarana dan prasarana wilayah, utilitas serta fasilitas pelayanan sosial masyarakat pada seluruh wilayah Kabupaten Tabanan
2. Target pertumbuhan ekonomi dan target indek gini yang belum tercapai maka pembangunan tidak hanya berdasarkan pendekatan fisik dan administratif saja tetapi juga berdasarkan pendekatan ekonomi kawasan. Hal ini terutama untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah kecamatan.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang memiliki potensi dan kemungkinan pengembangannya mampu melayani wilayah sekitarnya dan seluruh wilayah Kabupaten Tabanan, disertai dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur guna menumbuhkan kegiatan perdagangan dan jasa.

4. Menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian wilayah dengan menyebarkan lahan investasi sesuai dengan potensi yang dimiliki, pemerataan sarana dan prasarana wilayah, utilitas serta fasilitas pelayanan sosial masyarakat pada seluruh wilayah Kabupaten Tabanan.
5. Meningkatkan intensifikasi pertanian dan mempercepat penyediaan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Intensifikasi pertanian harus didukung oleh sarana dan prasarana pertanian seperti prasarana pengairan/irigasi, pupuk, prasarana hasil produksi, akses ke pemasaran produk yang baik guna mendukung jaminan keberhasilannya.
6. Meminimalkan alih fungsi lahan subur dari pertanian ke non pertanian dan penetapan lahan abadi pertanian untuk memantapkan ketahanan pangan serta menjaga agar Tabanan tetap sebagai lumbung pangan Bali.
7. Mensinergikan pertanian dengan pariwisata dengan mengembangkan konsep agrowisata.

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Kabupaten Tabanan harus mempertimbangkan sinergitas dan keselarasan dengan perencanaan ditingkat provinsi Bali dan ditingkat nasional. Oleh karena itu arah kebijakan yang diambil pun harus mempertimbangkan arah kebijakan ditingkat provinsi dan nasional. Sinergitas dan keselarasan ini akan memberikan dampak yang maksimal terhadap upaya peningkatan perekonomian daerah di tahun 2020.

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2020.

##### 3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Sesuai dengan tahapan pembangunan lima tahunan pada RPJPN 2005-2025 yang termuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, maka RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap lima tahunan terakhir yang harus dilaksanakan. Arah pembangunan yang ditetapkan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Mandiri artinya masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju dalam hal kualitas SDM-nya, tingkat kemakmurannya, kemantapan sistem dan kelembagaan politik serta hukumnya. Adil artinya tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu,

gender, maupun wilayah diantara masyarakat Indonesia. Makmur artinya masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Kebijakan ekonomi nasional dalam tahap ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan di sektor pertanian tanaman pangan, energi dan pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri manufaktur, serta kelautan dan kemaritiman. Tujuannya adalah agar Indonesia yang masih menjadi negara agraris dalam mengoptimalkan potensi pertaniannya tidak melakukan eksploitasi alam berlebihan dan mampu menjaga kontinuitasnya, mampu menghasilkan produk olahan baru dan mengelola potensi daerahnya menjadi tujuan wisata baru.

Untuk daerah Jawa-Bali sendiri, arah kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi adalah mendorong kolaborasi multi pihak (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas), antara lain melalui kewirausahaan, dan keterkaitan aktivitas ekonomi terutama di perdesaan non tertinggal.

### 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali

Arah kebijakan Ekonomi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2019 merupakan bagian awal dari perencanaan jangka menengah lima tahunan untuk periode 2018-2023. Upaya awal yang dilakukan ini adalah dengan mengendalikan inflasi daerah di Bali melalui :

- Peluncuran kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium, di Gudang Bulog Batubulan, Gianyar
- Rapat koordinasi penyusunan laporan Tw IV 2018 TPID Kabupaten Badung
- Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Karangasem
- Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Klungkung
- Pasar Murah, Operasi Pasar, Pemantauan Harga dan Sosialisasi Pengendalian Inflasi sebagai upaya antisipasi tekanan harga periode hari raya Natal, Galungan, dan tahun baru.

Kemudian perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2019 didorong oleh beberapa faktor yang meliputi:

1. Pembangunan Shortcut Jalan Mengwi-Singaraja
2. Pengembangan Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang
3. Pembangunan Jaringan Transmisi dan Pembangkit Listrik
4. Pengembangan Kawasan Nusa Dua (Hotel dan Kawasan Perkantoran)
5. Perpanjangan Runway dan pengembangan Bandara Ngurah Rai
6. Pembangunan Bendungan Tamblang dan Sidan
7. Pembangunan SPAM dan Perbaikan Jaringan Irigasi
8. Pembangunan Gedung, Jalan, Sekolah dan Sarana Olahraga
9. Beroperasinya Waduk Titab
10. Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif
11. Peningkatan Kunjungan Wisman Sebagai Dampak Lanjutan pelaksanaan IMF-WB AM 2018

Beberapa faktor pendorong kinerja ekonomi Bali kedepannya diperkirakan meliputi:

1. Pembangunan Bandara Bali Utara dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Bali Utara;
2. Shortcut Jalan Mengwi-Singaraja;
3. Pembangunan Bendungan Tamblang dan Sidan;
4. Pengembangan Kawasan Nusa Dua;
5. Peningkatan Kunjungan Wisman;
6. Upaya Peningkatan Produksi Pertanian melalui Program Gerakan Pemberdayaan Pertanian Terpadu (GPPT), Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), serta Implementasi Pergub Produk Lokal.

Tantangan dan peluang ekonomi Bali meliputi:

1. Penurunan Kualitas Pariwisata Bali, untuk mengatasi hal ini dapat ditempuh kebijakan pengembangan quality tourism melalui pengembangan wisata minat khusus berupa MICE berskala international, Medical Tourism, Sport Tourism dan

Retired Tourism. Selain itu, juga dapat dilakukan pengembangan zonasi destinasi wisata sesuai karakter masing-masing daerah dengan konsep *one island management*. Selain itu, juga dapat ditempuh kebijakan pengembangan pasar alternatif wisman yang meliputi Eropa Tengah, Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika.

2. Semakin Berkembangnya Destinasi Wisata Dunia. Untuk mengatasi hal ini, dapat ditempuh melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar destinasi wisata. Selain itu, juga dilakukan pengembangan kawasan pariwisata baru, antara lain pengembangan kawasan pariwisata Bali Utara (Menjangan).
3. Ketergantungan Akses Melalui Udara dan Keterbasan Infrastruktur, untuk mengatasi hal ini kebijakan pengembangan pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang menjadi salah upaya yang sedang berjalan.
4. Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama Bali. Terkait dengan hal ini, maka perlu dilakukan pengembangan pasar alternatif produk ekspor meliputi Eropa Tengah, Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika, dengan memaksimalkan peran kedutaan besar maupun konsulat jenderal dimasing-masing kawasan tersebut untuk menjaring pasar.
5. Net Perdagangan Antar Daerah Bali yang Selalu Negatif. Untuk mengatasi hal ini, dukungan terhadap Pergub Bali No. 99 tahun 2019 mengenai penggunaan dan pemasaran produk lokal perlu menjadi prioritas program untuk memastikan kualitas dan kuantitas produk Bali memenuhi khususnya kebutuhan pelaku usaha di bidang pariwisata.
6. Impor Pangan LN Trend Meningkat, untuk mengatasi hal ini beberapa komoditas impor seperti coklat, wine dan beras yang dapat dihasilkan di Bali dapat menjadi prioritas pengembangan.
7. Alih Fungsi Lahan. Untuk mengatasi hal ini maka pengembangan agrowisata dan desa wisata yang terintegrasi

dengan paket wisata yang dijual pelaku usaha pariwisata perlu menjadi prioritas pengembangan.

8. Pengendalian Inflasi daerah. Terkait dengan tantangan ini, upaya pengendalian inflasi melalui TIPD dan peningkatan peran BUMD melalui pengembangan BUMD yang khusus menangani pangan perlu menjadi prioritas.
9. Realisasi Belanja Terkonsetrasi pada Triwulan IV setiap tahun. Terkait dengan hal ini maka perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik dalam penyusunan program dan anggaran, percepatan tahapan pengadaan barang, jasa dan belanja modal diharapkan dapat dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran serta evaluasi secara konsisten dan berkesinambungan terhadap realisasi anggaran belanja.
10. Ketergantungan ekonomi Bali yang besar terhadap bidang usaha pariwisata. Terkait dengan tantangan ini, maka perlu dilakukan pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan dan pengembangan industri kreatif.

### 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tabanan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tabanan diarahkan agar memiliki keselarasan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Bali sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan dampak lebih besar terhadap keberhasilannya. Selain itu arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tabanan juga harus memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah saat ini seperti kondisi PDRB.

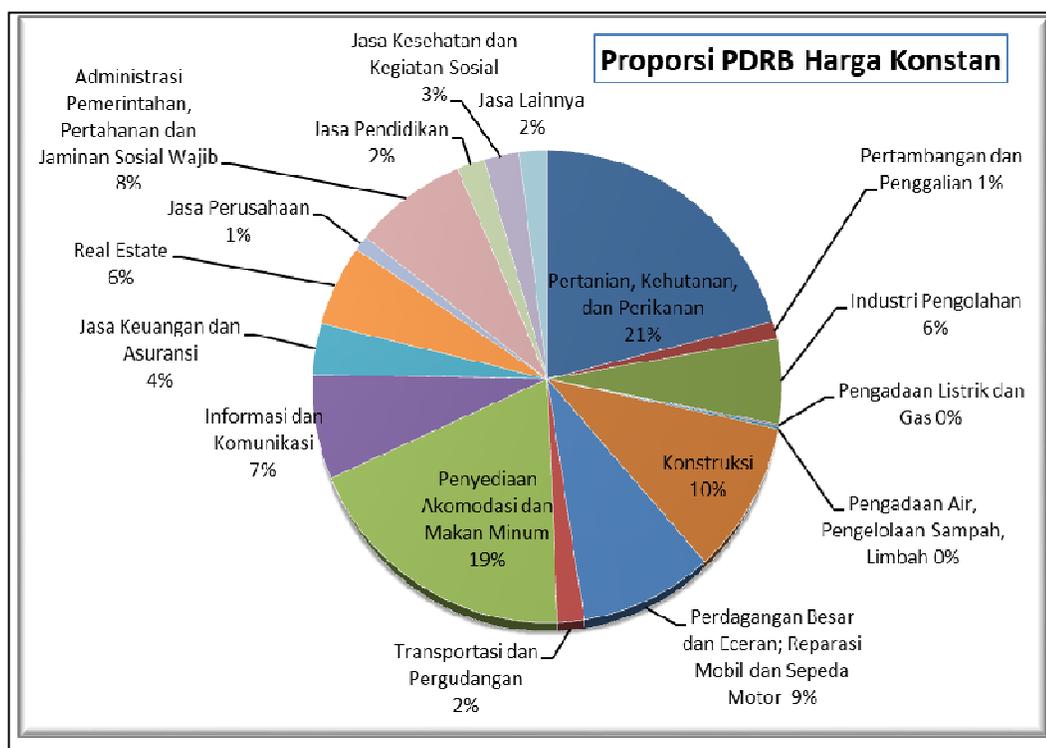
PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 20.551.149,69 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 14.113.208,67 juta rupiah atau meningkat 692.658,24 juta rupiah dibanding dengan tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan seri 2010 pada tahun 2017 sebesar 5,38 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2016 yang besarnya 6,14 persen.

Tabel 3.1  
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2017

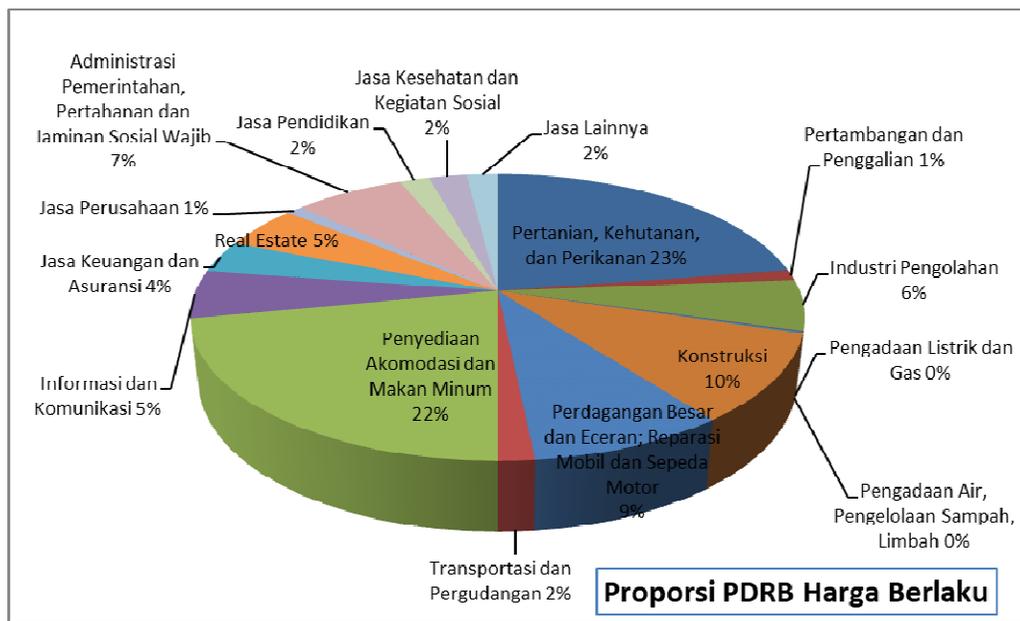
KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
PDRB Harga Berlaku (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)	18.665.249,73	20.551.149,69
PDRB Harga Konstan (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)	13.420.550,45	14.143.208,66
Laju pertumbuhan PDRB (persen)	6.14	5.38

Sumber : BPS Kab.Tabanan, 2018

Jika melihat dari 17 jenis lapangan usaha pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabanan Tahun 2017, pertanian masih memiliki persentase kontribusi tertinggi terhadap pendapatan regional Kabupaten Tabanan. Kemudian diikuti oleh kontribusi dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, dan yang ketiga adalah lapangan usaha dibidang konstruksi.



Gambar 3.1. Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017



Gambar 3.2. Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017

Namun demikian, jika dikelompokkan menurut 3 sektor yaitu primer, sekunder, dan tersier, Pendapatan Regional Kabupaten Tabanan masih didominasi oleh sektor tersier (penyediaan akomodasi makan minum, perdagangan, dan jasa-jasa). Sektor tersier memberikan sumbangan terhadap pendapatan regional Kabupaten Tabanan sebesar 60,36 persen, kemudian disusul oleh sektor primer sebesar 23,99 persen, dan sektor sekunder sebesar 15,65 persen. Begitu pula dilihat dari laju pertumbuhannya, dari nilai absolut baik atas harga konstan maupun atas harga berlaku, pertumbuhan ekonomi sektor primer masih berada dibawah pertumbuhan sektor sekunder dan tersier. Hal ini mengakibatkan peran sektor primer dalam pembentukan PDRB mulai mengalami pergeseran ke sektor sekunder dan tersier. Meskipun jika melihat data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan ditahun 2017, perlambatan yang terjadi dipengaruhi adanya bencana alam yaitu erupsi Gunung Agung.

Erupsi Gunung Agung mengakibatkan penutupan bandara Ngurah Rai serta menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke pulau Bali. Hal ini tentunya berdampak pada kontribusi sektor-sektor utama pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan seperti sektor pertanian, sektor akomodasi dan makan minum, serta sektor perdagangan. Di sektor pertanian Tabanan merupakan *supplier* terbesar kebutuhan konsumsi hotel-hotel dan restoran yang ada di

Bali yang tingkat kunjungannya menjadi berkurang. Selain itu Tabanan juga memiliki obyek-obyek dan akomodasi wisata yang juga menjadi sepi akibat penutupan bandara. Toko-toko dan kios-kios juga menjadi sepi pengunjung.

Data pergeseran kontribusi dari kelompok sektor primer ke kelompok sektor tersier juga harus disikapi dengan arah kebijakan yang tepat. Pembangunan di sektor akomodasi dan makan minum serta perdagangan harus lebih ditngkatkan dalam upaya mendukung pembangunan di sektor pertanian.

Dari hasil analisis kondisi ekonomi makro Kabupaten Tabanan, maka terdapat keselarasan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Bali. Arah Kebijakan ekonomi nasional yang selaras dengan Kabupaten Tabanan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan di sektor pertanian tanaman pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan arah kebijakan ekonomi provinsi Bali yang selaras dengan Kabupaten Tabanan adalah adanya upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan produksi pertanian melalui Program Gerakan Pemberdayaan Pertanian Terpadu (GPPT), Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), serta Implementasi Pergub Produk Lokal. Selain itu adanya upaya pengembangan agrowisata dan desa wisata yang terintegrasi dengan paket wisata yang dijual oleh pelaku usaha pariwisata selama ini menjadi prioritas pengembangan untuk mencegah alih fungsi lahan juga selaras dengan kebijakan ekonomi Kabupaten Tabanan. Adanya keinginan pemerintah Provinsi Bali untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Bali yang besar terhadap bidang usaha pariwisata melalui pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan dan pengembangan industri kreatif juga perlu diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tabanan.

Melihat keselarasan beberapa hal antara kondisi makro ekonomi Kabupaten Tabanan saat ini dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Bali, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tabanan dirumuskan untuk memprioritaskan sektor pertanian melalui pengembangan pusat-pusat agrowisata yang didukung dengan pengembangan fasilitas penunjang lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan pusat-pusat agrowisata tersebut.

Tabel 3.2  
Keselarasan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tabanan  
dengan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali

Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tabanan
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan di sektor pertanian tanaman pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif	meningkatkan produksi pertanian melalui Program Gerakan Pemberdayaan Pertanian Terpadu (GPPT)	memprioritaskan sektor pertanian pengembangan pusat-pusat agrowisata yang didukung dengan pengembangan fasilitas penunjang lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan pusat-pusat agrowisata
	pengembangan agrowisata dan desa wisata yang terintegrasi dengan paket wisata yang dijual oleh pelaku usaha pariwisata	
	pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan dan industri kreatif	

*Sumber : Data diolah, 2019*

#### 1. Arah Kebijakan Ekonomi dibidang Pertanian

Tidak dapat dipungkiri sektor pertanian bukanlah sektor yang mudah untuk dikembangkan. Ketergantungan akan kondisi alam seperti cuaca, air, dan kesuburan tanah menyebabkan fluktuasi hasil pertanian masih tinggi dan sulit untuk diprediksi. Hal ini masih diperparah dengan fluktuasi harga pasar yang sulit dikontrol oleh pemerintah. Oleh sebab itu selain berupaya untuk tetap menjaga kontinuitas hasil-hasil pertanian sebagai potensi utama wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga berupaya untuk mengarahkan kebijakan ekonominya terhadap sektor-sektor yang dapat memperkuat sektor pertanian.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tabanan dirumuskan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional, arah kebijakan ekonomi Provinsi Bali, potensi wilayah Kabupaten Tabanan di bidang

pertanian, serta mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan PDRB Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tabanan tahun 2020 diarahkan pada peningkatan sumber-sumber perekonomian di bidang pariwisata, pengembangan produk kreatif, serta perbaikan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan SDM dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan di sektor pertanian.

## 2. Agrowisata Pendukung Pertanian

Selain arah kebijakan ekonomi yang fokus untuk terus mengembangkan berbagai hal yang terkait dengan produktifitas pada sektor pertanian, keuntungan sektor pertanian di Kabupaten Tabanan yang memberikan dampak terhadap keindahan alam dan budaya masyarakatnya perlu dimanfaatkan dan disandingkan dengan sektor pariwisata yang telah berkembang di wilayah Bali. Demikian pula untuk mempertahankan jumlah masyarakat yang mau menggeluti sektor pertanian, maka kualitas sumber daya manusia masyarakat tersebut juga perlu ditingkatkan terutama dari sisi pendidikan dan kesehatan. Sektor -sektor tersebut harus pula dikembangkan secara merata sesuai dengan kondisi masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan.

Pariwisata di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk mendukung potensi wilayah pertanian. Kebijakan yang diarahkan adalah pengembangan agrowisata. Fasilitas-fasilitas pendukung agrowisata perlu dikembangkan di daerah-daerah yang berpotensi.

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan dibidang pariwisata yang dihadapi oleh Kabupaten Tabanan. Mulai dari kurangnya kualitas infrastruktur obyek wisata, infrastruktur akomodasi, infrastruktur akses, sampai dengan kualitas sumber daya manusia pendukung di daerah sekitarnya. Hal-hal tersebut menyebabkan masih rendahnya rata-rata lama menginap tamu. Jika dibandingkan kabupaten lainnya di Bali, rata-rata menginap tamu di kabupaten Tabanan hanya menduduki peringkat ke-6 dari 9 kabupaten/kota atau hanya 1,33 hari. Tingkat hunian

akomodasi wisata di Kabupaten Tabanan pun masih dibawah 40 persen sepanjang tahun 2017.

Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tabanan di tahun 2020 diarahkan untuk mengembangkan infrastruktur agrowisata sehingga mampu meningkatkan kunjungan dan lama hunian wisatawan yang menginap yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama para petani di desa-desa dan pendapatan regional kabupaten Tabanan.

Tabel 3.3  
Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Non Bintang di Bali Menurut Kab/Kota, November dan Desember 2018

No.	Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Menginap Tamu (hari)					
		Asing		Indonesia		Total	
		November 2018	Desember 2018	November 2018	Desember 2018	November 2018	Desember 2018
1	Jembrana	1.64	1.68	1.00	1.02	1.17	1.20
2	Tabanan	1.90	2.18	1.59	1.18	1.69	1.33
3	Badung	3.58	3.52	2.37	2.32	3.35	3.07
4	Gianyar	2.98	2.77	2.10	1.59	2.94	2.63
5	Klungkung	1.84	2.05	2.07	1.56	1.87	1.96
6	Bangli	1.00	1.00	1.00	1.02	1.00	1.02
7	Karangasem	3.74	3.62	1.63	1.52	3.43	3.11
8	Buleleng	2.66	2.64	1.11	1.10	1.49	1.45
9	Denpasar	4.67	4.82	1.87	1.72	2.48	2.09
	Bali	3.26	3.23	1.61	1.65	2.46	2.32

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2019

Tabel 3.4  
Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non Bintang Menurut Bulan di Kabupaten Tabanan (%), 2017

Bulan	Hotel Non Bintang
Januari	37,56
Februari	34,5
Maret	22,66
April	27,84
Mei	24,59
Juni	33,98
Juli	33,44
Agustus	36,58
September	28,04
Oktober	24,57
Nopember	28,82
Desember	25,3

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 3.5  
Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu  
Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tabanan (hari), 2017

Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik
Januari	1,42	1,34
Februari	1,71	1,71
Maret	2,08	1,04
April	1,83	1,14
Mei	1,61	1,24
Juni	1,96	1,14
Juli	1,52	1,15
Agustus	1,51	1,16
September	1,57	1,18
Oktober	1,73	1,07
Nopember	2,68	1,31
Desember	1,95	1,13

*Sumber : BPS Provinsi Bali, 2018*

### 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Agrowisata

Menciptakan obyek agrowisata baru di desa-desa artinya memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dalam pengelolaannya. Kualitas sumber daya manusia di desa harus ditingkatkan melalui pendekatan pelayanan dasar di desa-desa diantaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Saat ini kualitas infrastruktur di sekolah-sekolah masih harus ditingkatkan terutama untuk fasilitas-fasilitas yang tidak dapat didanai melalui Dana Alokasi Khusus. Demikian pula kualitas Pustu-Pustu yang masih perlu pembenahan di beberapa wilayah. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tabanan juga diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas infrastruktur tersebut.

#### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sampai dengan tahun anggaran 2019, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebesar 56 persen pendapatan daerah Kabupaten Tabanan berasal dari dana perimbangan baik berupa Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan sendiri hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 20 persen. Sedangkan sisanya sebesar 24 persen adalah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Sumber : Laporan Perhitungan APBD 2015 – 2018 dan analisis

Gambar 3.3 Pendapatan Daerah 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberikan arahan yang jelas bagi daerah untuk mengatur kewenangannya masing-masing menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dan tidak semata-mata bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat. Untuk itu Perangkat Daerah (PD) pengelola pendapatan harus mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat.

Pendapatan daerah dan PAD Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2016 – 2018 mengalami peningkatan 5,20% atau lebih rendah dari proyeksi dalam dokumen RPJMDSB 2016-2021 yang sebesar 7,68% per tahunnya. Rata-rata realisasi tersebut pun belum memperhatikan terjadinya fenomena penurunan alokasi dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tabanan dari Pemerintah Pusat (Tabel 3.6). Sedangkan PAD realisasi rata-rata peningkatannya melampaui target peningkatan pada RPJMDSB. Realisasi rata-rata PAD dalam kurun waktu tahun 2016-2018 adalah 8,29 persen, sedangkan pada RPJMDSB hanya 3,25 persen (Tabel 3.7).

Tabel 3.6  
Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya Tahun  
2016 – 2018

NO	TAHUN	REALISASI PENDAPATAN		TARGET PENDAPATAN RPJMDSB	
		(Rp) dalam juta	GROWTH (%)	(Rp) dalam juta	GROWTH (%)
1	2016	1.791.935,80	10,21%	1.791.935,80	10,21%
2	2017	1.847.829,53	3,12%	1.862.829,53	3,96%
3	2018	1.891.138,65	2,29%	2.027.841,54	8,86%
Rata-rata			5,20%		7,68%

*Sumber : Laporan Perhitungan APBD 2016 – 2018 dan analisis*

Tabel 3.7  
Dana Perimbangan Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya Tahun  
2016 – 2019

NO	TAHUN	REALISASI DANA PERIMBANGAN		PROYEKSI DANA PERIMBANGAN RPJMDSB	
		(Rp) dalam juta	GROWTH (%)	(Rp) dalam juta	GROWTH (%)
1	2016	1.102.265,09	-	1.102.265,09	-
2	2017	1.135.165,88	2,98%	1.135.165,88	2,98%
3	2018	1.077.346,59	-5,09%	1.247.325,96	9,88%
4	2019	1.091.284,20	1,29%	1.370.634,22	9,89%
Rata-rata			-0,27%		7,68%

*Sumber : Laporan Perhitungan APBD 2016 – 2018 dan analisis*

Tabel 3.8  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan dan  
Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2018

NO	TAHUN	REALISASI PAD		PROYEKSI PAD RPJMDSB	
		(Rp) dalam juta	GROWTH (%)	(Rp) dalam juta	GROWTH (%)
1	2016	318.033,60	1,93%	318.033,60	1,93
2	2017	327.462,52	2,96%	327.462,53	2,96
3	2018	409.183,80	19,97%	343.355,04	4,85
Rata-rata			8,29%		3.25%

*Sumber : Laporan Perhitungan APBD 2015 – 2018 dan analisis*

Jika dilihat dari sisi keseluruhan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mampu meningkatkan pendapatan sesuai target dalam RPJMDSB.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, sebagian besar komponen pendapatan daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari dana perimbangan. Masih besarnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap dana perimbangan menyebabkan kebijakan yang diambil pun harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Formulasi penentuan besarnya dana perimbangan yang baku akan sangat sulit untuk diintervensi oleh pemerintah daerah. Sejak

tahun 2017, Pemerintah Pusat menerapkan prinsip *floating* pada dana perimbangan yang berarti besaran yang diterima dapat berkurang dari surat penetapan nilai yang akan diterima jika pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan yang diminta dan jika terjadi pengurangan pendapatan negara. Berkurangnya kemampuan pendanaan pemerintah pusat inilah yang tentunya sangat mempengaruhi rendahnya pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tabanan saat ini. Pada tabel 3.6 terlihat bahwa peningkatan dana perimbangan sangat rendah dan bahkan di tahun 2018 terjadi penurunan perolehan dana perimbangan. Dan jika dirata-ratakan pertahunnya pun terjadi penurunan (-0,27%).

Optimisme pertumbuhan pendapatan terjadi pada kondisi PAD Kabupaten Tabanan. Realisasi PAD telah melampaui target dalam RPJMDSB. Hal ini menunjukkan kemampuan untuk menggali potensi-potensi PAD yang ada. Permasalahannya saat ini adalah pada komponen PAD dimana dari total PAD yang diterima sebagian besar berasal dari retribusi jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Tabanan. PAD dari retribusi tersebut harus dialokasikan kembali dalam jumlah yang sama untuk operasional Rumah Sakit Umum Tabanan.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Arah kebijakan pendapatan saat ini disusun berdasarkan analisis tabel 3.5, tabel 3.6, dan tabel 3.7. Dari hasil analisis tersebut diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Tabanan mampu meningkat rata-rata sebesar 4,49 persen pada tahun 2020. Target ini dianggap sebagai target moderat karena meskipun masih lebih rendah dari target RPJMDSB yang sebesar 7,68 persen, namun tetap berupaya memproyeksikan kenaikan pada dana perimbangan sebesar 3,94 persen, serta kenaikan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5,20%.

Target pendapatan yang masih dibawah target RPJMDSB ini menyebabkan perencanaan proyeksi program dan kegiatan pada belanja daerah tahun 2020 pun harus disesuaikan. Arah kebijakan pendapatan di tahun 2020 diarahkan untuk mengupayakan sumber-sumber peningkatan PAD melalui sumber pajak dan retribusi daerah dari potensi kegiatan pariwisata yang belum optimal digali.

Diantaranya adalah dengan pembangunan kawasan wisata di desa-desa berbasis kegiatan pertanian (agrowisata) yang dilengkapi dengan obyek-obyek baru dan sarana akomodasinya. Dengan arah kebijakan pendapatan ini, diharapkan Kabupaten Tabanan secara perlahan kedepannya mampu melepaskan ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Selain itu juga dilakukan upaya-upaya pendukung peningkatan pendapatan daerah lainnya dengan cara sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan,
4. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Sebagai gambaran pendapatan dari Kabupaten Tabanan yang memuat Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.8. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa diproyeksikan pendapatan tidak akan dapat mencapai target rencana pendapatan pada RPJMDSB Kabupaten Tabanan. Jika pada dokumen RPJMDSB Kabupaten Tabanan diproyeksikan pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar 2,40 triliun rupiah, maka hasil proyeksi terhadap realisasi tahun anggaran

sebelumnya pada tahun 2020 pendapatan yang diperoleh sebesar 2,036 trilyun rupiah. Bahkan jika ditambahkan dengan target SilPA sebesar 35 milyar pun, masih terdapat kekurangan sebesar 334 milyar rupiah. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan rasionalisasi dalam mendanai berbagai program yang telah direncanakan dalam RPJMDSB pada tahun 2020.

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2016 s/d Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Proyeksi/ Tahun Berjalan	Target RKPD	Target pada RPJMDSB
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>318.033.600.631,19</b>	<b>327.462.528.850,00</b>	<b>409.183.800.000,00</b>	<b>390.046.212.096,97</b>	<b>410.328.615.126,01</b>	<b>377.709.810.000,00</b>
1.1.1	Pajak daerah	105.186.765.603,03	96.019.397.000,00	100.639.828.000,00	105.593.392.500,00	111.084.248.910,00	104.922.990.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	44.161.311.430,44	21.833.196.200,00	21.952.088.000,00	18.809.485.000,00	19.787.578.220,00	23.857.720.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.741.999.292,44	7.322.114.000,00	8.995.685.000,00	8.385.497.928,62	8.821.543.820,91	8.001.070.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	159.943.524.305,28	202.287.821.650,00	277.596.199.000,00	257.257.836.668,35	270.635.244.175,10	240.928.030.000,00
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.102.265.093.170,00</b>	<b>1.135.165.882.000,00</b>	<b>1.077.346.592.000,00</b>	<b>1.091.284.199.000,00</b>	<b>1.134.270.702.052,00</b>	<b>1.506.202.090.000,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	23.775.524.756,00	27.130.191.000,00	27.630.309.000,00	22.916.176.000,00	24.107.817.152,00	31.406.590.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	826.283.780.000,00	826.283.780.000,00	811.768.631.000,00	835.897.238.000,00	877.692.099.900,00	1.099.783.710.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	252.205.788.414,00	281.751.911.000,00	237.947.652.000,00	232.470.785.000,00	232.470.785.000,00	375.011.790.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>371.637.107.352,33</b>	<b>385.201.121.756,58</b>	<b>404.608.262.520,41</b>	<b>468.057.010.024,00</b>	<b>492.395.974.545,25</b>	<b>522.054.730.000,00</b>
1.3.1	Hibah	98.465.513.920,03	61.213.907.154,00	2.800.000.000,00	42.595.800.000,00	44.810.781.600,00	70.862.750.000,00
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	162.018.334.432,30	158.426.760.602,58	122.188.535.224,41	128.667.818.528,00	135.358.545.091,46	230.831.020.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	88.183.813.000,00	113.917.874.000,00	153.310.276.000,00	167.327.267.000,00	176.028.284.884,00	151.624.690.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	22.969.446.000,00	51.642.580.000,00	126.309.451.296,00	129.466.124.496,00	136.198.362.969,79	68.736.270.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>	<b>1.791.935.801.153,52</b>	<b>1.847.829.532.606,58</b>	<b>1.891.138.654.520,41</b>	<b>1.949.387.421.120,97</b>	<b>2.036.995.291.723,26</b>	<b>2.405.966.640.000,00</b>
	<b>Proyeksi Penerimaan Pembiayaan (SiLPA)</b>					<b>35.000.000.000,00</b>	

Sumber: Laporan Perhitungan APBD dan analisis

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2019 pemerintah telah menganut prinsip *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2020. Sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMDSB Kabupaten Tabanan, arah kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi 3 prioritas belanja, yaitu :

#### Prioritas I

Belanja prioritas I ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan urusan wajib dasar yang meliputi urusan pendidikan sebesar 20%, urusan kesehatan 10%, mandatori infrastruktur sebesar 25%, peningkatan SDM, untuk memenuhi pendanaan program unggulan daerah, kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta belanja prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran analisis per urusan dalam rangka pencapaian visi dan misi bupati dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

#### Prioritas II

Belanja prioritas II diarahkan untuk pemenuhan belanja lainnya ditingkat OPD yang masih mendukung visi dan misi bupati dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Pada prioritas II ini juga diarahkan untuk mendanai pembangunan pertanian serta memperluas lapangan kerja.

#### Prioritas III

Pada prioritas III, arah kebijakan belanja digunakan untuk pemenuhan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat (termasuk hibah dan bansos serta BKK desa) setelah prioritas I dan Prioritas II dapat dipenuhi secara maksimal.

Terkait arah kebijakan pendapatan yang memproyeksikan tidak mampu dipenuhinya target pendapatan, maka kemampuan belanja daerah Kabupaten Tabanan juga perlu disesuaikan kembali.

Untuk pemenuhan belanja program pada bab VIII dokumen RPJMDSB Kabupaten Tabanan, seluruh dana belanja langsung telah diterjemahkan ke dalam plafon program masing-masing urusan. Oleh karena itu perhitungan besaran proyeksi anggaran di tahun 2020 besarnya menjadi Rp 840.400.447.865,-. Angka tersebut berasal dari dana belanja langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, pembiayaan pengeluaran, serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

➤ Seleksi Prioritas Target Capaian Program

Ketidakmampuan pemenuhan anggaran untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RPJMDSB Kabupaten Tabanan dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021, harus diatasi dengan melakukan seleksi prioritas program berdasarkan capaian targetnya. Target-target program yang telah mampu dicapai dan mengalami percepatan capaian, dapat ditunda pelaksanaannya untuk mendanai target capaian program yang belum tercapai.

➤ Efisiensi Belanja Kegiatan

Melanjutkan kebijakan tahun 2019, maka ditahun 2020 efisiensi komponen belanja kegiatan dilakukan dengan mengurangi komponen belanja konsumsi, honorarium, dan perjalanan dinas pegawai.

Tabel 3.10  
Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TAHUN 2019	RANCANGAN 2020
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.127.348.308.341,58	1.157.608.398.267,41	1.144.550.058.813,57	1.231.594.843.858,26
2.1.1	Belanja Pegawai	847.890.937.910,00	843.013.937.900,00	792.139.753.680,00	868.764.864.900,00
2.1.2	Belanja Bunga	2.200.000.000,00	6.200.000.000,00	13.950.000.000,00	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	38.387.000.000,00	58.902.400.000,00	61.825.800.000,00	85.244.071.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.300.000.000,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab./Kota dan Pem. Desa	220.211.400.000,00	228.288.130.000,00	255.643.622.000,00	256.043.622.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	941.634.206,58	3.086.594.142,41	2.873.546.908,57	3.424.949.733,26
2.2	Belanja Langsung	976.001.224.265,00	969.050.256.253,00	1.077.863.724.919,57	840.400.447.865,00
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.3	Belanja Modal				
	Jumlah Belanja	2.103.349.532.606,58	2.126.658.654.520,41	2.222.413.783.733,14	2.071.995.291.723,26

*Sumber: Data diolah, 2019.*

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan ditetapkan saat kondisi daerah berada pada pertengahan tahap perkembangan kematangan ekonomi menuju tahap awal pembentukan wilayah. Pada tahap tersebut pembangunan pada bidang pertanian dalam arti luas menjadi penunjang utama dalam pengembangan sektor tersier dan fokusnya dalam pengembangan usaha agrowisata daerah Kabupaten Tabanan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Tabanan telah terdiversifikasi dari lapangan usaha pertanian dengan beberapa produk unggulannya menjadi perdagangan hasil pertanian dan jasa pariwisata. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang cenderung mengarah ke sektor tersier khususnya jasa pariwisata. Dari segi ekonomi, Kabupaten Tabanan juga mulai lebih mandiri sehingga Kabupaten Tabanan bisa dikatakan sudah masuk tahap kematangan ekonomi.

Di samping itu, Kabupaten Tabanan merupakan daerah yang ekspor hasil pertaniannya cukup tinggi diikuti dengan perkembangan ekonomi mengarah ke sektor tersier. Volume ekspor Kabupaten Tabanan diproyeksikan akan semakin tinggi dimasa mendatang namun dominasi pertumbuhan ekonominya lebih mengarah ke perdagangan jasa pariwisata. Kemudian secara nyata terjadi keterkaitan ekonomi yang kuat antara wilayah Kabupaten Tabanan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, khususnya dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ciri-ciri ini merupakan bagian dari wilayah pariwisata Provinsi Bali sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Kabupaten Tabanan sedang atau bahkan sebagian sudah menjadi wilayah pariwisata. Kondisi daerah di ataslah yang menjadi pertimbangan menetapkan Visi dan Misi serta sasaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025. Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Tabanan Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun 2025”.

Tabanan Sejahtera dicerminkan dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tidak saja ditandai dengan kecukupan memenuhi kebutuhan hidup secara fisik semata, namun juga meningkat dari sisi pemahaman rohaniah. Secara faktual dapat digambarkan bahwa semakin cerdas masyarakat sebagai akibat keberhasilan di bidang pendidikan,

semakin tinggi kemampuan mereka hidup mandiri karena mempunyai daya saing, maka akan menumbuhkan pola hidup yang dinamis dan dapat menyesuaikan diri sesuai perubahan jaman. Di samping itu, masyarakat Tabanan Sejahtera ditunjukkan oleh meningkatnya derajat kesehatan masyarakat karena didukung oleh kemudahan akses mendapatkan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat, pada seluruh umur pelayanan mulai dari dalam kandungan sampai manula, tersedianya sarana-prasarana kesehatan yang memadai sehingga umur harapan hidup masyarakat terus dapat dipertahankan di atas rata-rata nasional. Disadari bahwa hanya dengan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani yang akan dapat mengisi pembangunan, tidak saja sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat sehat juga akan mampu meningkatkan produktifitas pada seluruh sektor-sektor penunjang ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga mencapai lebih dari 7 persen.

Berbasis Pertanian diambil dari kejayaan masa lalu Kabupaten Tabanan yang bersumber dari sektor pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat, akan terus digali dan dikembangkan dari sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern dan menjadikan pertanian sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Pertanian mampu sebagai pembangkit kegiatan ekonomi daerah dapat terwujud melalui kebijakan dan program-program terobosan dalam hal diversifikasi ceruk pasar hasil pertanian. Kemajuan pertanian akan ditunjukkan oleh kemampuan produknya bersaing pada pasar global, tidak saja secara komparatif tetapi juga dapat bersaing secara kompetitif. Pertanian tumbuh dan berkembang sebagai produk wisata dengan mengisi ceruk pasar agrowisata yang sekarang sedang berkembang dan menjadi *trend center* di pasar pariwisata global. Pertanian dan pariwisata harus saling menunjang dalam keseimbangan yang sama-sama menguntungkan. Tumbuhnya agrowisata daerah mendorong penciptaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Kabupaten Tabanan.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi RPJPD Kabupaten Tabanan 2006-2025 sebagai berikut :

1. Misi kesatu : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, produktif, dan religius melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan dan urusan pemerintahan daerah.

Pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya mewujudkan individu dan masyarakat yang mampu mandiri dalam perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan serta memfasilitasi masyarakat dalam hal asuransi kesehatan mandiri. Pelayanan pendidikan ditujukan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang profesional mulai dari usia dini telah memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki, pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Di samping sehat dan cerdas, masyarakat juga difasilitasi dalam menciptakan keamanan dan kerukunan dalam menjalankan perintah-perintah agama yang dianutnya sehingga akan terbentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

2. Misi kedua : Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan dan berlandaskan pada kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah sebagai roda penggerak perekonomian daerah dengan mengisi ceruk pasar agrowisata global. Pertanian sebagai potensi daerah merupakan produk utama untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan menjadikan pembangunan pertanian sebagai stimulan untuk menciptakan *multi pleyer* terhadap kegiatan ekonomi sektor lainnya. Pemerintah memberikan fasilitasi untuk terwujudnya produk daerah yang memiliki daya saing, baik di pasaran lokal, regional, maupun global. Hal ini dilakukan dengan membangun infrastruktur, mengembangkan SDM yang menguasai IPTEK dan memiliki keunggulan dan daya saing di bidangnya. Segala upaya mendayagunakan sumberdaya alam untuk meningkatkan perekonomian daerah harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, tata ruang, dan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

3. Misi ketiga : Mewujudkan pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh dicirikan oleh produk yang dihasilkan memiliki daya saing komparatif dan kompetitif.

Pembangunan pertanian mampu mempertahankan keberlanjutan ketahanan pangan, memfasilitasi berkembangnya agribisnis dan agrowisata melalui pemanfaatan sumberdaya pertanian, baik lahan basah, lahan kering, maupun perairan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pengembangan sektor pertanian.

4. Misi keempat : Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai pusat Agrowisata Provinsi Bali.

Agrowisata atau *agroturisme* adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumberdaya lahan, serta memelihara budaya dan teknologi lokal (*indigenous knowledge*) yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya. Kabupaten Tabanan memiliki sumberdaya pertanian terbesar di Bali dan memiliki peluang yang sangat besar mengembangkan agrowisata sebagai perpaduan antara pariwisata, pertanian, dan budaya. Pengembangan agrowisata menjadi sebuah alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan kelangsungan hidup, menggali potensi ekonomi petani kecil dan masyarakat pedesaan.

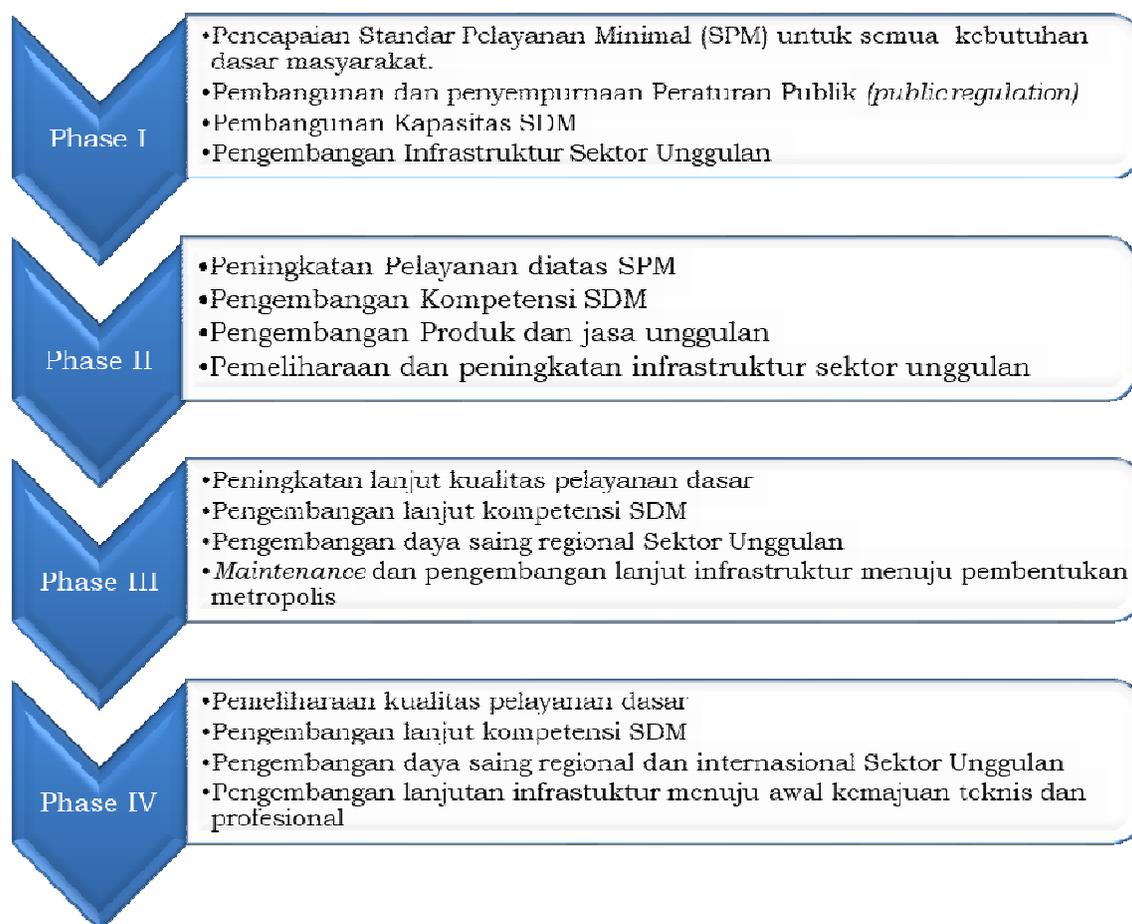
5. Misi kelima : Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membentuk sistem pemerintahan yang baik (*good goverment*).

Pelayanan publik dalam konteks ini didefinisikan sebagai pelayanan pemerintah, dalam hal ini aparaturnya. Aparatur publik harus benar-benar menunjukkan diri sebagai abdi masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik (prima). Pelayanan prima yang diwujudkan adalah melalui penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (*public goods and services*) dengan cara yang efektif dan efisien. Guna memberikan pelayan prima tersebut, dibutuhkan tatanan birokrasi yang baik, bersih dan berwibawa, serta berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*.

6. Misi keenam : Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk lokal daerah.

Pesatnya perkembangan IPTEK dan arus informasi global tetap diimbangi dengan upaya membangun karakter masyarakat yang berjiwa nilai-nilai budaya Bali. Budaya daerah berkembang dan menjadi nilai tambah bagi kepariwisataan sehingga keduanya saling bersinergi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi dan Misi dalam RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025, direncanakan dicapai dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan arah pembangunan lima tahunan. Untuk lebih jelasnya tahapan RPJPD Kabupaten Tabanan 2005 - 2025 dapat dilihat pada gambar 4.1 dan tabel 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Tahapan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tabel 4.1  
Arah Pembangunan Lima Tahunan dalam Dokumen RPJPD  
Kabupaten Tabanan

TAHAP LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH)	ARAH PEMBANGUNAN DALAM RPJPD
I (2006-2010)	1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk seluruh kebutuhan dasar masyarakat seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007.

TAHAP LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH)	ARAH PEMBANGUNAN DALAM RPJPD
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan dan penyempurnaan peraturan publik (<i>Public Regulation</i>).</li> <li>3. Pembangunan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah.</li> <li>4. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan sektor unggulan/ potensi ekonomi daerah sebagai langkah awal pencapaian kesejahteraan masyarakat yang dicanangkan dalam visi jangka panjang daerah kabupaten Tabanan.</li> <li>5. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan tata peruntukan wilayah agar tetap dapat mempertahankan karakteristik daerah sebagai daerah pertanian dalam arti luas.</li> </ol>
II (2011-2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar daerah di atas SPM nasional.</li> <li>2. Pengembangan kompetensi SDM untuk dapat bersaing dalam era global.</li> <li>3. Pengembangan produk dan jasa unggulan daerah sebagai pendorong pembangunan perekonomian daerah.</li> <li>4. Mengembangkan dan memfasilitasi wilayah yang akan menjadi embrio agrowisata.</li> <li>5. Mendorong dan memfasilitasi investor untuk bergerak di bidang usaha agrowisata dan menjadikan agrowisata sebagai produk unggulan pengembangan perekonomian daerah Kabupaten Tabanan.</li> <li>6. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya tarik investasi.</li> <li>7. Peningkatan konservasi sumber-sumber mata air termasuk perlindungan terhadap daerah tangkapan air Danau Beratan.</li> </ol>
III (2016-2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan lanjut kualitas pelayanan dasar menuju masyarakat mandiri.</li> <li>2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM menuju persaingan globalisasi.</li> <li>3. Pengembangan daya saing di tingkat regional produk unggulan daerah.</li> <li>4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut infrastruktur menuju pembentukan daerah Agrowisata dengan menjadikan bidang pertanian sebagai penunjang utamanya.</li> <li>5. Konservasi berkelanjutan terhadap kelestarian fungsi hutan dan perlindungan sumber-sumber air, termasuk Danau Beratan.</li> </ol>
IV (2021-2025)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan kualitas pelayanan dasar untuk karakteristik masyarakat mandiri.</li> <li>2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM masuk</li> </ol>

TAHAP LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH)	ARAH PEMBANGUNAN DALAM RPJPD
	<p>persaingan global.</p> <p>3. Pengembangan daya saing regional dan internasional produk unggulan daerah.</p> <p>4. Pengembangan lanjut infrastruktur menuju awal kemajuan teknis dan profesional penunjang daerah Agrowisata.</p> <p>5. Konservasi hutan dan sumber-sumber mata air dan tindakan pencegahan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah.</p>

Arah pembangunan per periode lima tahunan dalam periode RPJPD Kabupaten Tabanan 2006-2025 terdiri dari sasaran pokok pembangunan, indikator dari target pencapaian pembangunan.

#### I. Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Pertama Tahun 2005-2010

RPJMD I meletakkan kerangka dasar pembangunan Kabupaten Tabanan yang difokuskan pada 8 (delapan) bidang prioritas pembangunan yang didukung oleh 1 (satu) bidang penunjang. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah sebagai wahana pembangunan kepala daerah terpilih, maka dalam lima tahun pertama (2005-2010) disusun agenda-agenda pembangunan sebagai berikut:

##### 1. Pendidikan

Bidang pendidikan dikemas guna mencapai Tabanan Cerdas Tahun 2008. Target ini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain dicerminkan oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) yakni rata-rata untuk SD (120%), SLTP (105%) dan SLTA (85%), sedangkan angka partisipasi murni (APM) yakni rata-rata untuk SD (110%), SLTP (85%) dan SLTA (50%), angka melanjutkan untuk SD – SLTP (120%), SLTP – SMA/SMK 90%, angka putus sekolah SD (0%), SLTP (0,2%) dan SMA/SMK (0,2%), angka mengajar guru SD (85%), SLTP (90%) dan SMA/SMK (95%), proporsi ruang belajar/kelas yang rusak berat SD (10%), SLTP (2%),

SMA/SMK (0%), ketersediaan perpustakaan SD, SLTP dan SMA/SMK masing-masing 100%, ketersediaan laboratorium (SLTP dan SMA/SMK) masing-masing 100%, Angka buta huruf (15 tahun ke atas) sebesar 5%.

## 2. Kesehatan

Bidang kesehatan dicanangkan dengan target pencapaian Tabanan Sehat Tahun 2007. Dalam pencapaian target ini, tujuan yang ditetapkan adalah pemberdayaan individu untuk mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat, meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang antara lain tercermin dari meningkatnya umur harapan hidup menjadi 70 tahun, pemanfaatan Puskesmas (70%), pemanfaatan RS (80%), pemanfaatan tempat pelayanan kesehatan (100%), penggunaan obat generik berlogo (100%), pencegahan penyakit untuk desa KLB (100%), imunisasi ibu hamil TT 1 (95%), TT 2 (> 90%), angka kematian bayi (3/1000 kelahiran hidup), angka kematian ibu melahirkan (50/100.000 ibu melahirkan), pemeriksaan gigi dan mulut untuk SD (100%), pelayanan KK miskin (100%), penanganan berat bayi lahir rendah (100%), kasus bayi gizi buruk (0,1%), rasio dokter umum (40/100.000), rasio dokter spesialis (13/100.000), rasio bidan (100/100.000) rasio ahli gizi (11/100.000), rasio perawat (117/100.000), pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (40%).

## 3. Budaya dan Pariwisata

Bidang budaya dan pariwisata menetapkan target terwujudnya Tabanan Taksu Bali Tahun 2010. Target ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk lokal daerah, mendorong kegiatan kepariwisataan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas produk pariwisata.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya penurunan ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat, meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah,

meningkatkan kunjungan wisata ke obyek wisata dan daya tarik wisata yang ada.

#### 4. Ekonomi Kerakyatan

Dalam konteks ekonomi makro dan mikro, bidang ini memiliki target pencapaian LPE Tabanan 7% Tahun 2010. Target ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan mampu bersaing dipasar global

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan perekonomian daerah sebesar 7,24% (dalam harga konstan), meningkatnya produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menumbuhkan wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

#### 5. Aparatur / Pelayanan Publik

Bidang ini menetapkan target mewujudkan Pelayanan Prima Tahun 2008. Target bidang ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (*good governance*).

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat.

#### 6. Pertanian

Bidang Pertanian ditetapkan untuk pencapaian target terwujudnya Tabanan sebagai daerah agrowisata provinsi Bali Tahun 2025. Target ini bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan keberlanjutan ketahanan pangan, memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis, meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perkebunan, perikanan dan peternakan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga memiliki daya saing komparatif dan kompetitif.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan

peternakan, meningkatnya kemampuan petani, nelayan dan peternak dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani sebesar 4%.

#### 7. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Target bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tabanan ditetapkan guna pencapaian Tabanan Tertib Ruang Tahun 2010. Target tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan fungsi dan karakteristik wilayah pengembangan yang ada. Sedangkan pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar dapat terjaga dengan baik, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah tertatanya pembangunan wilayah sesuai dengan fungsinya (sesuai dengan RTRW, RDTR, dan perencanaan tata ruang lainnya), membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### 8. Keamanan dan Ketertiban

Bidang ini memiliki target Tabanan Aman, Tertib, Nyaman Tahun 2008. Target ini bertujuan untuk mengantisipasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya penurunan angka pelanggaran hukum dan meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, menurunnya angka kriminalitas.

#### 9. Penunjang / Infrastruktur

Bidang penunjang/infrastruktur sebagai pendukung 8 (delapan) bidang prioritas pembangunan ini memiliki target mewujudkan infrastruktur wilayah sebagai pendukung pencapaian delapan bidang prioritas. Target ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung

pemerintah yang layak pakai, sarana/prasarana transportasi yang memadai, kondisi perumahan/permukiman yang sehat, dan mewujudkan optimalisasi jaringan irigasi/sumber daya air.

## II. Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Kedua Tahun 2011-2015

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM I, RPJM II ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan penekanan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah.

1. Membaiknya kualitas pendidikan ditunjukkan oleh meningkatnya keterpaduan penanganan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta seluruh BALITA di Kabupaten Tabanan memiliki akses yang seluas-luasnya mendapatkan pendidikan yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Sejalan dengan hal tersebut mutu tenaga pendidik pada seluruh jenjang pendidikan telah memenuhi standar kualifikasi menurut peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak adanya kesenjangan distribusi jumlah guru antar sekolah dan wilayah. Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam rangka mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan demokratis semakin nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Kondisi kesehatan masyarakat yang semakin mantap dengan semakin meluasnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga perilaku masyarakat ini juga berpengaruh terhadap keberadaan objek wisata yang semakin bersih dan asri di seluruh Kabupaten Tabanan. Jaminan pelayanan kesehatan baik terhadap keluarga miskin, masyarakat rentan, maupun masyarakat umum berlangsung tertib dan mantap ditandai dengan tidak adanya diskriminasi pelayanan dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kesehatan, baik pada tingkat pelayanan dasar maupun rujukan. Sejalan dengan itu, cakupan pelayanan air bersih terhadap masyarakat perdesaan dan perkotaan telah mencapai 90 % rumah tangga.
3. Dalam kerangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kualitas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten semakin baik ditandai dengan tidak adanya jalan yang rusak berat untuk ruas jalan yang

menghubungkan kota-kota kecamatan, antar pusat-pusat produksi, dan antar objek wisata. Di samping itu, umur konstruksi jalan yang dibangun/direhabilitasi mencapai lebih dari 4 (empat) tahun. Sarana dan prasarana irigasi keberadaanya juga semakin baik dengan ditunjukkan oleh stabilnya luas tanam padi per tahun.

4. Pembangunan bidang ekonomi yang semakin mantap ditunjukkan oleh membaiknya daya tarik investasi, tercapainya ketahanan pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani, tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan komoditas unggulan daerah, serta semakin besarnya volume dan nilai ekspor produk daerah. Daya tarik investasi yang membaik didukung oleh proses perijinan yang transparan, murah, mudah, dan cepat, kondisi daerah yang aman dan nyaman serta adanya jaminan kepastian hukum bagi investor.
5. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, manajemen pembangunan semakin profesional yang ditandai dengan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan serta mengacu pada kaidah-kaidah tata ruang. Perlindungan terhadap danau, mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) berlangsung konsisten sesuai rencana tata ruang.

### III. Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Tahun Ketiga Tahun 2015 -2020

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM I, RPJM II, RPJM III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, pariwisata budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang sehat dan kompetitif.

1. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang terus membaik di Kabupaten Tabanan ditandai oleh terjalannya keterpaduan fungsi, peran, dan tugas satuan kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan antarsatuan kerja yang menangani produksi, pengolahan, perdagangan, dan kelembagaan & organisasi usaha komoditas unggulan daerah, kecilnya gejolak harga komoditas pertanian antara sebelum dan pada saat panen raya, terwujudnya industri pengolahan

hasil pertanian skala kecil dan menengah dengan omzet terbesar di Bali, semakin meningkatnya jumlah wirausaha, pencapaian tingkat pengangguran terendah diantara kabupaten/kota di Bali, dan *gini ratio* maksimal 0,30.

2. Terbentuknya daerah agrowisata sebagai unggulan dan andalan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kunjungan lama tinggal wisatawan menjadi diatas 6 hari.
3. Pariwisata budaya terus berkembang ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Tabanan karena didukung keberadaan objek wisata terbersih di Bali, lestari sawah dengan luas minimum yang disyaratkan sebagai 'sawah abadi' dalam rencana tata ruang dengan lembaga tradisional subak yang tetap eksis mempertahankan adat dan budaya, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam industri pariwisata.
4. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pariwisata, pembangunan di Kabupaten Tabanan tetap dikelola dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan yang ditandai oleh dipertahankannya kawasan resapan air sebagai kawasan non budidaya, perlindungan terhadap sumber-sumber mata air, pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu, baik secara lintas sektor maupun lintas wilayah, serta pembangunan yang berbasis tata ruang.
5. Kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Tabanan terus meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain ditandai oleh jumlah tenaga kerja didominasi tamatan sekolah menengah atas/kejuruan ke atas, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan termasuk yang berbasis keunggulan lokal dengan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien.

#### IV. Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Keempat Tahun 2021-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM III, RPJM IV ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan melalui percepatan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan tingkat pertumbuhan yang mampu menyerap

pertumbuhan angkatan kerja dengan tetap terjaganya daya dukung dan fungsi lingkungan hidup. Kesejahteraan masyarakat Tabanan yang terus meningkat juga ditandai oleh makin tinggi dan meratanya pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh-kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terwujudnya kesetaraan gender.

1. Menjadi daerah penyedia pelayanan publik mandiri terbaik di Provinsi Bali terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan penyedia sarana dan prasarana umum masyarakat dengan angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun, telah terbentuknya masyarakat sehat mandiri serta panjang jalan beraspal diseluruh wilayah kabupaten Tabanan.
2. Sejalan dengan kemajuan ekonomi, kesejahteraan material masyarakat juga disertai dengan kemantapan kehidupan beragama yang ditandai oleh kerukunan inter dan antar pemeluk agama, penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, moralitas dan jatidiri sebagai masyarakat Bali yang dikenal jujur tetap bertahan, serta masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam berbagai dimensi kehidupan.
3. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan secara lestari sebagai modal pembangunan pada masa yang akan datang.
4. Tabanan telah tumbuh dan berkembang menjadi daerah agrowisata dan sebagai menjadi tujuan wisata wisatawan global dan telah dapat mengisi ceruk pasar agrowisata pasar global.
5. Pertumbuhan PDRB di bidang pertanian dengan ditunjang tumbuh kembangnya pasar agrowisata sehingga kesejahteraan masyarakat petani menjadi meningkat dan dominan dan juga telah terjadi sinergisitas antara sektor primer dan tersier khususnya antara pertanian, pariwisata dan budaya daerah dan menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian pertumbuhan perekonomian daerah di atas 7%.
6. Produk pertanian dan produk pariwisata telah menjadi komoditi ekspor daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Saat ini RPJMD Kabupaten Tabanan telah memasuki tahapan lima tahunan (jangka menengah) ketiga dengan periode berlaku tahun 2016-2021. Tahapan jangka panjang ketiga ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.

Tahapan pembangunan jangka menengah ketiga atau disebut RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 memiliki visi “Tabanan Serasi (Sejahtera, Aman, dan Berprestasi)” atau lebih dikenal dengan sebutan TABANAN SERASI JILID II .

Visi Tabanan Serasi 2016-2021 (disebut dengan Jilid II) merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya (disebut dengan Jilid I) dengan semangat baru dan landasan yang lebih kuat. Semangat baru yaitu menjalankan ajaran Tri Sakti, memperkuat landasan yaitu dengan menggali konsep-konsep dasar pembangunan dari para pendiri bangsa melalui “Pembangunan Semesta Berencana”

Makna Tabanan Sejahtera, Aman, dan Berprestasi (Jilid II) ini pun dijabarkan secara lebih luas dari makna periode sebelumnya, sehingga menjadi:

- Kata “SERASI” sendiri diartikan sebagai : keselarasan atau keseimbangan atau keharmonisan antara unsur-unsur material – spiritual, fisik – non fisik, kota – desa, intelektual - budi pakerti, laki – perempuan, dan lain-lain agar tercipta kondisi masyarakat yang tenteram dan damai.
- Sejahtera adalah terwujudnya peningkatan kondisi ekonomi dan daya beli, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan life-skill masyarakat Tabanan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik.
- Aman adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (good governance).
- Berprestasi adalah terwujudnya rasa bangga sebagai masyarakat Tabanan melalui pencapaian prestasi oleh seluruh pelaku pembangunan di Tabanan di berbagai kenchah penggalangan prestasi

lingkup regional, nasional atau internasional. Pelaku pembangunan yang dimaksud adalah perempuan dan pemuda, pendidik, paramedis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, penyelenggara pemerintahan, sekeha/kelompok tradisional, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Dalam rencana pembangunan 2016–2021, visi Tabanan Serasi (jilid II) menempuh 5 (lima) misi pembangunan dengan masing-masing tujuannya, sebagai berikut :

1. Misi Kesatu : Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial.

Tujuan:

- Membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali seperti: *tat twam asi* (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan lain-lain.

2. Misi Kedua : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima.

Tujuan:

- Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Membangun kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pangan sehat/gizi seimbang.

3. Misi Ketiga : Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis usaha pertanian dan pariwisata.

Tujuan:

- Memperkuat ekonomi Tabanan dengan pelibatan masyarakat lokal seluas-luasnya untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah.
- Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan.
- Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.

4. Misi Keempat : Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.

Tujuan:

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang, dan ramah lingkungan.
- Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, dan budaya.

5. Misi Kelima : Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.

Tujuan:

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien.
- Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan & penganggaran berbasis kinerja.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat.
- Menata ulang organisasi perangkat daerah, tupoksi, dan sistem rotasi/mutasi pegawai.

Pada setiap tujuan dimasing-masing misi tersebut akan dijabarkan kembali menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikatornya yang ingin dicapai di tahun perencanaan 2020 dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021 sesuai misi yang telah ditetapkan di atas adalah seperti di bawah ini.

**Misi 1. MEMBENTUK SDM YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA DAN BERKEADILAN SOSIAL**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	1 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan.	Rata-rata lama sekolah	8,80
			Lembaga pendidikan Terakreditasi A (%)	90 SD 90 SMP
			Peringkat PORPROV	VI
		3 Meningkatkan Kualitas Penanganan kependudukan	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,01
			Angka pengangguran (%)	1,80

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	
2	Peningkatan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya lokal	Jumlah kearifan budaya lokal yang diakui secara nasional/ internasional	7
3	Peningkatan Pemenuhan Perlindungan Sosial	1	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	4,75
		2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak	Rasio KDRT (%)	0,05
		3	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Indek rasa aman (%)	100
				Indeks resiko bencana	154,4
		4	Meningkatnya keterampilan usia produktif	Menurunnya angka pengangguran (%)	1,80
		5	Meningkatnya penanganan PMKS	Tingkat kemandirian PMKS (%)	95

**Misi 2. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN PRIMA**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	
1	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	1	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan	Utilisasi pelayanan kesehatan (%)	100
		2	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	Angka morbiditas (%)	≤15
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi (%)	100
				Tingkat akreditasi RSD	Pari-purna
		2	Terselenggaranya pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM	Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)	100

**Misi 3. MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	
1	Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian	1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	2,02
		2	Berkembangnya Usaha-Usaha Pengolahan dan Pemasaran Pertanian	Kontribusi Industri Pengolahan Pertanian Terhadap PDRB (%)	70
		3	Meningkatnya Pem--berdayaan Masyarakatt Berbasis Pertanian	Desa mandiri (%)	100
2	Mengembangk-an Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pariwisata	1	Meningkatnya Pem-berdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata	Jumlah Desa yang Mendapat PAD Desa dari Sektor Pariwisata	6
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten (%)	24,84

**Misi 4. MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1 Mempercepat Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Wilayah	Indek Ketimpangan Wilayah	1 Tumbuhnya Generator Ekonomi Baru Sesuai Penataan ruang dan lingkungan hidup	Jumlah Kawasan Kabupaten yang mampu berkembang	17
			Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Memenuhi baku mutu
		2 Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Pusat–Pusat Pertumbuhan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap kondisi Sarana dan Prasarana infrastruktur	Tinggi

**Misi 5. MEMPERKUAT BIROKRASI YANG BERORIENTASI KINERJA, TRANSPARAN DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Reformasi Birokrasi	1 Meningkatnya kualitas SDM dan akuntabilitas instansi pemerintah	ASN yang memiliki kompetensi (%)	100
			Nilai SAKIP	A
		Opini BPK	WTP	
		Persentase Perangkat Daerah Pada Zona Hijau	100	
		2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM terhadap layanan publik	baik
			Layanan OPD berbasis IT (%)	100

**4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun Perencanaan 2020 merupakan rencana tahunan keempat dalam periode Rencana Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Pada tahun 2020 ini pula akan diadakan pemilihan kepala daerah baru. Oleh karena itu perencanaan di tahun 2020 sangat penting dalam menentukan hasil akhir pencapaian target indikator RPJMDSB Kabupaten Tabanan.

Meskipun target indikator prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 telah ditetapkan dalam RPJMDSB, namun jika melihat kondisi kemampuan APBD Kabupaten Tabanan pada tahun sebelumnya, diprediksikan kemampuan pendanaan di tahun 2020 tidaklah memungkinkan untuk menyesuaikan dengan proyeksi pada dokumen RPJMD (seperti telah diuraikan pada bab III dokumen ini). Hal ini menyebabkan tidak semua urusan yang direncanakan dalam RPJMDSB di tahun 2020 dapat didanai secara maksimal. Hal tersebut harus disikapi

dengan menentukan prioritas dan sasaran pembangunan RPJMDSB yang utama yang ingin dicapai ditahun 2020.

Melihat hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di tahun sebelumnya, kesesuaian dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Bali, tahapan arah pembangunan lima tahunan pada RPJPD, serta target indikator sasaran pada RPJMDSB, maka di tahun perencanaan 2020 ditetapkan tema pembangunannya adalah “Pemerataan Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah Di Kabupaten Tabanan”.

Tema tersebut terdiri dari dua kata kunci yakni pemerataan pembangunan dan potensi wilayah.

1. Pemerataan Pembangunan, mengandung makna proses perubahan yang dilakukan secara merata mencakup seluruh sistem dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan SDM
2. Potensi wilayah, mengandung makna kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai.

Sejalan dengan prioritas Rancangan awal RKP 2020 dan prioritas pembangunan Propinsi Bali (seperti terlihat pada tabel 4.2), Kabupaten Tabanan melalui tema “Pemerataan Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah Di Kabupaten Tabanan”, maka program prioritas Kabupaten Tabanan tahun 2020 diarahkan pada:

1. Pemerataan Pembangunan Urusan Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan)
2. Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik (Aparatur)
3. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Prasarana Wilayah
4. Peningkatan Kualitas Dan Kwantitas Produk Unggulan Potensi Wilayah
5. Pemerataan pertumbuhan ekonomi kerakyataan melalui optimalisasi BUMDES dan BUMDA
6. Penataan Daya Tarik Wisata
7. Peningkatan kinerja persampahan dan pelestarian lingkungan

Guna mengakselerasi program prioritas diatas, RKPD tahun 2020 tidak terlepas dari pola Pagu Indikatif Kecamatan (PIK), dimana dana yang dituangkan dalam PIK dalam bentuk program/kegiatan yang wajib di danai dalam APBD sesuai kriteria yang ditetapkan untuk mempercepat capaian

tema yang telah ditetapkan. Pola PIK ini merupakan salah satu bentuk penyalarsan proses perencanaan *bottom up* dan *top down*. Pola yang dibangun adalah kepastian dana 200 juta dikali jumlah desa per kecamatan. Namun dana tersebut tidak dibagi rata, tapi disesuaikan dengan tema dan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun fokus bidang PIK adalah pembangunan infrastruktur di bidang :

1. Pertanian
2. Pariwisata
3. Ekonomi kreatif
4. Pelayanan dasar diluar menu DAK (pendidikan, kesehatan)

Seleksi umum untuk memberikan secara *fair* desa yang mendapat pagu dana PIK, disesuaikan dengan permasalahan dan isu strategis serta tema pemerataan pembangunan berbasis potensi wilayah, melalui kriteria sebagai berikut:

1. Desa dengan jumlah KK miskin tertinggi.
2. Desa yang telah memiliki rencana pengembangandestinasasi wisata potensial.
3. Desa yang telah memiliki kelompok tani/pengolah aktif.
4. Desa yang telah memiliki pokdarwis aktif
5. Desa yang telah memiliki rencana pembentukan bumdes dengan core bisnis yang jelas
6. Desa dengan infrastruktur wisata dengan kondisi rusak
7. Desa dengan infrastruktur pertanian dengan kondisi rusak : jalan usaha tani, senderan, irigasi, dll.
8. Desa dengan infrastruktur pendidikan dengan kondisi rusak (diluar dak) : tembok penyengker, pelinggih, penataan halaman, ruang guru.
9. Desa dengan infrastruktur kesehatan dengan kondisi rusak (diluar dak) : pustu, tembok penyengker, pelinggih, penataan halaman.
10. Keberlanjutan PIK tahun sebelumnya

Tabel 4.2  
Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Bali, dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali		Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan	
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1	Pangan, Sandang dan Papan	1	Pemerataan pertumbuhan ekonomi kerakyataan melalui optimalisasi BUMDES dan BUMDA
2	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	2	Kesehatan dan Pendidikan	2	Pemerataan Pembangunan Urusan Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan)
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3	Peningkatan Kualitas Dan Kwantitas Produk Unggulan Potensi Wilayah
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup	4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4	Peningkatan kinerja persampahan dan pelestarian lingkungan
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	5	Pariwisata	5	Penataan Daya Tarik Wisata
		6	Penguatan Infrastruktur	6	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Prasarana Wilayah
		7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7	Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik (Aparatur)



## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Di tahun 2020, diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Tabanan tidak dapat memenuhi target sesuai dengan RPJMDSB Kabupaten Tabanan. Target pertumbuhan pendapatan pada RPJMDSB adalah sebesar 7,68 persen, sedangkan dari hasil evaluasi 3 tahun sebelumnya, pendapatan tidak sesuai dengan proyeksi RPJMDSB. Pada dokumen RKPD tahun 2020 target pendapatan ditetapkan secara moderat, yaitu sebesar 4,49 persen. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya dilakukan seleksi terhadap hal-hal yang menjadi prioritas rencana kerja dan pendanaan daerah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5.1  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH									
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III											
1	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																	
1	<b>PENDIDIKAN</b>																	
1	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>																	
1	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>																	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>31.583.760.000</b>	<b>31.583.760.000</b>	-	-	<b>33.162.948.000,00</b>	DISDIK									
1	01	1	1	1	1	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran	13 jenis	31.583.760.000	31.583.760.000			33.162.948.000,00	DISDIK
1	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>						<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>550.000.000</b>	-	-	<b>550.000.000</b>	<b>577.500.000,00</b>	DISDIK
1	01	1	1	2	1	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	85 buah	400.000.000	-		400.000.000	420.000.000,00	DISDIK				
1	01	1	1	2	2	Pemeliharaan Gedung tempat kerja	Jumlah pemeliharaan gedung tempat kerja	1 paket	150.000.000	-		150.000.000	157.500.000,00	DISDIK				
1	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>26.358.000</b>	<b>26.358.000</b>	-	-	<b>27.675.900,00</b>	DISDIK
1	01	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 dok	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DISDIK				
1	01	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	1 dok	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISDIK				
1	01	1	1	3	3	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah	Jumlah dokumen monev	1 dok	3.438.000	3.438.000			3.609.900,00	DISDIK				
1	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>						<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi</b>	<b>86,00%</b>	<b>6.132.070.000</b>	<b>2.562.070.000</b>	<b>3.350.000.000</b>	<b>220.000.000</b>	<b>6.438.673.500,00</b>	DISDIK

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							<b>baik</b>							
1	01	1	1	15	1	DOP Tk Negeri Kab. Tabanan	Jumlah TK Negeri yang mendapatkan DOP	11	126.060.000	126.060.000			132.363.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	2	Pembinaan dan seleksi pendidikan PAUD Berprestasi	jumlah pendidikan PAUD yang mendapat pembinaan dan seleksi	50 Or	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	3	BOP PAUD (DAK)	Jumlah PAUD Negeri yang mendapatkan DAK	11	408.000.000	408.000.000			428.400.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	4	Peningkatan aktivitas dan kreativitas penyelenggaraan PAUD	Jumlah kegiatan Aktivitas dan kreativitas PAUD	2 keg	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	5	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah dokumen pengelolaan PAUD	278 lbg	51.570.000	51.570.000			54.148.500,00	DISDIK
1	01	1	1	15	6	Akreditasi PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	50 lembaga	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	7	Pelatihan Kompetensi Tenaga PAUD	Jumlah tenaga PAUD yang mengikuti pelatihan	60	75.000.000	-	75.000.000		78.750.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	8	Kemitraan PAUD	Jumlah Mitra PAUD	3	25.000.000	-	25.000.000		26.250.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	9	Sosialisasi dan Pembentukan PAUD Hindu	Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi	60	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	10	Insentif bagi guru Non PNS (sukarelawan) PAUD Hindu	Jumlah guru yang mendapatkan insentif	12	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	11	Diklat Operator Data pokok Pendidikan PAUD-DIKMAS	Jumlah operator yang mengikuti diklat	380	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	12	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE)	Jumlah alat peraga Edukasi (APE) yang diadakan	11 paket	220.000.000	-	220.000.000		231.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	13	Pembangunan Bidang Pendidikan PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	20 sek	1.816.000.000	1.816.000.000			1.906.800.000,00	DISDIK
1	01	1	1	15	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana TK	Jumlah TK Negeri yang mendapatkan pengadanan sarana dan prasarana	11 TK	3.000.000.000	-	3.000.000.000		3.150.000.000,00	DISDIK
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya</b>	<b>peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya)</b>	<b>1.017 Orang</b>	<b>2.102.596.000</b>	<b>1.637.596.000</b>	<b>365.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2.207.725.800,00</b>	DISDIK
1	01	1	1	16	1	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Prosentase peserta Kejar Paket yang lulus pendidikan kesetaraan.	100%	100.000.000	100.000.000			105.000.000,00	DISDIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1 01 1 1 16 2	Pembinaan Lembaga Kursus dan PKBM se-Kab. Tabanan	Jumlah lembaga kursus dan PKBM yang mendapatkan pembinaan	35	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISDIK
1 01 1 1 16 3	Pelatihan Tutor Kesetaraan	Jumlah Tutor kesetaraan yang dilatih	40	75.000.000	-	75.000.000		78.750.000,00	DISDIK
1 01 1 1 16 4	Hari Aksara Internasional	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam perayaan Hari Aksara Internasional	1 keg	100.000.000	-		100.000.000	105.000.000,00	DISDIK
1 01 1 1 16 5	Akreditasi lembaga pendidikan masyarakat	Jumlah lembaga yang terakreditasi	72 lembaga	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISDIK
1 01 1 1 16 6	Biaya Operasional SKB	jumlah pemberian biaya operasional untuk kelancaran layanan satuan pendidikan SKB	1 SKB	40.000.000	-	40.000.000		42.000.000,00	DISDIK
1 01 1 1 16 7	Pengadaan Sarana dan prasarana SKB dan TK Negeri	Jumlah sarana Prasarana Yang diadakan	1 Paket	1.326.396.000	1.326.396.000			1.392.715.800,00	DISDIK
1 01 1 1 16 8	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun dan 12 tahun	600 orang	211.200.000	211.200.000			221.760.000,00	DISDIK
1 01 1 1 16 9	Apresiasi GTK PAUD-Dikmas	Jumlah lomba yang diikuti dalam apresiasi GTK PAUD/DIKMAS	10 Lomba	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISDIK
<b>1 01 1 1 17</b>	<b>Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar</b>	<b>Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM</b>	<b>21,41%</b>	<b>1.660.590.000</b>	<b>475.590.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.743.619.500,00</b>	DISDIK
1 01 1 1 17 1	Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/MI	Prosentase kelulusan siswa SD/MI	100,00%	360.990.000	360.990.000			379.039.500,00	DISDIK
1 01 1 1 17 2	Dana Pendidikan SD	Prosentase APK , APM SD	106,20% 92,50%	1.000.000.000	-		1.000.000.000	1.050.000.000,00	DISDIK
1 01 1 1 17 3	Monitoring dan Evaluasi Pendidikan SD	Dokumen Laporan Monev Penyelenggaraan Pendidikan SD	4dok	85.000.000	-	85.000.000		89.250.000,00	DISDIK
1 01 1 1 17 4	Lomba lomba pada bidang pendidikan Sekolah Dasar	Jumlahmedali yang diperoleh ditingkat Provinsi	6 medali	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DISDIK
1 01 1 1 17 5	Peningkatan mutu 8 standar sekolah imbas	Jumlah sekolah yang memenuhi SPM	56 Sek	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISDIK
<b>1 01 1 1 18</b>	<b>Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama</b>	<b>Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan</b>	<b>20,93%</b>	<b>1.363.878.000</b>	<b>163.878.000</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.432.071.900,00</b>	DISDIK

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
					<b>menengah pertama</b>	<b>pendidikan sesuai SPM</b>								
1	01	1	1	18	1	Penyelenggaraan UAS SMP/MTs	Prosentase Kelulusan SMP	100%	57.300.000	57.300.000		60.165.000,00	DISDIK	
1	01	1	1	18	2	Dana Pendidikan SMP	Prosentase APK , APM SMP	105,70% 77,45%	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.050.000.000,00	DISDIK	
1	01	1	1	18	3	Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan SMP	Dokumen Laporan Monev Penyelenggaraan Pendidikan SMP	1 dok	20.628.000	20.628.000		21.659.400,00	DISDIK	
1	01	1	1	18	4	Lomba-Lomba Tingkat SMP	Jumlah medali yang diperoleh ditingkat provinsi	6 medali	85.950.000	85.950.000		90.247.500,00	DISDIK	
1	01	1	1	18	5	PPDB Online SMP	Jumlah sekolah menyelenggarakan PPDB online	38 sek	200.000.000	-	200.000.000	210.000.000,00	DISDIK	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM</b>	<b>21,41%</b>	<b>27.219.234.108</b>	<b>10.157.566.000</b>	<b>17.061.668.108</b>	<b>-</b>	<b>28.580.195.813,40</b>	DISDIK
1	01	1	1	19	1	Pengadaan sarana dan prasarana SD/SDLB	Jumlah SD yang menerima bantuan DAK sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 sek	4.725.624.000	4.725.624.000		4.961.905.200,00	DISDIK	
1	01	1	1	19	2	Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana SD	Jumlah dokumen monev sarana dan prasarana SD	1 dok	60.000.000	-	60.000.000	63.000.000,00	DISDIK	
1	01	1	1	19	3	Pembangunan Bidang Pendidikan SD	Jumlah SD yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	71 sek	5.401.000.000	5.401.000.000		5.671.050.000,00	DISDIK	
1	01	1	1	19	4	Regrouping SD	Jumlah Sekolah yang di regrouping	4 sek	30.942.000	30.942.000		32.489.100,00	DISDIK	
1	01	1	1	19	5	Pengadaan sarana dan prasarana SD	Jumlah sarana dan prasarana SD yang diadakan	1 paket	17.001.668.108	-	17.001.668.108	17.851.751.513,40	DISDIK	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM</b>	<b>34,88%</b>	<b>27.831.361.000</b>	<b>1.811.670.000</b>	<b>26.019.691.000</b>	<b>-</b>	<b>29.222.929.050,00</b>	DISDIK
1	01	1	1	20	1	Pengadaan sarana dan prasarana SMP	Jumlah SMP yang menerima bantuan DAK sesuai dengan peraturan yang berlaku	30	1.681.670.000	1.681.670.000		1.765.753.500,00	DISDIK	
1	01	1	1	20	2	Monitoring dan Evaluasi pengadaan Sarana Prasarana SMP	Jumlah dokumen monev sarana dan prasarana SMP	1 dok	10.000.000	-	10.000.000	10.500.000,00	DISDIK	
1	01	1	1	20	3	Pembangunan Bidang Pendidikan SMP	Jumlah SMP yang mendapatkan bantuan	2 sek	130.000.000	130.000.000		136.500.000,00	DISDIK	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	01	1	1	20	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP	sarana prasarana Jumlah sarana Prasarana Yang diadakan untuk SMP	13 sek	26.009.691.000	-	26.009.691.000		27.310.175.550,00	DISDIK
1	01	1	1	21		<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik</b>	<b>92,24%</b>	<b>3.478.925.000</b>	<b>1.423.925.000</b>	<b>2.055.000.000</b>	-	<b>3.652.871.250,00</b>	DISDIK
1	01	1	1	21	1	Diklat dan Penilaian Angka Kredit jabatan Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Pelajar	Jumlah Guru yang didiklat dan Penilaian Angka Kredit jabatan Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Pelajar	80 or	50.000.000	50.000.000			52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	2	Olimpiade Guru Nasional (OGN)	Jumlah Guru yang maju ke3 olimpiade sains nasional guru tingkat Nasional	3 OR	100.000.000	100.000.000			105.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	3	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah guru yang didiklat calon Kepala Sekolah	40 or	450.000.000	-	450.000.000		472.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	4	Diklat Calon Pengawas Sekolah	Jumlah calon pengawas yang didiklat	30 or	400.000.000	-	400.000.000		420.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	5	Pemilihan Siswa, Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Jumlah PTK dan siswa yang mendapatkan juara di Propinsi	8 or	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	6	Pengelolaan Sertifikasi Guru	Jenis dokumen pengelolaan Sertifikasi Guru	1 dok	150.000.000	-	150.000.000		157.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	7	Diklat penguatan kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah yang didiklat Penguatan Kepala Sekolah	120 or	720.000.000	720.000.000			756.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	8	Pelatihan pengelolaan asset sekolah	Jumlah PTK yang mendapatkan Pelatihan pengelolaan asset sekolah	361 PTK	150.000.000	-	150.000.000		157.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	9	Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1 dok	350.000.000	350.000.000			367.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	10	Penyusunan Statistik Persekolahan dan Profil Pendidikan	Jumlah Dokumen statistik persekolahan dan profil pendidikan	4 dok	75.000.000	75.000.000			78.750.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	11	UKG	Jumlah guru yang mendapatkan nilai UKG dengan kategori baik	5600	300.000.000	-	300.000.000		315.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	12	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah	Jumlah Sekolah yang diverifikasi dokumen kurikulumnya	361	25.785.000	25.785.000			27.074.250,00	DISDIK
1	01	1	1	21	13	Bantuan Subsidi Peningkatan Kualifikasi guru	Jumlah guru yang mendapatkan subsidi	100 or	320.000.000	-	320.000.000		336.000.000,00	DISDIK

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	01	1	1	21	14	Pendidikan Inklusi	Penyelenggaraan pendidikan inklusi	1 keg	75.000.000	-	75.000.000		78.750.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	15	Diklat Kepala Perpustakaan	Jumlah Kepala Perpustakaan yang mengikuti diklat	100 or	150.000.000	-	150.000.000		157.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	21	16	Diklat Kepala Laboraturium	Jumlah Kepala Laboraturium yang mengikuti diklat	40 or	60.000.000	-	60.000.000		63.000.000,00	DISDIK
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>		<b>Program Pelayanan Manajemen Pendidikan</b>	<b>persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik'</b>	<b>44,20%</b>	<b>475.000.000</b>	-	<b>475.000.000</b>	-	<b>498.750.000,00</b>	DISDIK
1	01	1	1	22	1	Pengukuran SPM Pendidikan SMP	Jumlah sekolah yang memenuhi SPM	38	25.000.000	-	25.000.000		26.250.000,00	DISDIK
1	01	1	1	22	2	Pengukuran SPM Pendidikan SD	Jumlah sekolah yang memenuhi SPM	317	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	22	3	Pengukuran SPM Pendidikan PAUD-Dikmas	Jumlah sekolah yang memenuhi SPM	324	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	22	4	Pembinaan/Lomba-lomba	Jumlah peserta lomba yang diapresiasi	120	350.000.000	-	350.000.000		367.500.000,00	DISDIK
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>		<b>Program pendidikan karakter berbasis budaya</b>	<b>Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya</b>	<b>42,34%</b>	<b>1.945.000.000</b>	<b>1.695.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	-	<b>2.042.250.000,00</b>	DISDIK
1	01	1	1	23	1	Workshop Seni dan Budaya	jumlah aktivitas seni dan budaya yang dilaksanakan	40 or	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	2	Peringatan dan Perayaan Hari Besar	Jumlah kegiatan pada peringatan dan perayaan hari besar berupa berupa , peringatan Hardiknas dan PGRI lomba-loba hut Pemd Bali dan Gerakjalan Hut Margarana	3 keg	300.000.000	300.000.000			315.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	3	Pembinaan dan Lomba UKS	Ranking dalam lomba UKS tingkat Propinsi	II	100.000.000	100.000.000			105.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	4	Perindangan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan perindangan	15	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	5	Pembinaan Paskibraka	Jumlah peserta paskibraka yang dibina	82	750.000.000	750.000.000			787.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	6	Kemah Pelestarian Kebudayaan	Jumlah peserta kemah pelesatarian kebudayaan	50	100.000.000	100.000.000			105.000.000,00	DISDIK

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	01	1	1	23	7	Napak tilas	Jumlah peserta Nampak Tilas	400 orang	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	8	Pengembangan Kurikulum dan Penyesuaian Silabus SD	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Silabu SD	1 dok	50.000.000	50.000.000			52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	9	Kajian Muatan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan SD	dokumen muatan lokal alam kurikulum pendidikan SD	1 dok	50.000.000	50.000.000			52.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	10	Penerapan Pendidikan Karakter SD	Jumlah SD yang sudah menerapkan Pendidikan Karakter	324	170.000.000	170.000.000			178.500.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	11	Penerapan Pendidikan Karakter SMP	Jumlah SMP yang sudah menerapkan Pendidikan Karakter	38	100.000.000	100.000.000			105.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	23	12	Penerapan Pendidikan Karakter PAUD	Jumlah PAUD yang sudah menerapkan Pendidikan Karakter	10	75.000.000	75.000.000			78.750.000,00	DISDIK
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>		<b>Program Pendidikan Masyarakat</b>	<b>Jumlah peserta kursus lulus uji kompetensi</b>	<b>10,00%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>-</b>	<b>131.250.000,00</b>	DISDIK
1	01	1	1	24	1	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	Jumlah kelompok PKH yang mendapat pembinaan PKH	1 klp	75.000.000	-	75.000.000		78.750.000,00	DISDIK
1	01	1	1	24	2	Pendataan Lembaga Non Formal	Jumlah dokumen pendataan Lembaga Non Formal	1 dok	50.000.000	50.000.000			52.500.000,00	DISDIK
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>		<b>Program BOS</b>	<b>Persentase Sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan Dasar</b>	<b>49,58%</b>	<b>57.138.348.210</b>	<b>56.998.348.210</b>	<b>140.000.000</b>	<b>-</b>	<b>59.995.265.620,50</b>	DISDIK
1	01	1	1	25	1	Dana BOS SD	Prosentase Siswa SD yang Drop Out	0,01%	32.669.103.000	32.669.103.000			34.302.558.150,00	DISDIK
1	01	1	1	25	2	Dana BOS SMP	Prosentase Siswa SMP yang Drop Out	0,19%	22.695.050.000	22.695.050.000			23.829.802.500,00	DISDIK
1	01	1	1	25	3	Manajemen Pengelolaan BOS SD	Jumlah Dokumen Pengelolaan BOS SD	2 dok	68.760.000	68.760.000			72.198.000,00	DISDIK
1	01	1	1	25	4	Manajemen Pengelolaan BOS SMP	Jumlah Dokumen Pengelolaan BOS SMP	2 dok	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DISDIK
1	01	1	1	25	5	Diklat Pengelolaan Keuangan BOS SD	Jumlah bendahara BOS yang mengikuti diklat	312	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	25	6	Diklat Pengelolaan Keuangan BOS SMP	Jumlah bendahara BOS yang mengikuti diklat	38	40.000.000	-	40.000.000		42.000.000,00	DISDIK
1	01	1	1	25	7	Pendampingan BOS SD Negeri	Jumlah Sekolah yang mendapatkan	312	641.055.210	641.055.210			673.107.970,50	DISDIK

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	01	1	1	25	8	Pendampingan BOS SMP Negeri	Pendampingan BOS SD Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pendampingan BOS SMP	38	890.000.000	890.000.000			934.500.000,00	DISDIK
1	02					<b>KESEHATAN</b>								
1	02	1				<b>DINAS KESEHATAN</b>								
1	02	1	1			<b>DINAS KESEHATAN</b>								
1	02	1	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	-	-	<b>13.125.000.000,00</b>	DISKES
1	02	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	12.500.000.000	12.500.000.000			13.125.000.000,00	DISKES
1	02	1	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>465.780.000</b>	<b>456.280.000</b>	<b>9.500.000</b>	-	<b>226.569.000,00</b>	DISKES
1	02	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor	88%	206.280.000	206.280.000		-	216.594.000,00	DISKES
1	02	1	1	2	2	Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	Meningkatnya fungsi pasilitas gedung tempat kerja	88%	9.500.000		9.500.000	-	9.975.000,00	DISKES
1	02	1	1	2	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Farmasi (DAK Farmasi)	Meningkatnya pemenuhan sarana parasarana kantor	88%	250.000.000	250.000.000		-	262.500.000,00	DISKES
1	02	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>288.368.000</b>	<b>288.368.000</b>	-	-	<b>302.786.400,00</b>	DISKES
1	02	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3 Jenis Dokumen	10.887.000	10.887.000			11.431.350,00	DISKES
1	02	1	1	3	2	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip (BOK)	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3 Jenis Dokumen	202.991.000	202.991.000			213.140.550,00	DISKES
1	02	1	1	3	3	Pendataan Aset	jumlah dokumen aset yang dihasilkan	4 Jenis Dokumen	74.490.000	74.490.000			78.214.500,00	DISKES
1	02	1	1	15		<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Persentase jenis layanan kesehatan dasar yang mampu dilayani secara</b>	<b>100%</b>	<b>87.203.834.125</b>	<b>70.842.834.125</b>	<b>16.361.000.000</b>	-	<b>60.703.842.255,00</b>	DISKES

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							<b>prima</b>							
1	02	1	1	15	1	Pemantauan kepuasan pelanggan	Persentase Puskesmas yang indeks kepuasan pelanggan kategori Puas	100%	150.000.000	-	150.000.000		157.500.000,00	DISKES
1	02	1	1	15	2	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	15%	240.660.000	240.660.000			252.693.000,00	DISKES
1	02	1	1	15	3	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (BOK)	Persentase Puskesmas yang memiliki Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	15%	875.796.000	875.796.000			919.585.800,00	DISKES
1	02	1	1	15	4	Penunjang Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional	20	615.000.000	-	615.000.000		645.750.000,00	DISKES
					1	<i>Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Baturiti I (BLUD)</i>	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	2.457.965.725	2.457.965.725				DISKES
					2	<i>Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Baturiti II (BLUD)</i>	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.112.330.350	1.112.330.350				DISKES
					3	<i>Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kediri I (BLUD)</i>	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	2.180.010.700	2.180.010.700				DISKES
					4	<i>Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kediri II (BLUD)</i>	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	803.865.825	803.865.825				DISKES
					5	<i>Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kediri III (BLUD)</i>	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	849.154.950	849.154.950				DISKES
					6	<i>Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kerambitan I (BLUD)</i>	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.310.978.275	1.310.978.275				DISKES
					7	<i>Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kerambitan II (BLUD)</i>	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.029.059.600	1.029.059.600				DISKES
					8	<i>Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Marga I (BLUD)</i>	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.493.371.275	1.493.371.275				DISKES

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
	9	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Marga II (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.164.176.200	1.164.176.200			DISKES
	10	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Penebel I (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	2.596.536.900	2.596.536.900			DISKES
	11	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Penebel II (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.091.115.100	1.091.115.100			DISKES
	12	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Pupuan I (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	2.269.196.975	2.269.196.975			DISKES
	13	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Pupuan II (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.205.498.950	1.205.498.950			DISKES
	14	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Barat (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.634.194.625	1.634.194.625			DISKES
	15	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	2.141.909.950	2.141.909.950			DISKES
	16	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur I (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.144.232.300	1.144.232.300			DISKES
	17	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur II (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	541.127.600	541.127.600			DISKES
	18	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan I (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.156.834.500	1.156.834.500			DISKES
	19	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan II (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	80%	1.020.879.775	1.020.879.775			DISKES
	20	Dukungan biaya	Persentase sarana dan	80%	2.188.211.450	2.188.211.450			DISKES

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
					<i>operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan III (BLUD)</i>	prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar								
1	02	1	1	15	5	Pelayanan Mobil Sehat	Jumlah banjar yang mendapat pelayanan mobil sehat	100	83.658.000	83.658.000			87.840.900,00	DISKES
1	02	1	1	15	6	Pelaksanaan BLUD Puskesmas	Tersusunnya dokumen BLUD Puskesmas	20	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISKES
1	02	1	1	15	7	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Persentase Cakupan SPM Kesehatan	100%	15.596.000.000	-	15.596.000.000		16.375.800.000,00	DISKES
1	02	1	1	15	8	Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin (UHC)	Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	100%	40.194.769.100	40.194.769.100			42.204.507.555,00	DISKES
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	<b>Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima</b>	<b>100%</b>	<b>10.368.138.000</b>	<b>10.368.138.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.886.544.900,00</b>	DISKES
1	02	1	1	16	1	Monitoring rujukan dan perijinan bidang kesehatan	Persentase perijinan bidang kesehatan yang diterbitkan	98%	275.040.000	275.040.000			288.792.000,00	DISKES
1	02	1	1	16	2	Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	100%	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	DISKES
1	02	1	1	16	3	Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer (BOK)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	100%	54.138.000	54.138.000			56.844.900,00	DISKES
1	02	1	1	16	4	Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanganan Gawat darurat terpadu Pra Rumah Sakit oleh Fasilitas kesehatan	100%	252.120.000	252.120.000			264.726.000,00	DISKES
1	02	1	1	16	5	Penunjang Pelayanan UPT Rumah Sakit Nyitdah	Pencapaian BOR Rumah sakit Nyitdah	40%	9.741.000.000	9.741.000.000			10.228.050.000,00	DISKES
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>Persentase ketersediaan obat dan vaksin</b>	<b>90%</b>	<b>3.583.727.000</b>	<b>3.583.727.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.762.913.350,00</b>	DISKES
1	02	1	1	17	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	131.790.000	131.790.000			138.379.500,00	DISKES
1	02	1	1	17	2	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	2.600.000.000	2.600.000.000			2.730.000.000,00	DISKES

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	02	1	1	17	3	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Stunting)	Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	346.677.000	346.677.000			364.010.850,00	DISKES
1	02	1	1	17	4	Pengadaan Reagen (bahan laboratorium)	Persentase Ketersediaan Reagen untuk pelayanan kesehatan	100%	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DISKES
1	02	1	1	17	5	Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi	22	240.660.000	240.660.000			252.693.000,00	DISKES
1	02	1	1	17	6	Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (BOK)	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi	22	150.000.000	150.000.000			157.500.000,00	DISKES
									-					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)</b>	<b>Jumlah SDM yang memenuhi standar jumlah dan kompetensi</b>	<b>1.350</b>	<b>103.140.000</b>	<b>103.140.000</b>	-	-	<b>108.297.000,00</b>	DISKES
1	02	1	1	18	1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki SDM kesehatan yang memenuhi standar jumlah dan kompetensi	15%	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	DISKES
									-					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</b>	<b>Persentase penyakit menular yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>4.093.738.168</b>	<b>4.093.738.168</b>	-	-	<b>4.298.425.076,40</b>	DISKES
1	02	1	1	19	1	Pengendalian penyakit bersumber binatang	Penemuan Penyakit DBD Positif (< 55 or/100.000 pddk ); Persentase penemuan kasus Rabies (< 5/1000 pddk ); Persentase Penemuan kasus Malaria (< 1/1000 pddk ); Pemberian Obat cacung pada anak ≤ 12 tahun	100%; 100%; 100%; 100%.	1.696.080.000	1.696.080.000			1.780.884.000,00	DISKES
1	02	1	1	19	2	Pemberantasan penyakit menular langsung	Persentase Kecamatan yang melakukan pengendalian Zoonosis terpadu; Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; Penemuan semua kasus TB (CDR); Penemuan kasus baru Kusta (< 1/ 1000 pddk);	100%; 100%; 29%; 2%; 77%; 85%; 100%; <5%; <1%.	139.239.000	139.239.000			146.200.950,00	DISKES

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH					
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III							
			Persentase penemuan kasus Diare pada balita {10% x (270/1000) x jml pddk }; Persentase Penemuan kasus ISPA/Pneumoni pada Balita; Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar; -Insiden HIV<5%/pddk beresiko; - Bumil HIV <1%/bumil.											
1	02	1	1	19	3	Pemberantasan penyakit menular langsung (BOK)	Persentase Kecamatan yang melakukan pengendalian Zoonosis terpadu; Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; Penemuan semua kasus TB (CDR); Penemuan kasus baru Kusta (< 1/ 1000 pddk); Persentase penemuan kasus Diare pada balita {10% x (270/1000) x jml pddk }; Persentase Penemuan kasus ISPA/Pneumoni pada Balita; Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar; -Insiden HIV<5%/pddk beresiko; - Bumil HIV <1%/bumil.	100%; 100%; 29%; 2%; 77%; 85%; 100%; <5%; <1%.	1.303.146.000	1.303.146.000			1.368.303.300,00	DISKES
1	02	1	1	19	4	Kegiatan surveilan epidemiologi penyakit	Persentase Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam; Acute placid	100%; 4	49.278.000	49.278.000			51.741.900,00	DISKES

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun.							
1	02	1	1	19	5	Kegiatan surveilan epidemiologi penyakit (BOK)	Persentase Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam; Acute placid paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun.	100%; 4	230.058.000	230.058.000			241.560.900,00	DISKES
1	02	1	1	19	6	Pencegahan penyakit dengan imunisasi	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	92%; 100%	183.360.000	183.360.000			192.528.000,00	DISKES
1	02	1	1	19	7	Pencegahan penyakit dengan imunisasi (BOK)	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	92%; 100%	243.592.000	243.592.000			255.771.600,00	DISKES
1	02	1	1	19	8	Pemberantasan penyakit menular langsung (DAK Penugasan)	Persentase Kecamatan yang melakukan pengendalian Zoonosis terpadu; Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; Penemuan semua kasus TB (CDR); Penemuan kasus baru Kusta (< 1/ 1000 pddk); Persentase penemuan kasus Diare pada balita {10% x (270/1000) x jml pddk }; Persentase Penemuan kasus ISPA/Pneumoni pada Balita; Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar; -Insiden	100%; 100%; 29%; 2%; 77%; 85%; 100%; <5%; <1%.	248.985.168	248.985.168			261.434.426,40	DISKES

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							HIV<5%/pddk beresiko; - Bumil HIV <1%/bumil.							
1	02	1	1	20		<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>	<b>Persentase penyakit tidak menular yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>6.508.247.432</b>	<b>6.508.247.432</b>	-	-	<b>6.833.659.803,60</b>	DISKES
1	02	1	1	20	1	Pengendalian penyakit tidak menular	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. (SPM)	100%; 100%; 100%; 100%.	893.341.600	893.341.600			938.008.680,00	DISKES
1	02	1	1	20	2	Pengendalian penyakit tidak menular (BOK)	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. (SPM)	100%; 100%; 100%; 100%.	2.851.321.000	2.851.321.000			2.993.887.050,00	DISKES
1	02	1	1	20	3	Penyediaan Fasilitas Perawatan Akibat Dampak Asap Rokok	Persentase Puskesmas yang memiliki Fasilitas Perawatan Akibat Asap Rokok	100%	285.354.000	285.354.000			299.621.700,00	DISKES
1	02	1	1	20	4	Pengendalian penyakit tidak menular (Dak Penugasan Pengendalian Penyakit)	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100%; 100%; 100%; 100%.	2.478.230.832	2.478.230.832			2.602.142.373,60	DISKES

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							standar; Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.							
1	02	1	1	21		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</b>	<b>11,28%</b>	<b>1.022.624.000</b>	<b>1.022.624.000</b>	-	-	<b>893.260.200,00</b>	DISKES
1	02	1	1	21	1	Pelayanan hiegene dan sanitasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM; Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM; Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan; Persentase RS yang melakukan pengolahan limbah medis sesuai standar; Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan; Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar; Jumlah Pos UKK yang terbentuk.	45%; 50%; 9%; 100%; 32%; 100%; 80%; 2%	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DISKES
1	02	1	1	21	2	Pelayanan hiegene dan sanitasi (BOK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM; Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM; Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan;	45%; 50%; 9%; 100%; 32%; 100%; 80%; 2%	850.724.000	850.724.000			893.260.200,00	DISKES

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH				
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III						
			Persentase RS yang melakukan pengolahan limbah medis sesuai standar; Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan; Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar; Jumlah Pos UKK yang terbentuk.										
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS</b>	<b>75%</b>	<b>1.771.616.000</b>	<b>1.771.616.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.860.196.800,00</b>	DISKES
1	02	1	1	22	1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sarana Hidup Sehat	Persentase media promosi sarana hidup sehat yang dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan program bidang kesehatan	100%	68.760.000	68.760.000			72.198.000,00	DISKES
1	02	1	1	22	2 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sarana Hidup Sehat (BOK)	Persentase media promosi sarana hidup sehat yang dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan program bidang kesehatan	100%	1.135.495.000	1.135.495.000			1.192.269.750,00	DISKES
1	02	1	1	22	3 Kegiatan Pembinaan Desa Siaga	Persentase desa siaga aktif madya; Persentase PHBS di tatanan rumah tangga; Persentase PHBS di tatanan sekolah; Persentase PHBS di tatanan tempat Kerja; Persentase PHBS di tatanan tempat umum; Persentase PHBS di tatanan institusi kesehatan;	20%; 65%; 70%; 10%; 10%; 10%.	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISKES
1	02	1	1	22	4 Kegiatan Pembinaan Desa Siaga (BOK)	Persentase desa siaga aktif madya; Persentase PHBS di tatanan	20%; 65%; 70%;	538.711.000	538.711.000			565.646.550,00	DISKES

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
						rumah tangga; Persentase PHBS di tatanan sekolah; Persentase PHBS di tatanan tempat Kerja; Persentase PHBS di tatanan tempat umum; Persentase PHBS di tatanan institusi kesehatan;	10%; 10%; 10%.							
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Persentase balita gizi kurang</b>	<b>3,60%</b>	<b>653.098.000</b>	<b>653.098.000</b>	-	-	<b>493.224.900,00</b>	DISKES	
1	02	1	1	23	1	Peningkatan Status Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase balita kurus yang mendapat Makanan Tambahan; Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD).; Persentase Balita Stunting mendapat vitamin dan mineral; Persentase bumil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD); Persentase bumil KEK yang mendapat makanan tambahan; Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif; Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD).; Persentase balita yang ditimbang (D/S). Persentase balita gizi lebih. Sosialisasi pedoman gizi seimbang (PGS) di kabupaten dan kecamatan;	100%; 100%; 85%; 50%; 100%; 100%; 100%; 50%; 100%; 85%; 10%; 21%; 85%.	183.360.000	183.360.000			192.528.000,00	DISKES

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							Persentase penggunaan garam beryodium Gayo)							
1	02	1	1	23	2	Peningkatan Status Gizi Masyarakat (BOK)	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase balita kurus yang mendapat Makanan Tambahan; Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD).; Persentase Balita Stunting mendapat vitamin dan mineral; Persentase bumil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD); Persentase bumil KEK yang mendapat makanan tambahan; Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif; Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD).; Persentase balita yang ditimbang (D/S). Persentase balita gizi lebih. Sosialisasi pedoman gizi seimbang (PGS) di kabupaten dan kecamatan; Persentase penggunaan garam beryodium Gayo)	100%; 100%; 85%; 50%; 100%; 100%; 100%; 50%; 100%; 85%; 10%; 21%; 85%.	469.738.000	469.738.000			493.224.900,00	DISKES
1	02	1	1	24		<b>Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya</b>	<b>persentase puskesmas yang memiliki sapras sesuai standar</b>	<b>70%</b>	<b>27.987.174.514</b>	<b>22.524.174.514</b>	<b>5.463.000.000</b>	<b>-</b>	<b>29.386.533.239,70</b>	DISKES

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1 02 1 1 24 1	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas/ Pustu/Poskesdes	Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	70%	3.687.847.314	3.687.847.314			3.872.239.679,70	DISKES
1 02 1 1 24 2	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas/ Pustu/Poskesdes (BKK)	Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	70%	10.657.800.000	10.657.800.000			11.190.690.000,00	DISKES
1 02 1 1 24 3	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas/ Pustu/Poskesdes (DAK)	Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	70%	4.200.000.000	4.200.000.000			4.410.000.000,00	DISKES
1 02 1 1 24 4	Pengadaan/Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis	Persentase alat medis dan non medis sesuai standar	95%	2.656.888.200	2.656.888.200			2.789.732.610,00	DISKES
1 02 1 1 24 5	Pengadaan/Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis (DAK)	Persentase alat medis dan non medis sesuai standar	95%	1.321.639.000	1.321.639.000			1.387.720.950,00	DISKES
1 02 1 1 24 6	Pengadaan/Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis (BKK)	Persentase alat medis dan non medis sesuai standar	95%	5.250.000.000	-	5.250.000.000		5.512.500.000,00	DISKES
1 02 1 1 24 7	Pengadaan/Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis (UPTD Labkes dan Kalibrasi)	Persentase alat medis dan non medis sesuai standar	95%	213.000.000	-	213.000.000		223.650.000,00	DISKES
<b>1 02 1 1 26</b>	<b>Program Peningkatan kesehatan ibu</b>	<b>Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup</b>	<b>55</b>	<b>3.330.890.000</b>	<b>3.330.890.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.198.000,00</b>	DISKES
1 02 1 1 26 1	Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar; Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar; % pelayanan nifas; % KB Aktif	100%; 100%; 93%; 80%	68.760.000	68.760.000			72.198.000,00	DISKES
1 02 1 1 26 2	Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas (BOK)	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar; Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar; % pelayanan nifas; % KB Aktif	100%; 100%; 93%; 80%	1.556.130.000	1.556.130.000			1.633.936.500,00	DISKES
1 02 1 1 26 3	Jaminan Persalinan (DAK)	Cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Persentase komplikasi kebidanan yang	99%;95%	1.706.000.000	1.706.000.000			1.791.300.000,00	DISKES

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
						tertangani								
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>		<b>Program peningkatan kesehatan anak</b>	<b>Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup</b>	<b>8</b>	<b>1.295.594.000</b>	<b>1.295.594.000</b>	-	-	<b>1.360.373.700,00</b>	DISKES
1	02	1	1	27	1	Peningkatan Keselamatan Bayi dan Balita	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (% Kunjungan neonatal); % komplikasi neonatal yang tertangani; % Kunjungan bayi; Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (% pelayanan anak balita)	100%; 90%; 95%; 94%	63.030.000	63.030.000			66.181.500,00	DISKES
1	02	1	1	27	2	Peningkatan Keselamatan Bayi dan Balita (BOK)	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (% Kunjungan neonatal); % komplikasi neonatal yang tertangani; % Kunjungan bayi; Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (% pelayanan anak balita)	100%; 90%; 95%; 94%	1.232.564.000	1.232.564.000			1.294.192.200,00	DISKES
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>		<b>Program peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja</b>	<b>Cakupan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)</b>	<b>100%</b>	<b>1.242.496.000</b>	<b>1.242.496.000</b>	-	-	<b>1.262.505.300,00</b>	DISKES
1	02	1	1	28	1	Peningkatan peran kader kesehatan sekolah dalam upaya kesehatan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	40.110.000	40.110.000			42.115.500,00	DISKES
1	02	1	1	28	2	Peningkatan peran kader kesehatan sekolah dalam upaya kesehatan (BOK)	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1.202.386.000	1.202.386.000			1.262.505.300,00	DISKES
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>		<b>Program peningkatan kesehatan lanjut usia</b>	<b>Persentase Lansia yang dilayani</b>	<b>70%</b>	<b>818.198.000</b>	<b>818.198.000</b>	-	-	<b>835.041.900,00</b>	DISKES

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	02	1	1	29	1	Revitalisasi posyandu lansia	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (% pelayanan pada lanjut usia)	100%	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISKES
1	02	1	1	29	2	Revitalisasi posyandu lansia (BOK)	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (% pelayanan pada lanjut usia)	100%	795.278.000	795.278.000			835.041.900,00	DISKES
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>		<b>Program peningkatan manajemen puskesmas</b>	<b>persentase jumlah puskesmas dengan indeks kepuasan pelanggan memuaskan</b>	<b>80%</b>	<b>3.375.132.000</b>	<b>3.375.132.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.543.888.600,00</b>	DISKES
1	02	1	1	30	1	Pembinaan manajemen Puskesmas	Persentase Puskesmas yang telah memiliki PTP sesuai Renstra	100%	63.030.000	63.030.000			66.181.500,00	DISKES
1	02	1	1	30	2	Pembinaan manajemen Puskesmas (BOK)	Persentase Puskesmas yang telah memiliki PTP sesuai Renstra	100%	1.903.932.000	1.903.932.000			1.999.128.600,00	DISKES
1	02	1	1	30	3	Sistem informasi kesehatan	Tersedianya data dan informasi secara elektronik	1	64.176.000	64.176.000			67.384.800,00	DISKES
1	02	1	1	30	4	Pendampingan akreditasi Puskesmas	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	20%	44.694.000	44.694.000			46.928.700,00	DISKES
1	02	1	1	30	5	Pendampingan akreditasi Puskesmas (DAK)	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	20%	1.299.300.000	1.299.300.000			1.364.265.000,00	DISKES
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2</b>				<b>BRSU</b>								
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BRSU</b>								
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	<b>Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima</b>	<b>100%</b>	<b>214.685.854.530</b>	<b>162.055.038.450</b>	<b>52.630.816.080</b>	<b>-</b>	<b>225.420.147.256,50</b>	BRSUD
1	02	2	1	15	1	Pelayanan Kesehatan	Tercapainya pelayanan kesehatan prima kepada pasien	100%	139.621.139.450	139.621.139.450			146.602.196.422,50	BRSUD
1	02	2	1	15	2	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan	9 paket	22.433.899.000	22.433.899.000			23.555.593.950,00	BRSUD
1	02	2	1	15	3	Pengadaan Sarana dan	jumlah sarana dan	1 unit	52.630.816.080	-	52.630.816.080		55.262.356.884,00	BRSUD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH					
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III							
	Prasarana		prasarana yang diadakan;											
			gedung, 2 paket;											
1	03													
1	03	1												
1	03	1	1											
1	03	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	13.760.136.000	13.760.136.000	-	-	14.448.142.800,00	DPUPRPKP	
1	03	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Palayanan Administrasi Perkantoran	100%	13.760.136.000	13.760.136.000			14.448.142.800,00	DPUPRPKP	
1	03	1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	90%	9.889.000.000		9.889.000.000		-	-	DPUPRPKP
1	03	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Presentase Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor	100%	9.889.000.000		9.889.000.000		-	DPUPRPKP
1	03	1	1	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	58.446.000	58.446.000		-	-	61.368.300,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	1 Dokumen	6.876.000	6.876.000			7.219.800,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	3	3	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah	Jumlah laporan hibah tersedia	1 dok	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Tata Ruang yang dilegalisasi	5 dok	1.159.500.000	859.500.000	300.000.000		-	1.217.475.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	15	1	Pemutakhiran, Penyusunan dan Legalisasi Dokumen Tata Ruang	Materi Teknis Dokumen dan Perda	3 Dok	859.500.000	859.500.000			902.475.000,00	DPUPRPKP

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	03	1	1	15	2	Penyusunan dan Legalisasi Dokumen RTBL	Jumlah dokumen RTBL yang disusun dan dilegalisasi	30	300.000.000	-	300.000.000		315.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	16		<b>Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang</b>	<b>Persentase luas kawasan yang dapat dipertahankan sesuai dengan arahan rencana pola ruang</b>	<b>95%</b>	<b>557.300.000</b>	<b>57.300.000</b>	<b>500.000.000</b>	-	<b>585.165.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	16	1	Pembangunan Sistem Tata Ruang Berbasis Data Spasial	Peta wilayah yang berbasis data GIS	1 Sistem	500.000.000	-	500.000.000		525.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	16	2	Monev Pengendalian pemanfaatan Ruang	Dokumen Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dok	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	17		<b>Program perencanaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional</b>	<b>Jumlah perencanaan pada pusat pertumbuhan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional</b>	<b>4</b>	<b>500.000.000</b>	-	<b>500.000.000</b>	-	<b>525.000.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	17	1	Perencanaan Pengembangan Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan pada KPPN	Jumlah dokumen KPPN	1 dokumen	500.000.000	-	500.000.000	-	525.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	18		<b>Program perencanaan pembangunan kawasan perdesaan</b>	<b>Jumlah perencanaan pada pusat pertumbuhan di Pembangunan Kawasan Perdesaan</b>	<b>2</b>	<b>500.000.000</b>	-	<b>500.000.000</b>	-	<b>525.000.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	18	1	Kajian Perencanaan Pengembangan pada Pusat Pusat Pertumbuhan pada PKP	Jumlah Dokumen PKP	1 dokumen	500.000.000	-	500.000.000	-	525.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	19		<b>Program Pembangunan Jalan baru kabupaten</b>	<b>Panjang Jalan baru yang dibangun Dalam Rangka Membuka Akses Wilayah</b>	<b>20,05km</b>	<b>17.800.000.000</b>	-	<b>17.800.000.000</b>	-	<b>18.690.000.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	19	1	Penyusunan DED jalan baru	Dokumen Berupa Gambar dan RAB Jalan baru	3	2.800.000.000	-	2.800.000.000		2.940.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	19	2	Pembangunan Jalan Baru	Akses Jalan yang Dapat dilalui	8 km	15.000.000.000	-	15.000.000.000	-	15.750.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	20		<b>Program Pembangunan Jembatan Baru</b>	<b>Jumlah jembatan baru yang dibangun</b>	<b>6 Unit</b>	<b>12.000.000.000</b>	-	<b>12.000.000.000</b>	-	<b>12.600.000.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	20	1	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang	1 unit	12.000.000.000	-	12.000.000.000		12.600.000.000,00	DPUPRPKP

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH				
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III						
	Baru		dibangun										
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>Program Peningkatan Jalan Kabupaten</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>98.121.926.000</b>	<b>96.921.926.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>103.028.022.300,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	21	1 Penyusunan data Base Jalan Kabupaten sesuai SK 77	Sistem Data Base DD1 Sesuai SK 77	1 Paket	100.000.000	-	100.000.000	-	105.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	21	2 Penyusunan Leger jalan Kab. Tabanan	Dokumen Gambar tentang Riwayat suatu Ruas Jalan	30 Km	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.050.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	21	3 Penyusunan DED Jalan di Kab. Tabanan	Dokumen DED ruas Jalan Kabupaten	1 Dok	100.000.000	-	100.000.000	-	105.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	21	4 Peningkatan Jalan Kab. Tabanan	Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	20,85 km	73.229.400.000	73.229.400.000			76.890.870.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	21	5 Peningkatan Jalan Kab. Tabanan	Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	56,87 km	23.692.526.000	23.692.526.000			24.877.152.300,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>94,92%</b>	<b>9.123.300.000</b>	<b>6.933.300.000</b>	<b>2.190.000.000</b>	<b>-</b>	<b>9.579.465.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	22	1 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Jumlah Ruas jalan kabupaten yang terpelihara secara berkala	75 Ruas	2.922.300.000	2.922.300.000			3.068.415.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	22	2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten	Panjang ruas jalan dan jembatan yang terpelihara dengan baik	250 Km, 15 jembatan, 219,5 m	4.011.000.000	4.011.000.000			4.211.550.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	22	3 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Jumlah Jembatan yang terpelihara	15 jembatan, 219,5 m	2.190.000.000	-	2.190.000.000		2.299.500.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>Persentase sarana Binamarga dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>9.573.000.000</b>	<b>573.000.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.051.650.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	23	1 Pengadaan Alat Berat	Fasilitas Alat Berat Baru yang mendukung kegiatan kebinamargaan	3 Unit	9.000.000.000	-	9.000.000.000	-	9.450.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	23	2 Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang terpelihara dan berfungsi baik	17 Unit	573.000.000	573.000.000			601.650.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana LPJU</b>	<b>Persentase desa dalam cakupan layanan lampu penerangan jalan</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.544.600.000</b>	<b>5.844.600.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.871.830.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	24	1 Monitoring dan Validasi Pengelolaan LPJU	Dokumen Data Jaringan LPJU yang dikelola	1 Paket	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DPUPRPKP

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	03	1	1	24	2	DED Pengelolaan LPJU Kab. Tabanan	Dokumen DED berupa Gambar dan RAB Jaringan Penerangan Jalan Umum	1 Dok	500.000.000	-	500.000.000		525.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	24	3	Pemeliharaan dan Peningkatan Pelayanan LPJU di Kab. Tabanan	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang terpelihara	100%	2.292.000.000	2.292.000.000			2.406.600.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	24	4	Pengadaan LPJU	Jumlah LPJU baru yang terpasang	500 Unit	1.719.000.000	1.719.000.000			1.804.950.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	24	5	Meterisasi dan peningkatan jaringan LPJU di Kab. Tabanan	Cakupan Jaringan Penerangan Jalan Umum yang telah di Meterisasi	100 Unit	1.833.600.000	1.833.600.000			1.925.280.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>		<b>Program pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>Indeks Kinerja Jaringan Irigasi</b>	<b>73</b>	<b>12.433.230.000</b>	<b>6.433.230.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>13.054.891.500,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	25	1	Pemeliharaan jaringan irigasi di Kab. Tabanan	Jumlah Daerah Irigasi yang terpelihara	194 Daerah Irigasi	1.146.000.000	1.146.000.000			1.203.300.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	25	2	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi (DAK)	Jumlah Daerah Irigasi yang tertangani melalui Dana DAK	57 Daerah Irigasi	4.099.630.000	4.099.630.000			4.304.611.500,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	25	3	DED jaringan irigasi di Kab.Tbn	Jumlah Dokumen DED Jaringan Irigasi	20 Dok	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	25	4	PAI jaringan irigasi di Kab. Tabanan	Sistem PAI berbasis SIG	1 Sistem	458.400.000	458.400.000			481.320.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	25	5	Pembangunan Embung Membran	Jumlah Embung Membran yang terbangun	1 Unit	6.000.000.000	-	6.000.000.000	-	6.300.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	25	6	Perbaikan jaringan irigasi di Kab. Tabanan	Persentase jaringan irigasi yang terehabilitasi	42%	500.000.000	500.000.000			525.000.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>		<b>Program peningkatan prasarana aparatur dan prasarana publik</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik</b>	<b>85%</b>	<b>48.080.809.000</b>	<b>34.430.809.000</b>	<b>13.650.000.000</b>	<b>-</b>	<b>50.484.849.450,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	26	1	Pendataan bangunan, pengurusan IMB dan SLF gedung-gedung pemerintah	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang terdata dan ber-IMB	108 Unit	154.710.000	154.710.000			162.445.500,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	26	2	Penyusunan dan Review DED prasarana Gedung Kantor Pemerintah	Jumlah DED Bangunan dan DED Gedung Kantor Pemerintah	20 Paket	500.000.000	-	500.000.000		525.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	26	3	Pembangunan dan peningkatan bangunan gedung prasarana aparatur	Jumlah Bangunan Kantor Pemerintah yang dibangun atau ditingkatkan fungsinya	10 Unit	10.000.000.000	-	10.000.000.000		10.500.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	26	4	perbaikan prasarana	gedung kantor yang direhab	100 Unit	34.240.000.000	34.240.000.000			35.952.000.000,00	DPUPRPKP

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						publik	dan prsasaran publik yang dibangun							
1	03	1	1	26	5	Peningkatan dan Penataan fasilitas umum dan RTH	Jumlah Fasilitas Umum dan RTH yang tertata secara lebih Representatif	20 Unit	3.000.000.000	-	3.000.000.000		3.150.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	26	6	Pembinaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Sosialisasi pengelolaan Bangunan Gedung	1 Paket	150.000.000	-	150.000.000		157.500.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	26	7	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Paket	36.099.000	36.099.000			37.903.950,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>		<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>Persentase genangan yang dapat tertangani</b>	<b>95,00%</b>	<b>2.792.000.000</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.931.600.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	27	1	Perbaikan Drainase dan Trotoar	Panjang Trotoar yang diperbaiki	5469 meter	1.146.000.000	1.146.000.000			1.203.300.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	27	2	Pemeliharaan drainase dan trotoar di kab tabanan	Terpeliharanya drainase dan trotoar dikota tabanan dan Kediri	89,225 km	1.146.000.000	1.146.000.000			1.203.300.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	27	3	Pemutakhiran database drainase dan trotoar	Dokumen database drainase dan trotoar	1 Dok	250.000.000	-	250.000.000		262.500.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	27	4	Perencanaan Teknis Bidang Permukiman	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Permukiman	1 Dok	250.000.000	-	250.000.000		262.500.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>		<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah</b>	<b>Jumlah pusat pengolahan limbah komunal dalam kondisi baik</b>	<b>61</b>	<b>3.986.494.900</b>	<b>2.986.494.900</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.185.819.645,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	28	1	Pembangunan IPAL Komunal	Jumlah prasarana sanitasi komunal yang terbangun	4	2.929.194.900	2.929.194.900			3.075.654.645,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	28	2	Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal	Jumlah prasarana sanitasi yang terbangun	2 Paket	1.000.000.000	-	1.000.000.000		1.050.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	28	3	Monev dan Pembinaan Pengelolaan IPAL Komunal	Dokumen Monev	1 Paket	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>		<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum</b>	<b>Persentase layanan air minum kabupaten</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.143.458.000</b>	<b>8.093.458.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>8.550.630.900,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	29	1	Pengadaan prasarana air minum di kab tabanan	Jumlah desa yang prasarana air minumnya terbangun	15 Desa	802.200.000	802.200.000			842.310.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	29	2	Pemutakhiran Data Air Minum	Sistem pendataan air minum	1 Paket	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	29	3	Pendampingan	Jumlah desa yang	36 Desa	1.031.400.000	1.031.400.000			1.082.970.000,00	DPUPRPKP

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Pengembangan SPAM di Kab. Tabanan	mendapat pelayanan air minum							
1	03	1	1	29	4	Pengadaan dan Pemasangan SR Program Hibah PAMSIMAS	Jumlah SR yang terpasang	1,000 SR	1.146.000.000	1.146.000.000			1.203.300.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	29	5	Pengadaan Prasarana Air Minum di Kab. Tabanan (DAK Penugasan)	Jumlah Desa yang prasarana air minum nya terbangun melalui Dana DAK Penugasan	93 Desa	2.764.973.000	2.764.973.000			2.903.221.650,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	29	6	Pengadaan Prasarana Air Minum di Kab. Tabanan (DAK Reguler)	Jumlah Desa yang prasarana air minum nya terbangun melalui Dana DAK Reguler	22 Desa	2.245.745.000	2.245.745.000			2.358.032.250,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	29	7	Monev Kegiatan Bidang Permukiman	Tersedianya data bidang Permukiman	1 Paket	50.000.000		50.000.000		52.500.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>		<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	<b>Persentase jalan desa/lingkungan dalam kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>27.114.600.000</b>	<b>114.600.000</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>28.470.330.000,00</b>	DPUPRPKP
1	03	1	1	30	1	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Infrastruktur jalan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik	75%	20.000.000.000		20.000.000.000		21.000.000.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	30	2	DED Pengembangan Permukiman	Dokumen DED Pengembangan Permukiman	1 Dok	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DPUPRPKP
1	03	1	1	30	3	pembangunan infrastruktur partisipatif	perbaikan jalan desa/lingkungan	1 paket	7.000.000.000		7.000.000.000		7.350.000.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>04</b>					<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>				<b>DPUPRPKP</b>								
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DPUPRPKP</b>								
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase lingkungan perumahan yang tertangani</b>	<b>97%</b>	<b>1.057.300.000</b>	<b>57.300.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.110.165.000,00</b>	DPUPRPKP
1	04	1	1	15	1	Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan dan Verifikasi RTLH Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Pendataan Perumahan	1 Dok	100.000.000		100.000.000		105.000.000,00	DPUPRPKP
1	04	1	1	15	2	Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Kecamatan yang dimonev dan jumlah RTLH yang mendapat bantuan	2 Kecamatan	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DPUPRPKP

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	04	1	1	15	3	RP3KP	Jumlah Dokumen yang Direview	1 Dokumen	500.000.000	-	500.000.000	-	525.000.000,00	DPUPRPKP
1	04	1	1	15	4	Pendataan PSU	Jumlah dokumen data PSU	1 dok	400.000.000	-	400.000.000	-	420.000.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Persentase lingkungan sehat dan aman</b>	<b>40%</b>	<b>200.000.000</b>	-	<b>200.000.000</b>	-	<b>210.000.000,00</b>	DPUPRPKP
1	04	1	1	16	1	Perencanaan Teknis Perumahan Formal	Dokumen perencanaan teknis	1 dok	200.000.000	-	200.000.000	-	210.000.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh</b>	<b>berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan</b>	<b>100,00%</b>	<b>623.000.000</b>	-	<b>623.000.000</b>	-	<b>654.150.000,00</b>	DPUPRPKP
1	04	1	1	17	1	Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Permukiman Kumuh	berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1 paket	573.000.000	-	573.000.000	-	601.650.000,00	DPUPRPKP
1	04	1	1	17	2	Monev Program Kawasan Kumuh	Dokumen Laporan Monev	1 Dok	50.000.000	-	50.000.000	-	52.500.000,00	DPUPRPKP
<b>1</b>	<b>05</b>					<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1</b>				<b>SATPOL PP</b>								
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>SATPOL PP</b>								
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	-	-	<b>4.200.000.000,00</b>	SATPOL-PP
1	05	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	4.200.000.000,00	SATPOL-PP
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>491.382.000</b>	<b>103.140.000</b>	-	<b>388.242.000</b>	<b>515.951.100,00</b>	SATPOL-PP
1	05	1	1	2	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	14.898.000	14.898.000	-	-	15.642.900,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	2	2	Pembangunan Pos Jaga dan garase	Tersedianya Pos jaga dan garase Mobil sat Pol PP	1 Unit	88.242.000	-	-	88.242.000	92.654.100,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	2	3	Papan nama kantor	Tersedianya papan nama kantor Satpol PP	1 Unit	50.000.000	-	-	50.000.000	52.500.000,00	SATPOL-PP

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1 05 1 1 2 4	Pembangunan Gapura dan Tembok Penyengker	Tersedianya gapura dan tembok Penyengkar	1 Unit	200.000.000	-	-	200.000.000	210.000.000,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 2 5	Pengadaan Sepeda Motor Dinas	Tersedianya sepeda Motor Dinas	5 Unit	50.000.000	-	-	50.000.000	52.500.000,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 2 6	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	88.242.000	88.242.000	-	-	92.654.100,00	SATPOL-PP
<b>1 05 1 1 3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>11.345.400</b>	<b>11.345.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.912.670,00</b>	SATPOL-PP
1 05 1 1 3 1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Tersedianya 3 Dokumen sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 5 tahun kedepan	3 Jenis Dokumen	6.188.400	6.188.400	-	-	6.497.820,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 3 2	Pendataan Aset	Jumlah dokumen aset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000	-	-	5.414.850,00	SATPOL-PP
<b>1 05 1 1 4</b>	<b>Program Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase ASN yang mengikuti diklat teknis</b>	<b>100%</b>	<b>755.942.000</b>	<b>30.942.000</b>	<b>-</b>	<b>725.000.000</b>	<b>793.739.100,00</b>	SATPOL-PP
1 05 1 1 4 1	Diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja	35 orang	150.000.000	-	-	150.000.000	157.500.000,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 4 2	Latihan ke-Samapta-an Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah personil Sat Pol PP yang dilatih	62 Orang	30.942.000	30.942.000	-	-	32.489.100,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 4 3	Peningkatan sumber daya manusia apartur pemadam kebakaran	Jumlah Personil pemadam Kebakaran yang terlatih dan terdidik	9 orang	200.000.000	-	-	200.000.000	210.000.000,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 4 4	Pembinaan Mental spiritual satpol pp	sehat Fisik dan Mental anggota satpol pp	273 orang	75.000.000	-	-	75.000.000	78.750.000,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 4 5	Pengadaan Pakaian Dinas Satpol-PP	Meningkatnya Kineja Aparatur	273 stel	300.000.000	-	-	300.000.000	315.000.000,00	SATPOL-PP
<b>1 05 1 1 15</b>	<b>Program Pemeliharaan dan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase menurunnya jumlah gangguan kanrantibmas</b>	<b>100%</b>	<b>383.910.000</b>	<b>383.910.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>403.105.500,00</b>	SATPOL-PP
1 05 1 1 15 1	Patroli Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1095 kali	68.760.000	68.760.000	-	-	72.198.000,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 15 2	Pasukan Pengamanan Pimpinan (PASPAMPIN)	Terjaganya keamanan pimpinan	5 Orang	217.740.000	217.740.000	-	-	228.627.000,00	SATPOL-PP
1 05 1 1 15 3	Peringatan HUT Satpol PP	Terlaksananya HUT Satpol	45 Orang	80.220.000	80.220.000	-	-	84.231.000,00	SATPOL-PP

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						dan Jombore Satpol PP Tingkat Nasional	PP dan Jombore Satpol PP Tingkat Nasional							
1	05	1	1	15	4	Operasi Sapu Jagat	Jumlah Penertiban pelanggaran Perda	60 sasaran	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	SATPOL-PP
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat ditertibkan</b>	<b>100%</b>	<b>103.140.000</b>	<b>103.140.000</b>	-	-	<b>108.297.000,00</b>	SATPOL-PP
1	05	1	1	16	1	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada	40 Kali	22.920.000	22.920.000	-		24.066.000,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	16	2	Operasi Yustisi	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	200 Pelanggar	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	16	3	Pendataan dan deteksi dini	Potensi pelanggaran Perda dan Perkada	1 Dok	22.920.000	22.920.000	-		24.066.000,00	SATPOL-PP
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program kesiapsiagaan masyarakat</b>	<b>Persentase Limas Siapsiaga</b>	<b>133 Desa</b>	<b>175.636.000</b>	<b>66.468.000</b>	<b>109.168.000</b>	-	<b>184.417.800,00</b>	SATPOL-PP
1	05	1	1	17	1	Pembinaan Hansip/Linmas	Terlaksananya Pembinaan Hansip/Linmas	310 orang	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	17	2	Bimtek Satlinmas	Bimtek anggota satlitmas selama 3 Hari	133 desa	9.168.000		9.168.000	-	9.626.400,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	17	3	Bimbingan kesiagaan satlinmas dalam penanggulangan bencana, monitoring bencana	Jumlah Linmas yang di Bina / di monitoring	314 orang	100.000.000		100.000.000		105.000.000,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	17	4	Mendata dan monitoring kegiatan perlindungan masyarakat	Masyarakat yang terkena musibah tertangani dengan baik	133 Desa	9.168.000	9.168.000			9.626.400,00	SATPOL-PP
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Presentase pengaduan kebakaran yang dapat ditangani sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>277.332.000</b>	<b>277.332.000</b>	-	-	<b>291.198.600,00</b>	SATPOL-PP
1	05	1	1	18	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta kelengkapannya	Terlaksananya Perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	5 Unit	123.768.000	123.768.000			129.956.400,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	18	2	Operasional Pemadam Kebakaran	terwujudnya pelayanan kesiagaan pemadam kebakaran	35 kejadian	119.184.000	119.184.000			125.143.200,00	SATPOL-PP
1	05	1	1	18	3	Pencegahan	terlaksananya pencegahan	10 kali	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	SATPOL-PP

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	penanggulangan bahaya kebakaran								
<b>1 06</b>	<b>SOSIAL</b>									
<b>1 06</b>	<b>DINAS SOSIAL P3A</b>									
<b>1 06</b>	<b>DINAS SOSIAL P3A</b>									
<b>1 06</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.030.000.000</b>	<b>1.030.000.000</b>	-	-	<b>1.081.500.000,00</b>	DISSOS_P3A	
1 06	1 1 1 1	1 Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	1.030.000.000	1.030.000.000		1.081.500.000,00	DISSOS_P3A	
<b>1 06</b>	<b>1 1 2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>221.900.000</b>	<b>171.900.000</b>	-	<b>50.000.000</b>	<b>232.995.000,00</b>	DISSOS_P3A
1 06	1 1 2 1	1 Pemeliharaan gedung tempat kerja/pengadaan rehab gedung kantor	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dan Pemeberdayaan, Perlindungan Anak	100%	50.000.000			50.000.000	52.500.000,00	DISSOS_P3A
1 06	1 1 2 2	2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dan Pemeberdayaan, Perlindungan Anak yang diadakan	6 Jenis	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DISSOS_P3A
<b>1 06</b>	<b>1 1 3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>68.645.400</b>	<b>68.645.400</b>	-	-	<b>72.077.670,00</b>	DISSOS_P3A
1 06	1 1 3 1	1 Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	6.188.400	6.188.400			6.497.820,00	DISSOS_P3A
1 06	1 1 3 2	2 Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DISSOS_P3A
1 06	1 1 3 3	3 Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos	Persentase kesesuaian pemanfaatan dana hibah	100%	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISSOS_P3A
<b>1 06</b>	<b>1 1 15</b>	<b>Program Perlindungan dan Pemberdayaan</b>	<b>Persentase Jumlah masyarakat miskin yang</b>	<b>55%</b>	<b>1.348.842.000</b>	<b>1.348.842.000</b>	-	-	<b>1.416.284.100,00</b>	DISSOS_P3A

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH					
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III							
	<b>Ekonomi Masyarakat Miskin</b>	<b>mendapat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi</b>												
1	06	1	1	15	1	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang mendapat Bedah Rumah	16 unit	947.742.000	947.742.000			995.129.100,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	15	2	Pendampingan PKH	Tertanganinya keluarga PKH	10 Kecamatan	286.500.000	286.500.000			300.825.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	15	3	Pengendalian Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai	Tertanganinya Distribusi Bantuan Sosial Pangan	10 Kecamatan	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DISSOS_P3A
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	<b>58%</b>	<b>679.750.000</b>	<b>429.750.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>-</b>	<b>713.737.500,00</b>	DISSOS_P3A
1	06	1	1	16	1	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial	Tersedianya SDM Kesos yang berkualitas dan Profesional	25 orang	250.000.000	-	250.000.000		262.500.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	16	2	Pendampingan sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Persentase Pengaduan masyarakat yang mendapat Rujukan dan penanganan	10 Kec	257.850.000	257.850.000	-		270.742.500,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	16	3	Verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial	Tersedianya data penerimaan program Perlindungan Sosial yang valid	10 Kecamatan	171.900.000	171.900.000	-		180.495.000,00	DISSOS_P3A
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yg mendapat pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>90%</b>	<b>252.120.000</b>	<b>252.120.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264.726.000,00</b>	DISSOS_P3A
1	06	1	1	17	1	Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna sosial	persentase Tuna Sosial di luar Panti yang Mendapat rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	100%	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	17	2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas	Persentase penyandang Disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi soail dasar sesuai SPM	100%	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	17	3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Persentase Lanjut Usia terlantar di luar panti yang tertangani sesuai SPM	100%	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISSOS_P3A

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
1	06	1	1	17	4	Penanganan ODGJ dalam Pondok Laras	Persentase ODGJ miskin terlantar yang tertangani dalam UPTD Pelayanan Sosial sesuai SPM	100%	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	18		<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	<b>Persentase anak terlantar yang mendapat Pembinaan</b>	<b>85%</b>	<b>34.380.000</b>	<b>34.380.000</b>	-	-	<b>36.099.000,00</b>	DISSOS_P3A
1	06	1	1	18	1	Perlindungan khusus bagi Anak Berbasis Masyarakat	Persentase anak terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	100%	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	20		<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>	<b>Jumlah panti asuhan yang mendapat penanganan sosial</b>	<b>7 PA</b>	<b>160.440.000</b>	<b>160.440.000</b>	-	-	<b>48.132.000,00</b>	DISSOS_P3A
1	06	1	1	20	1	Penanganan Anak dan panti Asuhan	Terbantunya kebutuhan pokok bagi anak terlantar dalam panti asuhan	6 PA	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	20	2	Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Pondok Werdha Shanti Wanasara	Persentase Lanjut Usia Miskin Terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar pada UPTD Pelayanan Sosial sesuai SPM	100%	114.600.000	114.600.000				DISSOS_P3A
1	06	1	1	22		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS</b>	<b>35%</b>	<b>458.400.000</b>	<b>458.400.000</b>	-	-	<b>481.320.000,00</b>	DISSOS_P3A
1	06	1	1	22	1	Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Meningkatnya Penanganan PMKS dan PSKS	10 TKSK	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	22	2	Pengembangan Pelayanan KT, PSM dan Orsos	Meningkatnya Kreativitas dan Profesionalisme KT, PSM dan Orsos	4 KT, 4 PSM, & Orsos	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	22	3	Penyelenggaraan Hari besar Sosial dan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS)	Terselenggaranya pelaksanaan hari besar social dfan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS)	1 lokasi	28.650.000	28.650.000	-		30.082.500,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	22	4	Pemberdayaan K3S	Persentase PMKS yang mendapat bantuan	10 Kecamatan	143.250.000	143.250.000			150.412.500,00	DISSOS_P3A
1	06	1	1	22	5	peringatan monumen Tugu pahlawan dan Pemberian Bantuan	Jumlah veteran yang mendapat santunan	3 lokasi tugu monumen	57.300.000	57.300.000	-		60.165.000,00	DISSOS_P3A

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
						santunan kepada veteran		dan 400 veteran Orang							
1	06	1	1	24		<b>Program perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>263.580.000</b>	<b>263.580.000</b>	-	-	<b>276.759.000,00</b>	DISSOS_P3A	
1	06	1	1	24	1	Penanganan Korban Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sesuai SPM	100%	263.580.000	263.580.000			276.759.000,00	DISSOS_P3A	
2						<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	01					<b>TENAGA KERJA</b>									
2	01	1				<b>DISNAKER</b>									
2	01	1	1			<b>DISNAKER</b>									
2	01	1	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>781.572.000</b>	<b>781.572.000</b>	-	-	<b>820.650.600,00</b>	DISNAKER	
2	01	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	781.572.000	781.572.000			820.650.600,00	DISNAKER	
2	01	1	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>260.000.000</b>		-	-	<b>260.000.000</b>	<b>273.000.000,00</b>	DISNAKER
2	01	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dalam kondisi baik	86%	60.000.000			60.000.000	63.000.000,00	DISNAKER	
2	01	1	1	2	2	Rehab Gedung Kantor	Gedung tempat kerja dalam kondisi baik	40%	200.000.000			200.000.000	210.000.000,00	DISNAKER	
2	01	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>6.704.100</b>	<b>6.704.100</b>	-	-	<b>7.039.305,00</b>	DISNAKER	
2	01	1	1	3	1	Penyusunan Renstra,	Jumlah dokumen Sakip	2 Jenis	3.609.900	3.609.900			3.790.395,00	DISNAKER	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
2	01	1	1	3	2	Renja dan Lakip Pendataan Aset	tersedia jumlah dokumen asset yang tersedia	Dokumen 2 Jenis Dokumen		3.094.200	3.094.200		3.248.910,00	DISNAKER
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat dan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>460.764.000</b>	<b>382.764.000</b>	<b>-</b>	<b>78.000.000</b>	<b>483.802.200,00</b>	DISNAKER
2	01	1	1	15	1	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Satuan Pengamanan)	jumlah Satuan Pengamanan yang dilatih	30 org	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	DISNAKER
2	01	1	1	15	2	Iklan Layanan Masyarakat Ketenagakerjaan	Terlaksananya Iklan Layanan Masyarakat	100%	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISNAKER
2	01	1	1	15	3	Pelatihan Rutin Keterampilan Berbasis Kompetensi (bidang kuliner)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Rutin Keterampilan Berbasis Kompetensi (Bidang Kuliner)	16 orang	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DISNAKER
2	01	1	1	15	4	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit (MTU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit ( MTU )	16 orang	78.000.000			78.000.000	81.900.000,00	DISNAKER
2	01	1	1	15	5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan bidang Latas	Jumlah lokasi kegiatan yang termonitoring, terevaluasi dan terverifikasi	15 lokasi	10.314.000	10.314.000			10.829.700,00	DISNAKER
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program peningkatan kesempatan kerja</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja</b>	<b>70%</b>	<b>2.330.964.000</b>	<b>2.330.964.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.447.512.200,00</b>	DISNAKER
2	01	1	1	16	1	Kerjasama Pengamanan (outsourcing)	jumlah tenaga pengamanan yang dikerjasamakan	43orang	2.292.000.000	2.292.000.000			2.406.600.000,00	DISNAKER
2	01	1	1	16	2	Bursa Kerja On-line	Persentase terlayannya pencari kerja secara On-line	100%	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISNAKER
2	01	1	1	16	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pentaluas	Jumlah lokasi kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi	14 lokasi	10.314.000	10.314.000			10.829.700,00	DISNAKER
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja</b>	<b>Persentase perusahaan memenuhi 10 kriteria dalam UU Ketenagakerjaan</b>	<b>100%</b>	<b>45.796.000</b>	<b>29.796.000</b>	<b>-</b>	<b>16.000.000</b>	<b>48.085.800,00</b>	DISNAKER
2	01	1	1	17	1	Penyuluhan dan penyebaran peraturan ketenagakerjaan diperusahaan di Kab.	Jumlah perusahaan yang mendapat penyuluhan peraturan ketenagakerjaan	20 Perusahaan	10.314.000	10.314.000			10.829.700,00	DISNAKER

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Tabanan								
2	01	1	1	17	2	Pengkajian dan Pembahasan UMK	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kab. Tabanan	1 dokumen	9.168.000	9.168.000			9.626.400,00	DISNAKER
2	01	1	1	17	3	Sistem pendataan perusahaan berbasis informasi teknologi	data perusahaan	1 dokumen	10.314.000	10.314.000			10.829.700,00	DISNAKER
2	01	1	1	17	4	Sosialisasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Sosialisasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan HI.	30 Perusahaan	8.000.000	-	8.000.000		8.400.000,00	DISNAKER
2	01	1	1	17	5	Monev Pelaksanaan UMK	Jumlah Perusahaan yang Dimonitoring UMK	70 Perusahaan	8.000.000	-	8.000.000		8.400.000,00	DISNAKER
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program revitalisasi LLK</b>	<b>Persentase lulusan LLK yang terserap lapangan kerja dan kerja mandiri</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	DISNAKER
2	01	1	1	18	1	Rehab Gedung BLK	jumlah Gedung LLK yang terhab	1 Gedung	1.000.000.000	-	1.000.000.000		1.050.000.000,00	DISNAKER
2	01	1	1	18	2	Pengadaan sarana dan prasarana untuk praktek kuliner dan pertanian	Jenis Bahan praktek kuliner dan pertanian	5 jenis	1.000.000.000	-	1.000.000.000		1.050.000.000,00	DISNAKER
<b>2</b>	<b>02</b>					<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>1</b>				<b>DINAS SOSIAL P3A</b>								
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DINAS SOSIAL P3A</b>								
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan P2TP2A</b>	<b>100%</b>	<b>212.010.000</b>	<b>212.010.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222.610.500,00</b>	DISSOS_P3A
2	02	1	1	15	1	Pemberdayaan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Kasus Kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani sesuai SOP	10 Kecamatan	85.950.000	85.950.000			90.247.500,00	DISSOS_P3A
2	02	1	1	15	2	Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender	Persentase terpenuhinya indikator APE	100%	126.060.000	126.060.000			132.363.000,00	DISSOS_P3A

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
	dan Perlindungan Anak								
2 02 1 1 16	<b>Program peningkatan Mutu kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</b>	<b>persentase perempuan dan anak yang terpenuhi hak</b>	<b>90%</b>	<b>194.820.000</b>	<b>194.820.000</b>	-	-	<b>204.561.000,00</b>	DISSOS_P3A
2 02 1 1 16 1	Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak (KLA)	Persentase capaian kabupaten layak anak	100%	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	DISSOS_P3A
2 02 1 1 16 2	Pengembangan usaha mikro perempuan	pemberdayaan ekonomi perempuan dalam upaya kesetaraan gender	10 kecamatan	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISSOS_P3A
2 02 1 1 16 3	Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan dan perlindungan hak anak	75%	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	DISSOS_P3A
2 03	<b>PANGAN</b>								
2 03 1	<b>DISKEPA</b>								
2 03 1 1	<b>DISKEPA</b>								
2 03 1 1 1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>	<b>100%</b>	<b>710.000.000</b>	<b>710.000.000</b>	-	-	<b>745.500.000,00</b>	DISKEPA
2 03 1 1 1 1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	710.000.000	710.000.000			745.500.000,00	DISKEPA
2 03 1 1 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>	<b>86%</b>	<b>50.000.000</b>		-	<b>50.000.000</b>	<b>52.500.000,00</b>	DISKEPA
2 03 1 1 2 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dalam kondisi baik	100%	25.000.000			25.000.000	26.250.000,00	DISKEPA
2 03 1 1 2 2	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	Terwujudnya pemeliharaan bangunan gedung kantor	2 Unit	25.000.000			25.000.000	26.250.000,00	DISKEPA
2 03 1 1 3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>12.606.000</b>	<b>12.606.000</b>	-	-	<b>13.236.300,00</b>	DISKEPA
2 03 1 1 3 1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen SAKIP yang tersedia	3 Dok	6.876.000	6.876.000			7.219.800,00	DISKEPA

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
2	03	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Dok	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DISKEPA
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>	<b>Jumlah desa yang memiliki percontohan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan sehat</b>	<b>45%</b>	<b>116.680.000</b>	<b>91.680.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	<b>122.514.000,00</b>	DISKEPA	
2	03	1	1	15	1	Lomba cipta menu Pangan lokal berbasis Sumber daya Lokal	Meningkatnya partisipasi Wanita dalam penyediaan Pangan Keluarga	10 kec	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISKEPA
2	03	1	1	15	2	Pengawasan dan Pengamanan Mutu Pangan	Jumlah lokasi pengambilan sampel bahan makanan yg diuji dan Kwt yang dibina	10 kec	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISKEPA
2	03	1	1	15	3	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Jumlah kelompok yang diberdayakan	3 Kec	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DISKEPA
2	03	1	1	15	4	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan Pelatihan	1 kec	25.000.000	-	25.000.000		26.250.000,00	DISKEPA
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan</b>	<b>Persentase Desa Mandiri Pangan</b>	<b>10%</b>	<b>185.950.000</b>	<b>85.950.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000</b>	<b>195.247.500,00</b>	DISKEPA	
2	03	1	1	16	1	Pemanfaatan kawasan mandiri pangan	Tersusunnya Database pada kawasan mandiri Pangan	4 Kawasan	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISKEPA
2	03	1	1	16	2	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 tahun	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISKEPA
2	03	1	1	16	3	Pertemuan Kordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Terselenggaranya pelatihan bagi kelompok tani	1 Paket	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISKEPA
2	03	1	1	16	4	Penyelenggaraan Bimtek Sumber Daya Pangan Lokal	SDM RT terlatih	2 Klp	25.000.000	-	25.000.000		26.250.000,00	DISKEPA
2	03	1	1	16	5	Analisis Neraca bahan makanan (NBM)	Tersusunnya Analisis Neraca bahan makanan (NBM)	1 Lap	55.000.000	-	55.000.000		57.750.000,00	DISKEPA
2	03	1	1	16	6	Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi (RMU)	jumlah Unit penggilingan Padi (RMU) yang dipantau	10 kec	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISKEPA
2	03	1	1	16	7	Analisis pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Laporan data Analisis konsumsi pangan penduduk	10 buku	20.000.000	-	20.000.000		21.000.000,00	DISKEPA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
2	03	1	1	17		<b>Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</b>	<b>Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan</b>	≥ 10%	<b>280.770.000</b>	<b>280.770.000</b>	-	-	<b>294.808.500,00</b>	DISKEPA
2	03	1	1	17	1	Pemantauan harga dan Pasokan pangan	Tersedianya data harga pangan	10 Kec	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISKEPA
2	03	1	1	17	2	Pengembangan cadangan Pangan	Tersedianya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	1 Gudang	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	DISKEPA
2	03	1	1	17	3	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan	Jumlah jenis dokumen pengawalan lembaga distribusi pangan	3 Jenis Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISKEPA
2	04					<b>PERTANAHAN</b>								
2	05					<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>								
2	05	1				<b>DLH</b>								
2	05	1	1			<b>DLH</b>								
2	05	1	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	100%	<b>2.034.150.000</b>	<b>2.034.150.000</b>	-	-	<b>2.135.857.500,00</b>	DLH
2	05	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	100%	2.034.150.000	2.034.150.000			2.135.857.500,00	DLH
2	05	1	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	100%	<b>171.900.000</b>	<b>171.900.000</b>	-	-	<b>180.495.000,00</b>	DLH
2	05	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Memperlancar kegiatan perkantoran	100%	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DLH
2	05	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	100%	<b>10.887.000</b>	<b>10.887.000</b>	-	-	<b>11.431.350,00</b>	DLH
2	05	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen tersedia	3 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DLH
2	05	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen aset yang tersedia	2 Jenis	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DLH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
2	05	1	1	15		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani</b>	<b>204</b>	<b>1.885.361.475</b>	<b>1.612.441.475</b>	<b>-</b>	<b>272.920.000</b>	<b>1.979.629.548,75</b>	DLH
2	05	1	1	15	1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	2 dokumen	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DLH
2	05	1	1	15	2	Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya indeks kualitas lingkungan	1 dokumen	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DLH
2	05	1	1	15	3	Pengawasan pelaksanaan lingkungan Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH	Meningkatnya ketaatan Usaha / kegiatan terhadap ijin lingkungan, SPPL dan ijin PPLH	30 usaha	30.942.000	30.942.000			32.489.100,00	DLH
2	05	1	1	15	4	Pembinaan terintegrasi dan pemasangan warning sticker usaha / kegiatan yang belum memiliki ijin lingkungan, ijin PPLH dan SPPL	Berkurangnya jumlah perusahaan yang tidak memiliki ijin lingkungan, ijin PPLH dan SPPL	65 Usaha	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DLH
2	05	1	1	15	5	Pelayanan Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, dan Registrasi SPPL	Jumlah ijin lingkungan, ijin PPLH, dan registrasi SPPL yang diterbitkan	60 ijin	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DLH
2	05	1	1	15	6	Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar air	Tersedianya data sumber pencemar	1 Dokumen	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DLH
2	05	1	1	15	7	Integrated Costal Management/Pemsea	Tersedianya kebijakan dan kegiatan dalam menangani kawasan pesisir	1 laporan	51.570.000	51.570.000			54.148.500,00	DLH
2	05	1	1	15	8	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan	300%	85.950.000	85.950.000			90.247.500,00	DLH
2	05	1	1	15	9	Pemantauan Kerusakan lingkungan	Tersedianya data kerusakan lingkungan	1 dokumen	47.215.200	47.215.200			49.575.960,00	DLH
2	05	1	1	15	10	Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)	Tersedianya data mengenai adaptasi dan mitigasi di Kab. Tabanan	1 dokumen	50.000.000			50.000.000	52.500.000,00	DLH
2	05	1	1	15	11	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah kasus hokum lingkungan yang tertangani	10 kasus	40.110.000	40.110.000			42.115.500,00	DLH
2	05	1	1	15	12	Pembinaan sumber pencemar	Jumlah sumebr pencemar yang dibina	20 sumber pencemar	50.000.000			50.000.000	52.500.000,00	DLH
2	05	1	1	15	13	Penetapan kelas air	Tersedianya data kelas air	1 dokumen	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	DLH
2	05	1	1	15	14	Konservasi keanekaragaman hayati	Tersedianya data keanekaragaman hayati	1 dokumen	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DLH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
2 05 1 1 15 15	Perlindungan Sumber Daya Alam	Terlindunginya Sumber Daya Alam	1 dokumen	22.920.000	-		22.920.000	24.066.000,00	DLH
2 05 1 1 15 16	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya Profil Keanekaragaman Hayati	1 dokumen	50.000.000	-		50.000.000	52.500.000,00	DLH
2 05 1 1 15 17	Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3	Tersedianya Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3	1 dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DLH
2 05 1 1 15 18	Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan	Tersedianya sapras pemantauan lingkungan	1 paket	100.000.000	-		100.000.000	105.000.000,00	DLH
2 05 1 1 15 19	DAK Lingkungan	Jumlah Sarana	41 unit	926.904.275	926.904.275			973.249.488,75	DLH
<b>2 05 1 1 16</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>206.790.000</b>	<b>131.790.000</b>	<b>-</b>	<b>75.000.000</b>	<b>217.129.500,00</b>	DLH
2 05 1 1 16 1	Pembinaan Penangkaran Flora dan Fauna	Tersedianya Data Flora dan Fauna	1 lokasi	50.000.000	-		50.000.000	52.500.000,00	DLH
2 05 1 1 16 2	Peringatan Hari Peduli Sampah Sedunia	Tersedianya data mengenai kebersihan lingkungan tabanan	1 tahun	25.000.000	-		25.000.000	26.250.000,00	DLH
2 05 1 1 16 3	Lomba Adipura	Tersedianya data mengenai kebersihan lingkungan tabanan	1 tropi	74.490.000	74.490.000			78.214.500,00	DLH
2 05 1 1 16 4	Kemitraan dalam Kelestarian Lingkungan Hidup	Tersedianya data mengenai kebersihan lingkungan tabanan	5 piagam	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DLH
<b>2 05 1 1 17</b>	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>Jumlah sport/titik taman, hutan dalam kondisi terpelihara</b>	<b>12 taman dan 5 hutan</b>	<b>2.317.475.775</b>	<b>1.817.475.775</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.433.349.563,75</b>	DLH
2 05 1 1 17 1	Pemeliharaan Taman di Kab. Tabanan	Luas Taman Kota yang ditata dengan baik dan indah	2,535 ha	1.817.475.775	1.817.475.775			1.908.349.563,75	DLH
2 05 1 1 17 2	Penataan taman di perkotaan tabanan	Tertatanya taman kota dengan baik dan benar	1 lokasi	500.000.000	-	500.000.000		525.000.000,00	DLH
<b>2 05 1 1 18</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Rasio/persentase volume sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada</b>	<b>80%</b>	<b>12.783.403.250</b>	<b>11.233.403.250</b>	<b>500.000.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>12.897.573.412,50</b>	DLH
2 05 1 1 18 1	Pengelolaan penanganan persampahan	Jumlah pewadahan / pemilahan / pengolahan sampah yang ditangani	210 pewadahan, 115 pemilahan,	1.260.600.000	1.260.600.000			1.323.630.000,00	DLH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH							
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III									
2	05	1	1	18	2	Pengelolaan pengangkutan sampah	Jumlah desa / pasar yang diangkut sampahnya	6 pengolahan 10 desa, 13 pasar	2.750.400.000	2.750.400.000					2.887.920.000,00	DLH
2	05	1	1	18	3	Pengelolaan kebersihan fasilitas publik	Jumlah ruas jalan dan gang / pasar yang mendapat pelayanan penyapuan	80 ruas jalan 17 pasar	3.515.355.000	3.515.355.000					3.691.122.750,00	DLH
2	05	1	1	18	4	OutsourcingTenaga Kebersihan	Jumlah ruas jalan yang mendapat pelayanan penyapuan	18 ruas jalan	1.925.018.250	1.925.018.250					2.021.269.162,50	DLH
2	05	1	1	18	5	Pengelolaan sampah di TPA sembung gede	Volume sampah yang tertangani di TPA	109.200 m3	1.146.000.000	1.146.000.000					1.203.300.000,00	DLH
2	05	1	1	18	6	Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA	Jumlah Pemasangan Instalasi Gas Mentan	25 titik	51.570.000	51.570.000					54.148.500,00	DLH
2	05	1	1	18	7	Pengelolaan sampah di pasar bajera	Persentase sampah tertangani sampah di bajera	80%	74.490.000	74.490.000					78.214.500,00	DLH
2	05	1	1	18	8	Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita	Jumlah sampah yang tertangani secara berkelanjutan	4.368 m3	458.400.000	458.400.000					481.320.000,00	DLH
2	05	1	1	18	9	Pengawasan Peraturan Pengelolaan persampahan	Jumlah peraturan daerah yang diadakan	12 perda	50.000.000	-		50.000.000			52.500.000,00	DLH
2	05	1	1	18	10	Pengadaan lahan TPA	Luas lahan TPA yang tersedia	75 are	1.000.000.000	-		1.000.000.000			1.050.000.000,00	DLH
2	05	1	1	18	11	Penanganan leachate / air lindi	Tertanganinya leachate / air lindi	1 tahun	51.570.000	51.570.000					54.148.500,00	DLH
05	1	1	18		12	Pembangunan Drainase Salurah Air Sampah di TPA	tertanganinya Drainase Saluran Air Sampah di TPA	1 Tahun	500.000.000		500.000.000				525.000.000,00	DLH
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat</b>	<b>Jumlah pengolahan persampahan berbasis masyarakat (TPST3R dan Bank sampah)</b>	<b>2 TPST, 5 Bank sampah</b>	<b>333.870.000</b>	<b>108.870.000</b>	<b>-</b>	<b>225.000.000</b>		<b>350.563.500,00</b>	<b>DLH</b>	
2	05	1	1	19	1	Pembangunan TPST 3R	Jumlah bangunan TPST 3R yang tersedia	1 unit	200.000.000	-		200.000.000		210.000.000,00	DLH	
2	05	1	1	19	2	Gemah ripah bank sampah	Jumlah TPS 3R dan bank sampah yang dibina	5 bang sampah	51.570.000	51.570.000				54.148.500,00	DLH	
2	05	1	1	19	3	Sosialisasi Peraturan Bidang Persampahan/ limbah	Sosialisasi perda persampahan di 10 kecamatan	2 kecamatan	25.000.000	-		25.000.000		26.250.000,00	DLH	
2	05	1	1	19	4	Pengembangan dan pengelolaan sampah mandiri	Terciptanya pengelolaan sampah mandiri	2 desa	57.300.000	57.300.000				60.165.000,00	DLH	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
2	05	1	1	20		<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan IPLT</b>	<b>Kapasitas tinja yang mampu ditanangani 0,76 ton/th</b>	<b>1.283,1 m3/th</b>	<b>569.021.550</b>	<b>569.021.550</b>	-	-	<b>597.472.627,50</b>	DLH
2	05	1	1	20	1	Pengelolaan IPLT dan IPAL	Rasio Lumpur Tinja yang tertangani	1 Tahun	569.021.550	569.021.550			597.472.627,50	DLH
2	06					<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>								
2	06	1				<b>DISDUKCAPIL</b>								
2	06	1	1			<b>DISDUKCAPIL</b>								
2	06	1	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.524.873.330</b>	<b>1.524.873.330</b>	-	-	<b>1.601.116.996,50</b>	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	1.524.873.330	1.524.873.330			1.601.116.996,50	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>892.591.000</b>		-	<b>892.591.000</b>	<b>937.220.550,00</b>	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana	12 bulan	492.591.000			492.591.000	517.220.550,00	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	2	2	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung tempat kerja.	1 tahun	400.000.000			400.000.000	420.000.000,00	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.314.000</b>	<b>10.314.000</b>	-	-	<b>10.829.700,00</b>	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	1 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan</b>	<b>80%</b>	<b>2.249.679.150</b>	<b>2.249.679.150</b>	-	-	<b>2.362.163.107,50</b>	DISDUKCAPIL
2	06	1	1	15	1	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kecamatan yang Database Kependudukan Tersambung (Online) dengan Kabupaten, Provinsi	10 kecamatan	481.320.000	481.320.000			505.386.000,00	DISDUKCAPIL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH						
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III								
2	06	1	1	15	2	Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan	jumlah penduduk pendatang yang memiliki dokumen kependudukan	1000 orang	51.570.000	51.570.000			54.148.500,00	DISDUKCAPIL	
2	06	1	1	15	3	Monitoring/survey Lapangan Santunan Kematian	terlaksananya monitoring / survey lapangan pemberian santunan kematian	30 Desa	25.785.000	25.785.000			27.074.250,00	DISDUKCAPIL	
2	06	1	1	15	4	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Persentase jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	1.318.859.000	1.318.859.000			1.384.801.950,00	DISDUKCAPIL	
2	06	1	1	15	5	Penerbitan KIA	Persentase Jumlah anak yang memiliki KIA	30000 anak	247.536.000	247.536.000			259.912.800,00	DISDUKCAPIL	
2	06	1	1	15	6	Perekaman KTP elektronik berbasis Sekolah	Jumlah siswa yang dapat memiliki KTP Elektronik bisa terekam	2000 Orang	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	DISDUKCAPIL	
2	06	1	1	15	7	Pelayanan keliling pencatatan sipil	Jumlah penduduk yang melayani administrasi	700 orang	21.469.150	21.469.150			22.542.607,50	DISDUKCAPIL	
<b>2</b>	<b>07</b>					<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>				<b>DPMD</b>									
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DPMD</b>									
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	DPMD
2	07	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.000.000.000	1.000.000.000				1.050.000.000,00	DPMD
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>823.630.400</b>	<b>323.630.400</b>		<b>-</b>	<b>500.000.000</b>	<b>864.811.920,00</b>	DPMD
2	07	1	1	2	1	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	Terlaksananya pemeliharaan gedung tempat kerja	90%	500.000.000				500.000.000	525.000.000,00	DPMD
2	07	1	1	2	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya alat sarana dan prasarana kantor yang layak dipakai	90%	323.630.400	323.630.400				339.811.920,00	DPMD
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan</b>	<b>Persentase serapan</b>	<b>100%</b>	<b>40.887.000</b>	<b>10.887.000</b>		<b>-</b>	<b>30.000.000</b>	<b>42.931.350,00</b>	DPMD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH					
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III							
	<b>Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>anggaran sesuai target</b>												
2	07	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Dokumen renja dan lakip	3 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DPMD
2	07	1	1	3	2	Pendataan Aset	Buku Laporan Aset	2 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DPMD
2	07	1	1	3	3	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah	Persentase kesesuaian pemanfaatan dana hibah	100%	30.000.000	-	30.000.000		31.500.000,00	DPMD
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa</b>	<b>Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUMDes</b>	<b>90 Kelompok</b>	<b>526.060.000</b>	<b>126.060.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>552.363.000,00</b>	DPMD
2	07	1	1	15	1	Pembentukan dan Pelatihan manajemen BUMDes Baru	Terbentuk dan Terlatihnya Pengurus BUMDes yg mampu mengelola potensi desa.	69 orang	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DPMD
2	07	1	1	15	2	Pelatihan Fasilitator dan Pendampingan Operasional BUMDes dan Kelompok Pendampinnya	Jumlah Fasilitator yang terlatih	90 Bumdes	126.060.000	126.060.000	-		132.363.000,00	DPMD
2	07	1	1	15	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana BUMDes	Tersedianya sarana dan prasarana BUMDes	1 Paket	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DPMD
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>Jumlah desa yang memiliki kapasitas aparatur pemerintah desa memadai</b>	<b>133 desa</b>	<b>459.380.000</b>	<b>34.380.000</b>	<b>-</b>	<b>425.000.000</b>	<b>482.349.000,00</b>	DPMD
2	07	1	1	16	1	Bintek Perbekel	Meningkatnya manajemen dan kualitas aparat desa	266 desa	400.000.000	-	400.000.000		420.000.000,00	DPMD
2	07	1	1	16	2	Pembinaan LPM	Terbinanya kelompok LPM se Kab. Tabanan	10 LPM	25.000.000	-	25.000.000		26.250.000,00	DPMD
2	07	1	1	16	3	Pembinaan Kerjasama Desa dan Kemitraan	Terbinanya Kerjasama Desa dan Kemitraan	30 desa	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DPMD
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program peningkatan pengelolaan pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang mendapatkan penilaian baik atas kinerja keuangan</b>	<b>80%</b>	<b>532.340.000</b>	<b>332.340.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>558.957.000,00</b>	DPMD
2	07	1	1	17	1	Penyusunan Profil Desa	ketersediaan data dan informasi statistik daerah dengan unit analisis kecamatan	28 Desa	28.650.000	28.650.000	-		30.082.500,00	DPMD
2	07	1	1	17	2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlatihnya aparatur pemerintahan desa dalam	133 desa	257.850.000	257.850.000	-		270.742.500,00	DPMD

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							pembuatan SPJ keuangan Desa							
2	07	1	1	17	3	Pola Tata Desa	prosentase luas kawasan strategis yang memiliki dokumen tata ruang	7 dokumen	45.840.000	45.840.000	-		48.132.000,00	DPMD
2	07	1	1	17	4	Bimtek Aplikasi Siskeudes	Jumlah Desa yang Memahami tentang Aplikasi Siskeudes	30 desa	100.000.000	-		100.000.000	105.000.000,00	DPMD
2	07	1	1	17	5	Sistem Keuangan Desa	Adanyan Dokumen APBD Desa yang berbasis Aplikasi Siskeudes	133 desa	100.000.000	-		100.000.000	105.000.000,00	DPMD
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah desa "berprestasi"</b>	<b>1 Desa</b>	<b>1.551.730.000</b>	<b>1.151.730.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>1.629.316.500,00</b>	DPMD
2	07	1	1	18	1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yang dibina dalam rangka lomba desa	20 Desa	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DPMD
2	07	1	1	18	2	Bulan Bakti Gotong Royong dan TMMD	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi desa dan untuk mempertahankan nilai-nilai gotong royong masyarakat sebagai sistem nilai budaya bangsa	1 Desa	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	DPMD
2	07	1	1	18	3	Revitalisasi dan operasional posyandu	meningkatnya jumlah posyandu dan kader Posyandu yang terbina	65 orang	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DPMD
2	07	1	1	18	4	monitoring dan evaluasi kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kelompok TTG yang dibina	10 kelompok	97.410.000	97.410.000			102.280.500,00	DPMD
2	07	1	1	18	5	Pos Pelayanan Teknologi	Sosialisasi tentang pos pelayanan teknologi (Posyantek)	10 kec	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DPMD
2	07	1	1	18	6	Pemberian Makanan Tambahkan Anak Sekolah (PMTAS)	Cakupan desa siaga aktif	188 orang	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DPMD
2	07	1	1	18	7	Penunjang Kegiatan PKK	Peningkatan 10 Program Pokok PKK	30 desa	573.000.000	573.000.000	-		601.650.000,00	DPMD
2	07	1	1	18	8	Pembina PKK	Meningkatnya Pengetahuan Kader PKK	133 desa	150.000.000	-		150.000.000	157.500.000,00	DPMD
2	07	1	1	18	9	Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam rangka mempercepat	Menurunkan Angka Kemiskinan desa	1 desa	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DPMD

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Penanggulangan Kemiskinan								
2	07	1	1	18	10	Pendataan Swadaya Murni Masyarakat	Jumlah Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fasilitas Desa Dalam setahun	3 desa	50.000.000	-		50.000.000	52.500.000,00	DPMD
2	07	1	1	18	11	Optimalisasi SDA pada Kawasan Pedesaan	Jumlah Desa Kawasan Yang di Bina	22 desa	100.000.000	-		100.000.000	105.000.000,00	DPMD
<b>2</b>	<b>08</b>					<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>1</b>				<b>DISPENDUK &amp;KB</b>								
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DISPENDUK &amp;KB</b>								
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>994.728.000</b>	<b>994.728.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.044.464.400,00</b>	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	994.728.000	994.728.000			1.044.464.400,00	DISPENDUK_K B
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>1.226.955.750</b>	<b>1.168.307.000</b>	<b>-</b>	<b>58.648.750</b>	<b>1.288.303.537,50</b>	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	2	1	Pengadaan Saran dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK)	Jumlah jenis sapras yang diadakan	62 Unit	1.168.307.000	1.168.307.000			1.226.722.350,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	2	2	Sarana Prasarana kantor	Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang diadakan	2 Jenis	58.648.750	-		58.648.750	61.581.187,50	DISPENDUK_K B
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>12.606.000</b>	<b>12.606.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.236.300,00</b>	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	6.876.000	6.876.000			7.219.800,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DISPENDUK_K B
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif</b>	<b>75,00%</b>	<b>3.013.796.000</b>	<b>3.013.796.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.164.485.800,00</b>	DISPENDUK_K B

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
2	08	1	1	15	1	Kegiatan Penyediaan Pelayan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Pasangan Usia subur miskin yang terlayani KB	150 akseptor	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	15	2	Kegiatan Bintek Keluarga Berencana	Penurunan jumlah unmened	5%	8.022.000	8.022.000			8.423.100,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	15	3	Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK)	Meningkatnya jumlah sasaran penggerakan pelayanan KB	72,50%	2.863.670.000	2.863.670.000			3.006.853.500,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	15	4	Kegiatan Pelatihan Pelaporan Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Tersedianya database yang berkualitas dan terkini	1 paket	44.694.000	44.694.000			46.928.700,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	15	5	Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapat Bintek / Pendampingan	5 kelompok	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	15	6	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Terlayannya kebutuhan alokasi bagi masyarakat miskin	72,50%	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	15	7	Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB	Meningkatkan pengetahuan aparat desa dan PLKB di bidang program KKBPK di kampung KB	88,90%	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	15	8	Advokasi PPKBD dan Institusi Masyarakat Pedesaan di Tingkat Kecamatan	Jumlah PPKBD dan institusi masyarakat yang mendapat advokasi tentang program KKBPK	133 PPKBD dan 11 institusi masyarakat	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISPENDUK_K B
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menikah 21 tahun keatas</b>	<b>77,00%</b>	<b>72.920.000</b>	<b>22.920.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>76.566.000,00</b>	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	16	1	Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja yang mendapat advokasi dan KIE tentang KRR	120 orang	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	16	2	Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan	Meningkatnya pengetahuan sikap perilaku remaja tentang KRR	75%	50.000.000	-		50.000.000	52.500.000,00	DISPENDUK_K B
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)</b>	<b>89,00%</b>	<b>51.570.000</b>	<b>51.570.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.148.500,00</b>	DISPENDUK_K B
2	08	1	1	17	1	Bimtek Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Kader BKB yang mendapat bimtek	10 kelompok	51.570.000	51.570.000			54.148.500,00	DISPENDUK_K B

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
2	09					<b>PERHUBUNGAN</b>								
2	09	1				<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>								
2	09	1	1			<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>								
2	09	1	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>2.927.000.000</b>	<b>2.927.000.000</b>	-	-	<b>3.073.350.000,00</b>	DISHUB
2	09	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	2.927.000.000	2.927.000.000			3.073.350.000,00	DISHUB
2	09	1	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>2.040.000.000</b>	<b>1.146.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>194.000.000</b>	<b>2.142.000.000,00</b>	DISHUB
2	09	1	1	2	1	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terealisasinya sarana dan prasarana kantor	1 paket	194.000.000	-		194.000.000	203.700.000,00	DISHUB
2	09	1	1	2	2	FS dan DED Gedung Kantor Dinas Perhubungan	Jumlah FS dan DED Gedung Kantor Perhubungan Terbangun	2 paket	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	2	3	Pembangunan Gedung ATCS Control System	Terbangunnya Gedung ATCS	1 paket	1.146.000.000	1.146.000.000			1.203.300.000,00	DISHUB
2	09	1	1	2	4	Pemeliharaan gedung tempat kerja	Terpeliharanya gedung tempat kerja	70%	500.000.000	-	500.000.000		525.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>45.157.000</b>	<b>45.157.000</b>	-	-	<b>47.414.850,00</b>	DISHUB
2	09	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	2 Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DISHUB
2	09	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000			42.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	4		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Persentase ASN Dinas Perhubungan yang memperoleh diklat teknis</b>	<b>67%</b>	<b>50.000.000</b>	-	-	<b>50.000.000</b>	<b>52.500.000,00</b>	DISHUB
2	09	1	1	4	1	In House training LLAJ	Jumlah personil yang mendapat pelatihan	20 orang	50.000.000	-		50.000.000	52.500.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Pesentase jumlah kajian bidang perhubungan terhadap kebutuhan</b>	<b>94%</b>	<b>6.046.876.350</b>	<b>4.046.876.350</b>	<b>2.000.000.000</b>	-	<b>6.349.220.167,50</b>	DISHUB

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
2	09	1	1	15	1	Perencanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kab. Tabanan yang dihasilkan	1 dokumen	400.000.000	-	400.000.000		420.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	2	Perencanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan Tabanan	Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas perkotaan Tabanan yang Dihasilkan	1 dokumen	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	3	Perencanaan trayek angkutan perdesaan	Jumlah Dokumen trayek angkutan perdesaan yang dihasilkan	1 dokumen	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	4	Perencanaan trayek angkutan perkotaan	Jumlah Dokumen trayek angkutan perkotaan yang dihasilkan	1 dokumen	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	5	Perencanaan potensi PAD dinas perhubungan Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen potensi PAD dinas perhubungan Kab. Tabanan yang dihasilkan	1 dokumen	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	6	FS dan DED tempat parkir bertingkat	Jumlah dokumen tempat parkir bertingkat yang dihasilkan	2 dokumen	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	7	Penyusunan database dan monitoring bengkel	Jumlah Dokumen database dan monitoring perbengkelan yang dihasilkan	1 dokumen	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISHUB
2	09	1	1	15	8	Pendataan fasilitas keselamatan jalan di Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Kab. Tabanan yang dihasilkan	1 dokumen	400.000.000	-	400.000.000		420.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	9	Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Trayek	Jumlah Sistem informasi Uji Kir dan Trayek Terbangun	1 sistem	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	10	Sistem Informasi Manajemen Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Fasilitas Keselamatan Jalan Terbangun	1 sistem	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	15	11	Penunjang dan jasa petugas parkir	Terpenuhinya penunjang dan jasa operasional petugas parkir	1 tahun	3.126.345.300	3.126.345.300			3.282.662.565,00	DISHUB
2	09	1	1	15	12	Pengelolaan parkir elektronik	Terlaksananya parkir elektronik	1 paket	555.071.650	555.071.650			582.825.232,50	DISHUB
2	09	1	1	15	13	Penunjang dan jasa petugas retribusi terminal	Terpenuhinya penunjang dan jasa operasional petugas retribusi terminal	1 tahun	336.809.400	336.809.400			353.649.870,00	DISHUB

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
2	09	1	1	16		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik</b>	100%	438.290.000	418.290.000	-	20.000.000	460.204.500,00	DISHUB
2	09	1	1	16	1	Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Persentase fasilitas keselamatan transportasi darat terpelihara	100%	143.250.000	143.250.000			150.412.500,00	DISHUB
2	09	1	1	16	2	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	Persentase alat uji terpelihara	100%	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	DISHUB
2	09	1	1	16	3	Pemeliharaan halte	Persentase halte terpelihara	100%	20.000.000	-		20.000.000	21.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	16	4	Pemeliharaan terminal di Kab. Tabanan	Jumlah terminal yang terpelihara di Kab. Tabanan	1 terminal	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	DISHUB
2	09	1	1	17		<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai</b>	16 unit	564.600.000	114.600.000	450.000.000	-	592.830.000,00	DISHUB
2	09	1	1	17	1	Pengadaan halte	Jumlah halte di jalan kabupaten yang terbangun	2 unit	150.000.000	-	150.000.000		157.500.000,00	DISHUB
2	09	1	1	17	2	Pembangunan gedung kantor terminal tuakilang	Terbangunnya gedung kantor terminal tuakilang	1 unit	300.000.000	-	300.000.000		315.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	17	3	Pengadaan sistem dan jaringan ATCS	Terealisasinya pengadaan sistem dan jaringan ATCS	1 paket	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DISHUB
2	09	1	1	18		<b>Program Peningkatan dan Pngamanan Lalu Lintas</b>	<b>Persentase ruas jalan kabupaten yang berkeselamatan</b>	30,13% (91/302)	6.801.202.700	1.501.202.700	2.800.000.000	2.500.000.000	7.141.262.835,00	DISHUB
2	09	1	1	18	1	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten dilengkapi fasilitas keselamatan	91	2.800.000.000	-	2.800.000.000		2.940.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	18	2	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (DAK)	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten dilengkapi fasilitas keselamatan dengan dana DAK	91	2.500.000.000	-		2.500.000.000	2.625.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	18	3	Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai petugas pengamanan lalu lintas	Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai petugas pengamanan lalu lintas	1 tahun	1.336.178.700	1.336.178.700			1.402.987.635,00	DISHUB
2	09	1	1	18	4	Forum lalu lintas	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	1 rekomendasi	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	DISHUB
2	09	1	1	18	5	Pengamanan rutin lalu lintas darat dan hari-hari besar nasional	Terlaksananya pengamanan rutin lalu lintas darat dan hari-hari besar nasional	1 tahun	68.760.000	68.760.000			72.198.000,00	DISHUB
2	09	1	1	18	6	Lomba WTN	Diraihnya piala WTN	1 piala	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	DISHUB
2	09	1	1	19		<b>Program Peningkatan</b>	<b>Rasio jumlah seat</b>	1,8%	21.227.534.000	17.207.534.000	-	4.020.000.000	22.288.910.700,00	DISHUB

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH					
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III							
	<b>Pelayanan Angkutan</b>	<b>angkutan umum terhadap jumlah penduduk</b>												
2	09	1	1	19	1	Bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Jumlah siswa yang mendapatkan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas	600 orang	24.066.000	24.066.000			25.269.300,00	DISHUB
2	09	1	1	19	2	Penilaian pelajar pelopor	Terpilihnya pelajar pelopor	3 orang	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DISHUB
2	09	1	1	19	3	Pembinaan sekolah mengemudi	Persentase sekolah mengemudi terbina	25%	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DISHUB
2	09	1	1	19	4	Trans Serasi	Jumlah cakupan wilayah yang terlayani angkutan trans serasi	9 kecamatan	17.117.000.000	17.117.000.000			17.972.850.000,00	DISHUB
2	09	1	1	19	5	Penyuluhan angkutan umum	Jumlah awak angkutan umum yang mendapat penyuluhan	60 orang	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISHUB
2	09	1	1	19	6	Pemilihan AKUT	Terpilihnya awak angkutan teladan	1 orang	9.168.000	9.168.000			9.626.400,00	DISHUB
2	09	1	1	19	7	Pembinaan angkutan danau	Jumlah awak angkutan danau terbina	76 orang	20.000.000	-	20.000.000		21.000.000,00	DISHUB
2	09	1	1	19	8	Pengadaan sarana transportasi perdesaan (DAK)	Jumlah unit angkutan Perdesaan dengan dana DAK terealisasi	10 unit	4.000.000.000	-	4.000.000.000		4.200.000.000,00	DISHUB
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang layak uji</b>	<b>23100</b>	<b>1.401.100.000</b>	<b>401.100.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.471.155.000,00</b>	DISHUB
2	09	1	1	20	1	Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	1 tahun	401.100.000	401.100.000			421.155.000,00	DISHUB
2	09	1	1	20	2	Pengadaan alat uji kendaraan bermotor	Jumlah alat uji sesuai standar	3 unit	1.000.000.000	-	1.000.000.000		1.050.000.000,00	DISHUB
<b>2</b>	<b>10</b>					<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>				<b>DISKOMINFO</b>								
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DISKOMINFO</b>								
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>869.660.000</b>	<b>869.660.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>913.143.000,00</b>	DISKOMINFO
2	10	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	800.900.000	800.900.000			840.945.000,00	DISKOMINFO
2	10	1	1	1	2	Penunjang kegiatan persandian, keamanan	Terpenuhinya kebutuhan persandian dan	100%	68.760.000	68.760.000			72.198.000,00	DISKOMINFO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH				
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III						
	informasi dan telekomunikasi	telekomunikasi											
2	10	1	1	2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>27.504.000</b>	<b>27.504.000</b>	-	-	<b>28.879.200,00</b>	DISKOMINFO
2	10	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terealisasinya sarana dan prasarana kantor	100%	27.504.000	27.504.000		28.879.200,00	DISKOMINFO
2	10	1	1	3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>16.044.000</b>	<b>16.044.000</b>	-	-	<b>16.846.200,00</b>	DISKOMINFO
2	10	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Sakip Tersedia	2 dokumen	5.730.000	5.730.000		6.016.500,00	DISKOMINFO
2	10	1	1	3	2	Pendataan Aset	Jumlah dokumen aset tersedia	1 dokumen	5.730.000	5.730.000		6.016.500,00	DISKOMINFO
2	10	1	1	3	3	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah	Jumlah laporan	1 laporan	4.584.000	4.584.000		4.813.200,00	DISKOMINFO
2	10	1	1	15	<b>Program Pengembangan e- government</b>	<b>Persentase terbangunnya platform Smart Government Kab. Tabanan</b>	<b>83%</b>	<b>1.324.776.000</b>	<b>1.324.776.000</b>	-	-	<b>1.391.014.800,00</b>	DISKOMINFO
2	10	1	1	15	1	Pembangunan Smart Government	Jumlah OPD yang Memiliki Aplikasi untuk Menunjang Smart Government	40 OPD	1.324.776.000	1.324.776.000		1.391.014.800,00	DISKOMINFO
2	10	1	1	16	<b>Program Pengembangan jaringan Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase wilayah yang terlayani jaringan Telekomunikasi</b>	<b>90%</b>	<b>5.598.279.000</b>	<b>4.998.279.000</b>	-	<b>600.000.000</b>	<b>5.878.192.950,00</b>	DISKOMINFO
2	10	1	1	16	1	Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Jumlah OPD yang Terintegrasi Jaringan	41 OPD	2.463.900.000	2.463.900.000		2.587.095.000,00	DISKOMINFO
2	10	1	1	16	2	Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kab. Tabanan	Persentase Menara Telekomunikasi yang Laik Operasi (layak operasi dan berijin)	95%	57.300.000	57.300.000		60.165.000,00	DISKOMINFO
2	10	1	1	16	3	Pengadaan dan Pemeliharaan	Jumlah Wilayah di Kab. Tabanan yang Terintegrasi	349 Desa Pakraman,	2.477.079.000	2.477.079.000		2.600.932.950,00	DISKOMINFO

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi (BKK)	Jaringan	24 Objek Wisata, 20 Puskesmas						
2	10	1	1	16	4	Smart System Platform (Smart System Control Room)	Persentase tersedianya sarana smart system control room di Kab. Tabanan	40%	600.000.000	-	600.000.000	630.000.000,00		DISKOMINFO
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase Informasi Daerah yang dipublikasikan</b>	<b>83%</b>	<b>249.400.000</b>	<b>171.900.000</b>	<b>-</b>	<b>77.500.000</b>	<b>180.495.000,00</b>	DISKOMINFO
2	10	1	1	17	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab. Tabanan	jumlah pameran yang diikuti	1 Pameran	68.760.000	68.760.000		72.198.000,00		DISKOMINFO
2	10	1	1	17	2	Penyelenggaraan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi)	Persentase Informasi yang dipublikasikan oleh PPID pada masing-masing OPD	90%	45.840.000	45.840.000		48.132.000,00		DISKOMINFO
2	10	1	1	17	3	Literasi Media	Jumlah Masyarakat yang memperoleh pemahaman tentang Pemanfaatan Media Informasi	1000 orang	77.500.000	-	77.500.000			DISKOMINFO
2	10	1	1	17	4	Penyelenggaraan Website www.tabanankab.go.id	Persentase Beroperasinya perangkat website Pemerintah Kab. Tabanan	90%	57.300.000	57.300.000		60.165.000,00		DISKOMINFO
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Masyarakat</b>	<b>Persentase desa di wilayah Kab. Tabanan berbasis IT</b>	<b>90%</b>	<b>140.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.000.000</b>	<b>147.000.000,00</b>	DISKOMINFO
2	10	1	1	18	1	Pengembangan Internet Positif bagi Siswa di Kab. Tabanan	Jumlah siswa SMU/SMK yang Mengikuti Kegiatan Lomba Internet Positif	300	90.000.000	-	90.000.000	94.500.000,00		DISKOMINFO
2	10	1	1	18	2	Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi	persentase pembangunan Bidang komunikasi	65%	50.000.000	-	50.000.000	52.500.000,00		DISKOMINFO
<b>2</b>	<b>11</b>					<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>								
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>				<b>DISKOP &amp; UKM</b>								
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DISKOP &amp; UKM</b>								
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>641.760.000</b>	<b>641.760.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>673.848.000,00</b>	DISKOPUKM
2	11	1	1	1	1	Penunjang Administrasi	Jumlah jenis pelayanan	100%	641.760.000	641.760.000		673.848.000,00		DISKOPUKM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH				
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III						
	Perkantoran	yang diberikan											
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>850.000.000</b>	<b>-</b>	<b>850.000.000</b>	<b>892.500.000,00</b>	<b>DISKOPUKM</b>	
2	11	1	1	2	1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	7 buah	50.000.000	-	50.000.000	52.500.000,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	2	2	Rehab Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	2 unit	800.000.000	-	800.000.000	840.000.000,00	DISKOPUKM
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.887.000</b>	<b>10.887.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.431.350,00</b>	<b>DISKOPUKM</b>
2	11	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	4	5.730.000	5.730.000		6.016.500,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	3	2	Pendataan Aset	Jumlah Dokumen Aset	2 Dok	5.157.000	5.157.000		5.414.850,00	DISKOPUKM
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi Sektor Rill Yang Berkualitas</b>	<b>1,46%</b>	<b>1.549.286.800</b>	<b>740.660.000</b>	<b>448.626.800</b>	<b>360.000.000</b>	<b>1.626.751.140,00</b>	<b>DISKOPUKM</b>
2	11	1	1	15	1	Pembinaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina	100 Koperasi	34.380.000	34.380.000		36.099.000,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	15	2	Revitalisasi Koperasi, Amalgamasi dan Pembubaran Koperasi	Jumlah Koperasi yang direvitalisasi, amalgamasi dan dibubarkan	25 Koperasi	28.650.000	28.650.000		30.082.500,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	15	3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai Kesehatannya	115 Koperasi	45.840.000	45.840.000		48.132.000,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	15	4	Pendataan Koperasi di Kab. Tabanan	Jumlah Koperasi yang didata	100 koperasi	17.190.000	17.190.000		18.049.500,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	15	5	Klinik Koperasi	Jumlah KUKM yang melakukan Konsultasi	30 Koperasi	17.190.000	17.190.000		18.049.500,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	15	6	Audit Koperasi	Jumlah Koperasi bermasalah yang di Audit	2 Koperasi	34.380.000	34.380.000		36.099.000,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	15	7	Diklat Peningkatan Kapasitas Pengawasan Koperasi	Jumlah Kapasitas Pengawasan Koperasi	30 Orang	40.000.000	-	40.000.000	42.000.000,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	15	8	Diklat Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas	Jumlah Pengurus dan Pengawas yang dilatih	30 Orang	40.000.000	-	40.000.000	42.000.000,00	DISKOPUKM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH					
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III							
2	11	1	1	15	9	Diklat Akuntansi Bagi Pengelola Koperasi	Jumlah Akuntan yang dilatih	30 Orang	50.000.000	-	50.000.000	52.500.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	10	Diklat Juru Buku berbasis Kopetensi	Jumlah Juru Buku yang dilatih	30 Orang	40.000.000	-	40.000.000	42.000.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	11	Diklat Kasir berbasis Kompetensi	Jumlah Kasir yang dilatih	30 Orang	50.000.000	-	50.000.000	52.500.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	12	Bintek Tata Cara Pelaporan dan Penyelenggaraan RAT	Meningkatnya Wawasan Tata Cara Pelaporan	30 Orang	40.000.000	-	40.000.000	42.000.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	13	Diklat Manejer berbasis Kompetensi	Jumlah Manager yang dilatih	30 Orang	50.000.000	-	50.000.000	52.500.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	14	Diklat Kolektor Koperasi	Jumlah Kolektor yang dilatih	25 Orang	34.380.000	34.380.000	-	36.099.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	15	Monev Dana Bergulir APBD	Jumlah Koperasi Penerima Dana Bergulir yang di Monev	26 Koperasi	28.650.000	28.650.000	-	30.082.500,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	16	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Peningkatan produktivitas usaha bagi KUMKM		500.000.000	500.000.000	-	525.000.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	17	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang ikut serta dalam perayaan HUT koperasi	500 koperasi	448.626.800	-	448.626.800	471.058.140,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	15	18	Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi	Peningkatan Wawasan Pengetahuan dan Keterampilan Peserta yang dilatih	63 Koperasi	50.000.000	-	50.000.000	52.500.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	16		<b>Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan UMKM</b>	<b>Jumlah kelompok usaha yang difasilitasi pemasaran produknya</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	-	<b>150.000.000</b>	<b>157.500.000,00</b>	DISKOPUKM	
2	11	1	1	16	1	Gebyar UMKM	Jumlah UMKM yang mempromosikan Produknya	25 UMKM	100.000.000	-	100.000.000	105.000.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	16	2	Promosi Produk UMKM	Jumlah Promosi Produk bagi UMKM	6 kali	50.000.000	-	50.000.000	52.500.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	17		<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>Persentase UMKM yang mengalami Pertumbuhan</b>	<b>69%</b>	<b>226.570.000</b>	<b>51.570.000</b>	-	<b>175.000.000</b>	<b>237.898.500,00</b>	DISKOPUKM
2	11	1	1	17	1	Sosialisasi Sumber sumber Pembiayaan	Jumlah SDM UKM yang mendapat sosialisasi	150 Orang	75.000.000	-	75.000.000	78.750.000,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	17	2	Pemberdayaan UMKM	Jumlah IUMK yang di data per Tahun	2000 IUMK	51.570.000	51.570.000	-	54.148.500,00	DISKOPUKM	
2	11	1	1	17	3	Pembangunan Bidang UKM	Persentase Pembangunan Bidang UKM	10 UKM	100.000.000	-	100.000.000	105.000.000,00	DISKOPUKM	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
2	11	1	1	18		<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</b>	<b>Jumlah UKM yang mampu mempromosikan produknya</b>	<b>35 UKM</b>	<b>47.190.000</b>	<b>17.190.000</b>	-	<b>30.000.000</b>	<b>49.549.500,00</b>	DISKOPUKM
2	11	1	1	18	1	Gerakan wirausaha muda	Jumlah wirausaha muda yang dibina	10 UKM	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	18	2	Temu usaha KUKM	jumlah KUKM yang mengikuti pertemuan	70 KUKM	30.000.000			30.000.000	31.500.000,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	19		<b>Program Peningkatan SDM UMKM</b>	<b>Jumlah kelompok UMKM yang mampu meningkatkan omset penjualan</b>	<b>30 Klp</b>	<b>157.300.000</b>	<b>57.300.000</b>	-	<b>100.000.000</b>	<b>165.165.000,00</b>	DISKOPUKM
2	11	1	1	19	1	Pembinaan LPD, Revitalisasi LPD dan Monev	Jumlah LPD yang dibina, direvitalisasi dan dimonev	70 LPD	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISKOPUKM
2	11	1	1	19	2	Bintek Manajemen Kewirausahaan	Jumlah SDM UMKM yang mendapat Bintek	250 Orang	100.000.000			100.000.000	105.000.000,00	DISKOPUKM
2	12					<b>PENANAMAN MODAL DAERAH</b>								
2	12	1				<b>DPMPPTSP</b>								
2	12	1	1			<b>DPMPPTSP</b>								
2	12	1	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.489.800.000</b>	<b>1.489.800.000</b>	-	-	<b>1.564.290.000,00</b>	DPMPPTSP
2	12	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	1.489.800.000	1.489.800.000			1.564.290.000,00	DPMPPTSP
2	12	1	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>70.000.000</b>	-	-	<b>70.000.000</b>	<b>73.500.000,00</b>	DPMPPTSP
2	12	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik yang mendukung kelancaran tugas PD	100%	70.000.000			70.000.000	73.500.000,00	DPMPPTSP
2	12	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.887.000</b>	<b>10.887.000</b>	-	-	<b>11.431.350,00</b>	DPMPPTSP

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH						
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III								
	<b>Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>														
2	12	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen SAKIP yang tersedia	2 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DPMPPTSP	
2	12	1	1	3	2	Pendataan Aset	Jumlah Dokumen data aset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DPMPPTSP	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</b>	<b>Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)</b>	<b>4.871,96</b>	<b>163.878.000</b>	<b>163.878.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.071.900,00</b>	DPMPPTSP
2	12	1	1	15	1	Forum Koordinasi Penanaman Modal	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	4 Kali	74.490.000	74.490.000			78.214.500,00	DPMPPTSP	
2	12	1	1	15	2	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi daerah	4 kali	89.388.000	89.388.000			93.857.400,00	DPMPPTSP	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan kualitas pelayanan Investasi</b>	<b>Persentase Ijin dan Non Perijinan terbit terhadap Total Permohonan Ijin dan Non Perijinan</b>	<b>98,7%</b>	<b>217.740.000</b>	<b>217.740.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228.627.000,00</b>	DPMPPTSP
2	12	1	1	16	1	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terpantaunya Pengembangan Penanaman Modal dan Perijinan	48 kali	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DPMPPTSP	
2	12	1	1	16	2	Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perijinan dari permohonan ijin masuk pada Fron Office (FO) sampai ijin terbit ≤ 10 dan jumlah ijin yang terbit	10 Hari/5.500 ijin	108.870.000	108.870.000			114.313.500,00	DPMPPTSP	
2	12	1	1	16	3	Penyelenggaraan Pelayanan Non Perijinan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perijinan dari permohonan ijin masuk pada Fron Office (FO) sampai ijin terbit ≤ 10 dan jumlah ijin yang terbit	10 Hari/5.500 ijin	51.570.000	51.570.000			54.148.500,00	DPMPPTSP	
<b>2</b>	<b>13</b>					<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>									
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>													
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>												
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Pembinaan Pemuda dan</b>	<b>Peraihan Medali Terhadap Cabang Olah Raga/Seni</b>	<b>100</b>	<b>3.022.220.000</b>	<b>2.372.220.000</b>	<b>650.000.000</b>		<b>-</b>	<b>3.173.331.000,00</b>	DISDIK

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						<b>Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>Yang Diikuti dalam Lomba Tingkat Provinsi</b>							
2	13	1	1	15	1	PORJAR	Jumlah medali yang diperoleh dalam PORJAR	6	2.372.220.000	2.372.220.000			2.490.831.000,00	DISDIK
2	13	1	1	15	2	Pelatihan Penggerak Olah Raga Pelajar	Jumlah Penggerak olahraga yang mengikuti pelatihan	50 or	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISDIK
2	13	1	1	15	3	Pendataan Lembaga Aktifitas Pemuda dan olahraga	Dokumen data pemuda dan olahraga	1 dok	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISDIK
2	13	1	1	15	4	Pemasalan dan pembibitan pemuda dan pelajar	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan olah raga	50 or	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISDIK
2	13	1	1	15	5	Pengadaan sarana Olahraga, Seni dan Budaya	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana olahraga, seni dan budaya	10 sek	300.000.000	-	300.000.000		315.000.000,00	DISDIK
<b>2</b>	<b>14</b>					<b>STATISTIK</b>								
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>				<b>DISKOMINFO</b>								
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DISKOMINFO</b>								
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Persentase penyediaan data informasi statistik daerah Kab. Tabanan</b>	<b>56%</b>	<b>103.140.000</b>	<b>103.140.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.297.000,00</b>	DISKOMINFO
2	14	1	1	15	1	Pendataan Data dan Informasi Statistik Daerah Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Basis Data Perencanaan	1 buku	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	DISKOMINFO
2	14	1	1	15	2	Pengolahan dan Analisa Data Informasi Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Data Informasi Statistik Daerah	1 buku	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISKOMINFO
2	14	1	1	15	3	Penyediaan Data Informasi Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi statistik daerah	80%	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISKOMINFO
<b>2</b>	<b>15</b>					<b>PERSANDIAN</b>								
<b>2</b>	<b>16</b>					<b>KEBUDAYAAN</b>								
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>				<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>								
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>								
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.172.358.000</b>	<b>1.172.358.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.230.975.900,00</b>	DISBUD
2	16	1	1	1	1	Penunjang Administrasi	Terpenuhinya kebutuhan	100%	1.172.358.000	1.172.358.000			1.230.975.900,00	DISBUD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH				
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III						
	Perkantoran		pelayanan adminstrasi perkantoran										
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>128.650.000</b>	<b>28.650.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000</b>	<b>135.082.500,00</b>	DISBUD
2	16	1	1	2	1	Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	90%	28.650.000	28.650.000	-	30.082.500,00	DISBUD
2	16	1	1	2	2	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	100.000.000	-	100.000.000	105.000.000,00	DISBUD
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>66.468.000</b>	<b>66.468.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69.791.400,00</b>	DISBUD
2	16	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen	3 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000		5.414.850,00	DISBUD
2	16	1	1	3	2	Pendataan Aset	Jumlah Laporan Data Aset	2 Jenis Dokumen	4.011.000	4.011.000		4.211.550,00	DISBUD
2	16	1	1	3	3	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah	Terpantaunya penggunaan dana hibah	10 kec	57.300.000	57.300.000	-	60.165.000,00	DISBUD
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Program Lembaga Adat/ Tradisional</b>	<b>Jumlah Lembaga Adat/ Tradisional</b>	<b>294</b>	<b>1.106.580.000</b>	<b>906.580.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.161.909.000,00</b>	DISBUD
2	16	1	1	15	1	Utsawa Dharma Gita	Meningkatnya Jumlah Pagelaran Seni Budaya	12 Pagelaran	70.000.000	70.000.000	-	73.500.000,00	DISBUD
2	16	1	1	15	2	Monitoring BKK Desa Pakraman	Terealisasinya BKK Desa Pakraman	40 Desa Pakraman	28.650.000	28.650.000		30.082.500,00	DISBUD
2	16	1	1	15	3	Pembinaan dan Lomba Desa Pakraman	Jumlah Ds. Pakraman yang di Bina	10 Desa Pakraman	91.680.000	91.680.000	-	96.264.000,00	DISBUD
2	16	1	1	15	4	Pembinaan dan Pembahasan Awig - awig Desa Pakraman	Pembahasan Awig-awig Ds. Pakraman	10 Awig- awig	17.190.000	17.190.000	-	18.049.500,00	DISBUD
2	16	1	1	15	5	Pembinaan dan Lomba Sekaa Teruna di Kab. Tabanan	Jumlah Sekaa Truna Yang di Bina dan dinilai	10 Sekaa	100.000.000	-	100.000.000	105.000.000,00	DISBUD
2	16	1	1	15	6	Pembinaan dan Lomba Subak dan Subak Abian	Terwujudnya dan lestari nya lembaga subak dan subak abian yang mandiri	20 Subak dan Subak Abian	51.570.000	51.570.000	-	54.148.500,00	DISBUD
2	16	1	1	15	7	ACI di Penyiwaan Pura	Terlaksananya	Pura	355.260.000	355.260.000		373.023.000,00	DISBUD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH						
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III								
	Subak Kab. Tabanan	penyiwian/upacara di Pura Penyiwian Subak dan Subak Abian	Penyiwian Subak dan Subak Abian												
2	16	1	1	15	8	Pemeriksaan dan Pembahasan Awig-Awig Subak	Tersedianya awig-awig subak yang diperiksa dan mendapatkan pembahasan	38 Awig- awig subak	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISBUD	
2	16	1	1	15	9	Pelaksanaan Pekelem dan Nangluk Merana di Kab. Tabanan	Terciptanya kelestarian sumber daya alam di Kab. Tabanan	Pekelem dan Nangluk Merana	275.040.000	275.040.000			288.792.000,00	DISBUD	
2	16	1	1	15	10	Kegiatan penghargaan kepada pelaku, praktisi dalam bidang seni, sastra dan budaya	Jumlah pelaku seni dan budaya	10 Pelaku, praktisi dalam bidang seni	100.000.000	-	100.000.000			105.000.000,00	DISBUD
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dilindungi</b>	<b>650 benda cagar budaya</b>	<b>747.410.000</b>	<b>547.410.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>784.780.500,00</b>	DISBUD	
2	16	1	1	16	1	Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Warisan Budaya	Jumlah Warisan budaya benda dan tak benda yang ditetapkan	10 kecamatan	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISBUD	
2	16	1	1	16	2	Kegiatan pendataan benda cagar budaya	Terlaksananya pendataan benda cagar budaya yang terdata di Kab. Tabanan	10 Kecamatan	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISBUD	
2	16	1	1	16	3	Kegiatan sosialisasi Penggunaan bahasa bali dan etika berbusana adat Bali	Jumlah sosialisasi	10 Kecamatan	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISBUD	
2	16	1	1	16	4	Kegiatan penyusunan purana di Kab. Tabanan	Jumlah BCB yang terdata	1 BCB	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISBUD	
2	16	1	1	16	5	Kegiatan Penyelegraan Bulan Bahasa Bali	Terselenggaranya bulan bahasa Bali	10 Kecamatan	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISBUD	
2	16	1	1	16	6	Pengelolaan Museum dan Taman Budaya (DAK)	Jumlah Cagar Budaya yang di lindungi	1 Museum Subak	450.000.000	450.000.000			472.500.000,00	DISBUD	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan</b>	<b>178</b>	<b>3.277.000.000</b>	<b>2.827.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.440.850.000,00</b>	DISBUD	
2	16	1	1	17	1	Pelaksanaan PKB Tingkat Kabupaten & Provinsi	Tumbuh Kembangnya Kesenian di Masyarakat	20 Sekaa	2.827.000.000	2.827.000.000			2.968.350.000,00	DISBUD	
2	16	1	1	17	2	Seleksi Gong Kebyar Anak-anak, Wanita dan Dewasa	Bergairahnya aktifitas Seniman dan organisasi kesenian	10 Kecamatan	250.000.000	-	250.000.000		262.500.000,00	DISBUD	
2	16	1	1	17	3	Pentas Parade Seni	jumlah kelompok seni yang terlibat	10 Kelompok	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISBUD	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
2	17						<b>PERPUSTAKAAN</b>								
2	17	1					<b>DISPERSIP</b>								
2	17	1	1				<b>DISPERSIP</b>								
2	17	1	1	1			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>713.650.000</b>	<b>713.650.000</b>	-	-	<b>749.332.500,00</b>	DISPERSIP
2	17	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	713.650.000	713.650.000			749.332.500,00	DISPERSIP	
2	17	1	1	2			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>188.000.000</b>	-	-	<b>188.000.000</b>	<b>197.400.000,00</b>	DISPERSIP
2	17	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	90%	138.000.000			138.000.000	144.900.000,00	DISPERSIP	
2	17	1	1	2	2	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 gedung	50.000.000			50.000.000	52.500.000,00	DISPERSIP	
2	17	1	1	3			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>8.022.000</b>	<b>8.022.000</b>	-	-	<b>8.423.100,00</b>	DISPERSIP
2	17	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	4.011.000	4.011.000			4.211.550,00	DISPERSIP	
2	17	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	4.011.000	4.011.000			4.211.550,00	DISPERSIP	
2	17	1	1	15			<b>Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</b>	<b>Persentase sekolah dan Desa yang telah memiliki perpustakaan</b>	<b>64%</b>	<b>147.768.000</b>	<b>123.768.000</b>	<b>24.000.000</b>	-	<b>155.156.400,00</b>	DISPERSIP
2	17	1	1	15	1	Pelayanan Perpustakaan keliling	Persentase cakupan layanan perpustakaan keliling	64%	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISPERSIP	
2	17	1	1	15	2	Pengadaan dan pengolahan Bahan Pustaka	Tingkat kunjungan ke perpustakaan per tahun	10%	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISPERSIP	
2	17	1	1	15	3	Layanan Story Telling	Tingkat kunjungan ke perpustakaan per tahun	72.921 Orang/Tahu	13.752.000	13.752.000			14.439.600,00	DISPERSIP	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
2	17	1	1	15	4	Lomba Perpustakaan, dan Minat Baca	Tingkat kunjungan ke perpustakaan per tahun	100%	22.920.000	22.920.000	-		24.066.000,00	DISPERSIP
2	17	1	1	15	5	Pembinaan Tenaga Perpustakaan Sekolah dan Desa	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dibina	160 orang	13.752.000	13.752.000			14.439.600,00	DISPERSIP
2	17	1	1	15	6	Monitoring pembinaan tenaga perpustakaan sekolah dan desa	Tingkat kunjungan perpustakaan per tahun	20%	24.000.000	-	24.000.000		25.200.000,00	DISPERSIP
2	17	1	1	15	7	Peningkatan minat baca	Prosentase masyarakat yang minat baca	80%	27.504.000	27.504.000	-		28.879.200,00	DISPERSIP
2	17	1	1	16		<b>Program Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan</b>	<b>Bertambahnya sarana dan prasarana perpustakaan</b>	<b>100%</b>	<b>421.043.000</b>	<b>421.043.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>442.095.150,00</b>	DISPERSIP
2	17	1	1	16	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (DAK)	Bertambahnya sarana dan prasarana perpustakaan	Perabotan layanan perpustakaan	421.043.000	421.043.000	-		442.095.150,00	DISPERSIP
2	18					<b>KEARSIPAN</b>								
2	18	1				<b>DISPERSIP</b>								
2	18	1	1			<b>DISPERSIP</b>								
2	18	1	1	16		<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Persentase dokumen/arsip daerah yang terdata</b>	<b>22%</b>	<b>255.070.000</b>	<b>91.680.000</b>	<b>163.390.000</b>	<b>-</b>	<b>267.823.500,00</b>	DISPERSIP
2	18	1	1	16	1	Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan	Tertatanya administrasi kearsipan	60%	17.190.000	17.190.000	-		18.049.500,00	DISPERSIP
2	18	1	1	16	2	Pengelolaan Arsip	Tersimpannya arsip dengan baik	25%	17.190.000	17.190.000	-		18.049.500,00	DISPERSIP
2	18	1	1	16	3	Audit kearsipan OPD dan Desa	Tertatanya pengelolaan arsip dengan baik	10%	17.190.000	17.190.000	-		18.049.500,00	DISPERSIP
2	18	1	1	16	4	Lomba Kearsipan	Meningkatnya pemahaman kearsipan	1%	78.390.000	-	78.390.000		82.309.500,00	DISPERSIP
2	18	1	1	16	5	Monitoring Kearsipan	Meningkatnya system tertib administrasi kearsipan	4%	85.000.000	-	85.000.000		89.250.000,00	DISPERSIP
2	18	1	1	16	6	Penelusuran Arsip terjaga dan Arsip Statis	Tertatanya administrasi kearsipan	5%	40.110.000	40.110.000	-		42.115.500,00	DISPERSIP
3						<b>URUSAN PILIHAN</b>								
3	01					<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
3	01	1				<b>DINAS PERIKANAN</b>								

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>											
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>DINAS PERIKANAN</b>								
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.178.088.000</b>	<b>1.178.088.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.236.992.400,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan yang diberikan	4 Jenis	1.178.088.000	1.178.088.000			1.236.992.400,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000.000</b>	<b>84.000.000,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	2	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor direhab dan terpelihara	1 Gedung	80.000.000			80.000.000	84.000.000,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>12.606.000</b>	<b>12.606.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.236.300,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja, Laporan Kinerja	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dihasilkan	5 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DISKAN
3	01	1	1	3	2	Pendataan Aset	Jumlah jenis laporan pengelolaan barang milik daerah dihasilkan	7 Jenis Dokumen	7.449.000	7.449.000			7.821.450,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang memperoleh diklat teknis</b>	<b>41,1%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	<b>26.250.000,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	4	1	Orientasi lapang Teknis Perikanan	Jumlah aparatur mengadopsi teknologi	15 orang	25.000.000			25.000.000	26.250.000,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program pengembangan perikanan budidaya</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	<b>4%</b>	<b>2.170.980.000</b>	<b>648.980.000</b>	<b>-</b>	<b>1.522.000.000</b>	<b>2.279.529.000,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	15	1	Pemberdayaan Lembaga Pembenihan Ikan	Prosentase peningkatan produksi benih ikan	6%	148.980.000	148.980.000			156.429.000,00	DISKAN
3	01	1	1	15	2	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah demplot diusahakan	3 demform	500.000.000	500.000.000			525.000.000,00	DISKAN
3	01	1	1	15	3	Pengadaan dan Sarana Prasarana Perikanan	Jumlah jenis sarana dan prasarana disediakan	6 jenis	1.522.000.000			1.522.000.000	1.598.100.000,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>program pengembangan</b>	<b>Tambahan produk</b>		<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.000.000,00</b>	DISKAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	unggulan daerah yang dikembangkan kawasan minapolitan	1,0						
3	01	1	1	16	1	Pengembangan Produk unggulan Daerah(PIK)	Jumlah jenis komoditas unggulan dikembangkan	5 Jenis	200.000.000	200.000.000			210.000.000,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan</b>	<b>Cakupan bina kelompok pelaku perikanan</b>	<b>191 klp</b>	<b>80.220.000</b>	<b>80.220.000</b>	-	-	<b>84.231.000,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	17	1	Perlindungan Sumber Daya Perikanan	Jumlah desa yang melaksanakan penambahan stock biota perairan	48 Desa	80.220.000	80.220.000			84.231.000,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>4%</b>	<b>768.004.000</b>	<b>768.004.000</b>	-	-	<b>806.404.200,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	18	1	Optimalisasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum meningkat	830,8 Ton	80.220.000	80.220.000			84.231.000,00	DISKAN
3	01	1	1	18	2	Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK)	Jenis sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia	5 Jenis	687.784.000	687.784.000			722.173.200,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>	<b>Persentase peningkatan pelaku utama perikanan masyarakat pesisir</b>	<b>1.4%</b>	<b>6.303.000</b>	<b>6.303.000</b>	-	-	<b>6.618.150,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	19	1	Pemberdayaan usaha garam rakyat	Jumlah produksi garam meningkat	3,5 ton	6.303.000	6.303.000			6.618.150,00	DISKAN
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>Produksi Aneka Olahan Ikan Bernilai Tambah</b>	<b>2525 ton</b>	<b>641.760.000</b>	<b>641.760.000</b>	-	-	<b>673.848.000,00</b>	DISKAN
3	01	1	1	20	1	Gerakan gemar makan ikan	Jenis ikan konsumsi dan menu olahan disosialisasikan	4 jenis	544.350.000	544.350.000			571.567.500,00	DISKAN
3	01	1	1	20	2	Bina mutu pengolahan hasil perikanan	Jumlah jenis produk dihasilkan dan terawasi mutunya	16 jenis	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DISKAN
3	01	1	1	20	3	Penyusunan statistik perikanan	Ketersediaan data dan informasi	90%	63.030.000	63.030.000			66.181.500,00	DISKAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	02					PARIWISATA								
3	02	1				DINAS PARIWISATA								
3	02	1	1			DINAS PARIWISATA								
3	02	1	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	692.184.000	692.184.000	-	-	726.793.200,00	DISPAR
3	02	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	1 Tahun	692.184.000	692.184.000			726.793.200,00	DISPAR
3	02	1	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	86%	100.000.000		-	100.000.000	105.000.000,00	DISPAR
3	02	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasaran Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak operasional	88%	100.000.000			100.000.000	105.000.000,00	DISPAR
3	02	1	1	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	10.887.000	10.887.000	-	-	11.431.350,00	DISPAR
3	02	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah jenis dokumen yang tersedia	2 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	DISPAR
3	02	1	1	3	2	Pendataan Aset	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak operasional	2 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	DISPAR
3	02	1	1	15		Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah DTW yang dikunjungi wisatawan	6	7.762.120.000	6.992.120.000	170.000.000	600.000.000	8.150.226.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	1	Monitoring dan Evaluasi DTW di Kab. Tabanan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi DTW di Kab. Tabanan	1 Jenis Dokumen	26.358.000	26.358.000			27.675.900,00	DISPAR
3	02	1	1	15	2	Pendataan dan Inventarisasi Kunjungan Wisata	Jumlah dokumen laporan data inventaris kunjungan wisata yang tersedia	1 Jenis Dokumen	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	3	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Sarana informasi dan pemasaran pariwisata yang tersedia	3 Jenis (brosur, aplikasi, dan web)	96.264.000	96.264.000			101.077.200,00	DISPAR
3	02	1	1	15	4	Pemeliharaan Aplikasi dan	Aplikasi dan Web yang	2 Jenis	100.000.000			100.000.000	105.000.000,00	DISPAR

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
					Web	tersedia dalam kondisi baik								
3	02	1	1	15	5	Lomba Blog	Jumlah Pemenang Lomba	3	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	6	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Event Pameran Pariwisata	4 Kali	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	7	Pembinaan dan Pengawasan Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum	1 Jenis Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	8	Monitoring, Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata disekitar DTW yang sudah berkembang	Dokumen Monitoring, Penataan, dan Pengembangan Atraksi Pariwisata disekitar DTW yang sudah berkembang	1 Jenis Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	9	Pengembangan Daya Tarik Wisata Bedugul	Jumlah Bangunan Yang Terbangun	1 Paket Hotel, restaurant, dan cottage	2.303.386.000	2.303.386.000			2.418.555.300,00	DISPAR
3	02	1	1	15	10	Pelayanan Kepariwisataaan	Tertatanya Area DTW Bedugul	3 lokasi (area htel, restaurant, dan cottage)	752.170.000	752.170.000			789.778.500,00	DISPAR
3	02	1	1	15	11	Tabanan Food Festival	Jumlah Penyelenggaraan Festival	1 Kali	126.060.000	126.060.000			132.363.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	12	Ulun Danu Festival	Jumlah Penyelenggaraan Festival	1 Kali	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	13	Pemilihan dan Pengiriman Jegog Bagus ke Tk Provinsi	Jegog Bagus Yang Terpilih dan Dikirim	2 Pasang	111.162.000	111.162.000			116.720.100,00	DISPAR
3	02	1	1	15	14	Bimtek Pelaku Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Terlatih	60 orang	50.000.000	-	50.000.000		52.500.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	15	Festival Komoditas Pertanian Kreatif	Jumlah Penyelenggaraan Festival	1 Kali	150.000.000	-	150.000.000		157.500.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	16	Pemilihan dan Pengiriman Jegog Bagus ke Tk Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Festival	1 Kali	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	17	Lomba Foto	Jumlah Pemenang Lomba	5	70.000.000	-	70.000.000		73.500.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	18	Penyusunan DED perencanaan pengembangan DTW di Kawasan Tepi Barat Danau Beratan	Dokumen DED Perencanaan Pengembangan DDTW di Kawasan Tepi Barat Danau Beratan	4 Dokumen	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	19	Pembinaan Sarana Akomodasi Pariwisata	Dokumen Akomodasi Pariwisata	1 Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPAR

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	02	1	1	15	20	Pembinaan Rumah Makan dan Restoran	Dokumen Pembinaan Rumah Makan dan Restoran	1 Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	21	Pembinaan Sanitasi Lingkungan Usaha Pariwisata	Dokumen Pembinaan Sanitasi Lingkungan Usaha Pariwisata	1 Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPAR
3	02	1	1	15	22	Pengembangan Sarana Penunjang Pariwisata			3.210.000.000	3.210.000.000			3.370.500.000,00	DISPAR
<b>3</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengembangan Desa Wisata/ agrowisata</b>	<b>Jumlah desa wisata/Agro Wisata yang berkembang</b>	<b>11</b>	<b>339.176.000</b>	<b>64.176.000</b>	<b>-</b>	<b>275.000.000</b>	<b>356.134.800,00</b>	DISPAR
3	02	1	1	16	1	Pembinaan dan Lomba Kelompok Sadar Wisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang terbina dan yang mengikuti lomba	6 Pokdarwis	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISPAR
3	02	1	1	16	2	Penyusunan DED Desa Wisata	Dokumen DED Desa Wisata	5 Dokumen	150.000.000	-		150.000.000	157.500.000,00	DISPAR
3	02	1	1	16	3	Revitalisasi Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata Yang Mendapatkan Pembinaan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	4	75.000.000	-		75.000.000	78.750.000,00	DISPAR
3	02	1	1	16	4	Penyebarluasan Informasi Peraturan Bupati Tabanan No 18 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Peramuwisata			50.000.000	-		50.000.000	52.500.000,00	DISPAR
3	02	1	1	16	5	Pemantauan Potensi, Penilaian dan Penetapan Desa Wisata	Dokumen Pemantauan Potensi, Penilaian dan Penetapan Desa Wisata	12 Kelompok	35.526.000	35.526.000			37.302.300,00	DISPAR
<b>3</b>	<b>03</b>					<b>PERTANIAN</b>								
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>				<b>DINAS PERTANIAN</b>								
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DINAS PERTANIAN</b>								
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>2.304.498.275</b>	<b>2.304.498.275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.419.723.188,75</b>	DISTAN
3	03	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Tugas-Tugas Perkantoran	100%	2.304.498.275	2.304.498.275			2.419.723.188,75	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.000.000</b>	<b>131.250.000,00</b>	DISTAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	03	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	100%	125.000.000	-	-	125.000.000	131.250.000,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Manajemen Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>	<b>100%</b>	<b>22.347.000</b>	<b>22.347.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.464.350,00</b>	DISTAN
3	03	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Persentase SKPD dengan Kualitas Laporan Keuangan dalam Kondisi baik	100%	5.157.000	5.157.000	-	-	5.414.850,00	DISTAN
3	03	1	1	3	2	Pendataan Aset	Persentase SKPD dengan Kualitas Laporan Keuangan dalam Kondisi baik	100%	4.011.000	4.011.000	-	-	4.211.550,00	DISTAN
3	03	1	1	3	3	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah	Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dana Hibah	100%	13.179.000	13.179.000	-	-	13.837.950,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Persentase luas lahan pertanian yang menerima subsidi pupuk, benih dan saprodi</b>	<b>60%</b>	<b>1.039.785.750</b>	<b>1.039.785.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.091.775.037,50</b>	DISTAN
3	03	1	1	15	1	Penyusunan statistik pertanian	Tersedianya data statistik pertanian	100%	19.252.800	19.252.800	-	-	20.215.440,00	DISTAN
3	03	1	1	15	2	Peningkatan produksi pertanian/ padi (fasilitasi pupuk dan pestisida)	Tersedianya pupuk pestisida dan alsin dalam keadaan cukup baik	20 ha	47.461.500	47.461.500	-	-	49.834.575,00	DISTAN
3	03	1	1	15	3	Asuransi pertanian	Terbantunya petani apabila terjadi musibah (puso untuk padi) dan kematian hewan (sapi) untuk ternak	1 tahun	973.071.450	973.071.450	-	-	1.021.725.022,50	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Padi</b>	<b>Angka produksi padi (ton)</b>	<b>207,623</b>	<b>17.260.492.317</b>	<b>17.040.492.317</b>	<b>-</b>	<b>220.000.000</b>	<b>18.123.516.932,33</b>	DISTAN
3	03	1	1	16	1	Pendampingan kegiatan UPSUS (Upaya Khusus) padi di Kab. Tabanan	Jumlah luasan pendampingan upsus	30 hektar	52.874.600	52.874.600	-	-	55.518.330,00	DISTAN
3	03	1	1	16	2	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Jumlah kelompok yang meningkat pemahamannya tentang cara pengendalian	10 subak	8.543.717	8.543.717	-	-	8.970.902,33	DISTAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	03	1	1	16	3	Peningkatan Infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pertanian (jalan dan jaringan irigasi usaha tani) (DAK)	Jumlah meningkatnya insfratraktur pertanian (jalan dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik dan cukup	20 paket	2.997.064.000	2.997.064.000			3.146.917.200,00	DISTAN
3	03	1	1	16	4	Peningkatan Infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pertanian (jalan dan jaringan irigasi usaha tani)	Jumlah meningkatnya insfratraktur pertanian (jalan dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik dan cukup	20 paket	13.409.010.000	13.409.010.000			14.079.460.500,00	DISTAN
3	03	1	1	16	5	Peningkatan sarana prasarana	jumlah sarana dan prasarana pertanian dan dam parit dalam kondisi baik	10 Kecamatan	573.000.000	573.000.000			601.650.000,00	DISTAN
3	03	1	1	16	6	Pendampingan Kegiatan UPSUS (Upaya Khusus) padi	Jumlah luasan pendampingan upsus	subak	220.000.000	-	220.000.000		231.000.000,00	DISTAN
3	03	1	1	17	6	<b>Program Peningkatan Produksi Hortikultura</b>	<b>Angka produksi sayuran per tahun (kwintal)</b>	<b>556,080</b>	<b>380.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	-	<b>399.000.000,00</b>	DISTAN
3	03	1	1	17	1	Pengembangan Produk Organik Hortikultura	Peningkatan luasan pengembangan produk organik yang bersertifikasi organik	3 ha	180.000.000	-	180.000.000		189.000.000,00	DISTAN
3	03	1	1	17	2	Pengembangan Kawasan Buah untuk Menunjang Agrowisata	Luasan pengembagnan hortikultura	1 kecamatan	200.000.000	200.000.000			210.000.000,00	DISTAN
3	03	1	1	18	7	<b>Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian</b>	<b>Persentase peningkatan kelompok/subak binaan yang berhasil menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha</b>	<b>10%</b>	<b>1.512.367.450</b>	<b>160.567.450</b>	<b>1.351.800.000</b>	-	<b>1.587.985.822,50</b>	DISTAN
3	03	1	1	18	1	Promosi dan Gelar Pasar Produk Pertanian organik/Ramah Lingkungan dan produk BUMDes	Terlaksananya kegiatan promosi	5	160.567.450	160.567.450			168.595.822,50	DISTAN
3	03	1	1	18	2	Pengolahan hasil pertanian	Persentase peningkatan kelompok/subak binaan yang berhasil menjalin kemitraan bisnis dengan	1 lokasi	1.006.800.000	-	1.006.800.000		1.057.140.000,00	DISTAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	03	1	1	18	3	Pengolahan Produk hasil Pertanian Hortikultura	pengusaha Jenis produk hasil pertanian yang dikelola	1 Jenis	345.000.000	-	345.000.000		362.250.000,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Perkebunan</b>	<b>Persentase Produksi Komoditas unggulan</b>	<b>10%</b>	<b>598.566.625</b>	<b>598.566.625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>628.494.956,25</b>	DISTAN
3	03	1	1	19	1	Pengamatan OPT Penting Tanaman Perkebunan	Frekuensi pengamatan opt penting pada komoditi perkebunan (kali)	600 kali	11.794.350	11.794.350			12.384.067,50	DISTAN
3	03	1	1	19	2	Gerakan Serentak Pengendalian Hama Terpadu	Jumlah subak abian yang meningkat pemahamannya tentang tata cara pengendalian hama terpadu (subak)	5 subak	36.772.275	36.772.275			38.610.888,75	DISTAN
3	03	1	1	19	3	Intensifikasi tanaman komoditas unggulan perkebunan	Luas intensifikasi tanaman perkebunan, jumlah benih atau bibit yang tersalur	6 subak abian	550.000.000	550.000.000			577.500.000,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan</b>	<b>Persentase Produk olahan primer komoditi unggulan perkebunan (ton)</b>	<b>40%</b>	<b>2.991.390.000</b>	<b>40.110.000</b>	<b>2.951.280.000</b>	<b>-</b>	<b>3.140.959.500,00</b>	DISTAN
3	03	1	1	20	1	Pendampingan, Pengawasan dan fasilitasi pengolahan komoditas perkebunan	Jumlah kegiatan kepada kelompok yang mengolah	25 unit	2.951.280.000	-	2.951.280.000		3.098.844.000,00	DISTAN
3	03	1	1	20	2	Temu kemitraan pengolahan komoditi unggulan perkebunan	sertifikasi produk pertanian	3 unit usaha	40.110.000	40.110.000			42.115.500,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani</b>	<b>Jumlah kelompok/subak binaan yang berhasil membentuk usaha bersama (agribisnis) yang menguntungkan</b>	<b>10</b>	<b>183.701.500</b>	<b>134.082.000</b>	<b>49.619.500</b>	<b>-</b>	<b>192.886.575,00</b>	DISTAN
3	03	1	1	21	1	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan dan kabupaten	Tersusnya buku program penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten	110 buku	134.082.000	134.082.000			140.786.100,00	DISTAN
3	03	1	1	21	2	Pembinaan lomba - lomba lembaga / SDM pertanian	Persentase kelembagaan penyuluh yang memiliki kompetensi	10 kecamatan	49.619.500	-	49.619.500		52.100.475,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>Program Pengembangan</b>	<b>Luas lahan pertanian yang</b>	<b>435 ha</b>	<b>1.305.464.000</b>	<b>220.605.000</b>	<b>915.782.000</b>	<b>169.077.000</b>	<b>1.370.737.200,00</b>	DISTAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						<b>Pertanian Organik</b>	<b>dikelola secara organik (tanpa memanfaatkan bahan kimia sintetis)</b>							
3	03	1	1	23	1	Pengembangan lanjutan Budidaya Padi Ramah Lingkungan melalui penerapan Sistem Pertanian Organik (Gerbang Pangan)	Tersedianya beras sehat aman di konsumsi	10 Kecamatan	915.782.000	-	915.782.000		961.571.100,00	DISTAN
3	03	1	1	23	2	Pengembangan Budidaya sayur ramah lingkungan, penanganan pasca panen dan fasilitasi pemasaran (Gerbang Pangan)	Jumlah petani yang mengikuti kegiatan sekolah lapangan sebanyak 160 orang tersebar di 8 subak	160 petani sayuran	169.077.000	-	169.077.000		177.530.850,00	DISTAN
3	03	1	1	23	3	Pengembangan Produk Organik Tanaman Pangan	Peningkatan luasan pengembangan produk organik dan jumlah sertifikasi organik	2 kecamatan 10 desa	48.705.000	48.705.000			51.140.250,00	DISTAN
3	03	1	1	23	4	Pengembangan Budidaya Sayur Ramah Lingkungan	Tersedianya sayur aman dikonsumsi	85%	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan</b>	<b>Persentase kelompok binaan yang telah mampu mengolah dan memasarkan hasil ternak secara kontinyu</b>	<b>5%</b>	<b>22.347.000</b>	<b>22.347.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.464.350,00</b>	DISTAN
3	03	1	1	24	1	Latihan Pengolahan Hasil Peternakan	Peningkatan nilai tambah hasil peternakan	6 Kelompok	22.347.000	22.347.000			23.464.350,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Palawija</b>	<b>Angka produksi jagung (ton)</b>	<b>10,072%</b>	<b>280.000.000</b>	<b>-</b>	<b>280.000.000</b>	<b>-</b>	<b>294.000.000,00</b>	DISTAN
3	03	1	1	25	1	Intensifikasi jagung hibrida	Luas intensifikasi jagung hibrida (ha)	850 ha	280.000.000	-	280.000.000		294.000.000,00	DISTAN
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Persentase peningkatan produksi dan populasi ternak</b>	<b>2%</b>	<b>6.795.800.000</b>	<b>2.029.700.000</b>	<b>4.766.100.000</b>	<b>-</b>	<b>7.135.590.000,00</b>	DISTAN
3	03	1	1	26	1	Pengembangan populasi ternak dan sarana-prasarana pendukungnya untuk peningkatan produksi peternakan	ternak sapi/Babi	100 ekor dannn 10 unit kandang%	2.029.700.000	2.029.700.000			2.131.185.000,00	DISTAN
3	03	1	1	26	2	Pengembangan Peternakan Terpadu	Jumlah KTT	50 KTT	4.766.100.000	-	4.766.100.000		5.004.405.000,00	DISTAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	03	1	1	27	15	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan ternak</b>	5%	176.484.000	176.484.000	-	-	185.308.200,00	DISTAN
3	03	1	1	27	1	Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular/zoonosis	Vaksin, obat - obatan dan alat kerja lainnya	5%	176.484.000	176.484.000			185.308.200,00	DISTAN
3	03	1	1	29	16	<b>Program Peningkatan Kemandirian Benih/Bibit</b>	<b>Persentase kebutuhan benih/bibit (padi, Kedele, Hortikultura) yang dapat dipenuhi dari petani Tabanan</b>	20%	734.400.000		734.400.000	-	771.120.000,00	DISTAN
3	03	1	1	29	1	Pengelolaan lahan UPTD PERBENIHAN TPH dan Perkebunan	Peningkatan luas lahan perbanyak benih padi	1,4 ha	575.880.000		575.880.000		604.674.000,00	DISTAN
3	03	1	1	29	2	Pembibitan Tanaman Sereh	Jumlah bibit tanaman sereh yang diserahkan	16.000	158.520.000		158.520.000		166.446.000,00	DISTAN
3	03	1	1	30	17	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)</b>	<b>Persentase Peningkatan Kompetensi PPL</b>	10%	600.000.000		600.000.000	-	630.000.000,00	DISTAN
3	03	1	1	30	1	PENAS KTNA	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Kelompok KTNA Dalam PENAS	60%	600.000.000		600.000.000		630.000.000,00	DISTAN
3	03	1	1	31	18	<b>Program pelestarian dan perlindungan Plasma Nuftah</b>	<b>Jumlah satwa/tanaman langka yang di konservasi</b>	3	80.220.000	80.220.000	-	-	84.231.000,00	DISTAN
3	03	1	1	31	1	Pemurnian dan adaptasi galur-galur mutan padi barak cendana	Jumlah varietas yang terpilih	3 galur	80.220.000	80.220.000			84.231.000,00	DISTAN
3	04					<b>KEHUTANAN</b>								
						<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	100%						
						<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	84%						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%						
	Program rehabilitasi hutan dan lahan	luas lahan potensial kritis diluar kawasan hutan	140						
	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Persentase produksi potensi hasil hutan	15%						
	program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Menurunnya luas perambahan hutan	30 ha						
<b>3 05</b>	<b>PERDAGANGAN</b>								
<b>3 05</b>	<b>DISPERINDAG</b>								
<b>3 05</b>	<b>DISPERINDAG</b>								
<b>3 05</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.016.502.000</b>	<b>1.016.502.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.067.327.100,00</b>	<b>DISPERINDAG</b>
3 05	1 1 1 1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Lancarnya Administrasi perkantoran	100%	1.016.502.000	1.016.502.000		1.067.327.100,00	DISPERINDAG
<b>3 05</b>	<b>1 1 2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>-</b>	<b>125.000.000</b>	<b>131.250.000,00</b>	<b>DISPERINDAG</b>
3 05	1 1 2 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	SKPD	75.000.000		75.000.000	78.750.000,00	DISPERINDAG
3 05	1 1 2 2	Pemeliharaan gedung tempat kerja	tersedianya gedung tempat kerja yang memadai dalam kondisi baik	SKPD	50.000.000		50.000.000	52.500.000,00	DISPERINDAG
<b>3 05</b>	<b>1 1 3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>11.345.400</b>	<b>11.345.400</b>	<b>-</b>	<b>11.912.670,00</b>	<b>DISPERINDAG</b>
3 05	1 1 3 1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan	100%	6.188.400	6.188.400		6.497.820,00	DISPERINDAG
3 05	1 1 3 2	Pendataan Aset	Jumlah dokumen aset yang tersedia	100%	5.157.000	5.157.000		5.414.850,00	DISPERINDAG

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	05	1	1	15		<b>Program Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Jumlah Komoditas Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Strategis yang diawasi</b>	<b>55%</b>	<b>74.490.000</b>	<b>74.490.000</b>	-	-	<b>78.214.500,00</b>	DISPERINDAG
3	05	1	1	15	1	Monitoring Harga, Pengawasan Pupuk dan Mikol	Jumlah data harga Pasar, Pupuk dan mikol yang tersedia	1 Paket	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	15	2	Monitoring Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Strategis	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Strategis terawasi peredarannya	25	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	15	3	Pembinaan dan Pendataan Toko Swalayan dan Pasar Rakyat	Jumlah data toko Swalayan dan pasar Rakyat yang tersedia	1 Paket	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	16		<b>Program Pelayanan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang per tahun UTTP</b>	<b>15000</b>	<b>303.690.000</b>	<b>303.690.000</b>	-	-	<b>318.874.500,00</b>	DISPERINDAG
3	05	1	1	16	1	Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Pangan	Meningkatnya kualitas keamanan produk pangan yang ada di Kab. Tabanan	95 IKM	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	16	2	Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang per tahun	15.000 UTTP	68.760.000	68.760.000			72.198.000,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	16	3	Penyediaan Sarana Operasional K metrologian	Tersedianya Sarana K metrologian	25 Kali	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	16	4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap UTTP dan BDKT	Jumlah alat UTTP yang telah diawasi dan jumlah pelaku usaha yang dibina	15.000 UTTP 225 Pelaku Usaha	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	16	5	Informasi dan Sosialisasi Metrologi Legal	Jumlah Wajib Tera dan Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi tentang metrology legal	6 Kali	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	17		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan</b>	<b>prosentase sarana yang legal dan representatif</b>	<b>50%</b>	<b>6.037.773.000</b>	<b>4.387.773.000</b>	-	<b>1.650.000.000</b>	<b>6.339.661.650,00</b>	DISPERINDAG
3	05	1	1	17	1	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya fasilitas pasar yang nyaman bagi pedagang kaki lima dan asongan	1 Pasar	100.000.000			100.000.000	105.000.000,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	17	2	Revitalisasi Pasar	Tersedianya pasar tradisional dalam kondisi baik	1 Unit	2.250.483.000	2.250.483.000			2.363.007.150,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	17	3	Monitoring Benda-benda	Tersedianya data benda	14 Pasar	50.000.000			50.000.000	52.500.000,00	DISPERINDAG

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						berharga pada Pasar di Kab. Tabanan	berharga yang tertib dan akuntabel							
3	05	1	1	17	4	Penunjang dan Jasa Operasional Pemungutan Retribusi Pasar	Meningkatnya Jasa operasional Dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan	30 pasar	2.137.290.000	2.137.290.000			2.244.154.500,00	DISPERINDAG
3	05	1	1	17	5	Pembangunan sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase Pembangunan Bidang perdagangan	45%	1.500.000.000	-		1.500.000.000	1.575.000.000,00	DISPERINDAG
<b>3</b>	<b>06</b>					<b>ENERGI DAN SUMBERDAYA MINDERAL</b>								
<b>3</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>	<b>Persentase Usaha Pertambangan Yang Dibina</b>	<b>30%</b>	<b>100.000.000</b>	-		<b>100.000.000</b>	<b>105.000.000,00</b>	DMPPTSP
3	06	1	1	1	1	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan galian C			100.000.000	-		100.000.000	105.000.000,00	DMPPTSP
<b>3</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Berlistrik</b>	<b>30%</b>	<b>25.000.000</b>	-		<b>25.000.000</b>	<b>26.250.000,00</b>	DMPPTSP
3	06	1	1	2	1	Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan		30%	25.000.000	-		25.000.000	26.250.000,00	DMPPTSP
<b>3</b>	<b>07</b>					<b>PERINDUSTRIAN</b>								
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>1</b>				<b>DISPERINDAG</b>								
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DISPERINDAG</b>								
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengendalian Mutu Produksi Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM)</b>	<b>65%</b>	<b>689.680.000</b>	<b>664.680.000</b>	-	<b>25.000.000</b>	<b>724.164.000,00</b>	DISPERINDAG
3	07	1	1	16	1	Fasilitasi Pembinaan dan Pendataan IKM serta Penerapan GKM IKM	Jumlah IKM yang Berkembang untuk Penjualan Daya Saing Produk IKM	10	40.110.000	40.110.000			42.115.500,00	DISPERINDAG
3	07	1	1	16	2	Pameran Deskransda	Jumlah Industri Kreatif yang berkembang	37	429.750.000	429.750.000			451.237.500,00	DISPERINDAG
3	07	1	1	16	3	Rumah Kemasan	Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu	65%	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	DISPERINDAG
3	07	1	1	16	4	Fasilitasi Peningkatan Keterampilan Teknis SDM bagi Operator Mesin	Jumlah Operator Mesin Kemasan yang dilatih	3	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	DISPERINDAG

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	07	1	1	16	5	Kemasan Pelatihan Kelompok IKM	Meningkatnya Persentase Kelompok IKM yang mendapat Pelatihan	58%	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	DISPERINDAG
3	07	1	1	16	6	Peningkatan Operasional Mesin Kemasan	Jumlah Produk yang dikemas	10	25.000.000	-	25.000.000		26.250.000,00	DISPERINDAG
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program Perlindungan Hasil Pertanian</b>	<b>Jumlah Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam distribusi dan pemasaran</b>	<b>55%</b>	<b>366.720.000</b>	<b>366.720.000</b>	-	-	<b>385.056.000,00</b>	DISPERINDAG
3	07	1	1	17	1	Peningkatan Kinerja Eksport	Meningkatnya jumlah informasi nilai ekspor	68 M	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	DISPERINDAG
3	07	1	1	17	2	Agro & Food Expo	Meningkatnya jumlah promosi komoditas yang dipublikasikan	5 Event	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	DISPERINDAG
3	07	1	1	17	3	Pasar Murah	Persentase hasil pertanian yang terserap pasar pada kawasan komoditas unggulan	55%	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	DISPERINDAG
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>Jumlah Peningkatan Produksi IKM yang dapat disalurkan</b>	<b>1</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	-	-	<b>367.500.000,00</b>	DISPERINDAG
3	07	1	1	18	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu Produksi Industri Kecil dan Menengah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Gula Semut	1 Paket	350.000.000	350.000.000			367.500.000,00	DISPERINDAG
<b>3</b>	<b>08</b>					<b>TRANSMIGRASI</b>								
<b>3</b>	<b>08</b>	<b>1</b>				<b>DISNAKER</b>								
<b>3</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>DISNAKER</b>								
<b>3</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program transmigrasi regional</b>	<b>Persentase calon transmigran yang berhasil ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi</b>	<b>100%</b>	<b>94.476.240</b>	<b>94.476.240</b>	-	-	<b>99.200.052,00</b>	DISNAKER
3	08	1	1	15	1	Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi	Jumlah calon transmigran (KK) yang akan ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi	5 KK	8.870.040	8.870.040			9.313.542,00	DISNAKER
3	08	1	1	15	2	Identifikasi Lokasi transmigrasi dan KSAD	Jumlah jenis dokumen identifikasi lokasi transmigrasi dan KSAD	1 jenis Dokumen	25.785.000	25.785.000			27.074.250,00	DISNAKER

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
3	08	1	1	15	3	Penempatan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang ditempatkan di lokasi transmigrasi	5 KK	59.821.200	59.821.200			62.812.260,00	DISNAKER
4						<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>								
4	01					<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>								
4	01	3				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
4	01	3	1			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
4	01	3	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>12.033.000.000</b>	<b>12.033.000.000</b>	-	-	<b>12.634.650.000,00</b>	SETDA
4	01	3	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	90%	12.033.000.000	12.033.000.000			12.634.650.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	3	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>2.563.380.000</b>	<b>34.380.000</b>	-	<b>2.529.000.000</b>	<b>2.691.549.000,00</b>	SETDA
4	01	3	1	2	1	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi OPD	86%	250.000.000			250.000.000	262.500.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	3	1	2	2	pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kehumasan	Jumlah sarana kehumasan yang dipelihara	5 jenis barang	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	3	1	2	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	90%	2.279.000.000			2.279.000.000	2.392.950.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	3	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>168.760.000</b>	<b>68.760.000</b>	-	<b>100.000.000</b>	<b>177.198.000,00</b>	SETDA

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	3	1	3	1	Penyusunan Dokumen SAKIP Setda Kab. Tabanan	Tersusunnya Dokumen SAKIP Setda Kab. Tabanan	2 Jenis Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	BAGIAN KEUANGAN
4	01	3	1	3	2	Pendataan Data Aset	Dokumen Data Aset Yang tersedia	2 Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	BAGIAN KEUANGAN
4	01	3	1	3	3	Penyusunan Laporan Keuangan Setda Kab. Tabanan	Terlaksananya Sistem Manajemen dan Pengelolaan keuangan secara terintegrasi	1 Dokumen	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	BAGIAN KEUANGAN
4	01	3	1	3	4	Fasilitasi dan Harmonisasi Penatausahaan Keuangan Setda Kab. Tabanan	Persentase SPP dan SPM yang terfasilitasi	100%	50.000.000	-		50.000.000	52.500.000,00	BAGIAN KEUANGAN
4	01	3	1	3	5	Penyusunan anggaran dan penelitian RKA Bagian Setda	Terwujudnya laporan keuangan Setda yang transparan dan akuntabel	1 data	50.000.000	-		50.000.000	52.500.000,00	BAGIAN KEUANGAN
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Penguatan Akuntabilitas</b>	<b>Nilai LKPPD dan Nilai LKJIP Perangkat daerah di Kab. Tabanan.</b>	<b>Baik/B</b>	<b>379.326.000</b>	<b>379.326.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>398.292.300,00</b>	SETDA
4	01	3	1	15	1	Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kab. Tabanan	1 Jenis Dokumen	68.760.000	68.760.000			72.198.000,00	BAGIAN ORTAL
4	01	3	1	15	2	Pendampingan Penguatan SAKIP	Persentase Perangkat daerah memiliki nilai baik	100%	81.366.000	81.366.000			85.434.300,00	BAGIAN ORTAL
4	01	3	1	15	3	Penyusunan LPPD	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah	2 Dokumen	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	BAGIAN TAPEM
4	01	3	1	15	4	Penyusunan LKPJ Bupati	Jumlah Dokumen Laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati	1 Dokumen	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	BAGIAN TAPEM
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang bersertifikat an Pemkab Tabanan</b>	<b>43</b>	<b>200.550.000</b>	<b>200.550.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.577.500,00</b>	SETDA
4	01	3	1	16	1	Pensertifikatan Tanah Aset Pemkab. Tabanan	Jumlah Aset tanah Pemerintah Daerah yang Berserifikat Atas nama Pemkab Tabanan	30 bidang Tanah	200.550.000	200.550.000			210.577.500,00	BAGIAN TAPEM
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah/Lembaga Lainnya</b>	<b>Jumlah Perjanjian Kerjasama Yang Diimplementasikan Dalam Setahun</b>	<b>20 Mou</b>	<b>34.380.000</b>	<b>34.380.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.099.000,00</b>	SETDA

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	3	1	17	1	Fasilitasi Kerjasama daerah	Terbentuknya kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama	10 Kerjasama	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	BAGIAN TAPEM
4	01	3	1	18		<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang dapat dilaksanakan sesuai target waktu dan tujuan program</b>	<b>20%</b>	<b>272.850.000</b>	<b>257.850.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>286.492.500,00</b>	SETDA
4	01	3	1	18	1	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1 Dokumen	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	BAGIAN PEMBANGUNA N
4	01	3	1	18	2	Optimalisasi Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Masyarakat	Dokumen laporan hasil pengendalian pelaksanaan bantuan masyarakat	0,2	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BAGIAN PEMBANGUNA N
4	01	3	1	18	3	Evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA)	Tercapainya peningkatan sistem evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	1 Dokumen	85.950.000	85.950.000			90.247.500,00	BAGIAN PEMBANGUNA N
4	01	3	1	18	4	Pencatan Proposal Bantuan	Tercatatnya proposal bantuan pada tahun 2020	1 Dokumen	15.000.000		15.000.000		15.750.000,00	BAGIAN PEMBANGUNA N
4	01	3	1	19		<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>Persentase Konflik-Konflik Pertanahan yang dapat diselesaikan.</b>	<b>20%</b>	<b>45.840.000</b>	<b>45.840.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.132.000,00</b>	SETDA
4	01	3	1	19	1	Penyelesaian Masalah pertanahan	Jumlah Permohonan Penyelesaian Pertanahan yang difasilitasi	10 Permohonan	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	BAGIAN TAPEM
4	01	3	1	19	2	Fasilitas Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa	Jumlah Surat Keputusan Tapal Batas Desa di Kab. Tabanan yang tertangani	1 paket	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	BAGIAN TAPEM
4	01	3	1	20		<b>Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi Daerah</b>	<b>Jumlah Kebijakan KDH Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Meningkatnya Pertumbuhannya Ekonomi Daerah</b>	<b>5</b>	<b>194.820.000</b>	<b>194.820.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204.561.000,00</b>	SETDA
4	01	3	1	20	1	Pengendalian Inflasi Daerah	Tersedianya dokumen laporan hasil survey harga pasar	1 Jenis Dokumen	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	BAGIAN EKONOMI
4	01	3	1	20	2	Pendampingan	Laporan pelaksanaan	1 Jenis	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	BAGIAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Perusahaan Daerah Darma Santika	program Perusahaan Daerah Darma Santika	Laporan						EKONOMI
4	01	3	1	20	3	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi	Terkendalinya pasokan BBM dan LPG bersubsidi di seluruh kecamatan	10 Kecamatan	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	BAGIAN EKONOMI
4	01	3	1	20	4	Monitoring KUR	Jumlah UKM yang dibina	30 UKM	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	BAGIAN EKONOMI
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21</b>		<b>Program Penyelenggaraan Hari- hari Besar/ Nasional/ Keagamaan</b>	<b>Jumlah Aktifitas penyelenggaraan hari-hari besar/ nasional/ Keagamaan</b>	<b>61 Keg</b>	<b>7.933.465.000</b>	<b>6.993.465.000</b>	<b>940.000.000</b>	<b>-</b>	<b>8.330.138.250,00</b>	SETDA
4	01	3	1	21	1	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan	10 Harnas	696.195.000	696.195.000			731.004.750,00	BAGIAN TAPEM
4	01	3	1	21	2	Peringatan HUT Kota Tabanan	Terselenggaranya HUT Kota Tabanan	1 kali	500.000.000	-	500.000.000		525.000.000,00	BAGIAN TAPEM
4	01	3	1	21	3	Pecaruan Tawur Kesanga	Terselenggaranya Kegiatan Tawur Kesanga	1 Kegiatan	252.120.000	252.120.000			264.726.000,00	BAGIAN KESRA
4	01	3	1	21	4	Penunjang Upacara Keagamaan	Terlaksananya penunjang upacara keagamaan	350 Paket	5.730.000.000	5.730.000.000			6.016.500.000,00	BAGIAN KESRA
4	01	3	1	21	5	Dharma Santi Perayaan Nyepi	Terselenggaranya Kegiatan Dharma Santi Nyepi	1 Kali	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BAGIAN KESRA
4	01	3	1	21	6	Mebayuh Massal	Jumlah peserta yang terlibat dalam mebayuh massal	500 orang	143.250.000	143.250.000			150.412.500,00	BAGIAN KESRA
4	01	3	1	21	7	Pemantapan tugas-tugas korp musik	Peserta drumband yang mendapat pelatihan	1 Paket	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	BAGIAN TAPEM
4	01	3	1	21	8	Senam Kesegaran Jasmani	jumlah senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan	1 tahun	40.000.000	-	40.000.000		42.000.000,00	BAGIAN KESRA
4	01	3	1	21	9	Lokakarya Banten	Terlaksananya Kegiatan Lokakarya banten	1 Kegiatan	130.000.000	-	130.000.000		136.500.000,00	BAGIAN KESRA
4	01	3	1	21	10	Pengadaan Sarana Keagamaan	Tersediannya sarana upacara berupa genta dan pakaian bagi pemangku	genta 20 bh, pakaian 40 stel	270.000.000	-	270.000.000		283.500.000,00	BAGIAN KESRA
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>22</b>		<b>Program Peningkatan pelayanan Kehumasan</b>	<b>Persentase Penyebarluasan Informasi Kebijakan Kepala Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>3.844.830.000</b>	<b>3.844.830.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.037.071.500,00</b>	SETDA
4	01	3	1	22	1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kab. Tabanan	dokumentasi dan berita yang disiarkan lewat media cetak dan elektronika	1138 berita advetorial dan media masa	2.865.000.000	2.865.000.000			3.008.250.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	3	1	22	2	Pembuatan Kliping Pers, Buku Saku dan DVD Tabanan Selayang Pandang	terbitnya buku kliping pers, buku saku dan penggandaan DVD tabanan selayang pandang	300 Buku kliping perst, 255 buku Saku, 125 DVD selayang pandang	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	3	1	22	3	Pekan Informasi Pembangunan Daerah	pertemuan dengan wartawan	24 kali pertemuan	223.470.000	223.470.000			234.643.500,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	3	1	22	4	Pembuatan Majalah SERASI	terbitnya majalah serasi	12.000 eks	389.640.000	389.640.000			409.122.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	3	1	22	5	Rakor dan Konsultasi Kehumasan dan Keprotokolan	terselenggaranya pertemuan dan konsultasi kehumasan dan keprotokolan	7 kali	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	3	1	22	6	Pendampingan Jurnalistik Kehumasan dan keprotokolan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan jurnalistik Kehumasan dan Keprotokolan	73 orang	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	3	1	22	7	Pemantauan Media Massa	jumlah pantauan media massa di Pemkab Tabanan	1 Paket	206.280.000	206.280.000			216.594.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
									-					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan</b>	<b>Terselenggaranya Upacara/Acara-acara sesuai dengan standar keprotokolan yang berlaku</b>	<b>90%</b>	<b>318.588.000</b>	<b>318.588.000</b>	-	-	<b>334.517.400,00</b>	SETDA
4	01	3	1	23	1	Kegiatan Protokoler Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kab. Tabanan	Jumlah Protokoler yang dilaksanakan, jumlah Plakat Lambang Daerah dan Bingkisan yang dibuat	250 kali, Plakat Lambang Daerah dan Bingkisan 120 buah	158.148.000	158.148.000			166.055.400,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	3	1	23	2	Pengadaan Pakaian Dinas Keprotokolan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	64 stell	160.440.000	160.440.000			168.462.000,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
									-					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>24</b>		<b>Program Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah permasalahan kelembagaan serta tugas dan fungsi yang diselesaikan</b>	<b>20%</b>	<b>411.414.000</b>	<b>411.414.000</b>	-	-	<b>431.984.700,00</b>	SETDA
4	01	3	1	24	1	Pembinaan & Evaluasi Pelayanan Publik	jumlah perangkat daerah yang dibina dievaluasi pelayanan publik	1 Kegiatan	137.520.000	137.520.000			144.396.000,00	BAGIAN ORTAL

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	3	1	24	2	Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan tahunan Roadmap Reformasi Birokrasi	50 buku	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BAGIAN ORTAL
4	01	3	1	24	3	Evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	1 Kegiatan	90.534.000	90.534.000			95.060.700,00	BAGIAN ORTAL
4	01	3	1	24	4	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi yang mengikuti kompetisi Pelayanan Publik (SINOVIK)	21 PD	68.760.000	68.760.000			72.198.000,00	BAGIAN ORTAL
4	01	3	1	24	5	Penyusunan Laporan Pencapaian SPM	Jumlah dokumen laporan pencapaian SPM	1 Jenis Dokumen	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BAGIAN TAPEM
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>25</b>		<b>Program Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan</b>	<b>250 Keg</b>	<b>1.304.280.000</b>	<b>779.280.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>1.369.494.000,00</b>	SETDA
4	01	3	1	25	1	Layanan e-procurement	tersusunnya dokumen pemilihan barang/jasa	110 Dokumen	573.000.000	573.000.000			601.650.000,00	BAGIAN PENGADAAN
4	01	3	1	25	2	Kajian Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tersusunnya Perbup Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai acuan oleh OPD dalam Proses Pengadaan	1 Perbup	300.000.000	-	300.000.000		315.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN
4	01	3	1	25	3	Peningkatan SDM Aparatur Pengadaan Barang	Jumlah SDM yang mengikuti bintek sertifikasi pengadaan barang/jasa	20 Orang	225.000.000	-		225.000.000	236.250.000,00	BAGIAN PENGADAAN
4	01	3	1	25	4	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah OPD yang telah Mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	40 OPD	206.280.000	206.280.000			216.594.000,00	BAGIAN PENGADAAN
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>26</b>		<b>Program Penataan dan Penyusunan Regulasi Daerah</b>	<b>Persentase penetapan regulasi daerah yang tepat waktu</b>	<b>75%</b>	<b>581.320.000</b>	<b>481.320.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>610.386.000,00</b>	SETDA
4	01	3	1	26	1	Harmonisasi Penyusunan, Pembahasan Ranperda/Ranperbup dan Produk Hukum Lainnya	Rancangan Peraturan daerah/ peraturan Bupati dan Produk hukum lainnya	20 Ranperda, 50 Ranperbup dan 500 Produk hukum lainnya	217.740.000	217.740.000			228.627.000,00	BAGIAN HUKUM & HAM
4	01	3	1	26	2	Harmonisasi Peraturan	Perda yang disebarluaskan	20 Perda, 50	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	BAGIAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Perundang-Undangan dan Produk Hukum		Perbub yg disebarluaskan						HUKUM & HAM
4	01	3	1	26	3	Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kadarkum	Jumlah Terbinanya Desa Sadar Hukum	2 Desa	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	BAGIAN HUKUM & HAM
4	01	3	1	26	4	Ranham / Kabupaten Peduli hukum	Jumlah OPD yang melaksanakan Aksi HAM Kabupaten	10 OPD	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	BAGIAN HUKUM & HAM
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>27</b>		<b>Program Fasilitas Masalah Hukum Daerah</b>	<b>Persentase Kasus yang difasilitasi Hingga Mempunyai Ketetapan Hukum</b>	<b>20%</b>	<b>148.980.000</b>	<b>148.980.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.429.000,00</b>	SETDA
4	01	3	1	27	1	Penanganan Kasus Hukum Pemerintah Kab. Tabanan	Jumlah Perkara yang ditangani	1 perkara	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	BAGIAN HUKUM & HAM
4	01	3	1	27	2	Penyelesaian Kasus Hukum	Jumlah Kasus yang ditangani	2 Kasus	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BAGIAN HUKUM & HAM
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4</b>				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>38.740.000.000</b>	<b>38.740.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.677.000.000,00</b>	SETWAN
4	01	4	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	38.740.000.000	38.740.000.000			40.677.000.000,00	SETWAN
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>559.562.000</b>	<b>559.562.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>587.540.100,00</b>	SETWAN
4	01	4	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	100 Unit	137.834.000	137.834.000			144.725.700,00	SETWAN
4	01	4	1	2	2	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor tempat kerja dan tempat tinggal	6 gedung	421.728.000	421.728.000			442.814.400,00	SETWAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	4	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>12.033.000</b>	<b>12.033.000</b>	-	-	<b>12.634.650,00</b>	SETWAN
4	01	4	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	6.876.000	6.876.000			7.219.800,00	SETWAN
4	01	4	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	SETWAN
4	01	4	1	15		<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>Persentase prolegda bidang prioritas daerah menjadi perda</b>	<b>90%</b>	<b>5.028.957.375</b>	<b>5.028.957.375</b>	-	-	<b>5.280.405.243,75</b>	SETWAN
4	01	4	1	15	1	Penyusunan Risalah DPRD	Tersusunnya Risalah DPRD	600 buku	132.029.500	132.029.500	-		138.630.975,00	SETWAN
4	01	4	1	15	2	Reses DPRD	Terlaksananya Reses DPRD	720 lokasi	4.136.443.450	4.136.443.450	-		4.343.265.622,50	SETWAN
4	01	4	1	15	3	Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD	Jumlah produk hukum yang dibahas DPRD	20 ranperda	551.015.100	551.015.100	-		578.565.855,00	SETWAN
4	01	4	1	15	4	Pembahasan RAPBD-P, APBD-P Tahun 2019 dan RAPBD 2020	Jumlah rancangan APBD dan APBD-P yang dibahas DPRD	2 perda dan 1 perda perubahan	175.326.550	175.326.550			184.092.877,50	SETWAN
4	01	4	1	15	5	Pengawasan Perda-Perda	Pengawasan Pelaksanaan Perda	20 perda	34.142.775	34.142.775			35.849.913,75	SETWAN
4	01	4	1	16		<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>	<b>Jumlah pemberitaan melalui media cetak dan elektronik</b>	<b>900 exp</b>	<b>1.004.629.450</b>	<b>1.004.629.450</b>	-	-	<b>1.054.860.922,50</b>	SETWAN
4	01	4	1	16	1	Buletin DPRD	Jumlah buletin DPRD yang diterbitkan	900 exp	877.423.450	877.423.450	-		921.294.622,50	SETWAN
4	01	4	1	16	2	Pemeliharaan Website DPRD	Update informasi dan komunikasi website	1 Tahun	127.206.000	127.206.000	-		133.566.300,00	SETWAN
4	01	5				<b>KECAMATAN KEDIRI</b>								
4	01	5	1			<b>KECAMATAN KEDIRI</b>								
4	01	5	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>418.290.000</b>	<b>418.290.000</b>	-	-	<b>439.204.500,00</b>	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	418.290.000	418.290.000			439.204.500,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	2		<b>Program Peningkatan</b>	<b>Persentase sarana dan</b>	<b>90%</b>	<b>15.000.000</b>		-	<b>15.000.000</b>	<b>15.750.000,00</b>	CAMAT KEDIRI

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						<b>Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>							
4	01	5	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	15.000.000	-	15.000.000		15.750.000,00	CAMAT KEDIRI
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>5.730.000</b>	<b>5.730.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.016.500,00</b>	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	3.438.000	3.438.000			3.609.900,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	2.292.000	2.292.000			2.406.600,00	CAMAT KEDIRI
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>123.905.200</b>	<b>121.705.200</b>	<b>-</b>	<b>2.200.000</b>	<b>130.100.460,00</b>	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	1	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	100%	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Yang terlayani	100%	2.200.000	-	2.200.000		2.310.000,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	3	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah Yang Mendapat Pembinaan UKS	2 sekolah	2.292.000	2.292.000			2.406.600,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	4	Pelaksanaan Musrenbang	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 dok	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan PKK	3 desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	6	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa Yang Dimonitoring	15 desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	7	Peringatan Hari-hari nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional di Kec.Kediri	1 kali	27.733.200	27.733.200			29.119.860,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	8	Pembinaan / Lomba-lomba	Jumlah Pembinaa/Lomba-lomba yang dilaksanakan	5 paket	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	9	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah Laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 dok	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	15	10	Evaluasi APBDes dan Perdes Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya yang terevaluasi	15 desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KEDIRI

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	5	1	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12 jenis</b>	<b>200.000.000</b>	-	-	<b>200.000.000</b>	<b>210.000.000,00</b>	CAMAT KEDIRI
4	01	5	1	16	1	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 Unit	200.000.000	-	-	200.000.000	210.000.000,00	CAMAT KEDIRI
4	01	6				<b>KECAMATAN TABANAN</b>								
4	01	6	1			<b>KECAMATAN TABANAN</b>								
4	01	6	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>378.180.000</b>	<b>378.180.000</b>	-	-	<b>397.089.000,00</b>	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	378.180.000	378.180.000			397.089.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>20.000.000</b>	-	<b>20.000.000</b>	-	<b>21.000.000,00</b>	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	88%	20.000.000	-	20.000.000		21.000.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>5.730.000</b>	<b>5.730.000</b>	-	-	<b>6.016.500,00</b>	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	3.438.000	3.438.000			3.609.900,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	2.292.000	2.292.000			2.406.600,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>166.374.000</b>	<b>136.374.000</b>	-	<b>30.000.000</b>	<b>174.692.700,00</b>	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	1	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani	100%	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	5.000.000	-		5.000.000	5.250.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	3	Pembinaan dan Lomba	Jumlah Sekolah yang	2 Sekolah	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						UKS	mendapat pembinaan UKS							TABANAN
4	01	6	1	15	4	Pelaksanaan Musrenbang	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 dok	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan PKK	2 desa	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	6	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	12 Desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	7	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Kali	15.000.000	-		15.000.000	15.750.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	8	Peringatan Hari-hari nasional	Jumlah Peringatan Hari- Hari Nasional	1 kali	33.234.000	33.234.000			34.895.700,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	9	Pembinaan / Lomba- lomba	Jumlah Pembinaan /Lomba-Lomba yang dilaksanakan	5 paket	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	10	Pemberian penghargaan kepada desa yang laporan keuangannya baik	meningkatnya semangat desa dalam penyusunan laporan keuangan	Desa	10.000.000	-		10.000.000	10.500.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	11	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah Laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 laporan	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	15	12	Evaluasi APBDes dan Perdes Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Liannya yang terevaluasi	12 Desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT TABANAN
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>257.300.000</b>	<b>57.300.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>210.000.000,00</b>	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	16	1	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)	Tersedianya data kecamatan dan laporan desa secara elektronik	1 tahun	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	CAMAT TABANAN
4	01	6	1	16	2	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 Unit	200.000.000	-		200.000.000	210.000.000,00	CAMAT TABANAN
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>7</b>				<b>KECAMATAN MARGA</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>7</b>	<b>1</b>			<b>KECAMATAN MARGA</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>263.580.000</b>	<b>263.580.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>276.759.000,00</b>	CAMAT MARGA
4	01	7	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	263.580.000	263.580.000			276.759.000,00	CAMAT MARGA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
4	01	7	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>20.000.000</b>	-	-	<b>20.000.000</b>	<b>21.000.000,00</b>	CAMAT MARGA
4	01	7	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Marga	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	20.000.000	-	-	20.000.000	21.000.000,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.314.000</b>	<b>10.314.000</b>	-	-	<b>10.829.700,00</b>	CAMAT MARGA
4	01	7	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000	-	-	6.016.500,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	4.584.000	4.584.000	-	-	4.813.200,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>121.162.000</b>	<b>111.162.000</b>	-	<b>10.000.000</b>	<b>127.220.100,00</b>	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	1	Pembinaan UKS dan Lomba UKS	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 sekolah	5.730.000	5.730.000	-	-	6.016.500,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	16 desa	11.460.000	11.460.000	-	-	12.033.000,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	3	Peringatan Hari-Hari Nasional	Jumlah peringatan hari-hari nasional	1 kali	22.920.000	22.920.000	-	-	24.066.000,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	4	Pembinaan /Lomba-Lomba	Jumlah pembinaan / Lomba-Lomba yang dilaksanakan	3 paket	11.460.000	11.460.000	-	-	12.033.000,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan PKK	2 desa	11.460.000	11.460.000	-	-	12.033.000,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani	100%	11.460.000	11.460.000	-	-	12.033.000,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	7	Monev Gerbang serasi dan Dana Hibah	Jumlah Laporan monev gerbang sersai dan dana hibah	1 Lap	11.460.000	11.460.000	-	-	12.033.000,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	8	Evaluasi APBDes dan Perdes Lainnya	Jumlah desa yang APBDes dan peraturan desa lainnya yang terevaluasi	16 Desa	11.460.000	11.460.000	-	-	12.033.000,00	CAMAT MARGA
4	01	7	1	15	9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin usaha mikro kecil IUMK	Persentase pelayanan ijin IUMK yang terlayani	100%	10.000.000	-	-	10.000.000	10.500.000,00	CAMAT MARGA

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	7	1	15	10	Pelaksanaan Musrenbang	Dokumen perencanaan pembangunan kecamatan	1 Dok	13.752.000	13.752.000			14.439.600,00	CAMAT MARGA
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12</b>	<b>200.000.000</b>	-	-	<b>200.000.000</b>	<b>210.000.000,00</b>	CAMAT MARGA
4	01	7	1	16	1	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 Unit	200.000.000	-		200.000.000	210.000.000,00	CAMAT MARGA
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>8</b>				<b>KECAMATAN BATURITI</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>8</b>	<b>1</b>			<b>KECAMATAN BATURITI</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>436.626.000</b>	<b>436.626.000</b>	-	-	<b>458.457.300,00</b>	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	436.626.000	436.626.000			458.457.300,00	CAMAT BATURITI
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>1.750.000.000</b>	-	-	<b>1.750.000.000</b>	<b>157.500.000,00</b>	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	2	1	Pembangunan Tembok Penyengker Kantor Camat Baturiti	Terbangunnya Tembok Penyengker Kantor Camat Baturiti	100%	200.000.000	-		200.000.000		CAMAT BATURITI
4	01	8	1	2	2	Tembok Pembatas Kantor dengan Mes Kantor Camat Baturiti	Terbangunnya Tembok Pembatas Kantor dengan Mes Kantor Camat Baturiti	100%	200.000.000	-		200.000.000		CAMAT BATURITI
4	01	8	1	2	3	Pembuatan Patung Maskot Kecamatan (Patung Dewi Danu)	Terbangunnya Patung Maskot Kecamatan (Patung Dewi Danu)	100%	700.000.000	-		700.000.000		CAMAT BATURITI
4	01	8	1	2	4	Penataan Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti	Tertatanya Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti	100%	300.000.000	-		300.000.000		CAMAT BATURITI
4	01	8	1	2	5	Penataan Ruang Pelayanan Umum	Tertatanya Ruang Pelayanan Umum	100%	200.000.000	-		200.000.000		CAMAT BATURITI
4	01	8	1	2	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Baturiti	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	150.000.000	-		150.000.000	157.500.000,00	CAMAT BATURITI
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>5.730.000</b>	<b>5.730.000</b>	-	-	<b>6.016.500,00</b>	CAMAT BATURITI

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						<b>Kinerja dan Keuangan</b>								
4	01	8	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	3.438.000	3.438.000			3.609.900,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	2.292.000	2.292.000			2.406.600,00	CAMAT BATURITI
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>108.556.000</b>	<b>98.556.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>113.983.800,00</b>	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	1	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani	100%	3.438.000	3.438.000			3.609.900,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	10.000.000	-		10.000.000	10.500.000,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	3	Pembinaan dan Lomba UKS	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 Sekolah	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	4	Pelaksanaan Musrenbang	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dok	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan PKK	2 Desa	6.876.000	6.876.000			7.219.800,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	6	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	12 Desa	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	7	Peringatan Hari-hari nasional	Jumlah Peringatan Hari- Hari Nasional	1 Kali	51.570.000	51.570.000			54.148.500,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	8	Pembinaan / Lomba- lomba	Jumlah Pembinaan /Lomba-Lomba yang dilaksanakan	5 Paket	6.876.000	6.876.000			7.219.800,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	9	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah Laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 Laporan	3.438.000	3.438.000			3.609.900,00	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	15	10	Evaluasi APBDes dan Perdes Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	12 Desa	3.438.000	3.438.000			3.609.900,00	CAMAT BATURITI
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12</b>	<b>22.920.000</b>	<b>22.920.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.066.000,00</b>	CAMAT BATURITI
4	01	8	1	16	1	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 unit	22.920.000	22.920.000			24.066.000,00	Camat Baturiti
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>9</b>				<b>KECAMATAN PENEHEL</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>9</b>	<b>1</b>			<b>KECAMATAN PENEHEL</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan</b>	<b>Persentase administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>424.020.000</b>	<b>424.020.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>445.221.000,00</b>	CAMAT

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						<b>Administrasi Perkantoran</b>	<b>perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>							PENEBEL
4	01	9	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	424.020.000	424.020.000			445.221.000,00	CAMAT PENEBEL
										-				
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>20.000.000</b>	-	<b>20.000.000</b>	-	<b>21.000.000,00</b>	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	20.000.000	-	20.000.000		21.000.000,00	CAMAT PENEBEL
										-				
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.314.000</b>	<b>10.314.000</b>	-	-	<b>10.829.700,00</b>	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT PENEBEL
										-				
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>85.950.000</b>	<b>80.220.000</b>	-	<b>5.730.000</b>	<b>90.247.500,00</b>	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	15	1	Pembinaan dan Lomba UKS	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 Sekolah	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	15	2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	18 Desa	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	15	3	Peringatan Hari-Hari Nasional	Jumlah Peringatan Hari- hari Nasional	1 Kali	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	15	4	Pembinaan/Lomba-Lomba	Jumlah pembinaan/Lomba- lomba yang dilaksanakan	5 Paket	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	3 Desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	15	6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	100%	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT PENEBEL
4	01	9	1	15	7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 Laporan	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT PENEBEL

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	9	1	15	8	Evaluasi APBDes dan Perdes Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya terevaluasi	18 Desa	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT PENEABEL
4	01	9	1	15	9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	5.730.000	-		5.730.000	6.016.500,00	CAMAT PENEABEL
4	01	9	1	15	10	Pelaksanaan Musrenbang	Dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT PENEABEL
4	01	9	1	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>200.000.000</b>	-	-	<b>200.000.000</b>	<b>210.000.000,00</b>	CAMAT PENEABEL
4	01	9	1	16	1	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 Unit	200.000.000	-		200.000.000	210.000.000,00	CAMAT PENEABEL
4	01	10				<b>KECAMATAN KERAMBITAN</b>								
4	01	10	1			<b>KECAMATAN KERAMBITAN</b>								
4	01	10	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>412.560.000</b>	<b>412.560.000</b>	-	-	<b>433.188.000,00</b>	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	412.560.000	412.560.000			433.188.000,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>15.000.000</b>	-	-	<b>15.000.000</b>	<b>15.750.000,00</b>	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	2	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Persentase Gedung Kantor dalam kondisi baik	90%	15.000.000	-		15.000.000	15.750.000,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.314.000</b>	<b>10.314.000</b>	-	-	<b>10.829.700,00</b>	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT KERAMBITAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
4	01	10	1	15		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>141.476.000</b>	<b>121.476.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>148.549.800,00</b>	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	1	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 Sekolah	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	15 Desa	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	3	Peringatan Hari-hari Nasional	Jumlah Peringatan Hari- hari Nasional	1 Kali	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	4	Pembinaan/Lomba-lomba	Jumlah Pembinaan / Lomba-lomba yang dilaksanakan	3 Paket	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	3 Desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani	100%	15.471.000	15.471.000			16.244.550,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	1 Laporan	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya	Jumlah Desa yang APBDes Dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	15 Desa	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	20.000.000			20.000.000	21.000.000,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	15	11	Parade Seni dan Budaya Kecamatan	Jumlah Parade Seni dan Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan	1 Kali	37.245.000	37.245.000			39.107.250,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12</b>	<b>401.123.000</b>	<b>201.123.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>421.179.150,00</b>	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	16	1	Taman SERASI	Terlaksananya Pelayanan Publik Terintegrasi	1 tahun	201.123.000	201.123.000			211.179.150,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	10	1	16	2	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 Unit	200.000.000			200.000.000	210.000.000,00	CAMAT KERAMBITAN
4	01	11				<b>KECAMATAN SELEMADEG TIMUR</b>								
4	01	11	1			<b>KECAMATAN</b>								

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						<b>SELEMADEG TIMUR</b>								
4	01	11	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>347.647.250</b>	<b>347.647.250</b>	-	-	<b>365.029.612,50</b>	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	347.647.250	347.647.250			365.029.612,50	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>20.000.000</b>	-	<b>20.000.000</b>	-	<b>42.000.000,00</b>	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	20.000.000	-	20.000.000		21.000.000,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	2	2	Penataan Halaman Kantor Camat Selemadeg Timur	Porsentase Halaman Kantor Camat yang ditata	90%	20.000.000	-	20.000.000		21.000.000,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>9.168.000</b>	<b>9.168.000</b>	-	-	<b>9.626.400,00</b>	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>82.928.000</b>	<b>77.928.000</b>	-	<b>5.000.000</b>	<b>87.074.400,00</b>	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	1	Pembinaan UKS	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 sekolah	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	10 Desa	12.606.000	12.606.000			13.236.300,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	3	Peringatan Hari-Hari Nasional	Jumlah peringatan Hari-hari Nasional	1 kali	19.482.000	19.482.000			20.456.100,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	11	1	15	4	Pembinaan/Lomba-Lomba	Jumlah pembinaan/lomba-lomba yang dilaksanakan	5 paket	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	jumlah desa yang mendapat pembinaan PKK	3 desa	9.168.000	9.168.000			9.626.400,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	100%	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 laporan	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya yang terevaluasi	10 Desa	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	5.000.000			5.000.000	5.250.000,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	15	10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>210.000.000,00</b>	CAMAT SELEMADEG TIMUR
4	01	11	1	16	1	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 unit	200.000.000			200.000.000	210.000.000,00	CAMAT SELEMADEG TIMUR
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>12</b>				<b>KECAMATAN SELEMADEG</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>1</b>			<b>KECAMATAN SELEMADEG</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>328.902.000</b>	<b>328.902.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345.347.100,00</b>	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	328.902.000	328.902.000			345.347.100,00	CAMAT SELEMADEG
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang</b>	<b>90%</b>	<b>57.300.000</b>	<b>57.300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.165.000,00</b>	CAMAT SELEMADEG

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							<b>mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>							
4	01	12	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	CAMAT SELEMADEG
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>4.584.000</b>	<b>4.584.000</b>	-	-	<b>4.813.200,00</b>	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	2.292.000	2.292.000			2.406.600,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	2.292.000	2.292.000			2.406.600,00	CAMAT SELEMADEG
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>88.760.000</b>	<b>68.760.000</b>	-	<b>20.000.000</b>	<b>93.198.000,00</b>	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	1	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 Sekolah	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	10 Desa	2.292.000	2.292.000			2.406.600,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	3	Peringatan Hari-hari Nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional	1 Kali	14.898.000	14.898.000			15.642.900,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	4	Pembinaan/Lomba-lomba	Jumlah Pembinaan / Lomba-lomba yang dilaksanakan	5 Paket	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	2 Desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani	100%	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 Laporan	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya	Jumlah Desa yang APBDes Dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	10 Desa	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	5.000.000			5.000.000	5.250.000,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dok	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	15	11	Parade Seni dan Budaya	Jumlah Parade Seni dan	1 Tahun	15.000.000			15.000.000	15.750.000,00	CAMAT

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Kecamatan	Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan						SELEMADEG	
4	01	12	1	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>200.000.000</b>	-	-	<b>200.000.000</b>	<b>210.000.000,00</b>	CAMAT SELEMADEG
4	01	12	1	16	1	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 Unit	200.000.000	-		200.000.000	210.000.000,00	CAMAT SELEMADEG
4	01	13				<b>KECAMATAN SELEMADEG BARAT</b>								
4	01	13	1			<b>KECAMATAN SELEMADEG BARAT</b>								
4	01	13	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>241.806.000</b>	<b>241.806.000</b>	-	-	<b>253.896.300,00</b>	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	241.806.000	241.806.000			253.896.300,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>20.000.000</b>	-	<b>20.000.000</b>	-	<b>21.000.000,00</b>	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Persentase sapras dalam kondisi baik	90%	20.000.000	-	20.000.000		21.000.000,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	2	2	Pembangunan Penyengker Kantor	Terwujudnya Penyengker Kantor	1 paket	250.000.000					CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	2	3	Pembuatan pintu gerbang	Terwujudnya pintu gerbang	1 paket	50.000.000					CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	2	4	Rehab pelinggih dan penyengker pelinggih kantor Camat Selemadeg Barat	Terpeliharanya bangunan pelinggih dan penyengker pelinggih	1 paket	250.000.000					CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	2	5	Pembuatan garase	Terbangunnya garase	1 paket	50.000.000					CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	2	6	Rehab gedung kantor	Terpeliharanya bangunan	1 paket	150.000.000					CAMAT

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Camat Selemadeg Barat	gedung kantor Camat Selemadeg Barat							SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>5.730.000</b>	<b>5.730.000</b>	-	-	<b>6.016.500,00</b>	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	3.438.000	3.438.000			3.609.900,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	2.292.000	2.292.000			2.406.600,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>93.658.000</b>	<b>83.658.000</b>	-	<b>10.000.000</b>	<b>98.340.900,00</b>	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	1	Pembinaan dan lomba UKS	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 Sekolah	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	11 Desa	6.876.000	6.876.000			7.219.800,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	3	Peringatan Hari-hari Nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari besar Nasional	1 kali	20.628.000	20.628.000			21.659.400,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	4	Pembinaan/Lomba-lomba	Jumlah Pembinaan / Lomba-lomba yang dilaksanakan	3 Paket	16.617.000	16.617.000			17.447.850,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	2 Desa	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani	100%	9.168.000	9.168.000			9.626.400,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 Laporan	6.876.000	6.876.000			7.219.800,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya	Jumlah Desa yang APBDes Dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	11 Desa	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	10.000.000	-		10.000.000	10.500.000,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	15	10	Pelaksanaan Musrenbang	Dokumen Perencanaan	1 Dok	8.595.000	8.595.000			9.024.750,00	CAMAT

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Kecamatan	Pembangunan Kecamatan							SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12</b>	<b>34.380.000</b>	<b>34.380.000</b>	-	-	<b>36.099.000,00</b>	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	13	1	16	1	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 unit	34.380.000	34.380.000			36.099.000,00	CAMAT SELEMADEG BARAT
4	01	14				<b>KECAMATAN PUPUAN</b>								
4	01	14	1			<b>KECAMATAN PUPUAN</b>								
4	01	14	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>401.100.000</b>	<b>401.100.000</b>	-	-	<b>421.155.000,00</b>	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	401.100.000	401.100.000			421.155.000,00	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	-	<b>21.000.000,00</b>	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	20.000.000		20.000.000		21.000.000,00	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.314.000</b>	<b>10.314.000</b>	-	-	<b>10.829.700,00</b>	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15		<b>Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik</b>	<b>100%</b>	<b>124.600.000</b>	<b>114.600.000</b>	-	<b>10.000.000</b>	<b>130.830.000,00</b>	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	1	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 Sekolah	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang	14 Desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00	CAMAT

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
							dimonitoring							PUPUAN	
4	01	14	1	15	3	Peringatan Hari-hari Nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional	1 Kali	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	4	Pembinaan/Lomba-lomba	Jumlah Pembinaan / Lomba-lomba yang dilaksanakan	5 Paket	17.190.000	17.190.000			18.049.500,00		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	5	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	3 Desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani	100%	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 Laporan	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya	Jumlah Desa yang APBDes Dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	14 Desa	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	10.000.000	-	10.000.000		10.500.000,00		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	15	10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dok	11.460.000	11.460.000			12.033.000,00		CAMAT PUPUAN
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>228.650.000</b>	<b>28.650.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>240.082.500,00</b>		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	16	1	Pelayanan Tanggap bencana	Persentase bencana yang mendapat tanggapan	100%	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00		CAMAT PUPUAN
4	01	14	1	16	2	Mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik yang Transparan	1 Unit	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00		CAMAT PUPUAN
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>				<b>BAKESBANGPOL</b>									
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>	<b>1</b>			<b>BAKESBANGPOL</b>									
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>653.220.000</b>	<b>653.220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>685.881.000,00</b>		BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	653.220.000	653.220.000			685.881.000,00		BADAN KESBANGPOL
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan</b>	<b>90%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>	<b>157.500.000,00</b>		BADAN KESBANGPOL

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							mendukung tugas dan fungsi PD							
4	01	15	1	2	1	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kantor	5 unit computer, 6 unit printer dan 1 buah faximile, 10 meja, 10 kursi	150.000.000	-		150.000.000	157.500.000,00	BADAN KESBANGPOL
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>16.617.000</b>	<b>16.617.000</b>		<b>-</b>	<b>17.447.850,00</b>	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 jenis dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 jenis dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	3	3	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah	Persentase kesesuaian pemanfaatan dana hibah	100%	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	BADAN KESBANGPOL
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang memperoleh Diklat terlatih</b>	<b>100%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>168.000.000,00</b>	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	4	1	Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Komunikasi Intelijen Daerah	Peningkatan kapasitas dan jaringan komunikasi intelijen Daerah	50 Orang	60.000.000	-		60.000.000	63.000.000,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	4	2	Bimtek orientasi lapangan manajemen pengelolaan potensi Konflik	Jumlah Orang di berikan Bimtek	1 Lokasi	100.000.000	-	100.000.000		105.000.000,00	BADAN KESBANGPOL
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase terkendalnya potensi konflik diwilayah Kab. Tabanan</b>	<b>100%</b>	<b>1.877.703.000</b>	<b>1.690.350.000</b>	<b>97.353.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>1.971.588.150,00</b>	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	15	1	Pengawasan Orang Asing	Presentase terjaganya situasi keamanan daerah yang kondusif dan terkendali	100%	97.353.000	-	97.353.000		102.220.650,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	15	2	Tim Kewaspadaan Dini	Presentase terjaganya situasi keamanan daerah yang kondusif dan	100%	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	BADAN KESBANGPOL

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
							terkendali							
4	01	15	1	15	3	Pemantauan dan pengendalian pengamanan daerah	terkendalnya keamanan daerah	1 tahun	1.461.150.000	1.461.150.000			1.534.207.500,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	15	4	Bina Solidaritas Kerukunan Antar Tokoh Lintas Agama/Penganut Kepercayaan dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Tokoh Agama/Penganut Kepercayaan terbina dalam mengelola potensi konflik adat/ sosial	225 orang	90.000.000	-		90.000.000	94.500.000,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	16		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan wasbang</b>	<b>110 orang</b>	<b>51.570.000</b>	<b>51.570.000</b>	-	-	<b>54.148.500,00</b>	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	16	1	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Bimtek Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah Ormas, LSM dan Karang Taruna yang terpapar Nilai-nilai Wasbang dan Bela Negara	220 orang	51.570.000	51.570.000		-	54.148.500,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	17		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu</b>	<b>85%</b>	<b>706.680.000</b>	<b>91.680.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>415.000.000</b>	<b>742.014.000,00</b>	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	17	1	Verifikasi dan Bina Tertib administrasi Bantuan Parpol	jumlah parpol yang tertib mempertanggungjawabkan bantuan keuangan	6 Parpol	30.000.000	-		30.000.000	31.500.000,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	17	2	Dialog Pembauran Kebangsaan	Jumlah Siswa SMA yang mendapat Bimtek pemantapan nilai-nilai Wasbang	700 orang	215.000.000	-		215.000.000	225.750.000,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	17	3	Pembinaan Ormas/LSM	terbinanya ormas/LSM	115 Ormas/LSM	70.000.000	-		70.000.000	73.500.000,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	17	4	Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah kecamatan yang terpantau terkendali dan terkoordinir	10 Kecamatan	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	17	5	Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	100 orang	200.000.000	-	200.000.000		210.000.000,00	BADAN KESBANGPOL
4	01	15	1	17	6	Dialog Politik	jumlah Perwakilan Tomas/Todat, Unsur Birokrasi, Tokoh politik Pengusaha dan lain-lain yang terlibat Dialog Politik	50 Orang	34.380.000	34.380.000		-	36.099.000,00	BADAN KESBANGPOL

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	01	15	1	17	7	Pembentukan Aliansi ormas /LSM di Kab. Tabanan	terbentuknya Aliansi Ormas /LSM di Kab. Tabanan	1 unit	100.000.000	-	-	100.000.000	105.000.000,00	BADAN KESBANGPOL
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>				<b>BPBD</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>1</b>			<b>BPBD</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.678.085.700</b>	<b>1.678.085.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.761.989.985,00</b>	BPBD
4	01	16	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	1.678.085.700	1.678.085.700			1.761.989.985,00	BPBD
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>45.840.000</b>	<b>45.840.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.132.000,00</b>	BPBD
4	01	16	1	2	1	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	88%	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	BPBD
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.314.000</b>	<b>10.314.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.829.700,00</b>	BPBD
4	01	16	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	BPBD
4	01	16	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	1 Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	BPBD
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah Aparatur dan relawan yang memperoleh bintek/pelatihan</b>	<b>55 Orang</b>	<b>80.220.000</b>	<b>80.220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.231.000,00</b>	BPBD
4	01	16	1	4	1	Pelatihan Tanggap Bencana	Jumlah personil BPBD dan relawan yang mendapat Pelatihan Penanganan Bencana	55 Orang	80.220.000	80.220.000			84.231.000,00	BPBD
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Pencegahan dan Kesiap siagaan</b>	<b>Menurunnya Indeks Resiko Bencana</b>	<b>154,40</b>	<b>731.795.000</b>	<b>237.795.000</b>	<b>-</b>	<b>494.000.000</b>	<b>768.384.750,00</b>	BPBD
4	01	16	1	15	1	Peningkatan Pemahaman	Persentase Masyarakat yang	10%	42.975.000	42.975.000			45.123.750,00	BPBD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH					
		INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III							
	kebencanaan di Kab. Tabanan	mengetahui tentang kebencanaan												
4	01	16	1	15	2	Reviu Rencana Penanggulangan Bencana (PRB)	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 Dok	200.000.000	-	200.000.000	210.000.000,00	BPBD	
4	01	16	1	15	3	Dokumen Rencana Kontijensi Per Ancaman	Dokumen Rencana Kontijensi Per ancaman	1 dok	94.000.000	-	94.000.000	98.700.000,00	BPBD	
4	01	16	1	15	4	Gelar Kesiapsiagaan dan Simulasi Bencana di Kab. Tabanan	Jumlah Gladi ruang dan Lapang Penanggulangan Bencana	1 kali	80.220.000	80.220.000		84.231.000,00	BPBD	
4	01	16	1	15	5	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan Bencana	1 Desa	57.300.000	57.300.000		60.165.000,00	BPBD	
4	01	16	1	15	6	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah Sekolah yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Sekolah	57.300.000	57.300.000		60.165.000,00	BPBD	
4	01	16	1	15	7	Pemberdayaan Tim Koordinasi penanggulangan Bencana Kab. Tabanan	persentase Kegiatan yang dilaksanakan tim Penanggulangan bencana Kab. Tabanan	100%	104.000.000	-	104.000.000	109.200.000,00	BPBD	
4	01	16	1	15	8	Pengadaan/Pemasangan Tanda rambu Bahaya di Kab. Tabanan	Jumlah Tanda Rambu Bahaya yang tersedia	10 rambu	96.000.000	-	96.000.000	100.800.000,00	BPBD	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	<b>Persentase Korban yang Mampu Tertangani Sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>388.409.250</b>	<b>328.409.250</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000</b>	<b>407.829.712,50</b>	BPBD
4	01	16	1	16	1	Penunjang TRC	Persentase Jumlah Kejadian/korban yang ditangani	100%	74.490.000	74.490.000		78.214.500,00	BPBD	
4	01	16	1	16	2	Pengelolaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Kejadian/Korban yang ditangani	100%	253.919.250	253.919.250		266.615.212,50	BPBD	
4	01	16	1	16	3	Siaga Rupusdalops Penanggulangan Bencana	Persentase Informasi Kebencanaan yang ditindaklanjuti	100%	60.000.000	-	60.000.000	63.000.000,00	BPBD	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	<b>Persentase Korban yang di Rehabilitasi dan di Rekonstruksi Sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>40.110.000</b>	<b>40.110.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.115.500,00</b>	BPBD
4	01	16	1	17	1	Pengecekan, Verifikasi dan Monitoring Bencana	Persentase Jumlah korban yang dapat ditangani	100%	40.110.000	40.110.000		42.115.500,00	BPBD	
<b>4</b>	<b>02</b>					<b>PENGAWASAN</b>								

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	02	1				INSPEKTORAT								
4	02	1	1			INSPEKTORAT								
4	02	1	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	1.146.000.000	1.146.000.000	-	-	1.203.300.000,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan- kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	100%	1.146.000.000	1.146.000.000			1.203.300.000,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	1.804.800	1.804.800	-	-	1.895.040,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	966.000	966.000			1.014.300,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	838.800	838.800			880.740,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN terkait dengan diklat teknis	90%	630.300.000	630.300.000	-	-	661.815.000,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	4	1	Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Persentase peningkatan kualitas Aparatur pengawasan	80%	630.300.000	630.300.000			661.815.000,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara / Daerah	90%	753.409.000	753.409.000	-	-	791.079.450,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	15	1	Pemeriksaan reguler secara berkala, pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat/ pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan tindakLanjut Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan reguler, kasus/PDPT dan laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	123 Dokumen	753.409.000	753.409.000			791.079.450,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	16		Program Pembinaan dan	Persentase peningkatan	90%	1.095.976.000	980.976.000	-	115.000.000	1.150.774.800,00	INSPEKTORAT

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						<b>Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah</b>	<b>kinerja perangkat daerah dengan nilai LKJIP "A"</b>							
4	02	1	1	16	1	Penunjang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Jumlah Laporan Saber Pungli yang diterbitkan	1 jenis laporan	433.188.000	433.188.000			454.847.400,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	16	2	Reviu LKPD, Dokumen Perencanaan, LKjIP, Pengadaan Barang dan Jasa, Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi, Maturitas, Kapabilitas serta Evaluasi APBD	Laporan hasil reviu dan evaluasi yang diterbitkan	5 laporan	257.850.000	257.850.000			270.742.500,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	16	3	Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kab. Tabanan	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan	6 Laporan	289.938.000	289.938.000			304.434.900,00	INSPEKTORAT
4	02	1	1	16	4	Survey Penilaian Integritas	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas	1 jenis laporan	115.000.000	-	115.000.000		120.750.000,00	INSPEKTORAT
<b>4</b>	<b>03</b>					<b>PERENCANAAN</b>								
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>1</b>				<b>BAPELITBANG</b>								
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>BAPELITBANG</b>								
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>980.976.605</b>	<b>980.976.605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.030.025.434,73</b>	<b>BAPELITBANG</b>
4	03	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	980.976.605	980.976.605			1.030.025.434,73	BAPELITBANG
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>700.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700.000.000</b>	<b>739.500.000,00</b>	<b>BAPELITBANG</b>
4	03	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Presentase Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor	90%	450.000.000			450.000.000	477.000.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	2	2	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100%	250.000.000			250.000.000	262.500.000,00	BAPELITBANG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
4	03	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	9.741.000	9.741.000	-	-	10.228.050,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	5.157.000	5.157.000			5.414.850,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen aset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	15		<b>Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan daerah</b>	<b>Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan</b>	20%	905.973.000	905.973.000	-	-	951.271.650,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	15	1	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah	2 jenis Dokumen	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	15	2	Penyusunan RPJMDSB 2021-2026	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Jenis Dokumen	229.200.000	229.200.000			240.660.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	15	3	Evaluasi Capaian Kerja OPD	jumlah OPD yang berkinerja baik	34 OPD	45.840.000	45.840.000			48.132.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	15	4	Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMDSB 2021 - 2026	Jenis Dokumen yang disusun	1 dok	143.250.000	143.250.000			150.412.500,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	15	5	Evaluasi RPJMDSB	terbangunnya sistem informasi perencanaan pembangunan		155.343.000	155.343.000			163.110.150,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	15	6	Operasional dan Pengembangan Sistem Tabanan Fair Plan	Persentase tingkat kesiapan aplikasi untuk digunakan	80%	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	16		<b>Program perencanaan pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi</b>	<b>Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah di bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam</b>	20%	275.040.000	275.040.000	-	-	288.792.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	16	1	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pertanian dan Lingkungan Hidup	1 jenis Dokumen	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	16	2	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan,	1 jenis Dokumen	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	BAPELITBANG

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Penanaman Modal dan Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata							
4	03	1	1	16	3	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1 jenis Dokumen	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	17		<b>Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan</b>	<b>Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan</b>	<b>20%</b>	<b>275.040.000</b>	<b>275.040.000</b>	-	-	<b>288.792.000,00</b>	BAPELITBANG
4	03	1	1	17	1	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2 jenis Dokumen	114.600.000	114.600.000			120.330.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	17	2	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan	1 jenis Dokumen	80.220.000	80.220.000			84.231.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	17	3	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat	1 jenis Dokumen	80.220.000	80.220.000			84.231.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	18		<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Prasarana Wilayah dan tataruang</b>	<b>Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan tataruang</b>	<b>20%</b>	<b>506.830.000</b>	<b>406.830.000</b>	-	<b>100.000.000</b>	<b>532.171.500,00</b>	BAPELITBANG
4	03	1	1	18	1	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi bidang pekerjaan umum dan tata ruang	1 jenis Dokumen	137.520.000	137.520.000			144.396.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	18	2	Perencanaan, Monitoring	persentase tingkat	100%	100.000.000	-		100.000.000	105.000.000,00	BAPELITBANG

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						dan Evaluasi Sektor Sanitasi dan Air Minum	pencapaian target kinerja daerah dibidang sanitasi dan air minum							
4	03	1	1	18	3	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perhubungan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah Dokumen infrastruktur permukiman dan proposal koordinasi bidang prasarana wilayah	2 jenis Dokumen	183.360.000	183.360.000			192.528.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	18	4	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi	Jumlah dokumen capaian realisasi RPJMD dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	1 jenis Dokumen	85.950.000	85.950.000			90.247.500,00	BAPELITBANG
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Program perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan Masyarakat</b>	<b>Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang Pembangunan manusia dan masyarakat</b>	<b>20%</b>	<b>275.040.000</b>	<b>275.040.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.792.000,00</b>	BAPELITBANG
4	03	1	1	19	1	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1 jenis Dokumen	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	19	2	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 jenis Dokumen	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	BAPELITBANG
4	03	1	1	19	3	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan	1 jenis Dokumen	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	BAPELITBANG
<b>4</b>	<b>04</b>					<b>KEUANGAN</b>								
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>1</b>				<b>BAKEUDA</b>								
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>BAKEUDA</b>								
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>2.790.510.000</b>	<b>2.790.510.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.930.035.500,00</b>	BAKEUDA
4	04	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	2.790.510.000	2.790.510.000			2.930.035.500,00	BAKEUDA

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
4	04	1	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>90%</b>	<b>13.028.507.000</b>	<b>10.585.414.500</b>	-	<b>2.443.092.500</b>	<b>13.679.932.350,00</b>	BAKEUDA
4	04	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana dan prasarana kantor dalam konsisi baik	1 paket	290.148.000	290.148.000	-		304.655.400,00	BAKEUDA
4	04	1	1	2	2	Pemeliharaan/ Rehab Rumah Dinas Wanasara	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	2 paket	793.092.500	-		793.092.500	832.747.125,00	BAKEUDA
4	04	1	1	2	3	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Balik	unit	229.200.000	229.200.000	-		240.660.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	2	4	Sewa Kendaraan PD	Tersedianya Kendaraan Sewa Untuk PD	12 Bulan	10.066.066.500	10.066.066.500			10.569.369.825,00	BAKEUDA
4	04	1	1	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	1 paket	1.150.000.000	-		1.150.000.000	1.207.500.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	2	6	Pengadaan Sepeda Motor	Jumlah Sepeda Motor Yang diadakan	1 paket	500.000.000	-		500.000.000	525.000.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>10.314.000</b>	<b>10.314.000</b>	-	-	<b>10.829.700,00</b>	BAKEUDA
4	04	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	5.730.000	5.730.000			6.016.500,00	BAKEUDA
4	04	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	4.584.000	4.584.000			4.813.200,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori "BAIK"</b>	<b>90%</b>	<b>2.314.519.000</b>	<b>2.064.519.000</b>	-	<b>250.000.000</b>	<b>2.430.244.950,00</b>	BAKEUDA
4	04	1	1	15	1	Pengembangan dan Implementasi SIKD	Prosentase PD menyampaikan laporan tepat waktu	90%	458.400.000	458.400.000			481.320.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan pada seluruh PD	100%	154.710.000	154.710.000			162.445.500,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	3	Penatausahaan Sistem Pembayaran Gaji PNS	Terlaksananya pengurusan system pembayaran gaji PNS	12 Bulan	87.669.000	87.669.000			92.052.450,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	4	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jumlah Dokumen APBD yang tersedia	1 Dokumen	217.740.000	217.740.000			228.627.000,00	BAKEUDA

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						Daerah (APBD)								
4	04	1	1	15	5	Penyusunan APBD	Tersusunnya APBD	1 Dokumen	303.690.000	303.690.000			318.874.500,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	6	Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Dokumen Pengendalian APBD yang tersedia	1 Dokumen	131.790.000	131.790.000			138.379.500,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	7	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	286.500.000	286.500.000			300.825.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	8	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Terkelolannya Pinjaman Daerah	12 Bulan	150.000.000	-		150.000.000	157.500.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	9	Penyusunan Standar Harga dan Buku Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Harga dan Pengadaan BMD yang tersedia	2 Dokumen	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	10	Verifikasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Terverifikasinya Laporan Keuangan PD	100%	57.300.000	57.300.000			60.165.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	11	Penatausahaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kas Daerah Yang Tersedia	1 Dokumen	91.680.000	91.680.000			96.264.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	15	12	Pengelolaan Administrasi Dana Transfer ke Desa	Terkelolanya dana-dana transfer ke Desa	100%	103.140.000	103.140.000			108.297.000,00	BAKEUDA
5	04	1	1	15	13	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS tepat Waktu	2 Dokumen	100.000.000	-		100.000.000	105.000.000,00	BAKEUDA
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Prosentase peningkatan target penerimaan PAD</b>	<b>13%</b>	<b>1.862.250.000</b>	<b>1.862.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.955.362.500,00</b>	BAKEUDA
4	04	1	1	16	1	Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan BPHTB	Tersedianya data laporan evaluasi dan monitoring pendapatan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB	1 Dokumen	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	16	2	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Lainnya Selain PBB-P2 dan BPHTB	Optimalnya Pemungutan Pajak Daerah Lainnya Selain PBB-P2 dan BPHTB	100%	504.240.000	504.240.000			529.452.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	16	3	Optimalisasi pemungutan BPHTB	Optimalnya pemungutan BPHTB	100%	154.710.000	154.710.000			162.445.500,00	BAKEUDA
4	04	1	1	16	4	Penatausahaan dan Pemutahiran database PBB-P2	Prosentase tersedianya database yang akuntabel yang dilengkapi dengan peta blok	100%	343.800.000	343.800.000			360.990.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	16	5	Pendataan, Penilaian dan Penerbitan SKPD PBB-P2	Tersedianya data SKPD PBB-P2	100%	515.700.000	515.700.000			541.485.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	16	6	Penatausahaan Pajak Daerah Lainnya selain PBB-P2 dan BPHTB	Terkelolannya Pajak Daerah Lainnya selain PBB-P2 dan BPHTB	100%	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	BAKEUDA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
4	04	1	1	17		<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase penurunan nilai temuan BMD</b>	<b>20%</b>	<b>1.437.471.900</b>	<b>716.250.000</b>	-	<b>721.221.900</b>	<b>1.509.345.495,00</b>	BAKEUDA
4	04	1	1	17	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD seluruh PD	1 Dokumen	343.800.000	343.800.000			360.990.000,00	BAKEUDA
4	04	1	1	17	2	Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemindahtanganan BMD	Jumlah dokumen pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan	1 Dokumen	372.450.000	372.450.000			391.072.500,00	BAKEUDA
4	04	1	1	17	3	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen/tolok ukur dalam pengelolaan BMD	1 Dokumen	721.221.900			721.221.900	757.282.995,00	BAKEUDA
4	05					<b>KEPEGAWAIAN</b>								
4	05	1				<b>BKPSDM</b>								
4	05	1	1			<b>BKPSDM</b>								
4	05	1	1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	-	-	<b>840.000.000,00</b>	BKPSDM
4	05	1	1	1	1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	800.000.000	800.000.000			840.000.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>86%</b>	<b>1.411.000.000</b>	-	-	<b>1.411.000.000</b>	<b>1.481.550.000,00</b>	BKPSDM
4	05	1	1	2	1	Pemeliharaan Gedung Kantor Tempat Kerja	Terpenuhinya Gedung Kantor Yang Memadai	1 Gedung	411.000.000			411.000.000	431.550.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	2	2	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	52 Buah	1.000.000.000			1.000.000.000	1.050.000.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	-	-	<b>3.990.000,00</b>	BKPSDM
4	05	1	1	3	1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 Jenis Dokumen	2.400.000	2.400.000			2.520.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	3	2	Pendataan Aset	jumlah dokumen asset yang tersedia	2 Jenis Dokumen	1.400.000	1.400.000			1.470.000,00	BKPSDM

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH	
						INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III			
4	05	1	1	15		<b>Program pembinaan ASN</b>	<b>Persentase ASN tertib administrasi kepegawaian</b>	<b>86%</b>	<b>479.550.000</b>	<b>479.550.000</b>	-	-	<b>503.527.500,00</b>	BKPSDM
4	05	1	1	15	1	Proses Kegiatan SLKS	Jumlah SLKS yang diterbitkan berdasarkan usulan	300 Orang	30.000.000	30.000.000			31.500.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	15	2	Penyiapan dan pengurusan administrasi SK kenaikan pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan sesuai usulan	1800	90.000.000	90.000.000			94.500.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	15	3	Penyiapan dan Pengurusan Administrasi SK Pensiun PNS	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan sesuai usulan tepat waktu	314	90.000.000	90.000.000			94.500.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	15	4	Pengurusan Penerbitan Karpeg Karis Karsu	Jumlah Karpeg Karis Karsu yang diterbitkan sesuai usulan	90 SK	9.000.000	9.000.000			9.450.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	15	5	Rekonsiliasi data ASN	Prosentase Akurasi Data ASN	95%	30.000.000	30.000.000			31.500.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	15	6	Penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Jumlah Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN	150 orang	28.650.000	28.650.000			30.082.500,00	BKPSDM
4	05	1	1	15	7	Koordinasi dan Pembinaan Kepegawaian	Jumlah OPD Yang Mendapat Pembinaan Kepegawaian	50 OPD	171.900.000	171.900.000			180.495.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	15	8	Penanganan Kasus PNS/CPNS	Jumlah Kasus PNS/CPNS Yang Di Tangani	5 Kasus	30.000.000	30.000.000			31.500.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	16		<b>Program pengembangan ASN</b>	<b>Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi</b>	<b>66%</b>	<b>3.363.463.000</b>	<b>3.122.463.000</b>	<b>241.000.000</b>	-	<b>3.531.636.150,00</b>	BKPSDM
4	05	1	1	16	1	Penyusunan Formasi ASN	tersusunnya buku pormasi ASN	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000			42.000.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	16	2	Seleksi/Assesment pimpinan Tinggi	Terpenuhinya pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi dibidangnya	100%	250.000.000	250.000.000			262.500.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	16	3	Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS	100%	100.000.000	100.000.000			105.000.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	16	4	Diklat Struktural	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	109 orang	1.719.000.000	1.719.000.000			1.804.950.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	16	5	Pengadaan ASN	Persentase Pemenuhan Formasi ASN yang dibutuhkan	100%	180.000.000	180.000.000			189.000.000,00	BKPSDM
4	05	1	1	16	6	Peningkatan ASN melalui tugas belajar dan ijin	Jumlah ASN yang memperoleh tugas belajar/	30 orang	241.000.000	-	241.000.000		253.050.000,00	BKPSDM

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		USULAN FORUM OPD 2020	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PERANGAKAT DAERAH
							INDIKATOR KINERJA	TARGET		Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III		
						belajar	ijin belajar							
4	05	1	1	16	7	Diklat-diklat Teknis Fungsional	Jumlah ASN yang memperoleh diklat teknis/fungsional	90 orang	797.463.000	797.463.000			837.336.150,00	BKPSDM
4	05	1	1	16	8	Pelantikan PNS	Terpenuhinya pejabat eselon II,III,IV dan V dan fungsional	100%	36.000.000	36.000.000			37.800.000,00	BKPSDM
<b>4</b>	<b>06</b>					<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								
<b>4</b>	<b>06</b>	<b>1</b>				<b>BAPELITBANG</b>								
<b>4</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>BAPELITBANG</b>								
<b>4</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Program Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan</b>	<b>3 rekomen- dasi</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315.000.000,00</b>	BAPELITBANG
4	06	1	1	15	1	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen kajian/rekomendasi Bidang Inovasi, Teknologi, Pemerintahan	1 jenis dokumen	100.000.000	100.000.000	-		105.000.000,00	BAPELITBANG
4	06	1	1	15	2	Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian/rekomendasi Sosial Kependudukan	1 jenis dokumen	100.000.000	100.000.000	-		105.000.000,00	BAPELITBANG
4	06	1	1	15	3	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kajian/rekomendasi Ekonomi Pembangunan	1 jenis dokumen	100.000.000	100.000.000	-		105.000.000,00	BAPELITBANG
						<b>TOTAL</b>			<b>1.133.878.865.503</b>	<b>840.520.447.865</b>	<b>255.790.194.488</b>	<b>37.193.223.150</b>	<b>1.144.712.667.201,90</b>	

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang pada prinsipnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Sebagai alat ukur, indikator tentunya mampu menggambarkan kemajuan daerah dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, selain itu indikator merupakan data dan informasi untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah terdapat tiga aspek yang dapat diukur

dengan indikator-indikator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum.

Tabel 6.1  
Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan  
Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tabanan Tahun 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020	2021
<b>A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>				
1	Pertumbuhan PDRB	6,15	5,95 (5,7-6,2)	6,5
2	Laju Inflasi	2,75	2,75	2,75
3	PDRB Perkapita Harga Berlaku (Jt/th)	38,76	55,00	60,00
4	Indeks Gini	0,34	0,30	0,25
5	Persentase Penduduk Miskin	5,61	3,96	3,00
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,54	75,7	76,25
7	Angka Kriminalitas ( Jumlah Kasus / 10.000 Penduduk)	3	2	2
<b>B. Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>B1. Urusan Pendidikan</b>				
1	Angka Melek Huruf	96,00	96,10	96,10
2	Angka Rata – rata Lama Sekolah	8,40	8,55	9
3	Angka Partisipasi Kasar			
a.	SD/MI/Paket A	105,08	106,10	106,10
b.	SMP/MTs/Paket B	104,76	105,60	105,80
c.	SMA/SMK/MA/Paket C	89,76	90,10	90,30
4	Angka Kelulusan			
a.	SD/MI/Paket A	100	100	100
b.	SMP/MTs/Paket B	99,98	100	100
c.	SMA/SMK/MA/Paket C	99,97	100	100
5	Angka Partisipasi Murni			
a.	SD/MI/Paket A	91,09	91,40	91,50
b.	SMP/MTs/Paket B	77,05	77,40	77,50
c.	SMA/SMK/MA/Paket c	60,17	60,50	60,60
<b>Pendidikan Dasar</b>				
1	Angka Partisipasi Sekolah	94,41	99,40	100,0
2	Ratio Ketersediaan (Sek/10.000 pddk)	2,5	3,5	3,5
3	Rasio Guru terhadap murid	1:14	1:13	1:12
4	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata (Guru/Kls/10.000 pddk)	1:35	1:35	1:35
<b>Pendidikan Menengah</b>				
1	Angka Partisipasi Sekolah	65,50	78,50	85,00
2	Rasio Ketersediaan Sekolah	0,50	1,00	1,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020		2021
	Menengah( Sek/ 10.000 pddk)				
3	Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid)	1:10	1,90		1,90
4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata – rata (Guru/kls/10.000 pddk)	1:35	1:35		1:35
5	Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun Melek huruf (%)	98,00	99,10		99,50
<b>Fasilitas Pendidikan</b>					
1	Persentase Lembaga Pendidikan non formal yang telah memenuhi SPM	55,00	80,00		90,00
2	Sekolah Pendidikan SD/Mi kondisi bangunan baik (%)	76,00	98,00		100,00
3	Sekolah Pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA kondisi baik	85,00	98,00		100,00
<b>Pendidikan Usia Dini</b>					
1	Pendidikan Usia Dini	50,55	59,45		62,40
<b>Angka Putus Sekolah</b>					
1	Angka Putus Sekolah (APS)SD/MI(%)	0,02	0,01		0,00
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04	0,01		0,00
3	Angka Putus Sekolah (APS)SMA/SMA/SM/MA	0,10	0,04		0,01
<b>Angka Kelulusan</b>					
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,00	99,70		100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,00	99,70		100,00
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	99,98	99,99		100,00
4	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	99,06	99,65		100,00
5	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	78,60	79,90		80,00
6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	75,00	78,00		80,00
<b>B.2 Kesehatan</b>					
1	Pencapaian BOR BRSUD Tabanan sesuai Standar	89,08	80,00	80,00	80,00
2	Tingkat Akreditasi Pelayanan BRSUD Tabanan	paripurna	Pari purna	Pari purna	paripurna
3	Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terakreditasi	10,00	25,00	50,00	100,00
4	Rasio Posyandu per Satuan Balita ( Bh/10.000)	12	13	13	13
5	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	2	3	3	3

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020		2021
6	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Bh/10.000)	2,00	3,00	3,00	3,00
8	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	4	5	5	5
9	Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	90	92	94	95
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebinaan (%)	40	60	70	80
11	Cakupan Desa Kelurahan UCI (%)	92	96	98	100
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100
14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit BDB (%)	100	100	100	100
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100
16	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	90,80	91,50	92	92
17	Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan Puskesmas (%)	90	92	94	95
18	Meningkatnya Cakupan Rawat Inap Puskesmas (%)	20	30	40	50
<b>B.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
1	Rasio Tempat Ibadah (Bh/1.000 Penduduk)	4	4	5	5
2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) (Ton/1.000 Orang	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Penyusunan Norma, Standar Pedoman dan Manual (NSPM) Buah	2	6	8	10
4	Rasio Pemukiman Layak Huni ( M2 / KM2)	10	10	10	10
5	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	30	40	45	45
6	Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan (%)	5	12	15	20
7	Jumlah Kawasan Strategis yang mampu berkembang	9	25	30	30
8	Ketahanan terhadap RTRW (%)	70	76	78	80

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020		2021
9	Luas Wilayah Produktif (%)	80	80	80	80
10	Luas Wilayah Industri (%)	30	30	30	30
11	Luas Wilayah Kebanjiran (%)	5	5	5	5
12	Luas Wilayah Kekeringan (%)	5	5	5	5
13	Luas Wilayah Perkotaan (%)	10	10	10	
14	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kondisi sarana prasarana Infrastruktur jalan yang menghubungkan Pusat Pusat Pertumbuhan	N/A	Sedang	Sedang	Tinggi
15	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	24	53	73	92
16	Panjang Jalan dilalui Roda Empat (KM per orang)	200	220	230	240
17	Jalan Penghubung Kabupaten dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman (KM) Penduduk (Minimal dilalui roda Empat	100,36	100,36	100,36	100,36
18	Jumlah Aset Irigasi (DI)	15	37	37	37
19	Jumlah Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	80	85	86	87
<b>B.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
1	Tingkat Pencapaian Komponen komponen SPM Bidang Keciaptakaryaan	9 SPM belum tercapai sesuai target	9 SPM sudah mencapai target	9 SPM sudah mencapai target	9 SPM sudah mencapai target
2	Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	40	60	70	70
3	Rumah Tangga pengguna Listrik (%)	40	57	60	60
4	Rumah Tangga bersanitasi (Bh/1000 Pddk)	6	6	6	6
5	Lingkungan Permukiman Kumuh	20	17	16	16
6	Rumah Layak Huni (Orang/ 1000 Penduduk	600	700	700	700
<b>B.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>					
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten (%)	75	95	100	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (%)	50	75	80	80
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) (%)	25	50	75	75
<b>B.6 Urusan Sosial</b>					
1	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan social dan pemberdayaan	70	90	95	95

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020	2021
2	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi ( Buah)	3	3	3
3	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (%)	70	70	70
4	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	70	70	70
<b>C. Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar</b>				
<b>C.1 Urusan Ketenagakerjaan</b>				
1	Menurunnya Angka Pengangguran (%)	2,25	1,20	1
2	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	98,02	98,7	99,2
<b>C.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	10	10	10
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	90	90	90
3	Rasio KDRT (%)	10	7	6
4	Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur (%)	30	17	16
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60	60	60
6	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindakan Kekerasan (%)	10	7	6
<b>C.3 Urusan Pangan</b>				
1	Regulasi Ketahanan Pangan (Buah)	2	2	2
2	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100	100	100
3	Indeks Pertanaman Padi (IP Padi) (%)	152,16	200	200
<b>C.4 Urusan Lingkungan Hidup</b>				
1	Persentase penanganan sampah (%)	90	90	90
2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	90	90	90
3	Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)	80	80	80
4	Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	70	70	70
5	Pencemaran status mutu air (%)	70	70	70
6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	60	70	70
7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	70	70	70
8	Tempat pembuangan sampah (TPS)	0,1	0,1	0,1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020	2021
	per satuan penduduk (buah/1000 pddk)			
9	Penegakan hukum lingkungan (%)	60	80	90
10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)	1.39	1.73	1.85
11	Kerusakan kawasan hutan (kawasan)	0.42	0.36	0.34
<b>C.5 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				
1	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan(%)	31,8	37,6	39,45
2	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian(%)	1.1	0.4	0.3
3	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengangkatn dan Pengesahan Anak (%)	0.1	0.6	0.7
<b>C.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
1	Persentase Bumdes yang produknya mampu diserap BUMD (%)	N/A	37	100
2	Persentase desa dengan pelayanan baik	N/A	70	100
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (kelompok)	14	14	14
<b>C.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (org)	4	4	4
2	Rasio akseptor KB(%)	60	60	60
3	Cakupan peserta KB aktif(%)	70	70	70
4	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I(%)	60	60	60
<b>C.8 Urusan Perhubungan</b>				
1	Perolehan penghargaan WTN	1	1	1
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum (buah)	66.42	66.42	66.42
3	rasio Ijin trayek (buah/org)	427	427	427

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020	2021
4	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	11.118	11.118	11.118
5	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis (buah)	3	3	3
6	Angkutan Darat (buah)	351.178	351.178	351.178
7	Kepemilikan Kir Angkutan umum	1036	1036	1036
8	Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum (ribu Rp.)	77	77	77
<b>C.9 Urusan Komunikasi dan Informatika</b>				
1	Jumlah wartel/warnet (buah/10.000 penduduk)	1	1	1
2	Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)	5	5	5
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (kali)	5	5	5
4	Pameran/Expo (kali)	2	2	2
<b>C.10 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>				
1	Jumlah koperasi Sehat yang jenis usaha utamanya bukan simpan pinjam	3 (koperasi,	7	9
<b>C.11 Urusan Penanaman Modal</b>				
1	Jumlah Investor PMDN	563	725	751
2	Jumlah Investor PMA	17	13	15
<b>C.12 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</b>				
1	Jumlah organisasi pemuda (buah)	114	114	114
2	Jumlah organisasi olah raga (buah)	30	30	30
3	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	28	28	28
4	Jumlah kegiatan olah raga (kali)	50	50	50
5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (buah/penduduk)	0,001	0,001	0,001
6	Lapangan olahraga (buah/penduduk)	0,004	0,004	0,004
<b>C.13 Urusan Statistik</b>				
1	Buku "Kabupaten dalam angka" (buah)	1	1	1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020	2021
2	Buku "PDRB Kabupaten" (buah)	1	1	1
<b>C.14 Urusan Kebudayaan</b>				
1	Jumlah Grup Kesenian yang representatif	1.175	1.175	1.175
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	1	3
3	Jumlah Klub Olahraga	10	10	10
4	Jumlah Gedung Olahraga yang representatif	1	7	10
<b>C.15 Urusan Perpustakaan</b>				
1	Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan (orang)	6	11	12
2	Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan (orang)	5	11	12
3	Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas (orang)	1.335	2.887	3.479
<b>C.16 Urusan Kearsipan</b>				
1	Pengelolaan arsip secara buku (buah)	10	10	10
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Buah)	28	28	28
<b>D Urusan Pilihan</b>				
<b>D.1 Urusan Kelautan dan Perikanan</b>				
1	Produksi perikanan (%) ton	1.648,8	5.108,9	5.178,1
2	Konsumsi Ikan (%) kg/kapita/tahun	19,3	33,0	35,0
3	Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan (%) Kelompok	131	106	131
<b>D.2 Urusan Pariwisata</b>				
1	Jumlah destinasi wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun	3 Obyek Wisata (Tanah Lot, Ulun Danau, Kebun Raya Eka Karya)	5	5 obyek wisata
2	Kunjungan wisata (%)	5	10	10
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	16	18	10
4	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah)	31	31	34
5	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah)	63	63	64

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020	2021
<b>D.3 Urusan Pertanian</b>				
1	Nilai Tukar Petani	<100	>100	>100
2	Luas lahan pertanian yang menerapkan sistem organik	1.450 ha	3.257	4.000 ha
3	Produktifitas Padi (Ton)/hektar)	55	56	57
4	Kontribusi Asektor Pertanian terhadap PDRB (%)	33	33	33
5	Cakupan bina kelompok petani (%)	10	10	10
<b>D.4</b>	<b>Usuran Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
1	Persentase jumlah Desa Berlistrik (%)	87	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	50	65	70
3	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	50	65	70
<b>D.5 Urusan perdagangan</b>				
1	Jumlah IKM	752	941	1.019
2	Tenaga Kerja	6.382	3.544	2.677
3	Nilai Investasi (Rp 000.000)	345	640	760
4	Nilai Produksi (Rp.000.000)	511	630	690
<b>D.6 Urusan Perindustrian</b>				
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	14.63	6.51	24,87 -26,02
2	Pertumbuhan Industri (UKM).	77,808	78,000	78,300
3	Pertumbuhan Industri IKM	11,905	12,326	12,609
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	37.7	4.65	85
<b>E.Usuran Penunjang Pemerintahan</b>				
<b>E.1 Perencanaan</b>				
1	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	91,70	92,00	92,00
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA (Buah)	1	1	1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2020	2021
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA ( Buah)	1	4	5
<b>E.2 Urusan Sekretariat Daerah</b>				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)	13.13	14.85	16.95
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	8.01	8.7	10.41
3	Produktivitas total daerah	40.86	48.87	59.08
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	4	5	6
5	Jumlah Nasabah Jamkrida	5759	7000	10000
6	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda	43	43	43

Tabel 6.2  
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
			2020
MISI I	1 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan.	Rata-rata lama sekolah	8.7
		Lembaga pendidikan Terakreditasi A (%)	85
			85
	2 Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Peringkat PORPROV	VI
	3 Meningkatkan Kualitas Penanganan kependudukan	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1.02
		Angka pengangguran (%)	1.9
	1 Meningkatkan apresiasi terhadap seni budaya lokal	Jumlah kearifan budaya lokal yang diakui secara nasional/internasional	6
	1 Menurunnya angka kemiskinya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	5
	2 Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak	Rasio KDRT (%)	0.12
	3 Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat	Indek rasa aman (%)	100
Indeks resiko bencana		159.4	
5 Meningkatkan penanganan PMKS	Tingkat kemandirian PMKS (%)	90	
MISI II	1 Meningkatkan upaya kesehatan perorangan	Utilisasi pelayanan kesehatan (%)	100
	2 Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Angka morbiditas (%)	≤15

MISI	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET
				2020
	1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi (%)	100
			Tingkat akreditasi RSD	Paripurna
	2	Terselenggaranya pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM	Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)	100
MISI III	1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	2.01
	2	Berkembangnya Usaha – Usaha Pengolahan dan Pemasaran Pertanian	Kontribusi Industri Pengolahan Pertanian Terhadap PDRB (%)	60
	3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian	Desa mandiri (%)	70
	1	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Berbasis Pariwisata	Jumlah Desa yang Mendapat PAD Desa dari Sektor Pariwisata	6
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten (%)			23.84	
MISI IV	1	Tumbuhnya Generator Ekonomi Baru Sesuai Penataan ruang dan lingkungan hidup	Jumlah Kawasan Kabupaten yang mampu berkembang	15
			Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Memenuhi baku mutu
	2	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Pusat – Pusat Pertumbuhan	Indek kepuasan Masyarakat terhadap kondisi Sarana dan Prasarana infrastruktur	Sedang
MISI V	1	Meningkatnya kualitas SDM dan akuntabilitas instansi pemerintah	ASN yang memiliki kompetensi (%)	85.96
			Nilai SAKIP	A
			Opini BPK	WTP
			Persentase Perangkat Daerah Pada Zona Hijau	90
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM terhadap layanan publik	baik
Layanan OPD berbasis IT (%)			100	

## BAB VII

### PENUTUP

Dokumen RKPD Tahun 2020 ini merupakan RKPD tahun keempat RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, memuat penjelasan yang mendetail mengenai prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2020, sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif dan target pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2020. Selanjutnya, dokumen RKPD Tahun 2020 dipakai sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020, Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD Tahun 2020 perlu mendapat dukungan dari semua pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta), karena program kegiatan yang tertuang didalam APBD, proses penyusunannya melibatkan ketiga komponen tersebut, dan pada akhirnya hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.

Bupati Tabanan,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI